PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

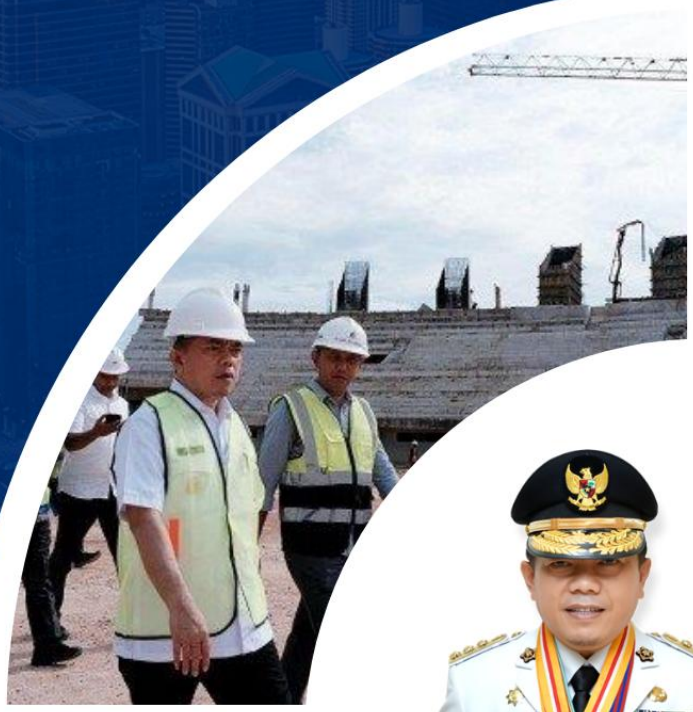

SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang baik;

b. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026;

c. bahwa untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan capaian program pembangunan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, serta untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 11), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dijabarkan ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2025.

(2) Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2024

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR (10-194/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR 3

DAFTAR TABEL 8

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Hubungan Antar Dokumen 5

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4.1 Maksud 9

1.4.2 Tujuan 10

1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.1 Kondisi Geografi 2-1

2.1.2 Aspek Demografi 2-26

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-29

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2-29

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2-40

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2-45

2.3 Aspek Pelayanan Umum 2-47

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2-47

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2-111

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2-125

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2-127

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2-127

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 2-130

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2-136

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia 2-137

2.2. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan 2-137

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu 3-1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 3-1
3.1.2 Neraca Daerah 3-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3-25
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 3-25
3.2.2 Analisis Pembiayaan 3-26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH 4-1
4.1 Permasalahan Pembangunan 4-1
4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal 4-1
4.1.2 Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian 4-2
4.1.3 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 4-4
4.1.4 Degradasi Lingkungan Hidup 4-7
4.2 Isu Strategis 4-9
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5-1
5.1 Visi 5-1
5.2 Misi 5-2
5.3 Tujuan dan Sasaran 5-3
5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah 5-3
5.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah 5-5
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-1
6.1 Strategi Pembangunan 6-1
6.2 Arah Kebijakan 6-11
6.2.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi 6-12
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7-1
7.1 Kerangka Pendanaan 7-1
7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 7-1
7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 7-8
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 8-1
BAB IX PENUTUP 9-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan 9-2
9.2 Pedoman Transisi 9-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perubahan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 9
Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi 2-2
Gambar 2-2 Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam DAS Batanghari (Sumber: Arbain *et al.* 2015)..... 2-7
Gambar 2-3 Peta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003) 2-10
Gambar 2-4 Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim..... 2-11
Gambar 2-5 Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim 2-12
Gambar 2-6 Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia 2020-2049 2-13
Gambar 2-7 Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-2049. 2-13
Gambar 2-8 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049 2-14
Gambar 2-9 Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020 2-17
Gambar 2-10 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi..... 2-20
Gambar 2-11 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi 2-22
Gambar 2-12 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi..... 2-24
Gambar 2-13 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi..... 2-26
Gambar 2-14 Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2021, Jambi Dalam Angka, data diolah) 2-28
Gambar 2-15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023..... 2-31
Gambar 2-16 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha..... 2-32
Gambar 2-17 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (dalam milyar rupiah)..... 2-32
Gambar 2-18 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-33
Gambar 2-19 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022 (dalam juta rupiah)..... 2-35
Gambar 2-20 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2019-2023..... 2-35
Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-36
Gambar 2-22 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-37
Gambar 2-23 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-39

Gambar 2-24 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022..... 2-40
Gambar 2-25 IPM Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM..... 2-41
Gambar 2-26 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-43
Gambar 2-27 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2023..... 2-44
Gambar 2-28 Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022..... 2-45
Gambar 2-29 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2022..... 2-53
Gambar 2-30 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2022..... 2-55
Gambar 2-31 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-59
Gambar 2-32 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-61
Gambar 2-33 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2018-2022 2-62
Gambar 2-34 Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga kesehatan di Provinsi Jambi 2-64
Gambar 2-35 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi..... 2-75
Gambar 2-36 Capaian Aspek IDI Tahun 2021 Provinsi Jambi 2-76
Gambar 2-37 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 ..2-79
Gambar 2-38 Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-80
Gambar 2-39 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan 2-80
Gambar 2-40 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2018-2023..... 2-82
Gambar 2-41 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022..... 2-83
Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-85
Gambar 2-43 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2022 2-86
Gambar 2-44 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2018 – 2022 2-87

Gambar 2-45 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2018 – 2022..... 2-87
Gambar 2-46 IDG dan IPG Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-89
Gambar 2-47 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2018-2023 2-89
Gambar 2-48 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2-90
Gambar 2-49 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021 . 2-92
Gambar 2-50 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020 2-93
Gambar 2-51 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019. 2-94
Gambar 2-52 Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2020..... 2-97
Gambar 2-53 Total Fertility Rate Provinsi Jambi 2-98
Gambar 2-54 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi..... 2-99
Gambar 2-55 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Untuk Penerbangan Dalam Negeri di Provinsi Jambi (orang 2-100
Gambar 2-56 Kunjungan Kapal pelayaran Dalam dan Luar Negeri di Pelabuhan Provinsi Jambi Tahun 2021..... 2-101
Gambar 2-57 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021 2-102
Gambar 2-58 Persentase Koperasi aktif di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 ... 2-103
Gambar 2-59 Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 . 2-104
Gambar 2-60 Perkembangan Tenaga Kerja, Aset dan Omset Usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022..... 2-104
Gambar 2-61 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2018-2022 2-106
Gambar 2-62 Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022 2-111
Gambar 2-63 Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton) Tahun 2018-2022 2-112
Gambar 2-64 Perkembangan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun) 2-112
Gambar 2-65 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (orang)..... 2-113

Gambar 2-66 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (orang) 2-114
Gambar 2-67 Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Ton) di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-115
Gambar 2-68 Perkembangan produksi komoditi perkebunan Provinsi Jambi (ton) Tahun 2018 -2022 2-116
Gambar 2-69 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2018-2022(US$) 2-121
Gambar 2-70 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (US$) 2-122
Gambar 2-71 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi..... 2-123
Gambar 2-72 Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018-2022 2-128
Gambar 2-73 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-130
Gambar 2-74 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2018 – 2022 2-131
Gambar 2-75 Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043) 2-132
Gambar 2-76 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043) 2-133
Gambar 2-77 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-134
Gambar 2-78 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-134
Gambar 2-79 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional 2-136
Gambar 2-80 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021..... 2-136
Gambar 2-81 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-137
Gambar 4-1 Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik..... 4-1
Gambar 4-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023..... 4-3
Gambar 4-3 IPM Nasional dibanding IPM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 dengan metode baru..... 4-4

Gambar 4-4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2019-2023 4-5
Gambar 4-5 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2019-2023 4-6
Gambar 4-6 Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017 4-7
Gambar 4-7 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi..... 4-8
Gambar 4-8 Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)..... 4-9
Gambar 6-1 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera RPJMN 2020-2024 6-12
Gambar 6-2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2022 6-13
Gambar 6-3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022 6-15
Gambar 6-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022 6-16
Gambar 6-5 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022 6-17
Gambar 6-6 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022..... 6-18

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi 2-1
Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari 2-6
Tabel 2-3 Nama Sungai yang Melintasi kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota 2-7
Tabel 2-4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi 2-8
Tabel 2-5 Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim 2-11
Tabel 2-6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi 2-14
Tabel 2-7 Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018 2-15
Tabel 2-8 Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020 2-18
Tabel 2-9 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi 2-23
Tabel 2-10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi ... 2-25
Tabel 2-11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022 2-26
Tabel 2-12 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota .. 2-27
Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2023 2-29
Tabel 2-14 Perkembangan Seni Budaya 2-45
Tabel 2-15 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022 2-46
Tabel 2-16 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-48
Tabel 2-17 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-49
Tabel 2-18 Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Jambi 2-50
Tabel 2-19 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-53
Tabel 2-20 Jumlah Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 ... 2-54
Tabel 2-21 Prevalensi balita *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2-56

Tabel 2-22 Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi 2-57
Tabel 2-23 Eliminasi Malaria (kab/kota) di Provinsi Jambi 2-58
Tabel 2-24 Kondisi eksisting sebaran puskesmas terakreditasi di Provinsi Jambi 2-59
Tabel 2-25 Kondisi Eksisting sebaran puskesmas dengan dokter dan tanpa dokter di Provinsi Jambi 2-60
Tabel 2-26 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-63
Tabel 2-27 Persentase Kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-64
Tabel 2-28 Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi..... 2-65
Tabel 2-29 Kondisi Eksisting PMKS di Provinsi Jambi 2-67
Tabel 2-30 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi 2-69
Tabel 2-31 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2016-2022 2-78
Tabel 2-32 Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha di Provinsi Jambi 2-83
Tabel 2-33 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 2-84
Tabel 2-34 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-90
Tabel 2-35 Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2020 2-91
Tabel 2-36 Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2-94
Tabel 2-37 Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020 di Provinsi Jambi 2-95
Tabel 2-38 Perkembangan Olahraga Provinsi JambiTahun 2018-2022 2-107
Tabel 2-39 OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 2-107
Tabel 2-40 Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 2-109
Tabel 2-41 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 2-109
Tabel 2-42 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 2-109
Tabel 2-43 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi 2-110
Tabel 2-44 Potensi Geothermal Provinsi Jambi 2-118
Tabel 2-45 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi 2-118
Tabel 2-46 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci..... 2-120
Tabel 2-47 Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan..... 2-126

Tabel 2-48 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota 2-128
Tabel 2-49 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2023 2-139
Tabel 2-50 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2023..... 140
Tabel 2-51 Indikator TPB yang tidak mencapai target TPB Provinsi Jambi berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan bidang Tahun 2023 141
Tabel 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-2
Tabel 3-2 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-6
Tabel 3-3 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Rp) 3-7
Tabel 3-4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 3-9
Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-10
Tabel 3-6 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2019 – 31 Desember 2023 3-13
Tabel 3-7 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1Januari 2019 - 31 Desember 2023 3-16
Tabel 3-8 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-18
Tabel 3-9 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-19
Tabel 3-10 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-21
Tabel 3-11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi... 3-22
Tabel 3-12 Defisit Riil Anggaran 3-24
Tabel 3-13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 3-25
Tabel 3-14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 3-26
Tabel 3-15 Perubahan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 3-31
Tabel 5-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi . 5-9

Tabel 5-2 Target Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN 5-13
Tabel 5-3 Target Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 5-13
Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 6-1
Tabel 6-2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2022 6-13
Tabel 6-3 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 6-14
Tabel 6-4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 6-14
Tabel 6-5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 6-15
Tabel 6-6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 6-16
Tabel 6-7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 6-17
Tabel 6-8 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa..... 6-23
Tabel 6-9 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin..... 6-24
Tabel 6-10 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial..... 6-24
Tabel 6-11 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026..... 6-26
Tabel 6-12 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026..... 6-27
Tabel 6-13 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 6-27
Tabel 6-14 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026..... 6-27
Tabel 6-15 Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 6-28
Tabel 6-16 Arah Kebijakan PembangunanProvinsi Jambi Tahun 2022 – 20266-29
Tabel 6-17 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026 6-39
Tabel 7-1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2024-2026 dan Realisasi Tahun 2022-2023 7-3
Tabel 7-2 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat..... 7-10

Tabel 7-3 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026..... 7-11
Tabel 7-4 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026..... 7-12
Tabel 7-5 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Jambi..... 7-13
Tabel 7-6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi..... 7-14
Tabel 8-1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi 8-2
Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi..... 8-2
Tabel 8-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi 8-4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021, sebagaimana juga telah termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan lima (5) tahun keempat dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. Sedangkan Perubahan RPJMD dilakukan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyesuaian terhadap beberapa strategi, arah kebijakan dan lain-lain.

Dalam perjalanannya, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodir beberapa perubahan atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar perubahan ini mengacu pada pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menyebutkan bahwa :

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
   a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
   b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 342 tersebut, perubahan ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) khususnya perubahan kebijakan nasional. Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dimana terjadi re-desain terhadap pengelolaan transfer ke daerah (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan lain-lain), pengaturan pembiayaan utang daerah, pengaturan sinergi pendanaan, pengaturan dana abadi daerah, pengaturan pajak dan retribusi daerah, serta pengaturan pengelolaan belanja daerah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi

Jambi juga dijadikan dasar perubahan RPJMD, karena pembentukan Provinsi Jambi sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga perlu diakomodir dalam perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang dipedomani pada saat penyusunan RPJMD telah dicabut dengan hadirnya undang-undang ini. Demikian pula terhadap keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana sebelumnya segala hal terkait Mineral dan Batubara termasuk program/kegiatan pendukung telah dikeluarkan dalam perencanaan RPJMD karena mempedomani Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sementara itu, ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan juga perlu diakomodir melalui kebijakan dan program/kegiatan dalam Perubahan RPJMD. Selain itu, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan maka perlu pula dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran SPM Bidang Pendidikan yang dimuat dalam dokumen ini.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai wadah pemutakhiran nomenklatur program/kegiatan yang mengakomodir perubahan-perubahan aturan dalam perencanaan dan pembangunan daerah, juga menjadi pedoman dalam penambahan program pada

perubahan RPJMD ini. Selain perubahan kebijakan pusat dalam bentuk perubahan peraturan perundangan-undangan, Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini juga sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, dimana pengaturan ruang dalam perencanaan pembangunan harus mempedomani peratiran daerah ini.

1.2 Dasar Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sedangkan dasar hukum yang mengamanatkan Perubahan RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Perubahan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya tidak berbeda dengan hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

1. Perubahan RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi

   Perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

   Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu“Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

   (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif;

   (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya;

(3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum;
(4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib;
(5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
(6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan tahap perencanaan lima tahun keempat.

2. Perubahan RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

   Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, harus berpedoman pula pada RTRW Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

   Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga bisa disebut sebagai zona konservasi. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona produksi. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai zona distribusi.

3. Perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

   Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Perubahan Renstra PD merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Sehingga Perubahan Renstra PD merupakan bagian integral dari Perubahan RPJMD.

4. Perubahan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

5. RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2019–2024 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

   Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2019 – 2024 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

6. RTRWN dan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi

   Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional tersebut adalah:

   - Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan).
   - Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
   - Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
   - Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

   Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

7. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi

   Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tetap memperhatikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi dan

kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada wilayah perbatasan.

Hubungan antara Perubahan RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.

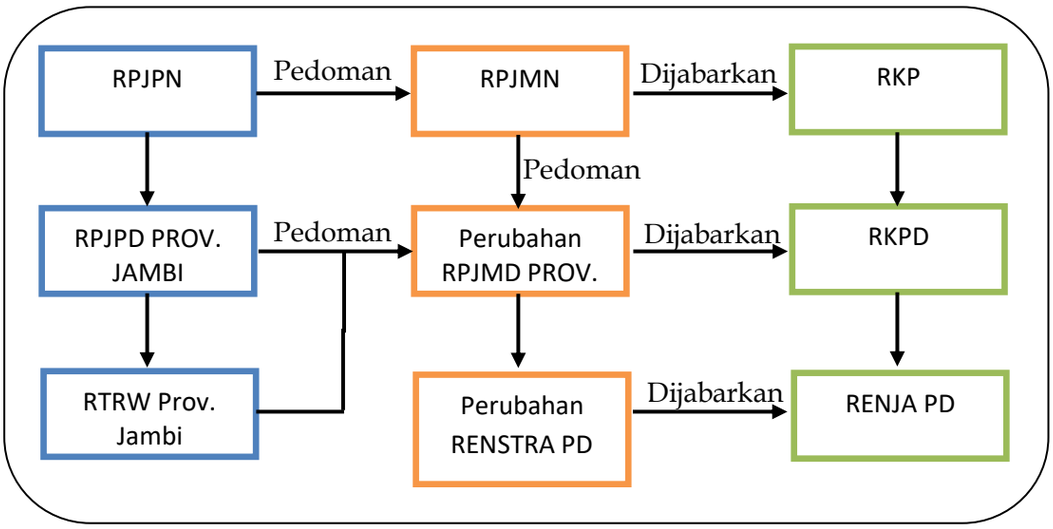

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perubahan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja PD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara

kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada giliranya akan tercipta konsistensi antara RTRW, RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilakukan dengan tujuan:

1. Menyempurnakan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang perlu disesuaikan karena adanya perubahan kebijakan nasional yang berlaku;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jambi, dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 dan 2026 yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 dan tahun 2026;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan terhadap RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang mendasari Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan Perubahan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dilakukannya Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

menjelaskan organisasi dokumen Perubahan RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana yang disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat lima tahun terakhir.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah sesuai dengan urusan yangmenjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi daya saing daerah, terutama pada fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran terhadap pengelolaan keuangan daerah sampai dengan tahun 2023 dan asumsi tahun 2024-2026.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.2. Neraca Daerah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama periode tahun 2021-2026.

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Menjelaskan tentang uraian Visi dan kata-kata kunci dari pernyataan Visi.

5.2 Misi

Menjelaskan tentang pernyataan misi yang merupakan penjabaran dari visi.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tentang keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta indikator yang menyatakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan tentang pedoman penyusunan RKPD selama masa transisi (periode RPJMD telah berakhir dan RPJMD baru belum ditetapkan) serta kaidah pelaksanaan RPJMD.

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km^2 dengan luas daratan seluas 49.026,579 km^2 dengan panjang garis pantai 228,13 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.540,12 km^2 atau sebesar 15,38% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.103,74 km^2 dan 5.935,89 km^2, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.445,20	18	287
2	Merangin	7.540,12	24	215
3	Sarolangun	5.935,89	11	158
4	Bungo	4.760,83	17	153
5	Tebo	6.103,74	12	129
6	Batanghari	5.387,52	8	124
7	Muaro Jambi	5.225,79	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	5.546,06	13	134
9	Tanjung Jabung Timur	4.546,62	11	93
10	Kota Sungai Penuh	364,92	8	69
11	Kota Jambi	169,89,43	11	68
Luas Daratan		49.026,58		
Total		53.435	144	1.585

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2023 (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022)

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 144 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa kelurahan adalah sebanyak 1.585

desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

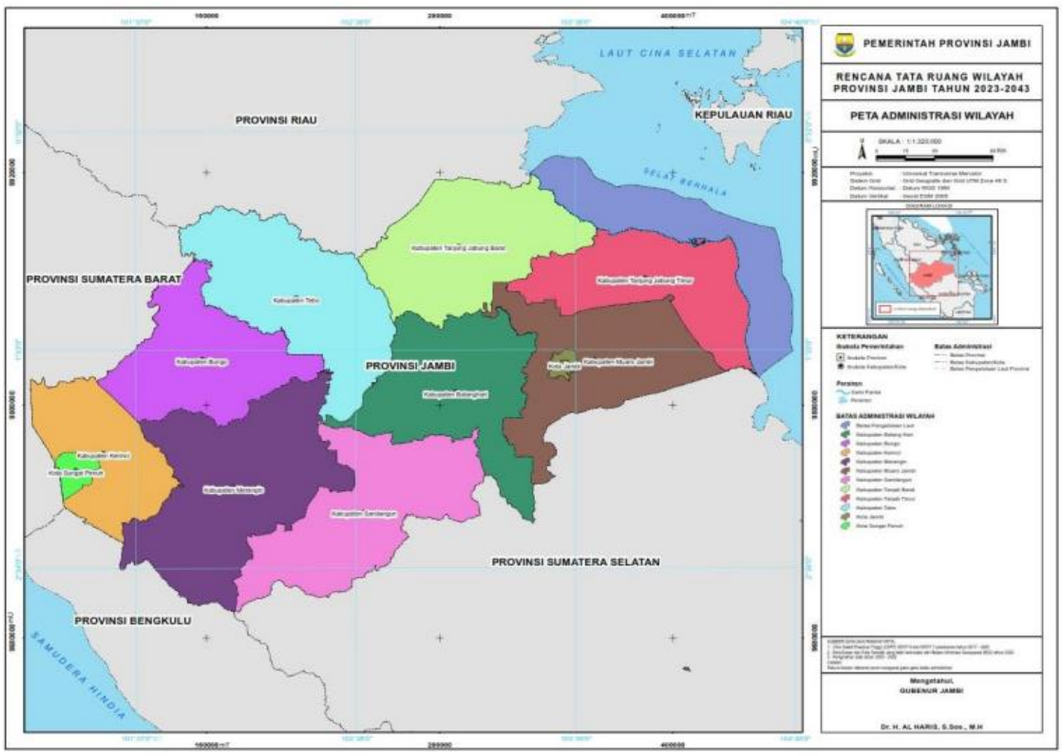

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0º 27'– 2⁰ 27' Lintang Selatan dan 101⁰ 5' 60"– 104⁰ 32' 60" Bujur Timur, yang berada pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan

pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle*).

2.1.1.3 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, secara topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yaitu:

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (67%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (17%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Daerah dataran tinggi >500 m (16%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Kabupaten Merangin, sebagian Kabupaten Sarolangun dan sebagian Kabupaten Bungo.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan masukan teknologi tertentu dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Provinsi Jambi dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang mempunyai kelerengan antara (20^0-40^0).

Kawasan ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang membujur dari barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

- Perbukitan bergelombang dengan ketinggian antara 50-500 meter dan kemiringan lereng 10^0 - 20^0. Wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
- Dataran dengan ketinggian antara 0-50 meter, kelerengan antara 0^0-10^0. Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan wilayah pantai.

2.1.1.4 Geologi

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.

a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan alluvium, endapan rawa dan endapan undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, resen.
b. Batuan sedimen, berumur permo-karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut :
   - Formasi Mentulu (Permo-Karbon)
   - Formasi Mengkarang (Perem)
   - Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura)
   - Formasi Telangakar (Oligo Miosen)
   - Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen)
   - Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen)
   - Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen)
   - Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen)

   Formasi ini terdiri dari batupasir, batu lempung, dengan sisipan batubara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batu pasir tufan, batu pasir gampingan, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.
c. Batuan malihan, terbagi atas formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan formasi Gangsal, berumur Permo-

Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.

d. Batuan gunung api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.
e. Batuan terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horenblenda dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Provinsi Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar-pun banyak dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta Batang Hari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu: Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari sesar besar Sumatera.

2.1.1.5 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu:

a. Sub DAS Batanghari Hulu
b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi
c. Sub DAS Batang Tabir
d. Sub DAS Batang Bungo
e. Sub DAS Batang Tebo
f. Sub DAS Batanghari Hilir

Tabel dan Gambar di bawah ini menunjukkan luas areal dan lokasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurut DAS Batanghari.

Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Jambi	Batanghari	450,295	10.27
		Bungo	463,749	10.58
		Kerinci	260,024	5.93
		Merangin	658,230	15.02
		Muaro Jambi	277,845	6.34
		Sarolangun	558,475	12.74
		Tanjung Jabung Timur	286,656	6.54
		Tebo	616,617	14.07
		Kota Jambi	16,895	0.39
		Kota Sungai Penuh	14,939	0.34
		Luas DAS di Provinsi Jambi	3,603,725	82.23
2.	Sumatera Barat	Dharmasraya	304,274	6.94
		Solok	117,741	2.69
		Solok Selatan	356,973	8.15
		Luas DAS di Prov. Sumatera Barat	778,988	17.77
Luas DAS total			4,382,713	100.00

Sumber: Arbain et al. (2015)

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu :

a. DAS Betara Pengabuan mencakup tujuh Sub DAS didalamnya.
b. DAS Mendahara mencakup sembilan Sub DAS didalamnya
c. DAS Air Hitam Laut mencakup empat Sub DAS didalamnya.

Pola aliran sungai di Provinsi Jambi berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruhi pada musim hujan dan kemarau.

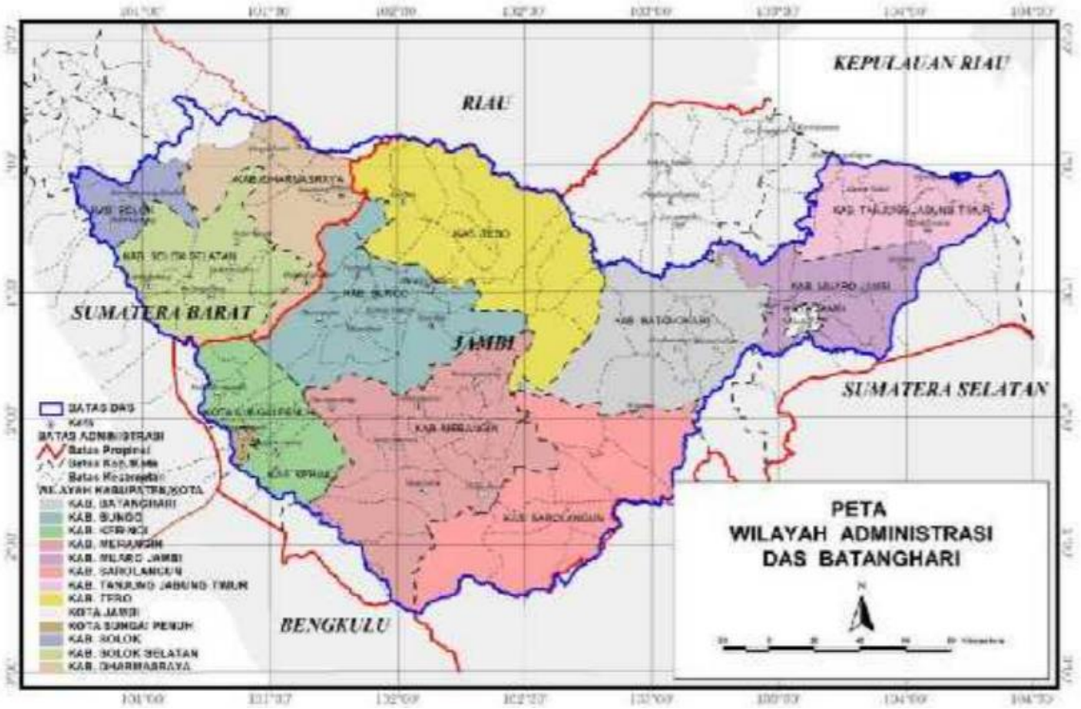

Sumber: Arbain et al. (2015)

Gambar 2-2 Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam DAS Batanghari (Sumber: Arbain *et al.* 2015).

Tabel 2-3 Nama Sungai yang Melintasi kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai
Kerinci	Batang Merangin, Sungai Siulak Deras
Merangin	Batang Merangin, Batang Tabir
Sarolangun	Batang Limun, Batang Tembesi, Batang Asai
Batang Hari	Batanghari, Batang Tembesi, Batang Asai
Muaro Jambi	Batanghari, Sungai Kumpeh
Tanjab Timur	Batanghari, Batang Berbak, Batang Mendahara, Batang Lagan, Batang Air Hitam
Tanjab Barat	Sungai Pengabuhan, Sungai Betara, Sungai Tungkal
Tebo	Batang Tebo, Batanghari
Bungo	Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat
Kota Jambi	Batang hari

Sumber : RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang melimpah, beberapa potensi kondisi yang mendukung untuk dibangun sarana prasarana sumber daya air. Berikut merupakan beberapa potensi danau yang ada di Provinsi Jambi yang dapat dikembangkan.

Tabel 2-4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi

No	Nama Danau	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
A.	Kota Jambi			
1	Danau Sipin	Sungai Putri, Legok dan Danau Sipin	Telanaipura	40
2	Danau Teluk Kenali	Teluk Kenali	Telanaipura	15
3	Danau Teluk	Teluk	Telanaipura	50
B.	Kabupaten Merangin			
1	Danau Depati Empat	Rantau Kermas	Jangkat	35
2	Danau Pauh	Pulau Tengah	Jangkat	250
3	Danau Kecil	Pulau Tengah	Jangkat	18
4	Sikumbang	Pulau Tengah	Jangkat	20
C.	Kabupaten Kerinci			
1	Danau Kerinci	Jujun	Keliling Danau	4.200
2	Danau Air Lingkat	Lempur Tengah	Gunung Raya	48
3	Danau Dua	Lempur Tengah	Gunung Raya	12
4	Danau Gunung Tujuh	Pelompek, Lubuk Pauh	Kayu Aro	1.200
5	Danau Belibis	Sido Mulyo	Kayu Aro	25
D.	Kabupaten Sarolangun			
1	Danau Biaro	Lidung	Sarolangun	10
2	Danau Baru	Pulau Pinang	Sarolangun	10
Jumlah				**5.933**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Secara hidrogeologi, produktivitas air tanah daerah Povinsi Jambi yang didasarkan atas sifat fisik batuan penyusun (akuifernya) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Sudadi 2003):

1. Produktivitas air tanah tinggi

   Meliputi sepanjang Sungai Batanghari dan Sungai Tembesi. Litologi akuifaer terutama berupa pasir dan kerikil yang merupakan endapan alluvium sungai. Debit sumur berkisar 5 hingga 25 l/detik dan jika ditinjau dari sifat fisik batuan penyusun akuifernya yang merupakan batuan lepas maka aliran air tanah yang terjadi merupakan aliran air tanah melalui ruang antar butir. Muka air tanah bebas mempunyai kedalaman berkisar dari 0.5 – 2.5 m di bawah muka tanah setempat dengan buaian (perbedaan) muka air tanah kecil antara musim hujan dan kemarau. Muka air tanah dalam atau tertekan diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m dari muka tanah setempat.

   Pasokan air dari daerah resapan umumnya kecil akan tetapi pasokan air terutama berasal dari Sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Sungai yang bertindak sebagai pemasok air tanah disebut juga sebagai sungai influen (influent stream). Ciri-ciri air tanah seperti ini umumnya potensi air tanahnya tinggi. Pengukuran harga keterusan air (*trasmissivity*) yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan di berbagai tempat di Indonesia yang

mempunyai kondisi serupa menunjukkan bahwa harga keterusannya lebih dari 500 m/hari.

2. Produktivitas air tanah sedang

Produktivitas air tanah sedang di daerah Provinsi Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a) Di bagian timur, meliputi daerah daratan pantai timur.

Walaupun produktivitas tanahnya sedang akan tetapi kendalanya adalah kualitas air tanahnya yang kurang baik, terutama untuk air tanah bebas. Kemungkinan air tanah dengan kualitas baik dapat diperoleh hanya berupa spot-spot, terutama pada lensa-lensa pasir lepas, dengan kedalaman muka air tanah bebas berkisar dari 3 – 10 m dibawah muka tanah setempat. Data air tanah tertekan diperoleh dari hasil pemboran di beberapa tempat menunjukkan 2 (dua) litologi akuifer utama, yaitu: a) Litologi akuifer dari Formasi Kasai yang dijumpai pada interval kedalaman 18 – 44 meter dan 76 – 95 meter dan berkualitas air kurang baik; dan b) Litologi akuifer dari Formasi Muaraenim yang dijumpai pada kedalaman antara 90 – 120 meter dan berkualitas air baik.

b) Di bagian tengah, di sekitar Bangko dan utara Muara Bungo

Debit sumur berkisar antara 1 – 5 l/detik dengan akuifer utama berupa batu pasir kurang padu, tufa dan tufa pasiran. Muka air tanah bebas diperkirakan kurang dari 20 m dari muka tanah setempat, sedangkan air tanah dalam diperkirakan dari 50 m dari muka tanah setempat. Data pemboran air tanah dalam di sekitar Bangko enunjukkan bahwa kedalaman sumur bor mencapai 100 meter dengan debit sekitar 8.5 l/detik.

c) Di bagian barat, di selatan Gunung Kerinci meliputi Sungai Penuh dan Padang Panjang (kaki Gunung Masurai)

Debit sumur diperkirakan sampai 5 l.detik dengan akuifer utama berupa tufa atau breksi volkanik dari endapan volkanik muda. Pada akuifer batuan lepas sistem airan air tanah dapat melalui ruang antar butir, sedangkan pada akuifer pada batuan padu aliran air tanah dapat melalui celahan dan rekahan. Muka air tanah bebas maupun muka air tanah dalam umumnya dalam. Untuk air tanah bebas, pada daerah tertentu dapat mencapai kurang dari 20 m di bawah muka tanah setempat.

3. Produktivitas air tanah rendah

Gambar 2-3 Peta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003)

Umumnya terdapat di bagian utara, baratdaya, dan barat wilayah Provinsi Jambi. Batuan penyusunnya adalah berupa batuan sedimen padu, batuan malihan dan batuan beku terobosan. Pada batuan malihan dan sedimen masih dapat diharapkan dijumpai air tanah walaupun secara terbatas, terutama pada zona pelapukan yang tebal atau daerah lembah. Sifat air tanah di daerah pelapukan dan lembah merupakan air tanah bebas yang dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan air tanah dapat diperoleh sedangkan pada musim kamarau umumnya sulit diperoleh.

2.1.1.6 Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi hanya dimiliki oleh 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Barat. Hal ini karena terkait dengan keberadaan hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut, yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan

Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjab Barat. Sebaran wilayah berdasarkan jasa daya dukung dalam pengaturan pengaturan iklim dapat dilihat pada peta dan tabel di bawah. Sedangkan persentase luas masing masing kabupaten berdasarkan tingkat daya tampung lingkungan dalam pengaturan iklim adalah sebagaimana gambar di bawah ini yaitu pada sebagian kabupaten di dominasi oleh kemampuan sangat rendah yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sebaliknya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh didominasi kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi.

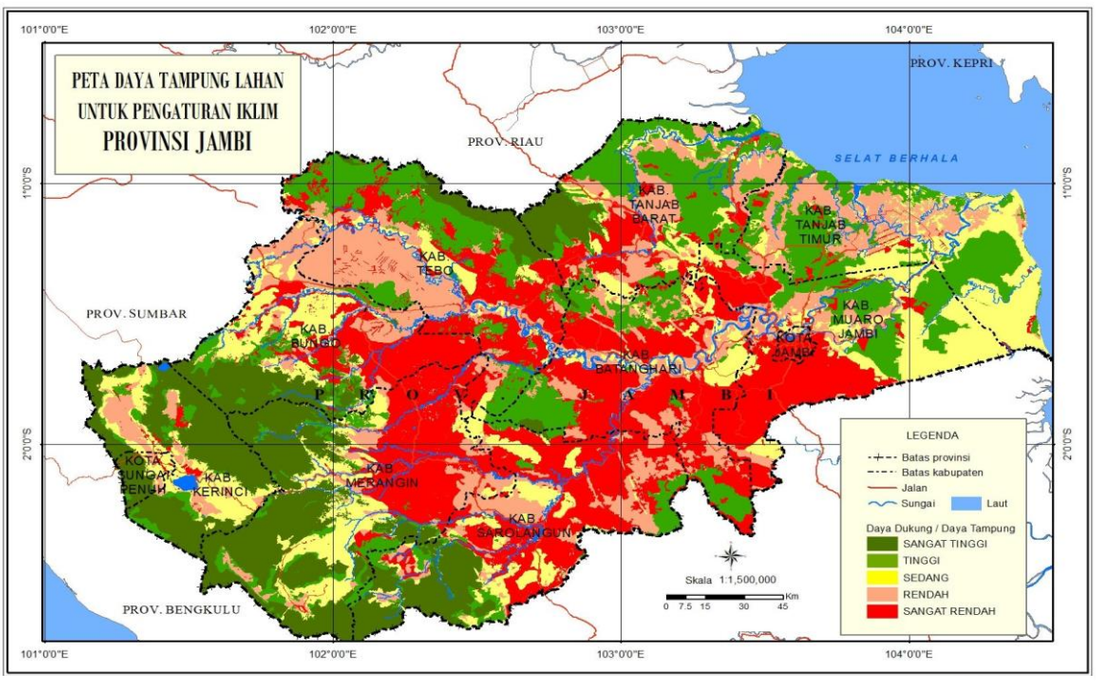

Gambar 2-4 Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim

Tabel 2-5 Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

No	Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kab. Batang Hari	258.894	116.781	57.072	108.131	4.900
2	Kab. Bungo	130.754	91.487	103.281	48.005	93.789
3	Kab. Kerinci	7.891	41.692	77.151	31.840	174.925
4	Kab. Merangin	214.953	67.877	120.232	58.136	287.517
5	Kab. Muaro Jambi	199.747	67.750	154.338	118.043	-
6	Kab. Sarolangun	245.627	107.428	84.545	57.147	108.631
7	Kab. Tanjab Barat	76.655	121.563	57.852	194.222	49.272
8	Kab. Tanjab Timur	15.551	133.216	158.592	177.405	502
9	Kab. Tebo	164.435	177.939	44.868	186.887	46.428
10	Kota Jambi	13.473	2.666	1.291	122	-
11	Kota Sungai Penuh	1.180	3.127	8.225	1.377	22.428
	Jumlah	1.329.159	931.525	867.446	981.316	788.392

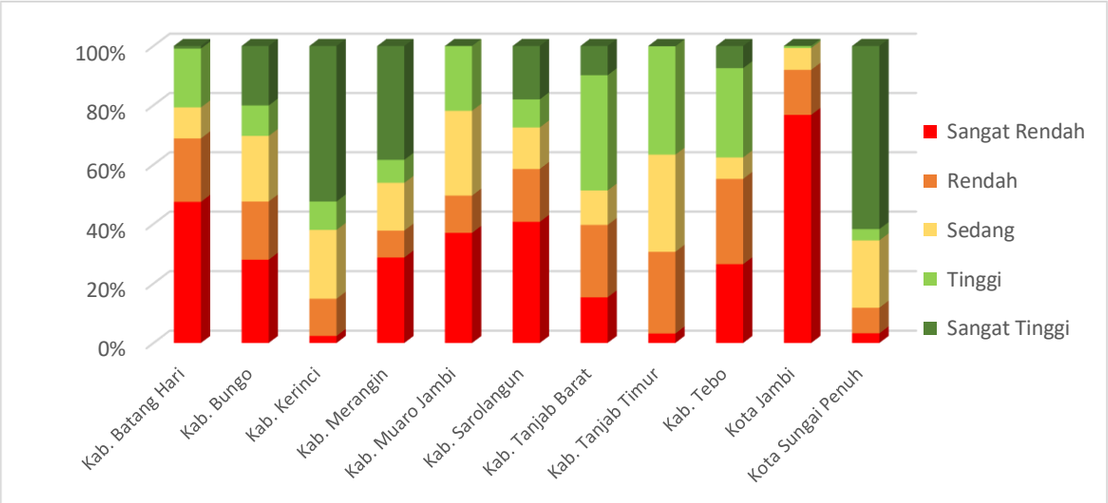

Gambar 2-5 Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

Gambar-gambar berikut menunjukkan hasil proyeksi perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode tahun 2020 hingga 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005. Hasil proyeksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jambi akan mengalami peningkatan suhu rata-rata tahun sebesar 1^0C hingga 1.1^0C, dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.1^0C hingga 1.2^0C dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.6).
2. Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penambahan hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20% dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.7).
3. Sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pantai Timur Sumatera) akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm, namun sebagian lainnya (wilayah tengah hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm (lihat Gambar 2.8).

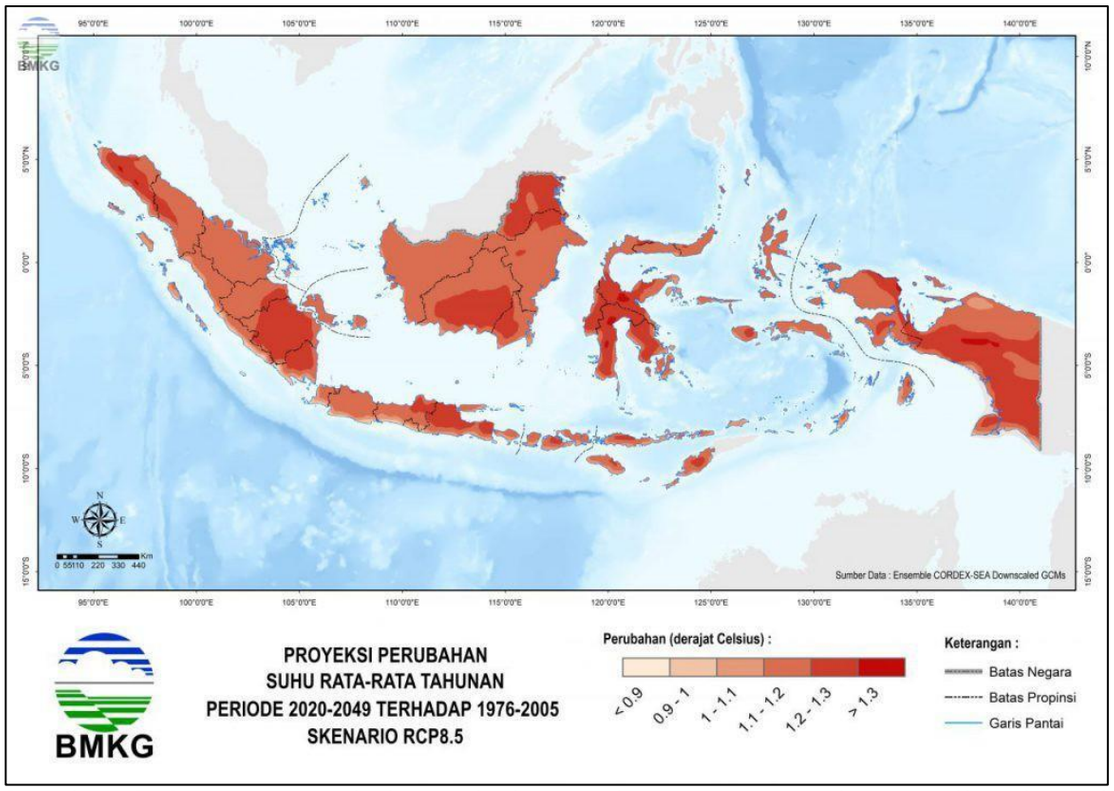

Gambar 2-6 Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia 2020-2049

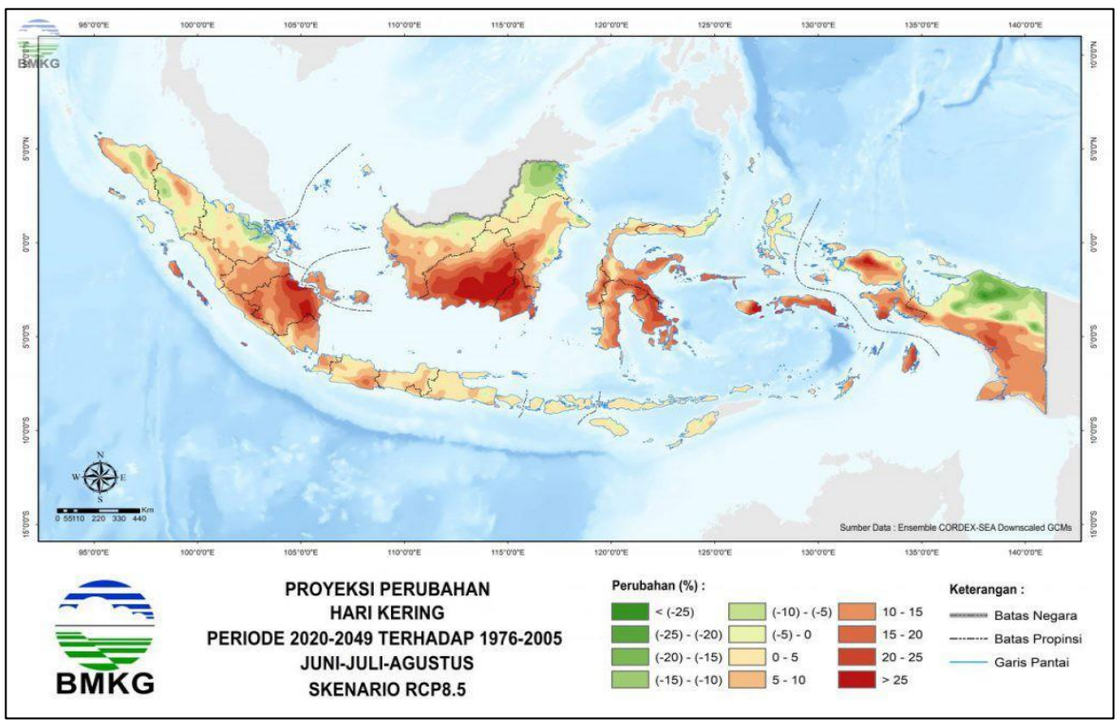

Gambar 2-7 Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-2049

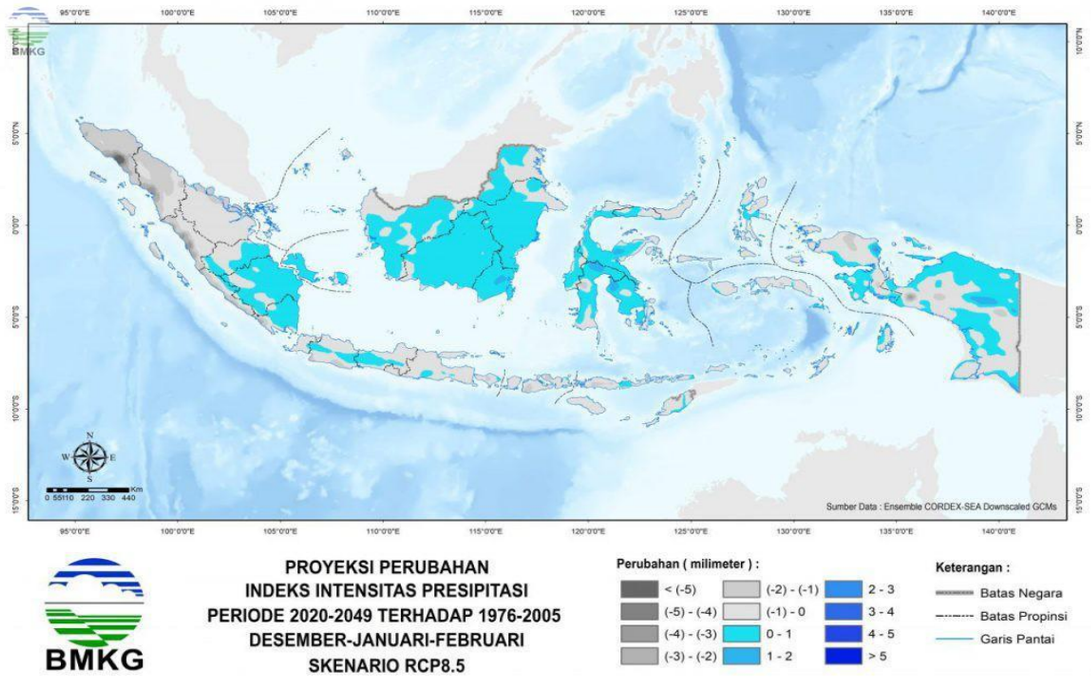

Gambar 2-8 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jambi menjadi 2 fungsi yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan permukiman. Luas lahan hutan mencapai 1.327.992,55 Ha atau 27,07% dari luas keseluruhan tutupan lahan di Provinsi Jambi. penggunaan lahan kawasan permukiman mencapai 151.542,42 Ha atau sebesar 3,09% dari luas keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan Gambar peta penggunaan lahan di Provinsi Jambi.

Tabel 2-6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Persentase (%)
Air Danau / Situ	10.340,01	0,21
Air Tawar Sungai	33.921,02	0,69
Hutan Rimba	1.327.992,55	27,07
Perkebunan / Kebun	856.202,64	17,45
Permukiman dan Tempat Kegiatan	151.542,42	3,09
Sawah	115.215,79	2,35
Semak Belukar / Alang - Alang	1.102.391,46	22,47
Tegalan / Ladang	1.308.103,11	26,66
Jumlah	**4.905.709,00**	**100**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Tabel 2-7 Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018

2011	Penutupan Lahan Tahun 2018 (ha)																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	576,797.67	25,392.94							17.34	21.24	15,400.38		22,385	12,870.88	5,263.35	92.75	06.47			67.00.00	
2	858.44.00	250,516.32		16,708					0,380	32,478.09	48,276.44	186.61	6,131	28,174.74	67,244.14	6,536.14				26,816	0,924
3			124,381.30	14,200.26					0,101		1,795.57	21,185.37	5,276	5,792	7,772.72	18,577.07					
4			784.04.00	30,238.98		70.93				1,827.57	736.95	3,272.42	6,049	1,449.41	3,397.73	7,542.91					
5					162.76	32,008										3,413				0,147	0,078
6				0,865	2,795	5,348.03			0,063			1,146	3,010	147.81	1,885	297.98					0,055
7							15,011.09		0,000	41.99	0,679	30.66		0,208		512.64	35,888				171.82
8								3,762						0,092							
9		03.14				6,336	0,251		42,256.94	0,853	0,001	0,121	0,801	0,983		2,225	167.75			76.85	2,653
10		68.13.00	315.55.00	4,765.39						163,898.58	3,448.19	3,639.92	7,405	3,158.75	17,598.49	7,008.95				0,545	108.87
11	00.41	1,065.37		0,380		0,675				3,099.41	97,796.17	22,934	7,515	38,378.64	1,052.25	9,966.31	17,774		0,190	530.68	6,562
12				277.67		107.77	0,255		0,366	3,256.88	1,472.40	194,870.28	7,107.30	3,718.91	4,438.19	45,304.57	491.89			0,356	7,956
13		0,767		0,055		3,692			6,598	414.91	2,507.26	927.65	67,088.65	3,474.57	1,841.21	257,305.35	582.64			1,320.52	5,693.69
14	00.56	4,163.87		1,175			498.96		40,690	3,171.89	551,001.75	12,881	6,599.14	1,020,959.30	8,522.76	203,982.69	400.90		0,167	6,772.98	29,362.08
15	00.00	230.53.00		10,924		0,208			0,382	34,707.48	22,405.92	1,364.99	26,190	20,616.11	81,382.79	15,708.78			0,149	14,417	0,135
16		34.48.00				3,354			0,003	2,952.87	2,750.87	2,053.00	11,741.34	9,077.32	2,241.73	408,760.42			4,930.72	11,478	5,777.95
17											1,415			0,797		2,002.66	13,951.73				1,443.46
18						0,226						72.61		42.98		28,694		8,797			
19													0,137						21,826.65		
20											0,177	0,223		1,632		0,997				5,555.97	281.85
21						56.70			0,101	88.33	358.97		4,363.19	11,240		7,522.81	182.75		8,284		44,100.32

1 Hutan Lahan Kering Primer
2 Hutan Lahan Kering Sekunder
3 Hutan Rawa Primer
4 Hutan Rawa Sekunder
5 Hutan Mangrove Primer
6 Hutan Mangrove Sekunder
7 Rawa
8 Savanna/ Padang rumput
9 Badan Air
10 Hutan Tanaman
11 Belukar
12 Belukar Rawa
13 Pertanian Lahan Kering
14 Pertanian Lahan Kering Campur
15 Tanah Terbuka
16 Perkebunan
17 Sawah
18 Tambak
19 Transmigrasi
20 Pertambangan
21 Pemukiman

2.1.1.7.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Bagian ini memaparkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jasa ekosistem yang disediakan.

A. Ketersediaan Pangan

Asumsi ketersediaan lahan yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah:

- Konsumsi beras tahun 2020 sebesar 84,2 kg/kapita/tahun
- Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,38% per tahunnya
- Standar kebutuhan konsumsi layak (KKL) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2018.

Terdapat dua skenario terhadap ketersediaan lahan untuk penyediaan pangan, yaitu:

1. Jika dilakukan revitalisasi terhadap lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan serta dengan asumsi tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen (pada tahun 2020 tercatat produktivitas lahan sawah hanya dapat menghasilkan 2,28 ton beras/ha/tahun) dan alih fungsi lahan pertanian pangan maka ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 88 tahun ke depan;
2. Jika tidak dilakukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan dan asumsi lainnya sama dengan skenario pertama maka ketersediaan lahan pangan hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 18 tahun ke depan.

B. Ketersediaan Air

Hasil olahan terhadap data curah hujan dan geohidrologi dikatehui bahwa ingga kini ketersediaan air untuk penduduk di wilayah bagian barat dan sebagian besar wilayah bagian tengah Provinsi Jambi masih melimpah. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya adalah terutama beberapa daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan

Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada daerah-daerah ini neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan).

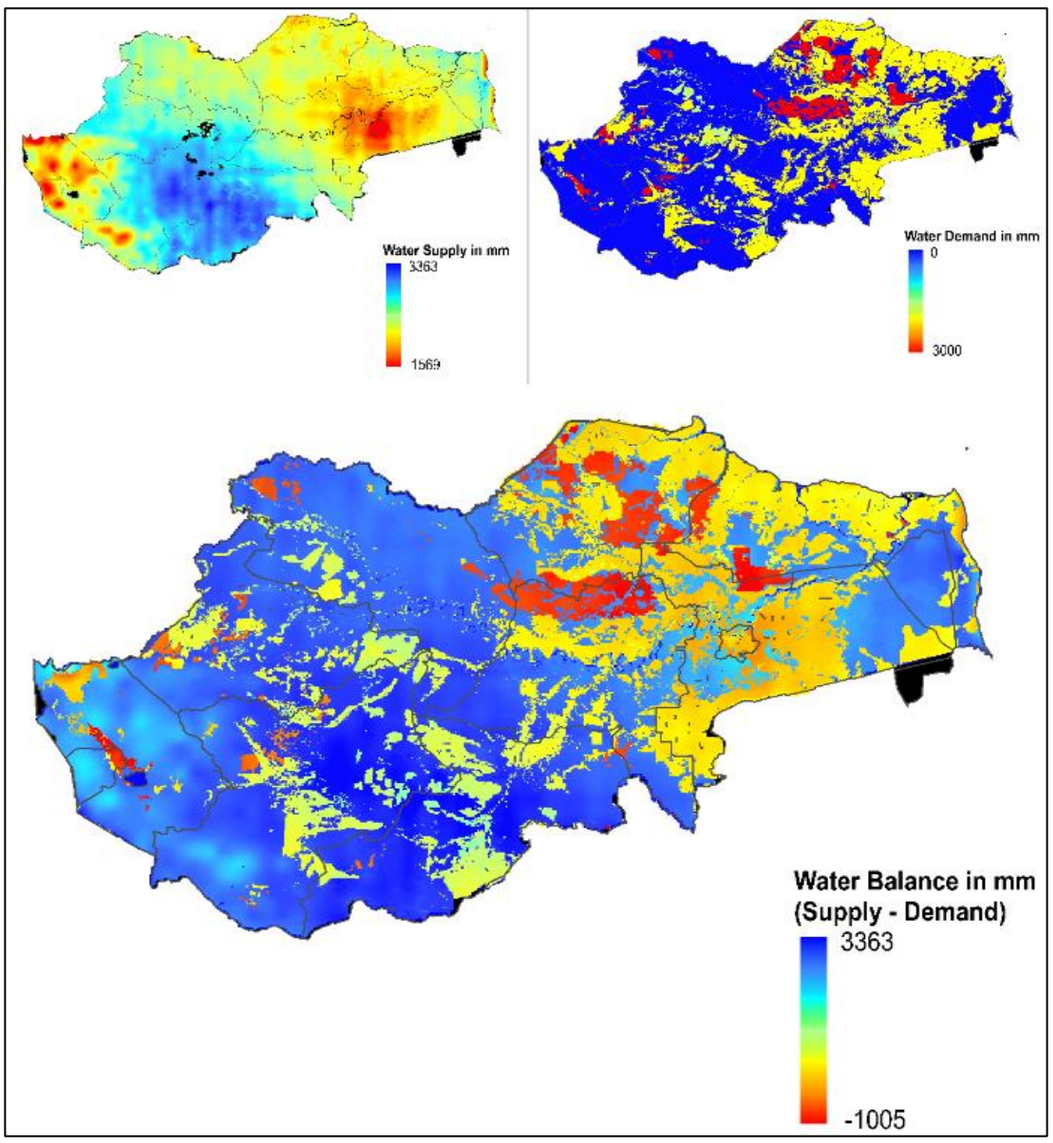

Sumber: data diolah, 2021

Gambar 2-9 Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020

C. Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal/Berusaha Rendah Risiko Bencana

Dengan menggunakan indeks rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (rawan bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan dan lahan) serta standar luas ruang hidup layak yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (11 m2/orang) dan Koefisien Dasar Hijau wilayah perkotaan dan perdesaan, maka dapat

diketahui masih cukup ruang yang layak untuk penduduk di wilayah Provinsi Jambi tinggal dan berusaha, kecuali di wilayah perkotaan yaitu Kota Jambi dan terutama Kota Sungai Penuh yang mulai terbatas. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan penataan ruang untuk kawasan pemukiman atau desa tangguh bencana serta bangunan layak ramah lingkungan di kawasan-kawasan pemukiman yang teridentifikasi berada di daerah rawan bencana untuk memitigasi dan mengantisipasi terjadinya kejadian bencana.

Tabel 2-8 Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang Layak (Ha)*	Ruang Layak** (Ha)	Surplus/(Defisit) (Ha)
Kerinci	826	3.304	2.478
Merangin	1.169	4.674	3.506
Sarolangun	957	3.829	2.872
Bungo	1.595	6.378	4.784
Batang Hari	1.327	5.310	3.982
Tebo	1.486	5.944	4.458
Muaro Jambi	1.327	5.306	3.980
Tanjung Jabung Barat	1.397	5.588	4.191
Tanjung Jabung Timur	1.011	4.044	3.033
Kota Jambi	1.000	1.500	500
Kota Sungai Penuh	159	239	80
Total	6.380	22.622	16.242

Sumber: Data diolah (2021).

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Iingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang

setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;

4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Rawan bencana alam nasional;
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. Kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh; dan
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan sosial budaya adalah Kawasan Percandian Muara Jambi seluas kurang lebih 21.288 hektar (3.355 Ha). Kawasan Cagar Budaya Muara jambi merupakan kawasan percandian agama Buddha yang telah tumbuh dan berkembang pada abad ke 7-13 M. Kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang menempati 8 (Delapan) Desa dalam 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Baru, dan Desa Kemingking Luar di Kecamatan Maro Sebo, serta Desa Tebat Patah, Desa Kemingking Dalam, Desa Dusun Mudo, dan Desa Teluk Jambu di Kecamatan Taman Rajo.

Kawasan Cagar Budaya Muara jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.259/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muara Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan luas 3.981 hektar. Bahkan telah masuk dalam daftar tentatif (*Tentative List*) UNESCO untuk nominasi warisan dunia dengan No. 5465 Tahun 2009.

Berdasarkan letak astronomis, kawasan ini berada pada zona 48 M 346839 mT- 356779 mT dan 9833468 mU-9840765 mU. Batas-batas kawasan ini adalah:

Sebelah Utara : Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo
Sebelah Selatan : Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah
Sebelah Barat : Desa Danau Lamo dan Desa Baru

Sebelah Timur : Desa Teluk Jambu dan Desa Dusun Mudo

Kawasan ini dibelah oleh sebuah sungai besar, yakni Sungai Batanghari yang membagi 2 kawasan ini menjadi sisi utara dan sisi selatan. Adapun tinggalan purbakala tersebut menempati tanggul alam kuno yang ada di sepanjang tepi Sungai Batanghari, baik di sisi utara maupun di sisi selatan. Tanggul alam merupakan bentukan lahan di sepanjang tebing sungai yang relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang terbentuk dari proses pengendapan oleh limpahan banjir. Umumnya daerah pedesaan yang terdapat di sepanjang Sungai Batanghari terletak pada tanggul alam, contohnya Desa Muaro Jambi. Proses pembentukan tanggul alam terus berlangsung hingga saat ini yang ditunjukkan oleh seringnya terjadi genangan air di daerah rendah di belakang tanggul alam ketika terjadi banjir. Di belakang tanggul alam terdapat rawa belakang (*backswamp*) yang sering tergenang air.

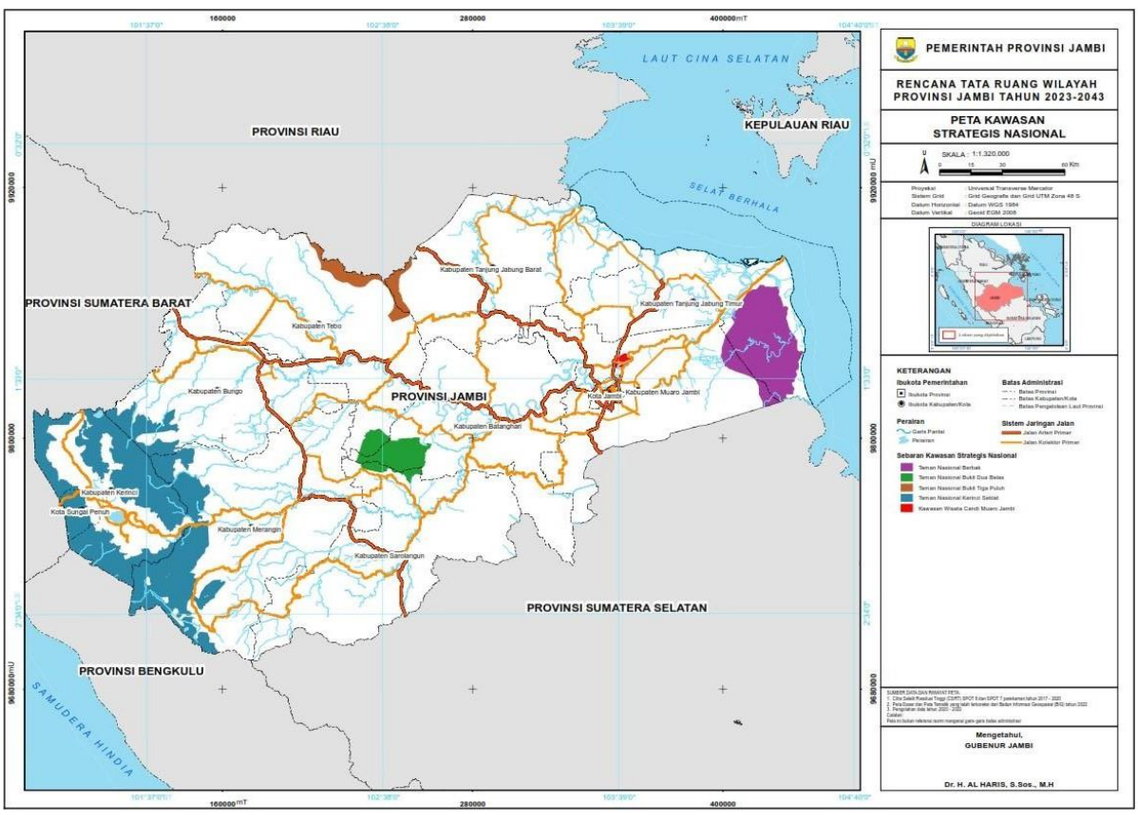

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-10 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi

Sistem sungai di satuan ruang geografis Muara Jambi terdiri dari Sungai Batanghari sebagai sungai induk dan beberapa anak sungainya, seperti Sungai Amburan Jalo, Sungai Terusan, Sungai Jambi, Parit

Sekapung, Parit Johor, Sungai Melayu, Sungai Selat, dan Sungai Berembang. Berdasarkan analisis arah aliran, pola aliran, dan morfometri saluran diketahui bahwa sistem sungai di daerah ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal tersebut diketahui dari adanya dugaan bahwa beberapa sungai di daerah ini merupakan sungai buatan, seperti Sungai Terusan, Parit Sekapung, Parit Johor, dan lain-lain.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Provinsi Jambi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jambi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dengan pertimbangan tipologi kawasan yang berbentuk kawasan perkotaan, kawasan berkarakter koridor, kawasan perdesaan, dan kawasan cepat tumbuh karena ada trigger ekonomi yang sedang dan akan dikembangkan. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

a. Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi;
b. Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
c. Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
d. Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
e. Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
f. Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
g. Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
h. Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
i. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Arah pengembangannya yaitu penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan strategis provinsi teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci. Dengan arah pengembangan pengembangan pemanfaatan sumber energi non fosil dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi berbasis hitech dan berwawasan lingkungan.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berada pada Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.

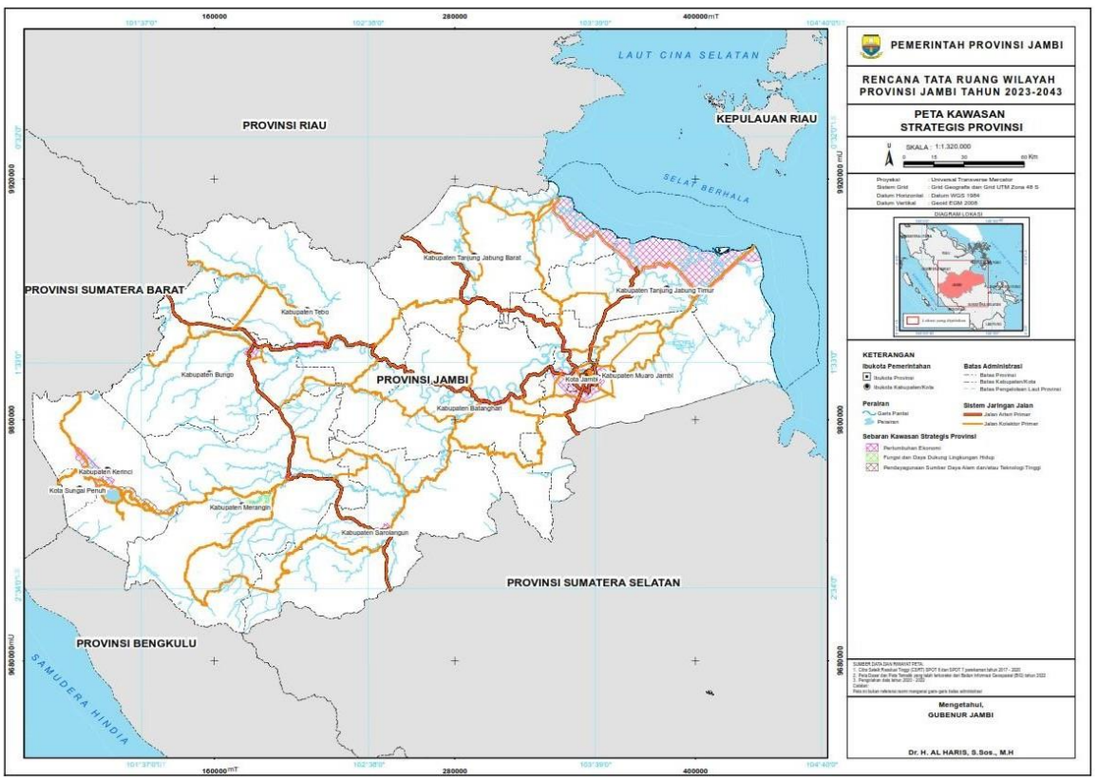

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-11 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.

A. Bencana Geologi

Bencana geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang berasal dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom volkanik yang membara. Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari enam kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

2. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari sembilan kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

B. Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir diperoleh potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-9 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	Batang Hari	108.254	57.040	23.100	188.394	Tinggi
2	Kerinci	21.489	12.472	9.603	43.564	Tinggi
3	Merangin	206.376	142.623	99.615	448.614	Tinggi
4	Muaro Jambi	192.240	88.624	38.629	319.493	Tinggi
5	Sarolangun	99.693	38.149	6.913	144.755	Sedang
6	Tanjung Jabung Barat	150.552	112.454	118.029	381.035	Tinggi
7	Tanj. Jabung Timur	79.462	138.352	255.060	472.874	Tinggi
8	Tebo	217.016	76.251	13.045	306.312	Sedang
9	Bungo	81.806	28.134	3.611	113.551	Tinggi
B	**Kota**					
1	Kota Jambi	39	19	-	58	Sedang
2	Kota Sungai Penuh	4.588	1.826	818	7.232	Tinggi
	Provinsi Jambi	**1.161.515**	**695.944**	**568.423**	**2.425.882**	**Tinggi**

Sumber : BPBD Prov. Jambi, 2023

Potensi bahaya banjir pada tabel di atas memperlihatkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Jambi yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jambi secara keseluruhan adalah 2.425.882,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.161.515,00 Ha, kelas sedang seluas 695.944,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 568.423,00 Ha.

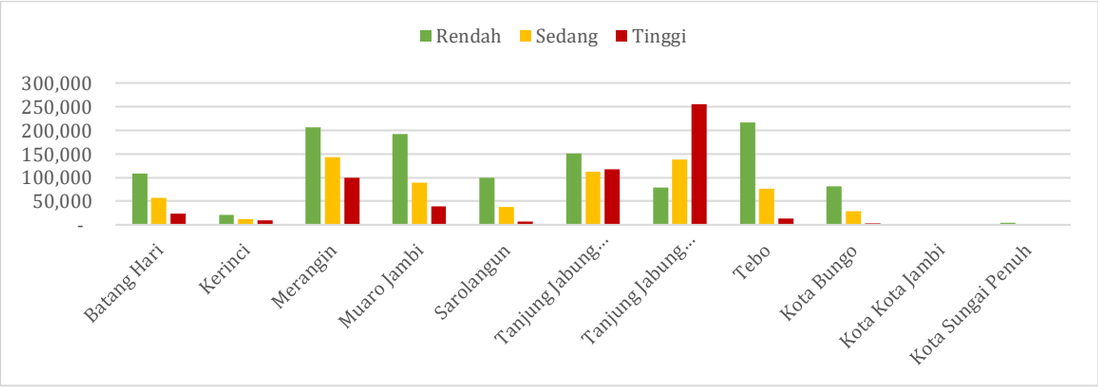

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-12 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Tebo dengan luas 217.016,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Merangin dengan luas 142.623,00 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 255.060,00 Ha.

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	**Kabupaten**					
1	Batang Hari	63.456	209.625	260.103	533.184	Tinggi
2	Kerinci	330.854	10.743	2.197	343.794	Tinggi
3	Merangin	399.518	288.100	41.958	729.576	Tinggi
4	Muaro Jambi	28.670	258.686	264.193	551.549	Tinggi
5	Sarolangun	185.256	245.441	168.473	599.170	Tinggi
6	Tanjung Jabung Barat	41.247	127.735	325.886	494.868	Tinggi
7	Tanjung Jabung Timur	16.711	176.116	296.549	489.376	Tinggi
8	Tebo	88.565	271.693	269.181	629.439	Tinggi
9	Bungo	111.731	284.776	65.700	462.207	Tinggi
B	**Kota**					
1	Kota Jambi	14.117	2.414	510	17.041	Tinggi
2	Kota Sungai Penuh	35.960	-	-	35.960	Rendah
	Provinsi Jambi	**1.316.085**	**1.875.329**	**1.694.750**	**4.886.164**	**Tinggi**

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jambi yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.886.164,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.316.085,00 Ha, kelas sedang 1.875.329,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.694.750,00 Ha.

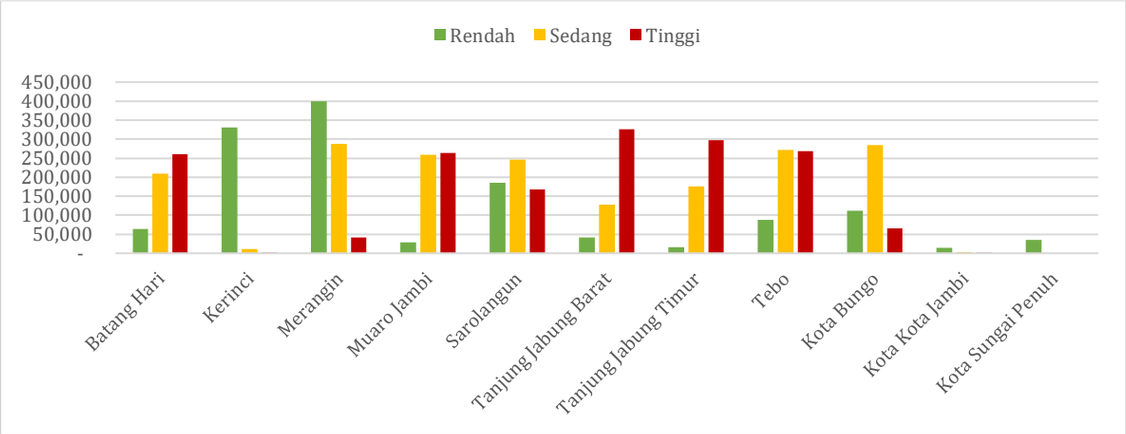

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-13 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 399.518,00 Ha, yaitu Kabupaten Merangin, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Merangin dengan luas 288.100,00 Ha. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 325.886,00 Ha.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2023 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.631.100 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 74 jiwa/km^2. Kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.647 jiwa/km^2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 272 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2020-2022 adalah sebesar 1,33 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,16 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,57 persen.

Tabel 2-11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	237.791	238.700	250.300	251.900	253.900
2	Merangin	383.480	388.900	354.100	355.700	357.600
3	Sarolangun	295.985	301.900	290.100	293.600	298.100
4	Batang Hari	269.966	272.900	301.700	306.700	313.200
5	Muaro Jambi	432.305	443.400	402.000	406.800	412.800

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
6	Tanjab Timur	218.413	220.000	229.800	231.800	234.200
7	Tanjab Barat	328.343	333.900	317.500	320.600	324.500
8	Tebo	348.760	354.500	337.700	340.900	344.800
9	Bungo	367.182	374.800	362.400	367.200	373.300
10	Kota Jambi	598.103	604.700	606.200	612.200	619.600
11	Sungai Penuh	89.944	90.900	96.600	97.800	99.200
Provinsi Jambi		**3,402,052**	**3.570.272**	**3.624.600**	**3.548.200**	**3.631.100**

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,44 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,56 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio 103,8.

Tabel 2-12 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km^2)
1	Kerinci	74
2	Merangin	47
3	Sarolangun	50
4	Batang Hari	58
5	Muaro Jambi	79
6	Tanjab Timur	52
7	Tanjab Barat	59
8	Tebo	56
9	Bungo	78
10	Kota Jambi	3.647
11	Sungai Penuh	272
Jumlah		**74**

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama empat dekade yakni tahun 1990, 2000, 2012 dan 2021 di atas. Pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun), sekolah

menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (13-15 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas (16 – 18 tahun) sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun)**.** Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap infrastruktur dan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik.

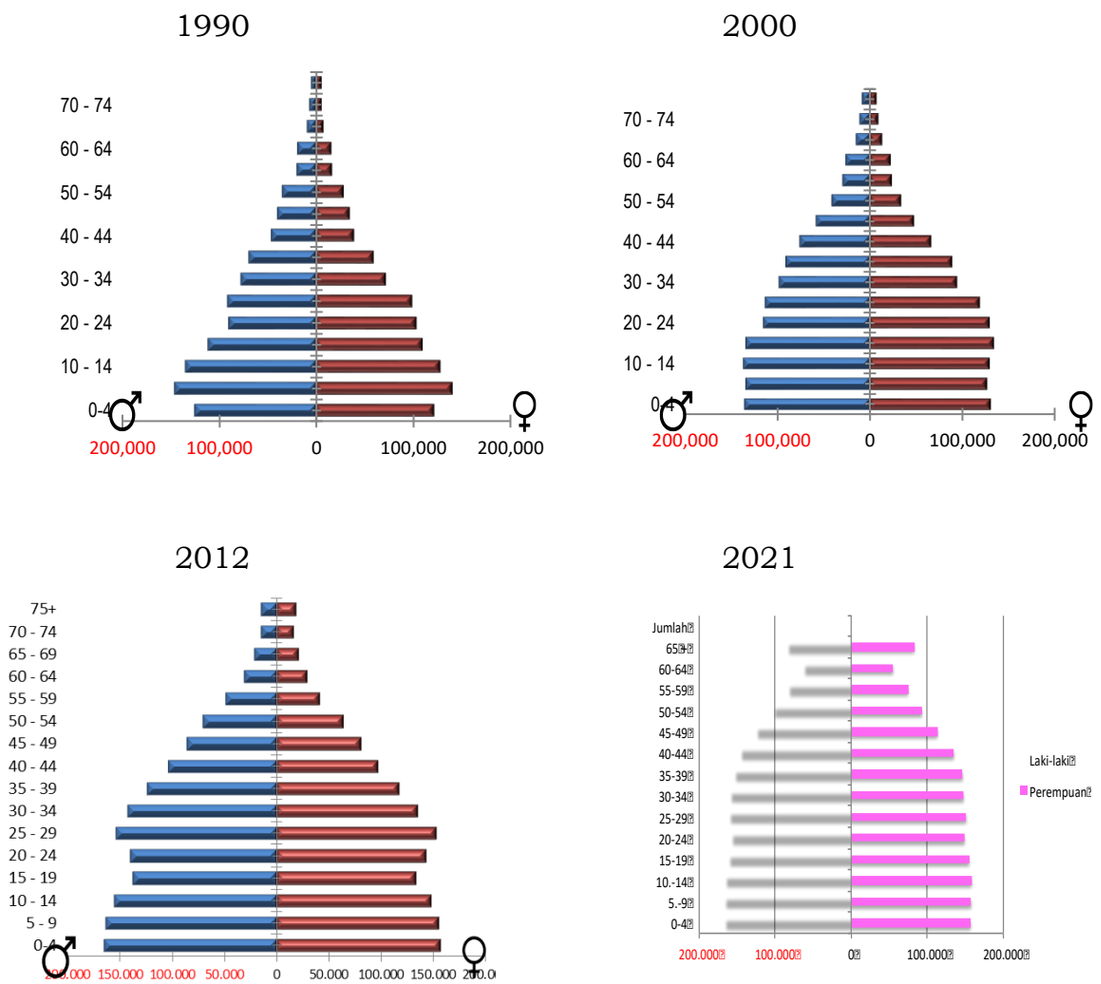

Gambar 2-14 Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2021, Jambi Dalam Angka, data diolah)

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2021, dimana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang

hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.

Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2023

Kab/Kota	Agama yang Dianut (%)						
	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
Kerinci	99,77	0,18	0,04	0,0004	0,0008	0,00	0,005
Merangin	98,02	1,61	0,24	0,01	0,04	0,001	0,08
Sarolangun	96,36	2,96	0,42	0,01	0,10	0,004	0,16
Batang Hari	97,17	2,33	0,29	0,00	0,09	0,003	0,12
Muaro Jambi	94,36	4,73	0,49	0,04	0,35	0,01	0,002
Tanjab Timur	98,60	1,14	0,18	0,02	0,07	0,002	0,00
Tanjab Barat	93,43	5,55	0,56	0,00	0,41	0,03	0,02
Tebo	96,42	2,87	0,46	0,01	0,01	0,00	0,23
Bungo	96,90	2,21	0,48	0,003	0,34	0,003	0,06
Kota Jambi	87,32	6,26	1,62	0,03	4,68	0,09	0,001
Sungai Penuh	99,11	0,61	0,17	0,001	0,10	0,00	0,00

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di seluruh kabupaten/kota beragama Islam dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah penduduk beragama Kristen Protestan dan Budha. Sedangkan untuk tiga agama lainnya menunjukkan variasi komposisi pada masing-masing kabupaten/ kota. Keragaman komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Provinsi Jambi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2019 mengalami perlambatan dari 4,74 di tahun 2018 menjadi 4,40 persen. Kondisi ini

disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, menurunnya harga minyak dunia) dan juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung.

Selanjutnya, akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama yang dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terutama Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 8,01 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen.

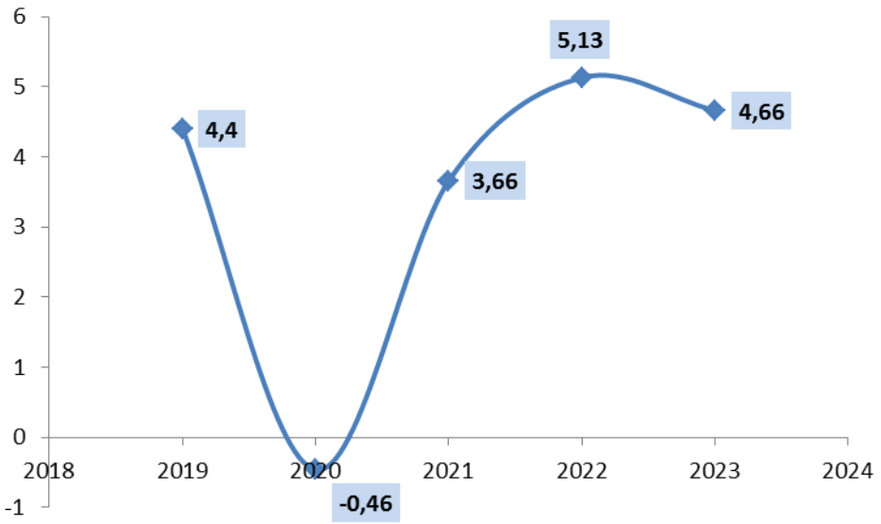

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 2-15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,82 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,41 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,00 persen. Di samping itu, beberapa lapangan usaha terkontraksi. Jasa kesehatan yang terdalam yaitu sebesar 2,40 persen.

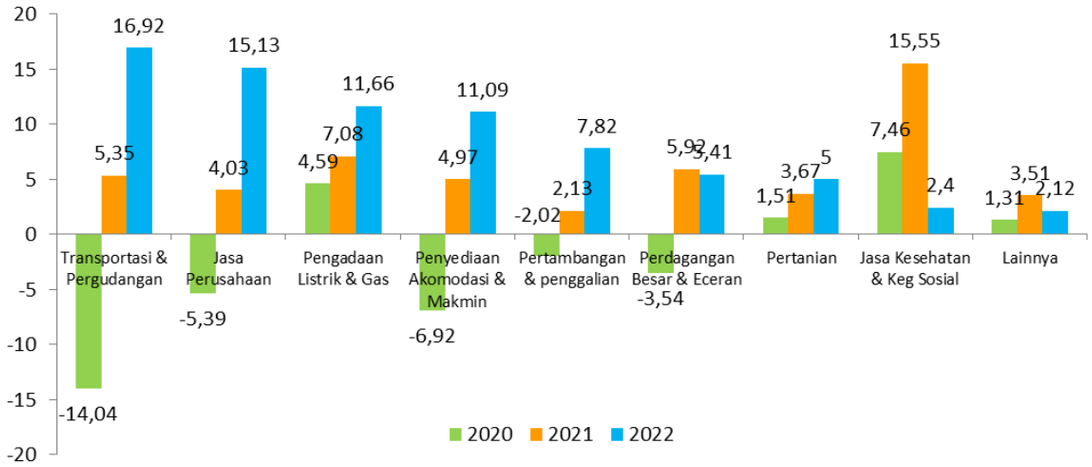

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-16 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode 2018–2022 adalah rata-rata sebesar 7,11 persen per tahun, sementara laju pertumbuhan PDRB ADHK rata-rata sebesar 3,09 persen per tahun.

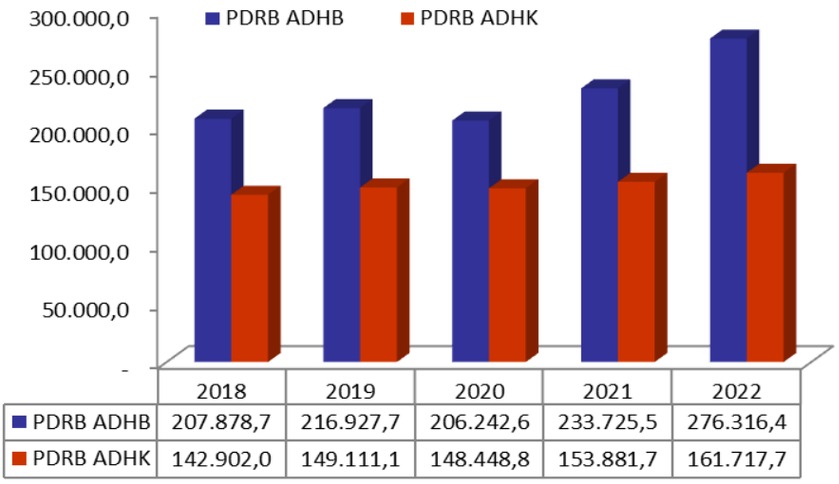

	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB	207.878,7	216.927,7	206.242,6	233.725,5	276.316,4
PDRB ADHK	142.902,0	149.111,1	148.448,8	153.881,7	161.717,7

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-17 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (dalam milyar rupiah)

Setelah dua tahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda, termasuk di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,23 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 5,13 persen, serta Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,09 persen. Sementara Provinsi Aceh berada pada pertumbuhan yang paling rendah dibanding provinsi lainnya yaitu sebesar 4,21 persen.

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi

Jambi selama 5 tahun terakhir (2018-2022), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 kontribusinya mencapai 30,25 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5 persen, lebih besar dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,67. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, dan semakin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 14,21 persen menjadi 19,29 persen di tahun 2022. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 12,16 persen.

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

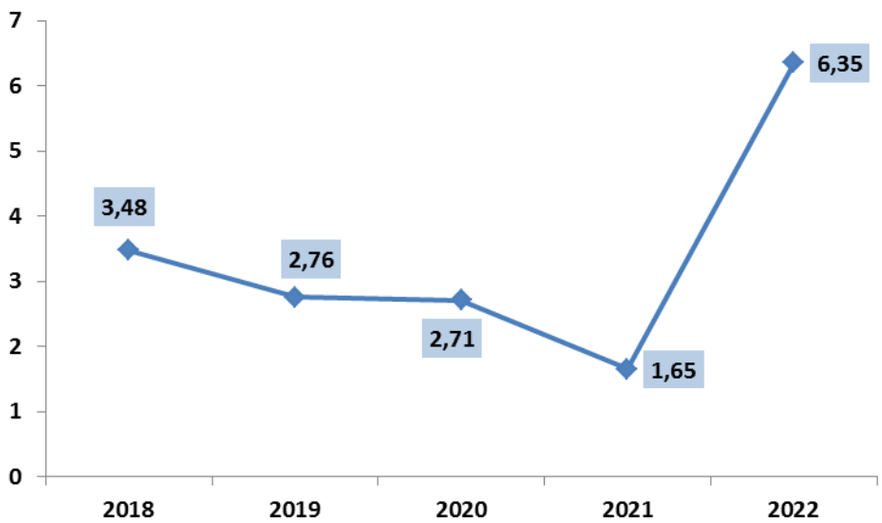

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-18 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, berdasarkan tahun kalender 2022 tercatat sebesar 6,35 (ytd). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat inflasi ini merupakan yang tertinggi setelah tahun 2013 dan 2014 yang mencapai 8,74 dan 8,72 persen.

Tingginya inflasi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 tersebut, utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yaitu pada komoditas bensin, angkutan udara solar, dan cuci kendaraan. Kenaikan harga tarif angkutan udara tersebut diakibatkan kenaikan harga avtur serta kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022, dimana harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter.

Di samping itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau juga memberikan andil besar dalam meningkatnya inflasi di tahun 2022, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan cabai merah, komoditas beras, rokok kretek filter, rokok kretek, rokok putih, telur ayam ras, dan ikan nila. Kenaikan inflasi dari sub-kelompok Rokok dan Tembakau dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok. Kenaikan harga komoditas telur ayam didorong oleh peningkatan biaya produksi yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2018-2022 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,74 persen per tahun. Sedangkan PDRB per kapita ADHB mengalami fluktuasi, terutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19, namun masih memiliki kecenderungan meningkat hingga tahun 2022 dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 5,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah–menengah (*lower–middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

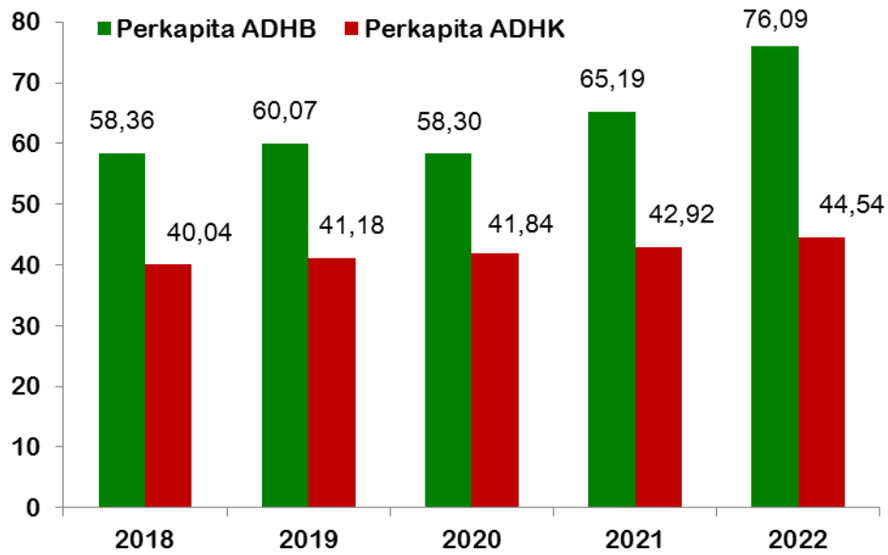

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-19 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022 (dalam juta rupiah)

2.2.1.3.1 Indeks Gini

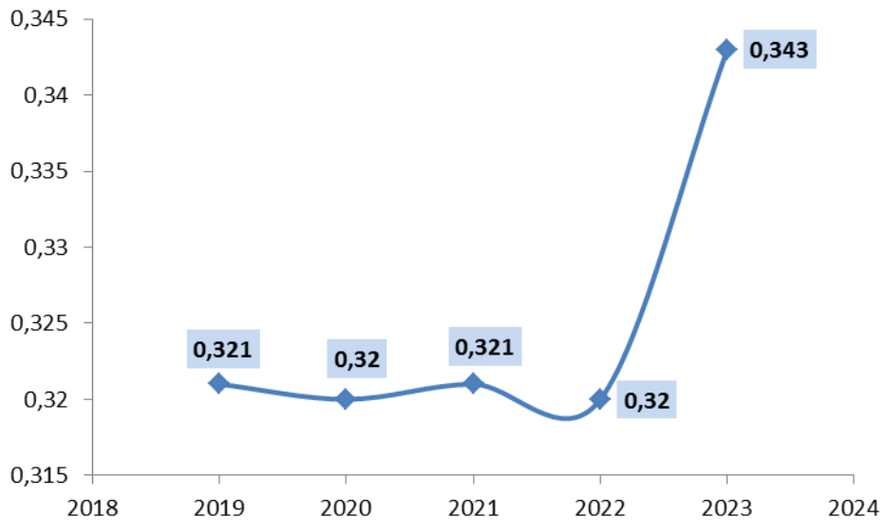

Sumber : BPS 2024

Gambar 2-20 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2019-2023

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks Gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 5 tahun terakhir, Koefisien Gini Provinsi Jambi relatif

rendah di bawah nasional. Berdasarkan daerah tinggal, Koefisien Gini Tahun 2023 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,365 dan 0,320. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit. Hanya beberapa Kabupaten/kota yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketimpangan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.

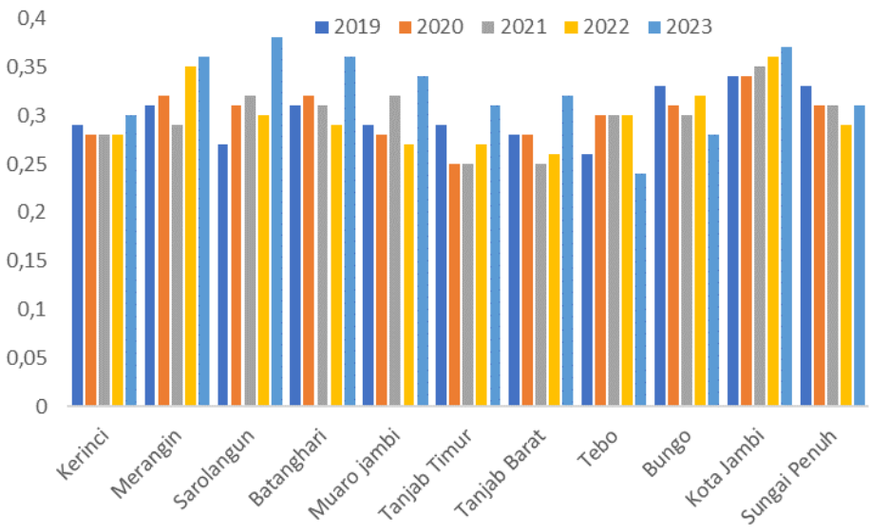

Sumber : BPS 2024. data diolah

Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

2.2.1.4 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan berimplikasi juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besaran Indeks Williamson antara nol sampai satu dengan kriteria jika indeks < 0,35 dikategorikan rendah, 0,35 – 0,5 dikategorikan sedang dan > 0,5 dikategorikan tinggi. Indeks Williamson Provinsi Jambi mulai dari tahun 2017-2020 memperlihatkan kecenderungan menurun, namun masih dikategorikan sedang. Pada tahun 2018, indeks Williamson Provinsi Jambi sebesar 0.46 mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 0,35.

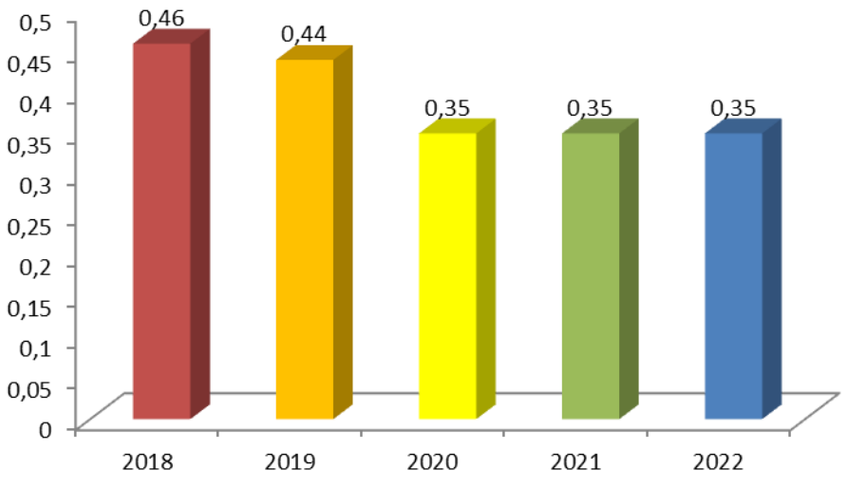

Sumber : BPS 2023. data diolah

Gambar 2-22 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

2.2.1.4.1 Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas

ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi, terutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnasi, sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 7,92 persen di tahun 2018 menjadi 7,70 persen di tahun 2022. walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 6,68 persen, yaitu dari Rp426.251 per kapita per bulan pada 2018 menjadi Rp585.950 per kapita per bulan pada 2022. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 281,47 ribu orang, meningkat menjadi 283,82 ribu orang pada tahun 2022.

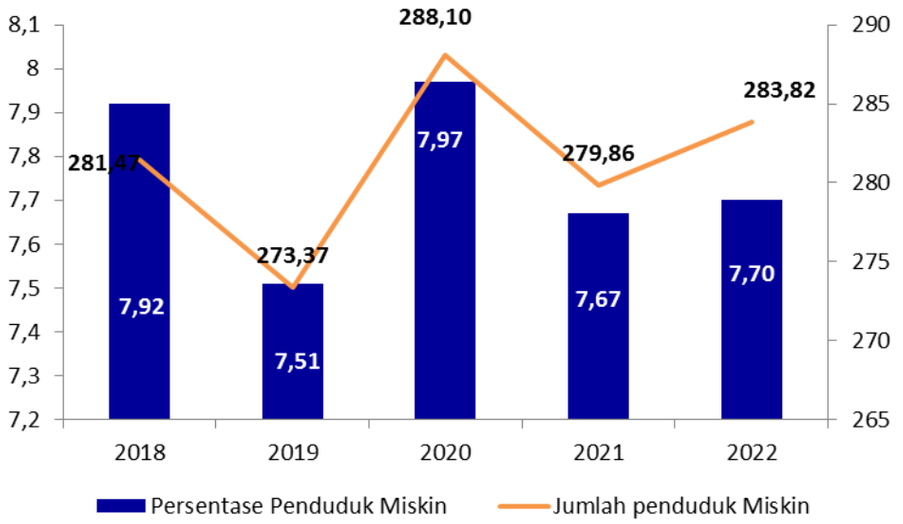

Sumber: BRS, 2023

Gambar 2-23 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode September 2018 - September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada September 2017 nilai P1 sebesar 0,99 meningkat menjadi 1,09 pada September tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), meningkat dari 0,19 pada September 2017 menjadi 0,23 pada September 2021. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.

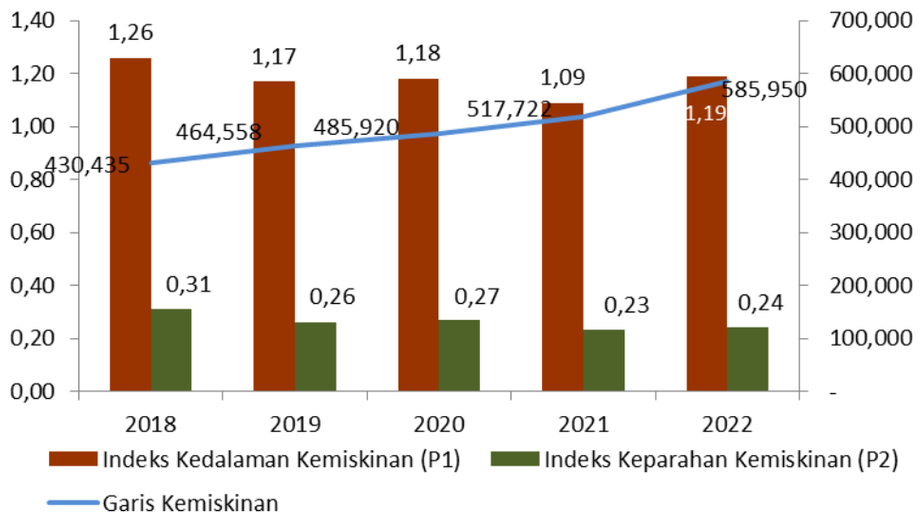

Sumber: BPS, data diolah, 2023

Gambar 2-24 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah

sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

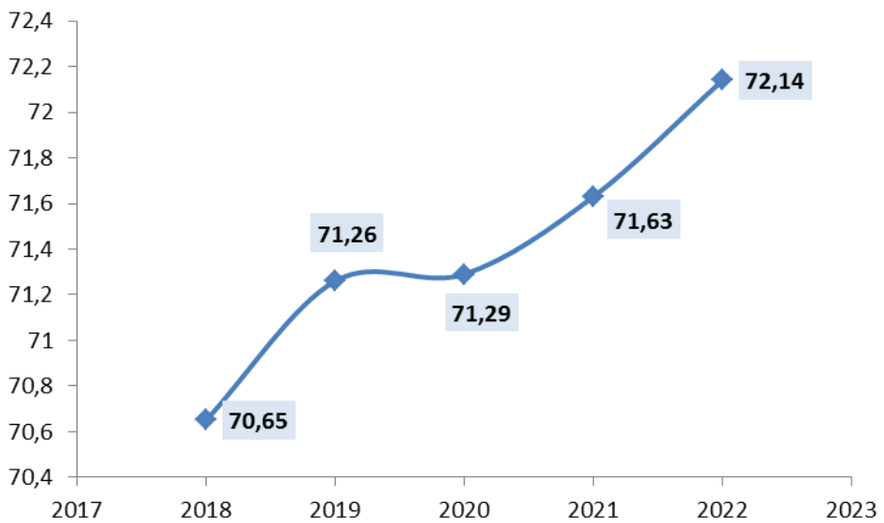

Sumber: BPS, data diolah, 2023

Gambar 2-25 IPM Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM

Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global

maupun nasional dan regional. Bila dilihat per kabupaten/ kota, IPM seluruh kabupaten/kota juga terus bergerak hampir menuju IPM tinggi, hanya dua kabupaten yang masih jauh untuk mencapai IPM kategori tinggi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian yang masih timpang antar wilayah dalam Provinsi Jambi ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui **APK** (Angka Partisipasi Kasar) dan **APM** (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Pada tahun 2022, APK pada tingkat SD mencapai 109,55, atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mencapai 109,48. Hal ini berarti terdapat 109,55 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, APK SMP sederajat sebesar 87,55 persen menjadi 87,34 persen pada tahun 2022. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada periode tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2018, APK SMA sebesar 78,93 persen, meningkat menjadi 84,33 persen pada tahun 2022.

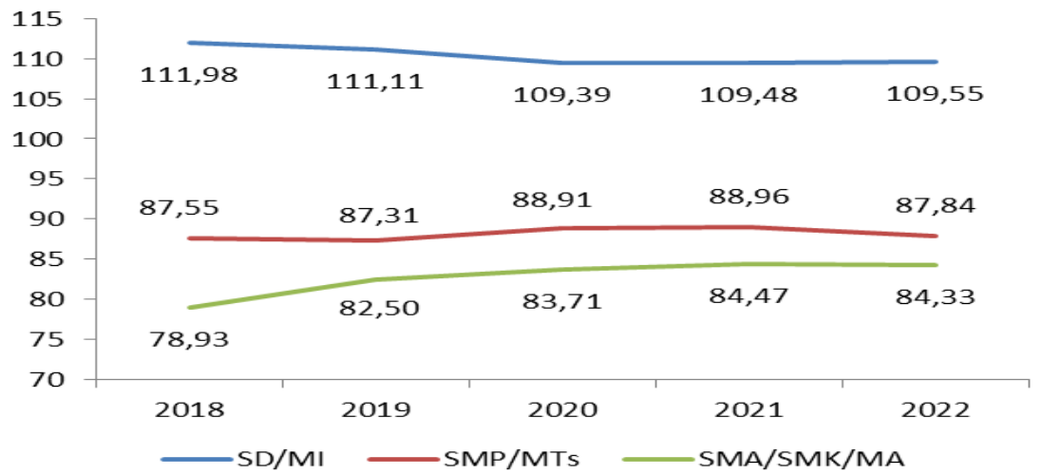

Sumber : BPS, Tahun 2023

Gambar 2-26 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi peningkatan dari 99,04 persen pada tahun 2018 menjadi 99,33 persen pada tahun 2022. Demikian juga APM SMP yang meningkat dari 79,38 persen di tahun 2018 menjadi 79,93 persen di tahun 2022. Untuk APM SMA, pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, APM SMA sebesar 60,92 persen, menurun menjadi 60,73 persen pada tahun 2022. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

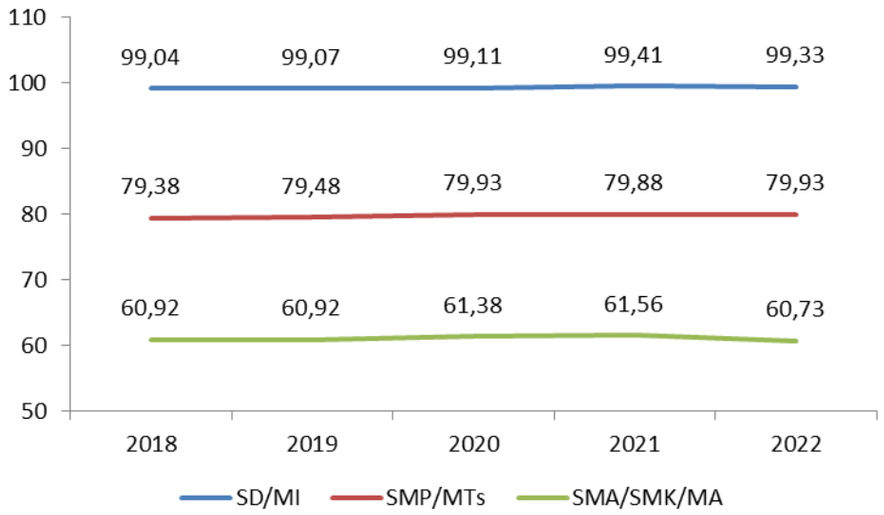

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-27 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2023

Meskipun angka partisipasi baik Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas **Sumber Daya Manusia Jambi**, karena masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.
2. Tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi
3. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
4. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.2.2.3 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam

persentase. Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang fluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih menjadi kendala yang harus segera terselesaikan dengan baik. Gambar di bawah menunjukkan pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pada tahun 2018, terdapat 31 orang dari 1000 siswa SM/sederajat yang putus sekolah, namun di tahun 2022 sudah semakin baik dimana terdapat 12 orang dari 1000 siswa SM/sederajat yang putus sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah cukup baik. Namun ke depan, juga diperlukan upaya-upaya inovatif terutama dalam menghadapi kondisi pasca pandemi covid-19, serta menghadapi era Revolusi 4.0.

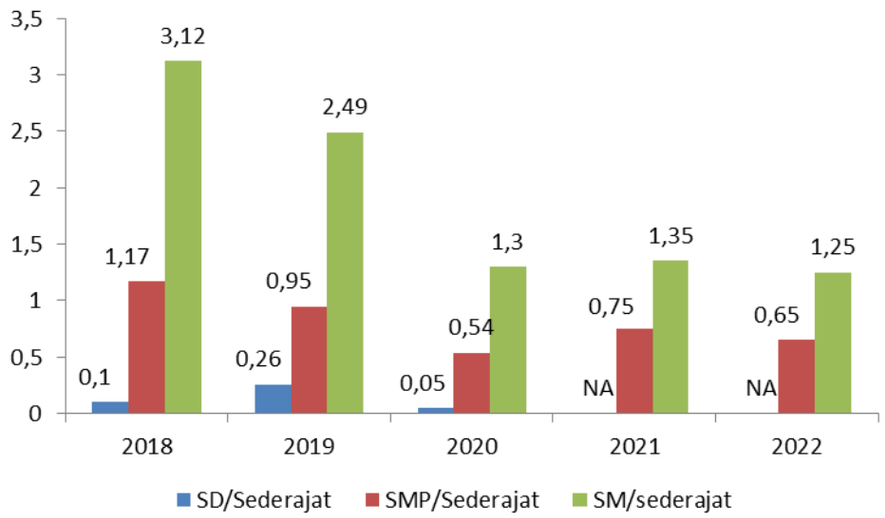

Sumber : BPS, Tahun 2023

Gambar 2-28 Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Tabel 2-14 Perkembangan Seni Budaya

No	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	9	10	2	3	5
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Budpar, 2023

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah

menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi agar karya seni dan budaya Jambi mendapatkan pengakuan. Dalam rentang tahun 2018-2022 telah ditetapkan 29 warisan budaya tak benda.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan seni budaya menunjukkan peningkatan yang berarti, walaupun di sisi yang lain prasarana seperti gedung kesenian relatif stagnan. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka kedepan program-program terkait internalisasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada generasi muda harus dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

2.2.3.2 Olah Raga

Tabel 2-15 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Cabang Olahraga	2020		2021*		2022*	
		Pemda	Pemda	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	19	230	19	230	19	230
2	Tenis	17	21	17	21	17	21
3	Bulu Tangkis	20	250	20	250	20	250
4	Bola Voli	122	326	122	326	122	326
5	Basket	11	44	11	44	11	44
6	Tenis Meja	15	57	15	57	15	57
7	Pencak Silat	10	16	10	16	10	16
8	Lap. Menembak	-	1	-	1	-	1
9	Angkat Besi	3	6	3	6	3	6
10	Senam	1	-	1	-	1	-
11	Kolam Renang	3	15	3	15	3	15
12	Taekwondo	1	3	1	3	1	3
13	Judo	1	2	1	2	1	2
14	Kempo	1	3	1	3	1	3
15	Gulat	2	2	2	2	2	2
16	Panjat Tebing	13	1	13	1	13	1
17	Golf	1	1	1	1	1	1
18	GOR	15	16	15	16	15	16
19	Dayung	8	3	8	3	8	3
20	Tinju	1	5	1	5	1	5
21	Sepak Takraw	3	31	3	31	3	31
22	Karate	3	5	3	5	3	5
23	Catur	2	3	2	3	2	3

Sumber: Dispora, 2023

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka olahraga merupakan salah satu faktor penunjang yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolahraga masih

rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlit Provinsi Jambi yang belum menggembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Pihak swasta.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Agenda besar pendidikan di Indonesia adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan bisa meningkat, sejajar dengan negara lain di Asia dan Dunia. Pendidikan yang bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidikan yang juga bermutu, yakni memiliki kualifikasi standar, profesional dan berdedikasi tinggi, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan SDM yang handal. Guru memilki peran strategis dalam pembangunan pendidikan, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, implementator kurikulum dan pelaku pendidikan yang secara langsung bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal dalam kurikulum menjadi tanggung jawab guru untuk merealisasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, untuk keberhasilan pendidikan diperlukan guru-guru yang berkualitas. Peningkatan kualifikasi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, hal tersebut sebagai wujud realisasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal S-1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar (Riyana, 2010).

Tabel 2-16 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SLTA/MA					
Jumlah Satuan Pendidikan SMA/MA	436	450	449	462	475
Jumlah Guru	8.445	8.890	8.893	9.257	10.081
Jumlah Murid	102.714	105.507	106.033	107.698	109.633
Rasio Guru terhadap 10.000 murid	822,19	842,60	838,70	859,53	910,52
Rasio Guru terhadap murid	12,16	11,87	12,99	11,63	10,88
Rasio sekolah dengan murid	235,58	234,46	236,15	233,11	230,81
Rasio sekolah dengan guru	19,37	19,76	19,81	20,04	21,22

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023 (data diolah).

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun dalam perspektif teknologi pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran (Miarso, 2008).

Rasio Guru terhadap murid adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu tahun agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio guru terhadap 10.000 murid SLTA/MA tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, ketersediaan guru per 10.000 murid sebanyak 822,19 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 12,16 orang murid SLTA/MA. Sementara di tahun 2023 ketersediaan guru per 10.000 murid adalah sebanyak 910,52 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 10,88 murid.

Tabel 2-17 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMK					
Jumlah Satuan Pendidikan SMK	228	178	176	177	179
Jumlah Guru	4.102	4.319	4.446	4.462	4.472
Jumlah Murid	51.084	54.477	54.319	53.700	50.064
Rasio Guru terhadap 10.000 murid	802,99	792,81	769,98	830,91	893,26
Rasio Guru terhadap murid	12,45	12,61	12,22	12,03	11,19
Rasio sekolah dengan murid	224,05	306,05	308,63	303,38	279,69
Rasio sekolah dengan guru	17,99	24,26	25,26	25,21	24,98

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. Pendidikan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong percepatan pembanguan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovati produktif yang menjadi salah satu progam unggulan provinsi Jambi. Untuk itu pembangunan pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berkualitas.

Rasio Guru terhadap 10.000 murid SMK pada tahun 2018-2022 berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ketersediaan guru sebanyak 802,99 orang untuk 10.000 orang murid SMK atau 1 orang guru tersedia untuk 12,45 orang murid. Sementara di tahun 2022, ketersediaan guru sebanyak 893,26 orang untuk 10.000 orang murid SMK, atau 1 orang guru tersedia untuk 11,19 orang murid.

2.3.1.1.1.1 Capaian Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2-18 Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				47.87 %
1 .	**Pendidikan Menengah**				71.99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**53.70 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	*192,95*	*129,517*	**63,433**	**67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.29 %**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	91.47 %
		1	**2**	**3**	
	1 . Buku teks pelajaran	129,517	129,517	**0**	**100.00 %**
	2 . Perlengkapan belajar	129,517	129,517	**0**	**100.00 %**
	3 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	4,792	4,792	**0**	**100.00 %**
	4 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	423	406	**17**	**95.98 %**
	5 . Penyediaan biaya personil peserta didik - (Orang)	4,304	4,103	**201**	**95.33 %**
	6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	10,263	9,914	**349**	**96.60 %**
	7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	423	423	**0**	**100.00 %**
	8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	2,243	983	**1,26**	**43.83 %**
	JUMLAH	**281,482**	**279,655**	**1,827**	**731.74 %**
2 .	**Pendidikan Khusus**				23.75 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**5.42 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	*30,298*	*2,052*	**28,246**	**7%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.34 %**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	91.68 %
		1	**2**	**3**	
	1 . Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	6	6	**0**	**100.00 %**
	2 . Perlengkapan belajar	2,193	2,193	**0**	**100.00 %**
	3 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	20	18	**2**	**90.00 %**
	4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	533	526	**7**	**98.69 %**
	5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	401	401	**0**	**100.00 %**
	6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	395	364	**31**	**92.15 %**
	7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	20	20	**0**	**100.00 %**
	8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	76	40	**36**	**52.63 %**
	JUMLAH	**3,644**	**3,568**	**76**	**733.47 %**

Belum terpenuhi 100 persen capaian SPM Bidang Pendidikan antara lain disebabkan oleh:

1. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh pernikahan usia dini (menikah pada saat di bangku sekolah).
2. Masih adanya anak usia sekolah sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga
3. Masih banyaknya orang tua yang menganggap bahwa mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib sehingga tidak diberikan pendidikan serta mengucilkan mereka dari dunia luar
4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga

dibutuhkan biaya khusus untuk memperoleh pendidikan di luar tempat tinggal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu program pemberian beasiswa untuk memotivasi siswa untuk tetap bersekolah serta mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat melalui pembangunan sekolah baru pada wilayah geografis yang sulit dijangkau, serta sarana prasarana pendidikan yang optimal.

2.3.1.1.2 Kesehatan

2.3.1.1.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu *(Maternal Mortality Rate)* adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Karena survey tersebut dilakukan 5 tahun sekali, maka data terkait AKI untuk data tahunan disajikan berupa data jumlah kematian ibu yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Tabel 2-19 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	5	4	9	4	7
2	Merangin	5	9	5	8	6

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Sarolangun	4	4	5	4	6
4	Batang Hari	3	7	7	9	9
5	Bungo	12	9	7	12	9
6	Tebo	3	10	11	8	7
7	Muaro Jambi	2	4	5	9	8
8	Tanjab Barat	4	5	3	5	5
9	Tanjab Timur	4	2	6	7	5
10	Kota Jambi	2	5	3	6	7
11	Kota Sei Penuh	2	0	1	3	3
	Provinsi	46	59	62	75	72

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi terus meningkat hingga tahun 2021 dan mulai menurun pada tahun 2022. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebanyak 72 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan Bungo masing-masing 9 kasus, sedangkan yang paling sedikit berada pada Kota Sungai Penuh yaitu sebanyak 3 kasus.

Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

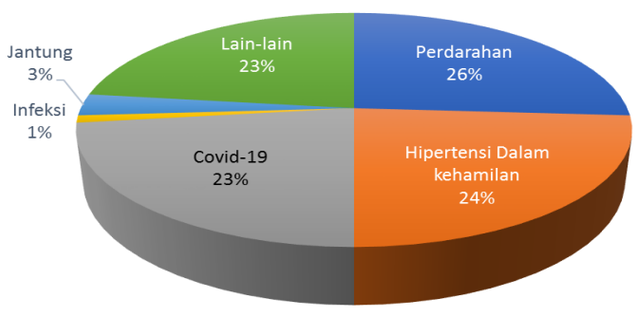

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2-29 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2022

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2022, jenis terbanyak adalah perdarahan, hipertensi, Covid-19

dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang dberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Tabel 2-20 Jumlah Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	42	49	62	40	47
2	Merangin	35	32	40	45	25
3	Sarolangun	21	23	22	19	19
4	Batang Hari	25	29	27	33	29
5	Bungo	32	25	43	40	52
6	Tebo	38	52	52	32	17
7	Muaro Jambi	12	21	18	33	19
8	Tanjab Barat	35	33	45	39	37
9	Tanjab Timur	11	13	20	5	5
10	Kota Jambi	4	8	16	7	12
11	Kota Sei Penuh	6	4	8	2	13
	Provinsi	**261**	**290**	**353**	**353**	**275**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefenisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian

yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat hingga tahun 2020 dan mulai menurun pada tahun 2022 setelah stagnan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus kematian bayi di beberapa kabupaten/kota meskipun angkanya secara keseluruhan menurun di Provinsi Jambi, namun di Kabupaten Kerinci, Bungo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh terdapat peningkatan jumlah kasus kematian bayi. Melihat tren tersebut, perlu dilakukan pemetaan dan lokus penurunan kematian bayi di beberapa kabupaten/kota, serta upaya dalam menurunkan jumlah tersebut. Adapun penyebab kematian bayi tersebut terutama disebabkan oleh BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) sebanyak 36% dan Asfiksia sebanyak 32%.

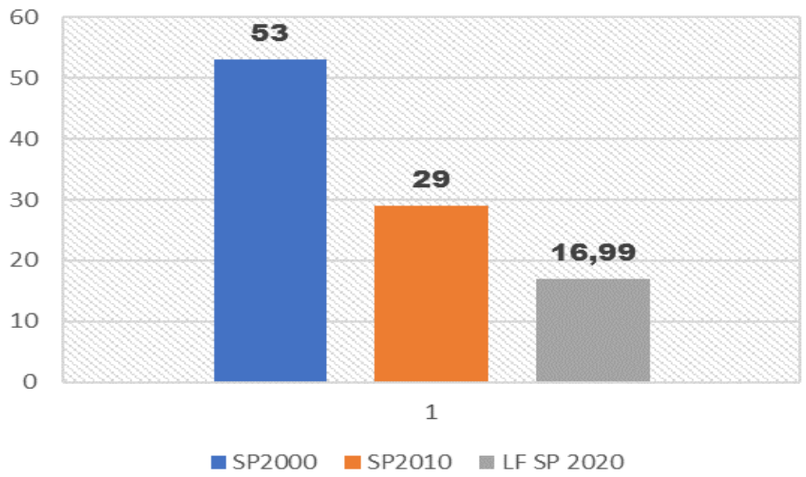

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-30 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2022

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, AKB Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama periode satu dekade, dari 29 per 1.000 kelahiran penduduk pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 16,99 per 1.000 kelahiran penduduk pada tahun 2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita menjadikan anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

Penyebab meningkatnya AKI dan AKB dikarenakan belum semua nakes melaksanakan pelayanan ibu dan anak terstandar, persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan masih rendah,sebaran tenaga bidan yang tidak merata, dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak di beberapa

Kabupaten tidak tinggal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) belum maksimal.

2.3.1.1.2.2 *Stunting* dan *Wasting*

Tabel 2-21 Prevalensi balita *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	2013 (Riskesdas)	2018 (Riskesdas)	2020 (SSGBI)	2022 (SSGI)
1.	Kerinci	55,3	42,2	33,85	24,2
2.	Merangin	37,5	35	15,38	14,5
3.	Sarolangun	40,8	18,8	19,06	16,8
4.	Batanghari	39,5	32,8	27,32	26,3
5.	Muaro Jambi	50	20,7	13,51	18,6
6.	Tanjab Timur	48,5	40,9	20,05	22,5
7.	TanJab Barat	29,6	44	21,81	9,9
8.	Tebo	41,4	33	30,13	25,0
9.	Bungo	34,5	20,7	27,57	15,4
10.	Kota Jambi	24,6	26,2	18,62	14,0
11.	Kota Sungai Penuh	36,9	35,8	25,66	26,0
PROVINSI		**37,2**	**30,1**	**21,03**	**18,00**

Sumber: Riskesdas 2013, 2018,SSGBI 2020,BKPK 2023

Stunting (pendek) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Anak yang *stunting* biasanya juga mengalami *wasting* atau kurus, diukur dengan melihat kurva berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Anak dikatakan *wasting* jika berat badan anak berdasarkan tinggi badannya menunjukkan hasil di bawah -2 SD. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Tabel di atas memperlihatkan perkembangan prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen (Riskesdas, 2013) pada tahun 2013 menjadi 18,0 persen (SSGI, 2022) pada tahun 2022. Namun demikian terdapat beberapa kabupaten/kota yang harus menjadi perhatian untuk penurunan stunting ini karena prevalensinya masih di atas provinsi, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 2-22 Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Prevalensi Wasting		
		Riskesdas 2013	Riskesdas 2018	SSGI 2022
1	Kerinci	5.40	11.52	5,4
2	Merangin	11.60	12.29	4,5
3	Sarolangun	18.10	12.60	4,7
4	Batanghari	22.00	17.03	6,7
5	Muaro Jambi	10.20	19.51	6,9
6	TanjungJabung Timur	13.30	15.90	9,7
7	TanjungJabung Barat	11.40	13.01	2,7
8	Tebo	13.60	7.92	7,4
9	Bungo	19.20	5.85	6,3
10	Kota Jambi	11.90	10.33	10,8
11	Kota Sungai Penuh	10.40	3.96	2,5
	PROVINSI JAMBI	13.50	12.05	6,6
	INDONESIA	12.10	10.20	7,7

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGI 2022

Sementara untuk balita kurus, hasil Survey Status Gizi Indonesia tahun 2022, memperlihatkan bahwa prevalensi wasting di Provinsi Jambi berada pada 6,6 persen, lebih baik dari nasional yang masih pada angka 7,7 persen. Terdapat beberapa kabupaten yang prevalensi wastingnya cukup tinggi atau lebih rendah dari provinsi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batang Hari. Untuk itu kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* dan *wasting* yang masih lebih tinggi Provinsi Jambi harus didorong untuk melaksanakan program-program konvergensi penurunan *stunting* dan *wasting* ini.

2.3.1.1.2.3 Eliminasi Malaria (kab/kota)

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.

Tabel 2-23 Eliminasi Malaria (kab/kota) di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	v	v	v	v	v
2	MERANGIN	-	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3	SAROLANGUN	-	-	-	-	-
4	BATANGHARI	-	-	-	-	-
5	MUARO JAMBI	v	v	v	v	v
6	TANJAB TIMUR	v	v	v	v	v
7	TANJAB BARAT	v	v	v	v	v
8	TEBO	-	-	-	-	-
9	BUNGO	v	v	v	v	v
10	KOTA JAMBI	v	v	v	v	v
11	SUNGAI PENUH	v	v	v	v	v
12	PROVINSI	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2022 Provinsi Jambi telah berhasil melakukan eliminasi malaria pada 7 kabupaten/kota atau 63,63 persen dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam upaya pengobatan dan eliminasi malaria di Provinsi Jambi, diantaranya adalah masih kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas program serta masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas. Untuk itu kedepan perlu advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta perlunya komitmen dukungan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk tidak sering melakukan mutasi terhadap petugas yang telah dilatih minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan. Sedangkan upaya lain yang harus terud dilakukan adalah penguatan diagnosis dan tatalaksana pengobatan malaria, penguatan surveilans malaria, penguatan pengendalian faktor resiko serta sediaan darah mikroskop yang diuji silang.

2.3.1.1.2.4 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi tahun 2018-2022 sedikit mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Di masa yang akan datang diharapkan terjadi keseimbangan antara penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.

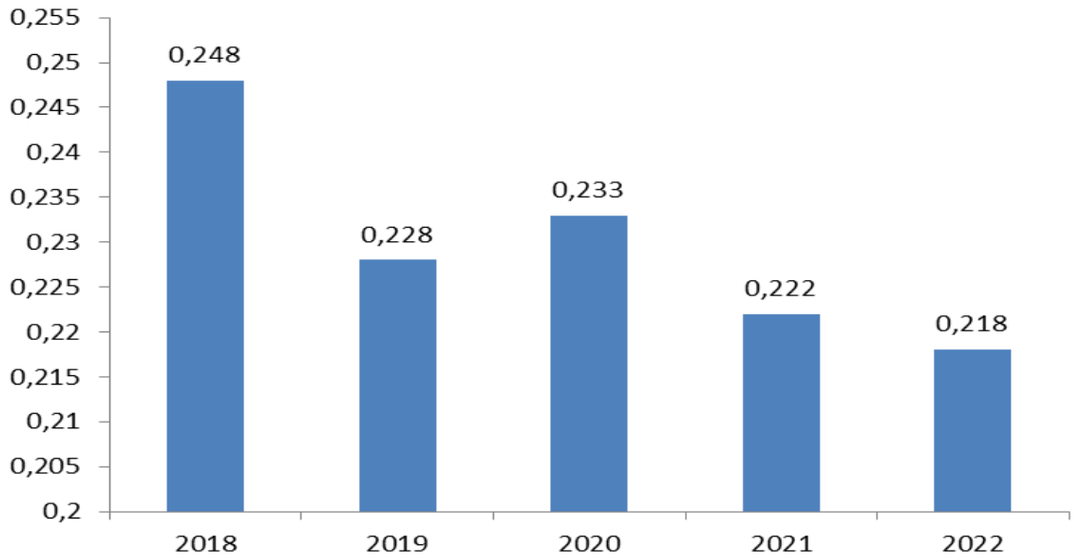

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-31 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Tabel 2-24 Kondisi eksisting sebaran puskesmas terakreditasi di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Belum Terakrediatasi
1	Kerinci	21	18	3
2	Merangin	27	25	2
3	Sarolangun	16	15	1
4	Batanghari	18	17	1
5	Muaro Jambi	22	18	4
6	Tanjab Timur	17	13	4
7	Tanjab Barat	16	16	0
8	Tebo	20	17	3
9	Bungo	19	19	0
10	Kota Jambi	20	20	0
11	Kota Sungai Penuh	11	10	1
	PROVINSI JAMBI	207	188	19

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2023

Jika dilihat sebaran puskesmas terakreditasi per kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, terlihat bahwa baru 3 Kabupaten/ kota yang telah mencapai 100 persen puskesmas terakreditasi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Capaian akreditasi puskesmas yang paling rendah adalah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian 76,5 persen. Hal ini berarti 90,82 persen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah di kabupaten/kota yang memenuhi standar untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Sementara untuk mendukung target RPJMN 0 persen puskesmas tanpa dokter, Provinsi Jambi masih memiliki 0,48 persen atau 1 puskesmas yang tanpa dokter, yang terdapat di Kabupaten Tebo. Kedepan seluruh puskesmas- harus didorong agar terakreditasi dan memiliki dokter.

Tabel 2-25 Kondisi Eksisting sebaran puskesmas dengan dokter dan tanpa dokter di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	PUSKESMAS DENGAN DOKTER	PUSKESMAS TANPA DOKTER
1	Kerinci	21	21	0
2	Merangin	27	27	0
3	Sarolangun	16	16	0
4	Batanghari	18	18	0
5	Muaro Jambi	22	22	0
6	Tanjung Jabung Timur	17	17	0
7	Tanjung Jabung Barat	16	16	0
8	Tebo	20	19	1
9	Bungo	19	19	0
10	Kota Jambi	20	20	0
11	Kota Sungai Penuh	11	11	0
	PROVINSI	207	206	1

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2023

2.3.1.1.2.5 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perumahsakitan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Perkembangan jumlah rumah sakit dan rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2018-2022 cenderung stabil, namun di tahun 2020 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana gambar berikut ini. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 2,1 persen dibanding tahun

sebelumnya, serta di tahun 2022 terdapat penambahan jumlah rumah sakit khusus.

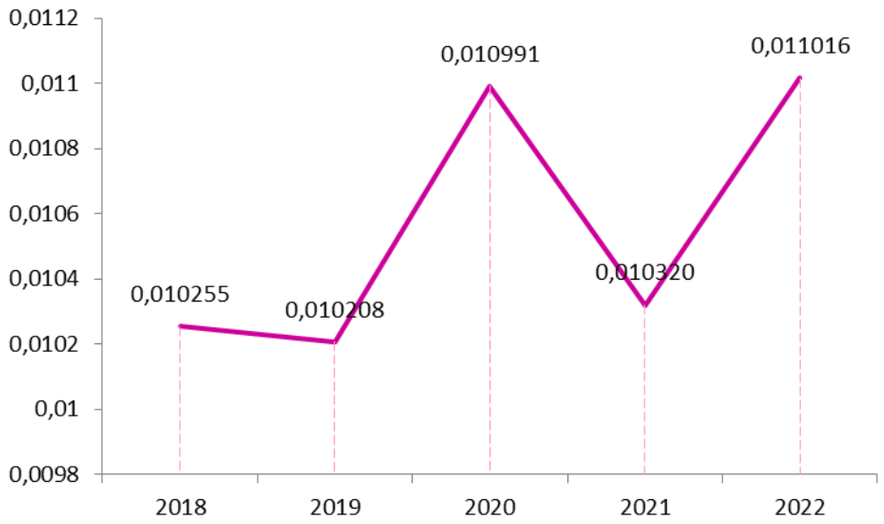

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-32 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) tentu diperlukan standarisasi dalam pelayanan. Sampai tahun 2022, dari 40 rumah sakit di Provinsi Jambi, 34 rumah sakit atau 85 persen telah terakreditasi. Rumah Sakit yang belum terakreditasi merupakan rumah sakit tipe D milik swasta dan organisasi sosial, dimana 5 rumah sakit berada di Kota Jambi dan 1 rumah sakit berada di Kabupaten Bungo. Kedepan rumah sakit-rumah sakit ini harus didorong untuk meningkatkan akreditasinya sehingga pelayanan FKRTL merata di seluruh kabupaten/kota.

2.3.1.1.2.6 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Jumlah dan rasio dokter di Provinsi Jambi dapat dilihat pada data berikut ini.

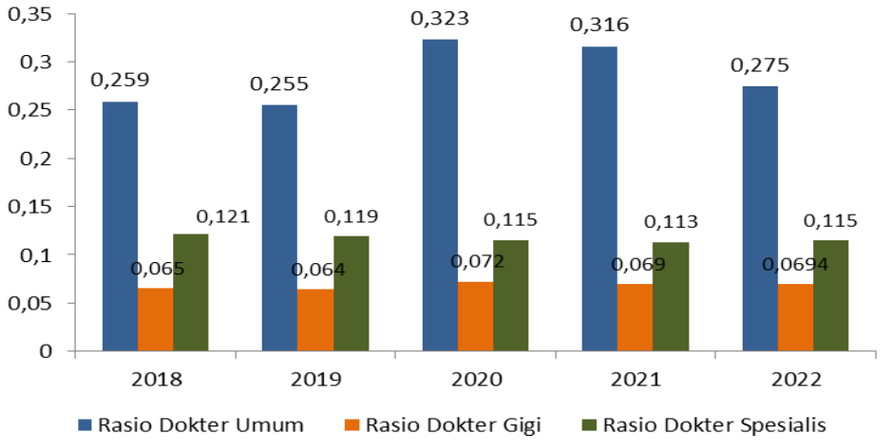

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-33 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2018-2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2019-2024, ketersediaan dokter spesialis diharapkan dapat mencapai 11 per 100.000 penduduk, dokter umum 45 per 100.000 penduduk dan dokter gigi sebanyak 13 per 100.000 penduduk. Sementara untuk tahun 2025 diharapkan ketersediaan dokter spesialis dapat mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 50 per 100.000 penduduk, dan dokter gigi sebanyak 14 per 100.000 penduduk.

Jika dikonversikan, rasio dokter umum per 100.000 penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 sebesar 27,50 orang dokter umum, sementara untuk rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah sebesar 6,94 orang dokter gigi. Untuk rasio dokter spesialis sebesar 11,50 orang per 100.000 penduduk Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan standar ketersediaan tenaga medis terutama dokter, maka baik untuk dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dari sisi jumlah belum memenuhi target. Untuk itu, ke depan perlu diprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dokter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, terutama untuk daerah-daerah terpencil.

2.3.1.1.2.7 Rasio Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga medis, perawat dan bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, teknisi

medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Jambi berfluktuasi dengan rasio yang masih belum ideal. Hal ini berpengaruh terhadap sebaran tenaga kesehatan itu sendiri, terutama pada puskesmas-puskesmas yang merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dimana masih cukup banyak puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan terutama pada wilayah-wilayah yang sulit akses transportasinya.

Tabel 2-26 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Medis	1.665	1.136	1.958	1.785	1.947
Rasio Tenaga Medis	0,466	0,031	0,055	0,498	0,536
Perawat dan Bidan	11.601	11.087	14.394	14.869	15.187
Rasio Perawat dan Bidan	3,249	3,059	4,057	4,147	4,182
Tenaga Farmasi	930	555	1.207	1.388	1458
Rasio Tenaga Farmasi	0,260	0,153	0,340	0,387	0,402
Ahli Gizi	285	220	433	477	502
Rasio Ahli Gizi	0,080	0,061	0,122	0,133	0,138
Teknisi Labor Medis	433	N/A	633	633	628
Rasio Teknisi Labor Medis	0,121	N/A	0,315	0,177	0,173
Tenaga Kesehatan Lingkungan	300	N/A	434	452	481
Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan	0,084	N/A	0,122	0,126	0,132

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

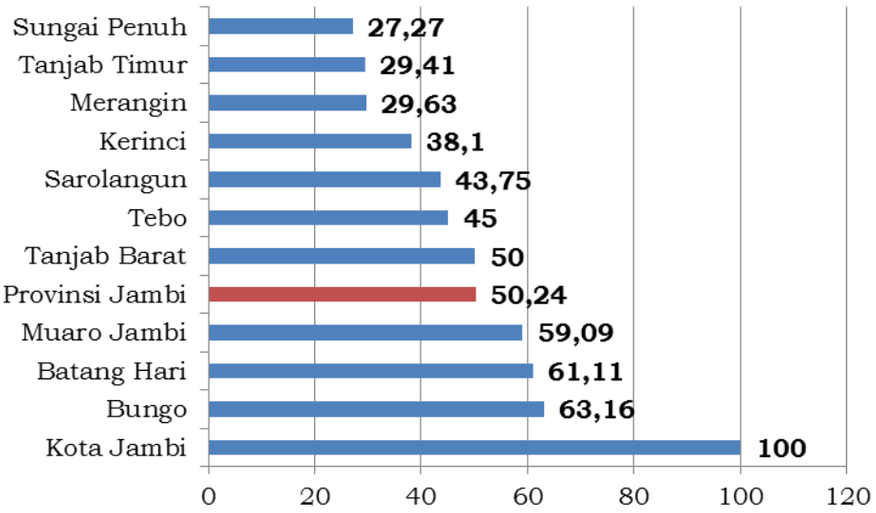

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jambi 2022, 2023

Gambar 2-34 Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga kesehatan di Provinsi Jambi

2.3.1.1.2.8 Jumlah Orang/Persen Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui PBI

Tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Peserta PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan gambaran kepesertaan di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-27 Persentase Kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016 -2020				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	67,53	73,60	70,75	74,41	70,75
2	MERANGIN	46,75	53,25	60,27	63,25	60,27
3	SAROLANGUN	60,07	72,36	77,03	78,42	86,80
4	BATANGHARI	80,73	91,51	83,79	85,46	92,63
5	MUARO JAMBI	58,64	62,13	69,01	70,07	69,27
6	TANJAB TIMUR	55,69	67,53	67,23	68,09	73,86
7	TANJAB BARAT	56,64	64,56	70,85	72,90	80,21
8	TEBO	42,60	47,05	53,71	56,80	63,41
9	BUNGO	52,57	60,79	62,31	65,62	72,52
10	KOTA JAMBI	96,24	97,13	95,53	98,53	102.04
11	SUNGAI PENUH	73,01	111,75	97,65	97,06	98,92
12	PROVINSI	63,85	71,02	73,39	76,16	80,58

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2022 kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi mencapai 80,58 persen, dengan persentase capaian tertinggi berada pada Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan cakupan terendah berada pada Kabupaten Tebo, yang baru mencapai 63,41 persen. Oleh karena itu kedepan perlu upaya khusus untuk mendorong kabupaten/kabupaten lainnya untuk mencapai target cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* di Provinsi Jambi.

2.3.1.1.2.9 Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi

Terdapat dua Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kedua SPM tersebut telah mencapai 100 persen pada tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2-28 Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				98.15 %
1 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**				96.66 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*68,554*	*68,554*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.66 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	83.29 %
		-1	**-2**	**-3**	
	1 . Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	87,4	28,781	**58,619**	**32.93 %**
	2 . Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	2,742	2,742	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)	42,476,526	50	**42,476,476**	**0.00 %**
	4 . Dokter	3	3	**0**	**100.00 %**
	5 . Perawat	9	9	**0**	**100.00 %**
	6 . Bidan	9	9	**0**	**100.00 %**
	7 . Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	10	10	**0**	**100.00 %**
	8 . Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	3	3	**0**	**100.00 %**
	9 . Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	3	3	**0**	**100.00 %**
	10 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	3	3	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**42,566,708**	**31,613**	**42,535,095**	**832.93 %**
2 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**				99.64 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	*24,743*	*24,743*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**19.64 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	98.21 %
		-1	**-2**	**-3**	
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	10	10	**0**	**100.00 %**
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	9,75	9,75	**0**	**100.00 %**
	3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	5	5	**0**	**100.00 %**
	4 . Tempat sampah biologis	100	100	**0**	**100.00 %**
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	5	5	**0**	**100.00 %**
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	200	200	**0**	**100.00 %**
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	3	3	**0**	**100.00 %**
	8 . Dokter	3	3	**0**	**100.00 %**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	4	3	**1**	**75.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	2	2	**0**	**100.00 %**
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	2	2	**0**	**100.00 %**
	12 . Tenaga Laboratorium	4	4	**0**	**100.00 %**
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	2	2	**0**	**100.00 %**
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	2	2	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**25,077**	**25,076**	**1**	**1,375.00 %**

Sumber : Biro Pemotda Setda Provinsi Jambi 2023

2.3.1.1.3 Sosial

Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Konsep PMKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, meliputi: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;korban bencana; dan/ataukorban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dari seluruh PMKS yang terdata di Provinsi Jambi, jumlah terbesar adalah pada kelompok fakir miskin diikuti oleh kelompok lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Fakir miskin masih mendominasi dengan jumlah terbesar dan memiliki kecenderungan meningkat terutama seiring dengan peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2-29 Kondisi Eksisting PMKS di Provinsi Jambi

NO	JENIS PMKS	TOTAL PMKS		
		LK	PR	JML
1	Anak balita terlantar	26	19	45
2	Anak terlantar	11.247	10.191	21.438
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	90	40	130
4	Anak jalanan	68	32	100
5	Anak dengan Kedisabilatasan (Adk)	621	639	1.260
6	Anak yang menjadi korban	60	35	95

NO	JENIS PMKS	TOTAL PMKS		
		LK	PR	JML
	tindak kekerasan/ diperlakukan salah			
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	51	46	97
8	Lanjut usia terlantar	10.251	9.868	20.119
9	Penyandang disabilitas	4.339	2.996	7.335
10	Tuna susila	327	352	679
11	Gelandangan	14	8	22
12	Pengemis	37	37	74
13	Pemulung	48	32	80
14	Kelompok minoritas	16	10	26
15	Eks warga binaan lembaga pemasyarakatan	471	10	481
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.316	524	1.840
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	389	238	627
18	Korban trafficking	2	0	2
19	Korban tindak kekerasan	8	9	17
20	Pekerja migran bermasalah sosial	2	71	73
21	Korban bencana alam	876	495	1.371
22	Korban bencana sosial	750	385	1.135
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	135	3.419	3.554
24	Fakir miskin	141.791	99.341	241.132
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	38	86	86
26	Komunitas adat terpencil	3.035	3.769	3.769
JUMLAH		176.008	132.652	308.660

Sumber: Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, 2023

Bila dikaitkan dengan Program Penanganan PMKS secara umum ataupun program-program lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, program –program tersebut belum efektif atau belum dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat secara layak, sehingga dibutuhkan metode penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif**,** meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.3.1.1.3.1 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi

SPM Bidang sosial Provinsi Jambi terus diupayakan pemenuhannya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Provinsi.

Hingga tahun 2020, tinggal satu jenis pelayanan yang belum terpenuhi, yaitu Rehabiltasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana yang tersedia serta keterbatasan sumberdaya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Kedepan keterbatasan tersebut perlu dicarikan solusinya sehingga Provinsi Jambi dapat memenuhi seluruh SPM bidang sosial yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2-30 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				79.82 %
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**				93.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	*125*	*125*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**13.33 %**
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	66.67 %
		-1	**-2**	**-3**	
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	**0**	**0%**
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan sandang	125	125	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	2	2	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	**0**	**0%**
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	**0**	**0%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	dan merujuk ke Panti Masyarakat				
	7 . Penyediaan alat bantu	173	173	**0**	**100.00 %**
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	125	125	**0**	**100.00 %**
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	125	125	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	125	125	**0**	**100.00 %**
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	5	5	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	15	**0**	**100.00 %**
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	7	**0**	**100.00 %**
	14 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	0	**0**	**0%**
	15 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	1	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**703**	**703**	**0**	**1,000.00 %**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti**				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*25*	*25*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan -1	**Jumlah warga negara yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	100.00 %
	1 . Pengasuhan	25	25	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	1	1	**0**	**100.00 %**
	3 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	1	1	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan sandang	25	25	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nemiliki Panti Anak	8	8	**0**	**100.00 %**
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum	1	1	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	memiliki Panti Anak				
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	25	25	**0**	**100.00 %**
	9 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	25	25	**0**	**100.00 %**
	10 . Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	5	5	**0**	**100.00 %**
	11 . Akses ke layanan pendidikan	25	25	**0**	**100.00 %**
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	25	25	**0**	**100.00 %**
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25	25	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**216**	**216**	**0**	**1,300.00 %**
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**				81.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**64.44 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*72*	*58*	**14**	**81%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.76 %**
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan -1	**Jumlah warga negara yang terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	83.79 %
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	72	72	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan sandang	72	72	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	**0**	**100.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	6 . Penyediaan alat bantu	5	5	**0**	**100.00 %**
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	1	1	**0**	**100.00 %**
	8 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	**0**	**100.00 %**
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	72	72	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	72	72	**0**	**100.00 %**
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	7	7	**0**	**100.00 %**
	12 . Akses ke layanan kesehatan dasar	72	72	**0**	**100.00 %**
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	**0**	**100.00 %**
	14 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	0	0	**0**	**0%**
	15 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	**0**	**100.00 %**
	16 . Pemulasaraan	25	23	**2**	**92.00 %**
	17 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	**0**	**100.00 %**
	18 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	**0**	**0%**
	19 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	72	72	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**499**	**497**	**2**	**1,592.00 %**
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**				92.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	*3*	*3*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.31 %**
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	61.54 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
		layanan			
		-1	**-2**	**-3**	
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	3	3	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan sandang	3	3	**0**	**100.00 %**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1	1	**0**	**100.00 %**
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	**0**	**0%**
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	**0**	**0%**
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	3	3	**0**	**100.00 %**
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	3	3	**0**	**100.00 %**
	9 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	3	3	**0**	**100.00 %**
	10 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	3	3	**0**	**100.00 %**
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	**0**	**0%**
	12 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	**0**	**0%**
	13 . Pemulangan ke daerah asal	1	1	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**20**	**20**	**0**	**800.00 %**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**				32.23 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**12.23 %**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*6,892*	*1,054*	**5,838**	**15%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	100.00 %
		-1	**-2**	**-3**	
	1 . Penyediaan permakanan	930	930	**0**	**100.00 %**
	2 . Penyediaan sandang	50	50	**0**	**100.00 %**
	3 . Peyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	**0**	**100.00 %**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	6,892	6,892	**0**	**100.00 %**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	150	150	**0**	**100.00 %**
	JUMLAH	**8,025**	**8,025**	**0**	**500.00 %**

2.3.1.1.4 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik. Beberapa potensi konflik dan konflik yang terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik lahan, konflik sumberdaya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada Tahun 2021 merupakan

kondisi tahun 2020. Berdasarkan data IDI di bawah, terlihat bahwa capaian indeks cenderung meningkat. Capaian angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi yang terus membaik setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 tingkat demokrasi di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori "sedang".

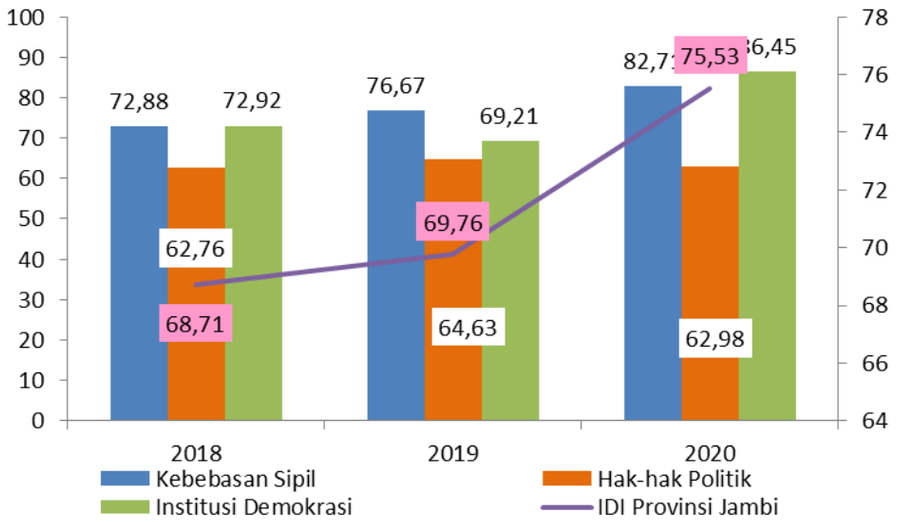

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-35 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari ketiga aspek IDI, hanya satu aspek mengalami penurunan dan dua aspek yang mengalami peningkatan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek lembaga demokrasi dan aspek kebebasan sipil, sedangkan hak-hak politik menurun mengalami penurunan.

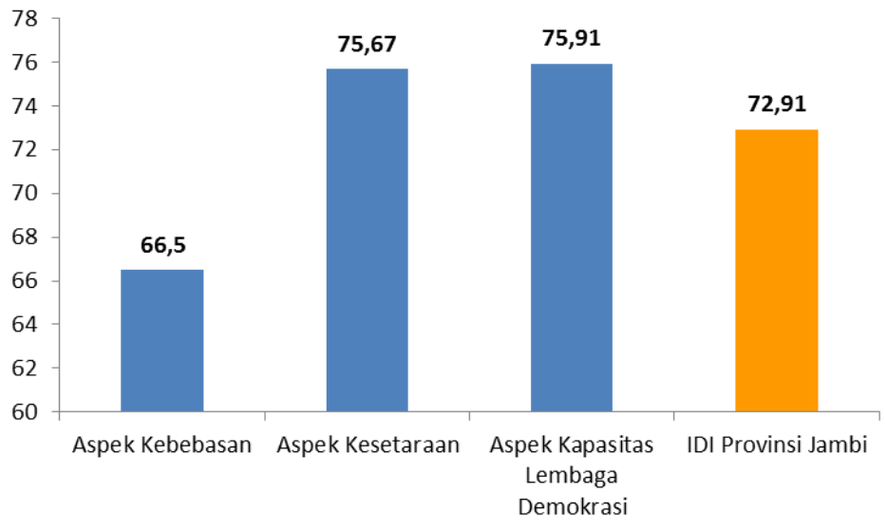

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2-36 Capaian Aspek IDI Tahun 2021 Provinsi Jambi

Selanjutnya, untuk IDI tahun 2021 menggunakan metode baru, mencapai angka **72,90** dalam skala 0 sampai dengan 100. Angka ini tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI sebelumnya mengingat baik secara teoritik, aspek, variabel, indikator, tahapan kerja, maupun sumber datanya sudah berbeda. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori "sedang". Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks < 60).

IDI Provinsi Jambi Tahun 2022 (kondisi tahun 2021) dengan menggunakan metode baru dibentuk oleh 22 indikator yang terbagi dalam tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan terdiri dari 7 indikator, Aspek Kesetaraan ada 7 indikator, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi disusun oleh 8 indikator. Pada Aspek Kebebasan tertinggi pada kategori sedang sebanyak 3 indikator. Aspek Kesetaraan masih terdapat satu indikator berkategori buruk. Adapun indikator dengan kategori baik tertinggi pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yaitu sebanyak 5 indikator.

Dari 22 indikator IDI, terdapat 10 indikator yang memiliki skor dengan kategori "baik" atau skor di atas 80, meliputi :

a. Indikator 1, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara;
b. Indikator 7, Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
c. Indikator 8, Kesetaraan Gender;
d. Indikator 9, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan;
e. Indikator 12, Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah;
f. Indikator 15, Kinerja Lembaga Legislatif;
g. Indikator 16, Kinerja Lembaga Yudikatif;
h. Indikator 17, Netralitas Penyelenggara Pemilu;
i. Indikator 20, Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah;
j. Indikator 21, Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik.

Terdapat 7 kinerja indikator demokrasi yang berkategori "sedang" (skor 60-80) di tahun 2021. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

a. Indikator 3, Terjaminnya kebebasan berkeyakinan;

b. Indikator 4, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
c. Indikator 6, Pemenuhan hak-hak pekerja
d. Indikator 10, Anti monopoli sumber daya ekonomi
e. Indikator 13, Akses masyarakat terhadap informasi publik
f. Indikator 14, Kesetaraan dalam pelayanan dasar
g. Indikator 19, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat 5 kinerja indikator demokrasi yang berkategori "buruk" (skor di bawah 60) di tahun 2021, yang perlu perhatian khusus. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

a. Indikator 2, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat;
b. Indikator 5, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu;
c. Indikator 11, Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial;
d. Indikator 18, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah;
e. Indikator 22, Pendidikan Politik pada kader partai politik.

Beberapa wilayah di Provinsi Jambi termasuk wilayah rawan terhadap bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat di desa/kelurahan tersebut memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana, mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Dari tahun 2016 hingga tahun 2022 telah terbentuk 100 Desa Tangguh Bencana.

Tabel 2-31 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jambi Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana
2016	38
2017	21
2018	18
2019	14
2020	3

Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana
2021	4
2022	2

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023

2.3.1.1.4.1 Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum

Jenis pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umun untuk provinsi adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi. Capaian SPM ini telah mencapai 100 persen pada Tahun 2023.

2.3.1.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Panjang jalan Provinsi Jambi tahun 2022 adalah 1.032,88 km dan belum termasuk panjang jalan nasional dan kabupaten/kota. Panjang jalan ini tidak berubah dibandingkan dengan panjang jalan tahun 2020. Jalan Provinsi Jambi didominasi dengan kondisi jalan yang beraspal sepanjang 823,047 km, sedangkan jalan yang tidak beraspal sepanjang 90,075 km. Kondisi jalan dengan kondisi baik sebesar 46,33 persen, kondisi sedang sebanyak 31,04 persen, sisanya berstatus rusak sebanyak 18,46 persen, dan rusak berat sebanyak 4,17 persen.

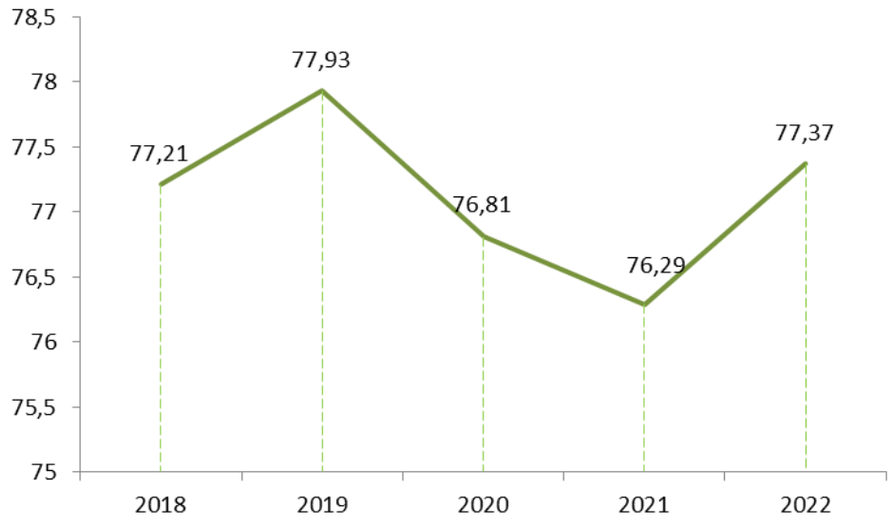

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2023

Gambar 2-37 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Sementara untuk luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2022 adalah DI Suban, DI Batang Ule. DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Penanganan Daerah Irigasi tahun 2018-2022 dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan rawa; pembangunan jaringan irigasi dengan fokus kegiatan pada penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air. Hasil pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut terlihat pada persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yang menunjukan tren perbaikan seperti terlihat pada gambar di bawah.

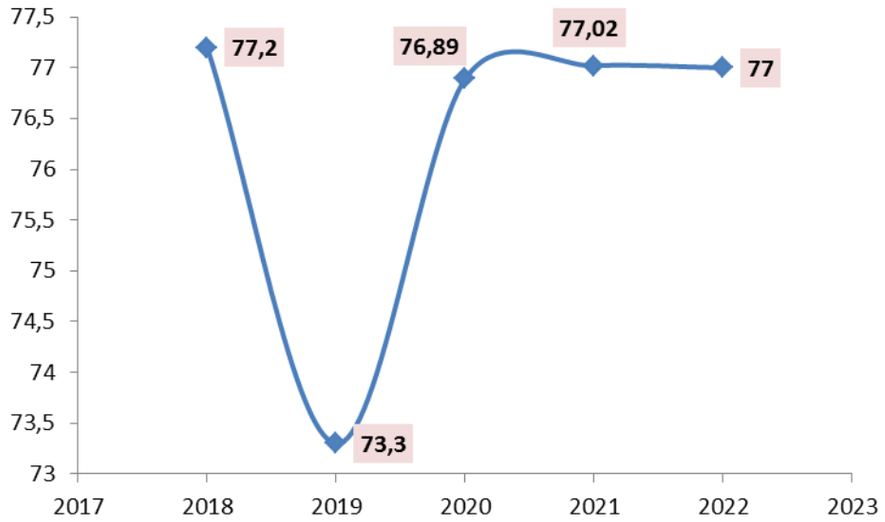

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-38 Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

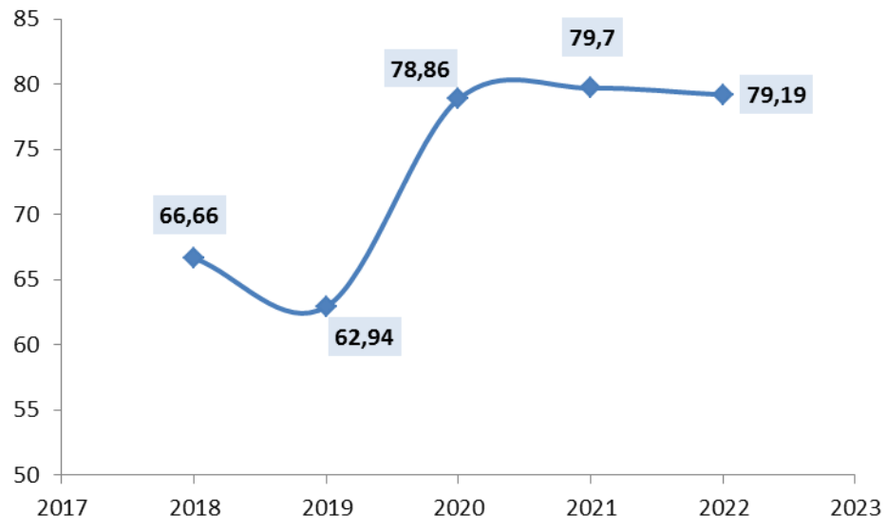

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2-39 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Selanjutnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yang merupakan target SDG'S Provinsi Jambi pada tahun 2022 terealisasi sebesar 79,19 persen. Capaian ini belum optimal karena beberapa faktor, diantaranya infrastruktur air minum berupa sambungan rumah yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal disisi lain *idle capacity* yang dimiliki masih sangat besar. Sehingga diperlukan upaya yang lebih fokus untuk mencapai target SDGs. Terkait dengan kewenangan, kedepan Pemerintah Provinsi Jambi harus mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk segera menyelesaikan infrastruktur ini.

2.3.1.1.5.1 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Menetri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat dua jenis layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Provinsi, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Sampai saat ini Provinsi Jambi belum memiliki SPAM dan SPALD regional sehingga belum dapat melaksanakan standar layanan ini.

2.3.1.1.6 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, tantangan yang dihadapi adalah akses terhadap hunian layak.

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal,akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi.

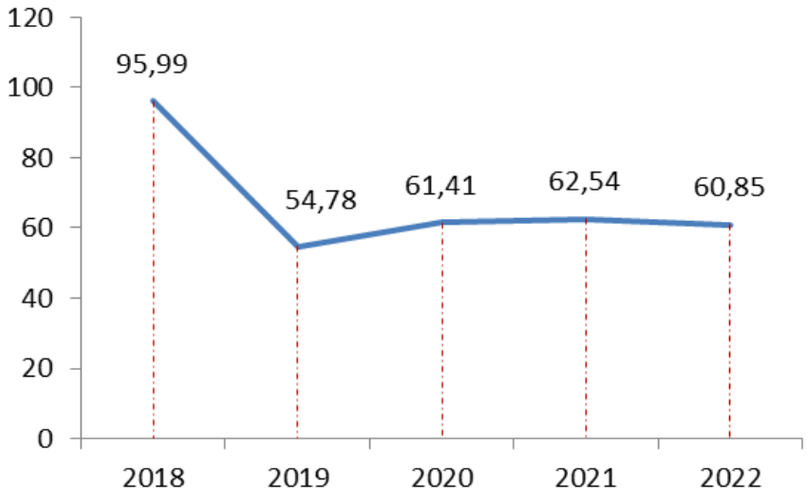

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-40 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2018-2022

Pada tahun 2018 rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses hunian layak sebesar 95,99 persen, ini merupakan hal yang baik, karena hampir keseluruhan rumah tangga memiliki akses hunian layak, tetapi pada tahun 2019 akses hunian layak bagi rumah tangga turun menjadi 54,78 persen, hingga tahun 2022 hanya mencapai 60,85 persen. Banyak hal yang menyebabkan turunnya akses hunian layak ini antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat, penyediaan sumber air yang aman, dan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, untuk itu ke depan diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, memperbanyak ketersediaan sumber air aman, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Gambar 2.41 menunjukkan bahwa sekitar 79,54 persen rumah tangga di Provinsi Jambi pada tahun 2022 memiliki akses ke sanitasi layak, mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya. Persentase rumah tangga di perkotaan dengan akses ke sanitasi layak lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di perdesaan.

Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain (contoh: memasak dan MCK). Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung.

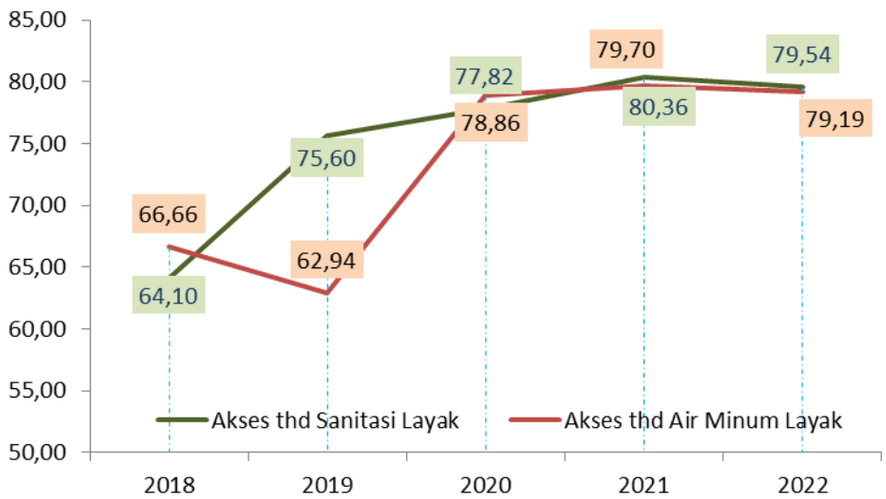

Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2023

Gambar 2-41 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Tabel 2-32 Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	Kota Jambi (2016)	Kawasan	Orang Kayo Hitam	10,06
			Pakuan Baru	13,93
			Murni	14,04
			Teluk Kenali	14,16
			Kenali Besar	13,64
			Jelmu	12,14
			Tengah	14,26
2	Tanjung Jabung Timur (2014)	Geragai	Pandan Jaya	10,93

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
3	Batanghari (2019)	Muara Bulian	Muara Bulian	11,07
		Muara Tembesi	Kampung Baru	10,51
4	Tebo (2019)	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	14,29
		Tebo Ulu	Pulau Temiang	13,5
5	Tanjung Jabung Barat (2017)	Bram Itam	Bram Itam Kiri	10,05
6	Sarolangun (2014)	Singkut	Sungai Benteng	11,12
		Pauh	Pauh	10,93
7	Kerinci (2014)	Siulak Mukai		12,19
8	M. Jambi (2021)	Kumpeh Ulu	Desa Pemunduran	10,34
TOTAL				207,16

Kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jambi berdasarkan SK kawasan kumuh Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan adalah seluas 1.355,64 Ha dengan kawasan terluas berada pada Kota Jambi yaitu seluas 689,1 Ha atau 50,8 persen dari total kawasan kumuh Provinsi Jambi. Sedangkan Kabupaten dengan kawasan kumuh terkecil adalah Kabupaten Bungo, yaitu seluas 17,47 Ha atau sebesar 1,3 persen dari total kawasan kumuh Provinsi Jambi. Namun total kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha adalah seluas 207,16 Ha.

2.3.1.1.6.1 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2-33 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%
2.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis layanan dasar yang belum tercapai adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya data perumahan yang akurat dan mutakhir serta ketergantungan daerah yang tinggi terhadap program rehabilitasi rumah dari pusat.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 43.680 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2022 adalah sebesar 67,8 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dibanding Agustus 2021 yang menunjukkan data sebesar 67,17 persen. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Namun, perlu dilakukan peningkatan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penumbuhan wirausaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada di masa yang akan datang.

Bila dilihat tren sektoral selama Agustus 2021 – Agustus 2022, hampir sektor mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (60.570 orang), industri pengolahan (11.320 orang), Pengangkutan dan pergudangan (5.240 orang). Sementara lapangan pekerjaan perdagangan besar turun sebesar 11.900 orang, pertambangan juga mengalami penurunan sebesar 7.500 orang, dan administrasi pemerintahan t5.980 orang.

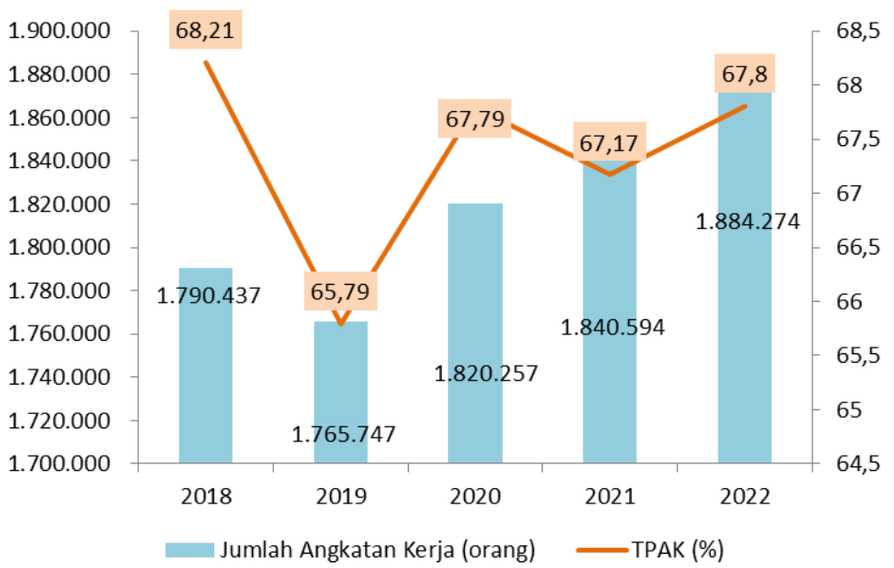

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-42 Perkembangan Jumlah angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD kebawah yaitu sebanyak 38,42 persen. Sementara penduduk yang pernah sekolah tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 11,75 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SMA dan SMP mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 0,67 poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMK, Universitas dan Diploma masing-masing turun 1,49 persen poin, 0,6 dan 0,42 persen poin.

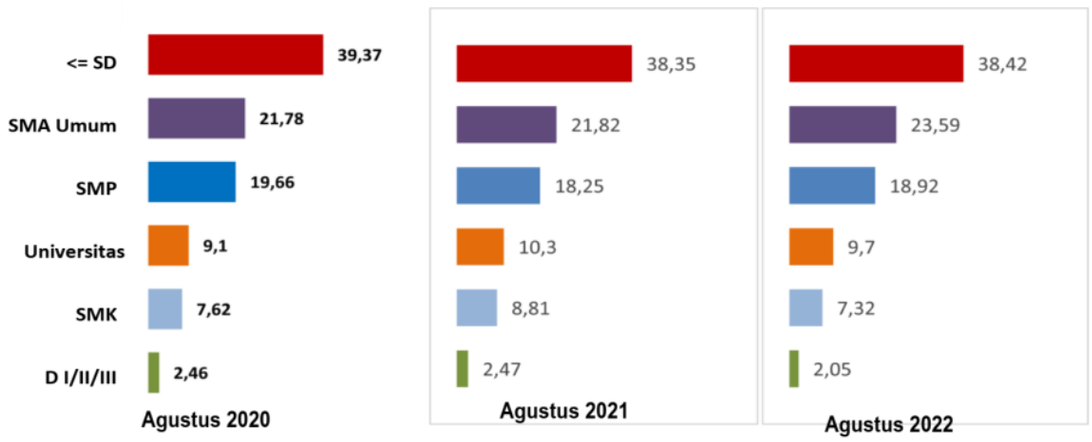

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-43 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2022

Untuk mendorong tingkat produktifitas, maka angkatan kerja perlu diarahkan kepada pendidikan kejuruan, sehingga angkatan kerja yang tamat SLTA sederajat akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

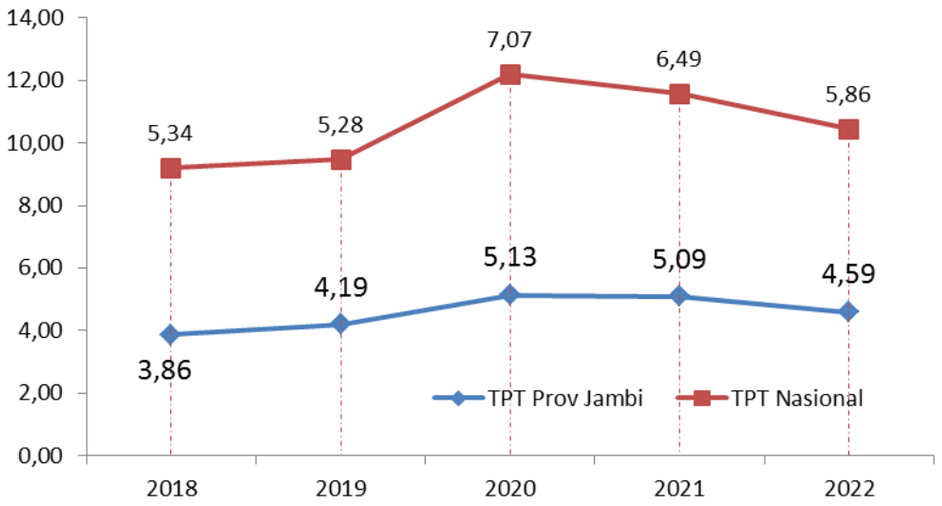

Sumber: BPS, 2031

Gambar 2-44 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2018 – 2022

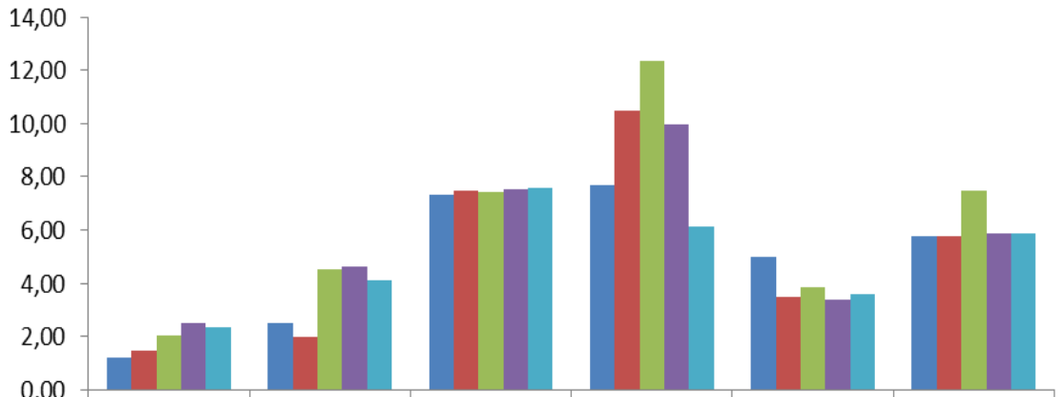

	≤ SD	SMP	SMA	SMK	Diploma I/II/III	Univ
2018	1,22	2,52	7,30	7,66	4,97	5,77
2019	1,47	2,00	7,49	10,49	3,51	5,79
2020	2,03	4,51	7,45	12,35	3,86	7,47
2021	2,52	4,63	7,55	9,95	3,39	5,88
2022	2,32	4,10	7,57	6,11	3,59	5,86

Sumber: BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-45 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2018 – 2022

Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi didominasi oleh penganggur dengan pendidikan SMK, meskipun setiap tahun semakin menurun, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan pendidikan SD kebawah. Untuk itu, ke depannya perlu dilakukan percepatan dalam mengatasi penganggur pada tingkat SMK dengan lebih banyak bekerja sama dengan dunia usaha dan industri,

sehingga penganggur dengan pendidikan SMK dapat lebih banyak terserap di pasar tenaga kerja.

Selanjutnya, pada tahun 2020, TPT Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,13 pada Agustus 2020 terutama akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan IV tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,703 ribu, terdapat 252,8 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 9,35 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 6,03 persen. Berkurangnya jam kerja merupakan dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 217,74 ribu orang terdampak. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 18,79 ribu orang atau sekitar 20 persen terhadap total penganggur (94 ribu orang) di Provinsi Jambi. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi yang masih tergolong rendah. Selain itu capaian yang berfluktuatif juga menunjukan bahwa Provinsi Jambi belum memiliki

pondasi yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pembangunan gender dan pemberdayaan gender.

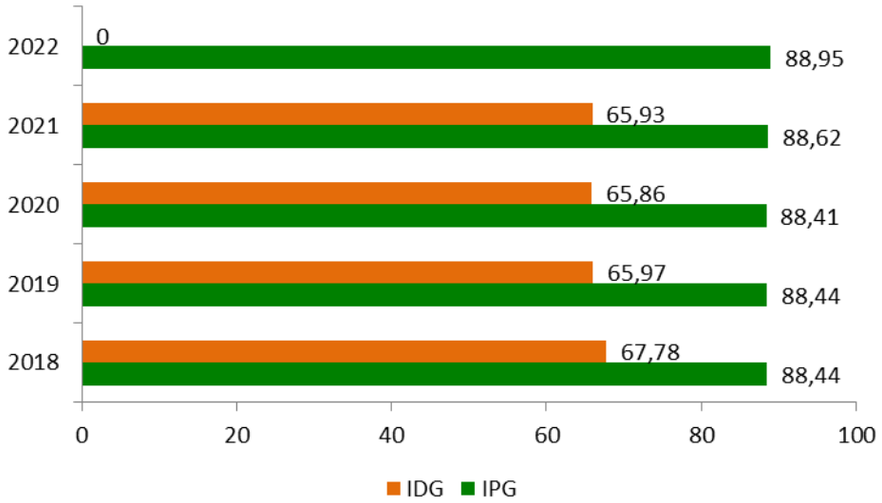

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-46 IDG dan IPG Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Disamping itu, partisipasi perempuan dalam legislatif pada tahun 2018-2022 juga masih rendah, kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini

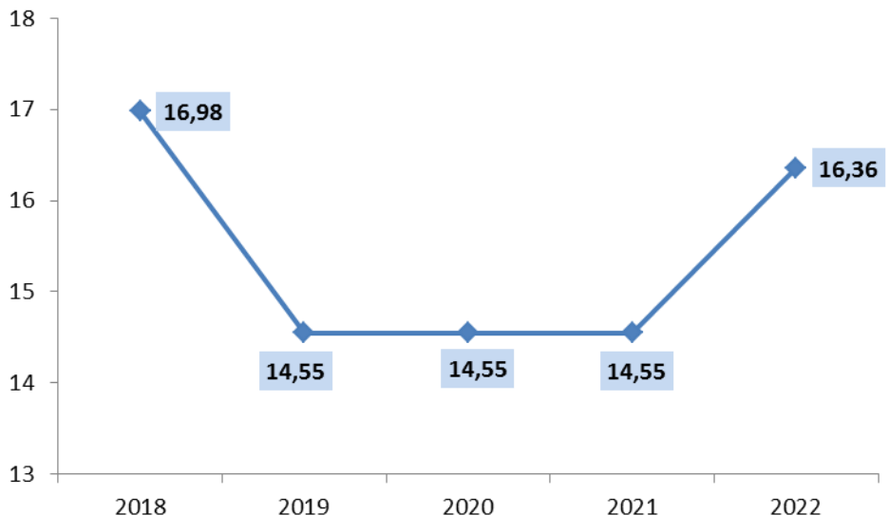

Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 2-47 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2018-2022

Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan

evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2022, terdapat 147 kasus yang tercatat, menurun signifikan dari tahun 2021 yang mencapai 667 kasus. Jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual, fisik dan psikis. Dari 667 kasus tersebut terdiri dari 82 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 65 kasus kekerasan terhadap anak.

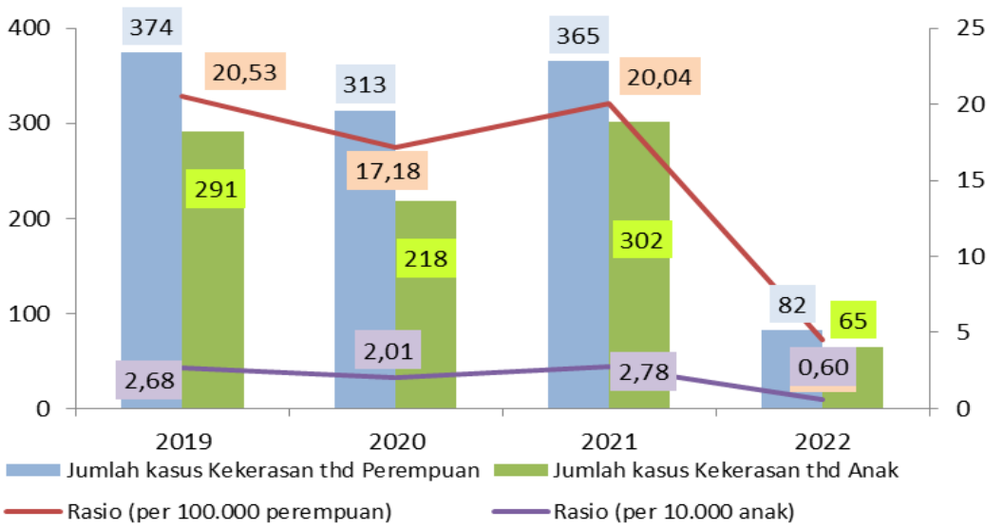

Sumber : Kementerian PPPA, 2023

Gambar 2-48 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.3.1.2.3 Pangan

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi tahun 2016-2019, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita telah melebihi angka kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 Kkal/kap/Hari.

Tabel 2-34 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)
1	2016	2.854
2	2017	3.425

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)
3	2018	3.134
4	2019	3.047
5	2020*	3.047

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi telah melebihi ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Di tahun 2020, komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah, sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Tabel 2-35 Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/kap/hari)
1	Padi-padian	1.520	1.200
2	Umbi-umbian	98	144
3	Pangan Hewani	183	288
4	Minyak dan Lemak	712	240
5	Buah Biji/Berminyak	208	72
6	Kacang-kacangan	56	120
7	Gula	141	120
8	Sayuran dan Buah	128	144
9	Lain-lain	-	72
	JUMLAH	**3.047**	**2.400**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan (data termutakhir), 2023

Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi dapat terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2017-2021 mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.

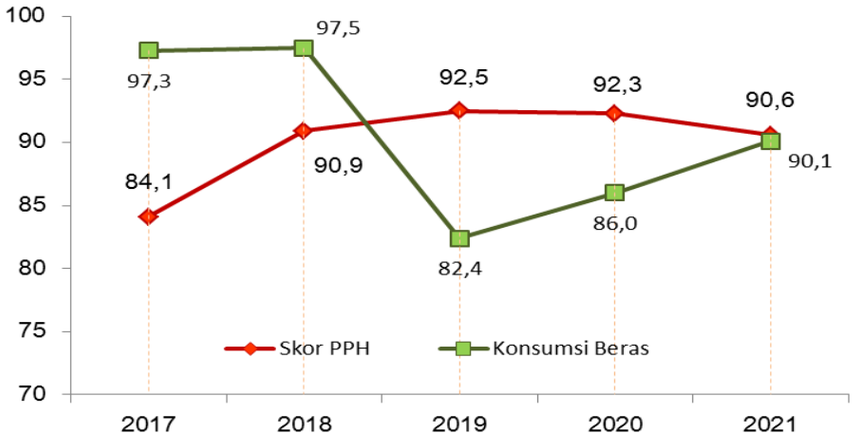

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Gambar 2-49 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021

2.3.1.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penataan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Jambi. untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini tanah serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kinerja urusan lingkungan hidup Provinsi Jambi dapat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkunga hidup secara nasional, dan merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Penghitungan IKLH sejak tahun 2015 telah menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan pada penghitungan IKLH tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan ini telah mempertimbangkan dinamika vegetasi setiap tahun, kondisi habitat, kondisi tutupan lahan di luar kawasan hutan, dan kondisi tutupan lahan di sempadan sungai. Untuk

tahun 2020, IKLH dihitung menggunakan 4 indikator yaitu indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

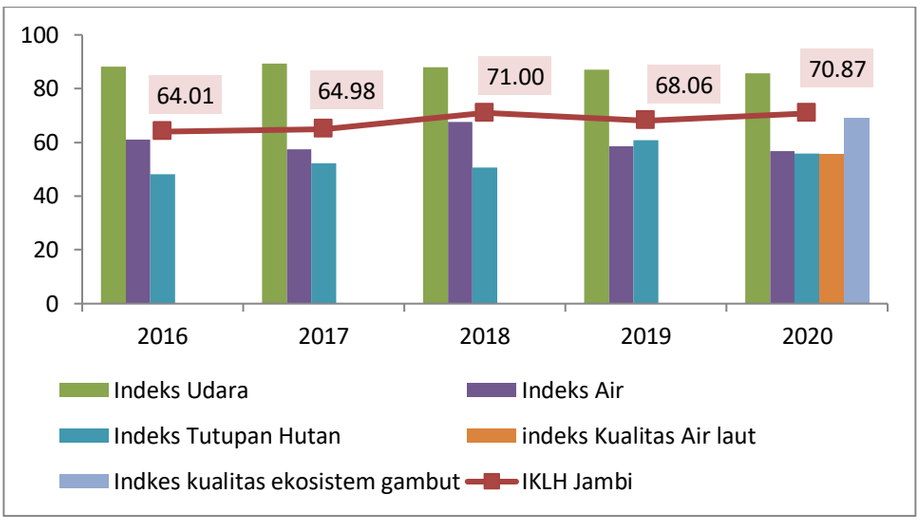

Sumber : Kemen.LHK, 2021

Gambar 2-50 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang waktu 2016 – 2020 selalu menunjukkan angka yang berfluktuasi. Ketiga indeks yang diukur sedikit mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan karena kebakaran lahan dan hutan cukup besar sehingga mempengaruhi kualitas udara dan aktivitas ekonomi penduduk Provinsi Jambi. Pada saat terjadi kabut asap tersebut, pemantauan terhadap parameter PM10 dilakukan dengan menggunakan alat AQMS (*air quality monitoring system*) mobile dari P3E Sumatera. Data PM10 tersebut kemudian dikonversikan ke ISPU sebagai bentuk informasi kualitas udara sesuai dengan KepMenLH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya-upaya perbaikan perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 cukup berat karena musim kemarau yang panjang.

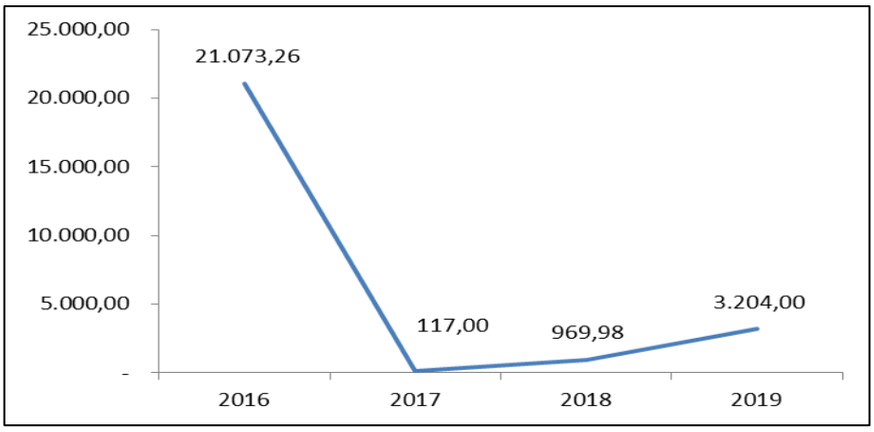

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-51 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019

Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen.

Sementara itu untuk pemnatauan kualitas air, secara berkala dilakukan sampling air sungai lintas kabupaten/kota Provinsi Jambi dengan lokasi sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 2-36 Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu ke Hilir)
1	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci
2	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin
3	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin
4	Batang Limun	Desa Pulau Pandan, Kab. Sarolangun
5	Batang Tembesi	Desa batu Kucing, Kab. Sarolangun
6	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang, Kab. Sarolangun
7	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang, Kabupaten Bungo
8	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo
9	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo
10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang, Kab. Tebo
11	Batang Tabir	Dusun Tuo Peninjauan, Kab. Batang Hari
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi, Kab. Batang Hari

Sumber: Dinas LH Prov. Jambi, 2021

Menurut PP No 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Saat ini kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan belum diberi izin dilakukan di Provinsi Jambi, sehingga harus dibawa ke perusahaan jasa pengolahan yang berada di Pulau Jawa. Untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, KLHK telah memberi izin 5 perusahaan jasa pengelola LB3 di Provinsi Jambi (3 perusahaan transporter dan 2 perusahaan pengumpul), sedangkan kegiatan pengurangan dan penyimpanan (sementara) diwajibkan kepada sumber penghasil LB3 tersebut.

Penanganan limbah medis khususnya Covid-19 menjadi sorotan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Arahan KLHK untuk penanganan limbah medis dan limbah Covid-19 menekankan agar limbah tersebut dikurangi dan dikelola semaksimal mungkin di sumber penghasil (PermenLHK Nomor 56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasyankes). Berdasarkan data yang dikumpulkan DLH Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, timbulan limbah medis pada tahun 2019, serta estimasinya pada tahun 2020 (dengan mempertimbangkan peningkatan limbah medis covid-19) adalah sebagai berikut:

Tabel 2-37 Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020 di Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Tahun 2019			Tahun 2020		
		LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari	LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari
1	Kota Jambi	645,15	591,60	1.236,75	1.290,30	1.183,20	2.473,50
2	Tebo	42,00	177,50	219,50	84,00	355,00	439,00
3	Sarolangun	69,00	291,20	360,20	138,00	582,40	720,40
4	Batang Hari	33,20	554,40	587,60	66,40	1.108,80	1.175,20
5	Muaro Jambi	92,40	333,00	425,40	184,80	666,00	850,80
6	Tanjung Jabung Barat	35,00	695,50	730,50	70,00	1.391,00	1.461,00
7	Tanjung Jabung Timur	44,00	166,00	210,00	88,00	332,00	420,00
8	Merangin	126,00	335,00	461,00	252,00	670,00	922,00
9	Bungo	145,30	238,00	383,30	290,60	476,00	766,60
10	Kerinci	25,00	45,00	70,00	50,00	90,00	140,00
11	Sungai Penuh	12,00	22,00	34,00	24,00	44,00	68,00
	TOTAL SUMBER	1.269,05	3.449,20	**4.718,25**	2.538,10	6.898,40	**9.436,50**

Sumber: Dinas LH Provinsi Jambi, 2021

Selain limbah yang dihasilkan di RS dan Fasyankes, limbah Covid-19 yang dihasilkan di tempat-tempat pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri tidak terpantau dan tidak dikelola sebagaimana mestinya sesuai SE

MENLHK No. 02/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19, Surat MENLHK No. 167 tahun 2020 perihal Pengelolaan LB3 Medis pada Fasyankes Darurat Covid-19, dan Surat Dirjen PSLB3 No. 194 Tahun 2020 terkait Penanganan Limbah Infeksius Covid.Pendataan limbah medis di klinik dokter atau bidan juga belum terdata sehingga dapat dikatakan potensi limbah medis jauh di atas angka tertera pada tabel di atas.

Potensi timbunan sampah Provinsi Jambi mencapai 1.746 ton per hari sehingga Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam kebijakan strategi pengelolaan sampah daerah (Jakstrada) sebanyak 173,2 ton per hari. Timbunan sampah yang cukup besar tersebut akibat dari pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2020 sekitar 1,34 persen per tahun, sehingga berimplikasi pada peningkatan timbulan sampah di masing-masing daerah. Provinsi Jambi memiliki 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimanfaatkan oleh 11 kabupaten dan kota, yaitu lima unit TPA *control landfill*, tiga unit TPA *sanitary land fill*, dan dua unit TPA *open dumping*. Timbunan sampah terbesar dihasilkan oleh Kota Jambi sekitar 418,91 ton per hari. Pada 11 kabupaten dan kota di Jambi telah dibentuk 51 unit bank sampah dan 14 tempat pengelolaan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R). Pemanfaatan bank sampah dan TPS 3R tersebut dapat mendukung capaian target Jakstrada Provinsi Jambi, khususnya pengurangan sampah. Selain itu pemanfaatan bank sampah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah sebagai tindak lanjut upaya pengurangan sampah di daerah.

2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase penduduk berumur 17 tahun keatas yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Provinsi Jambi pada tahun 2020 meningkat signifikan dibanding tahun 2016, dari 79,13 persen menjadi 100 persen di tahun 2020. Demikian pula pada kepemilikan akte kelahiran dibandingkan jumlah penduduk telah memperlihatkan cakupan yang baik, dimana sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 94 persen, dari sebelumnya pada tahun 2016 baru mencapai 31,79 persen. Kepemilikan akta nikah juga telah mencapai 100 persen pada tahun 2020. Capaian pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ini harus dipertahankan terus mengingat data kependudukan sangat penting dalam berbagai urusan yang lain.

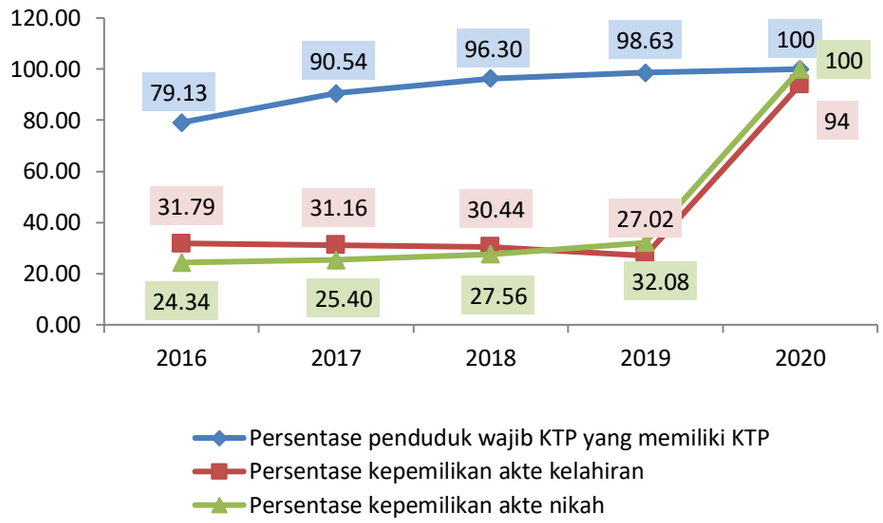

Sumber: Dinas Sosdukcapil Prov. Jambi, 2021

Gambar 2-52 Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan artinya memiliki atau mempunyai daya. Dengan demikian pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa/kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu masyarakat diharapkan mampu memetakan dan mengoptimalkan potensi diri dan lingkungannya, serta mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, salah kawasan perdesaan di Provinsi Jambi ditetapkan menjadi lokus prioritas KPPN. Kawasan perdesaan tersebut adalah Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi yang terletak pada Desa Penyengat Olak, Desa

Kademangan, Desa Senaung, Desa Setiris, Desa Mudung Darat dan Desa Danau Kedap. Desa-desa tersebut berada pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Maro Sebo. Dalam rangka pengembangan kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agribisnis ini, maka telah dibentuk Bumdes Rezeki Usaha Bersama sebagai lembaga yang didorong untuk mewujudkannya.

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Sebagaimana ketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

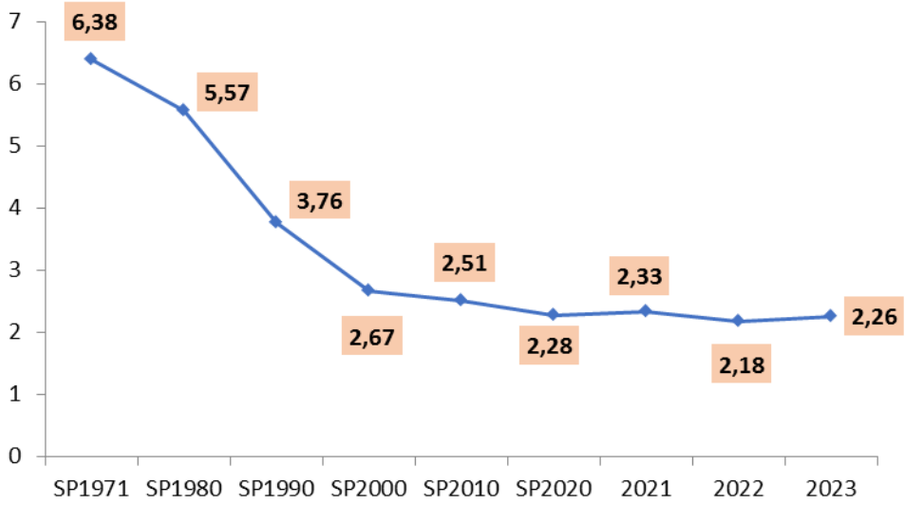

Sumber: Data SP, BPS, 2023 dan SDKIPBKI (2021-2023)
Gambar 2-53 Total Fertility Rate Provinsi Jambi

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi menunjukkan trend menurun hingga mencapai 2,28 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa rata-rata perempuan usia subur di Provinsi Jambi

memiliki anak lebih dari 2 orang. Salah satu pemicu peningkatan TFR ini adalah tren penurunan pemakaian kontrasepsi yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kedua hal ini patut diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masalah lainnya, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumberdaya manusia hingga daya saing.

2.3.1.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Jambi terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Jumlah mobil dan kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tentu saja berimplikasi terhadap kemacetan di berbagai wilayah terutama wilayah perkotaan. Untuk itu, perlu kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengurai kemacetan yang terjadi.

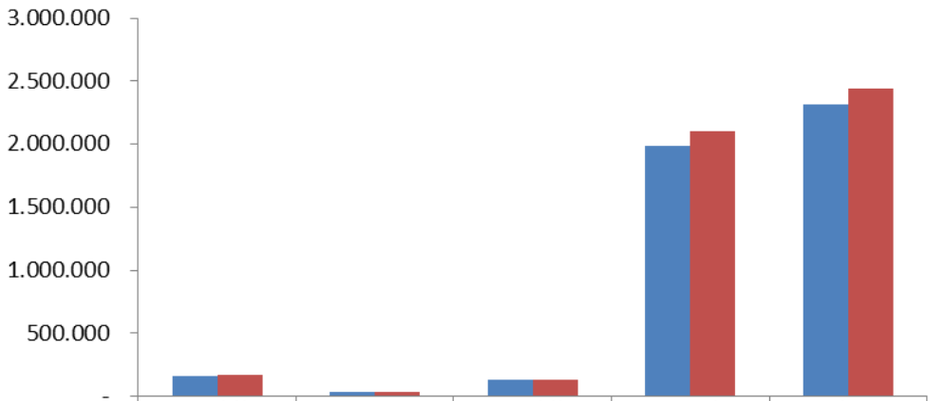

	Mobil Penumpang	Mobil Bis	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Bermotor
2020	162.107	35.001	130.604	1.991.271	2.318.983
2021	171.300	35.004	134.876	2.097.846	2.439.026

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-54 Jumlah arus penumpang pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Jambi

Moda transportasi udara memperlihatkan perkembangan yang kurang menggembirakan seiring dengan kenaikan harga tarif angkutan udara serta telah dibangunnya tol Palembang-Lampung, sehingga perubahan preferensi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi dalam pemilihan moda transportasi antar provinsi. Saat ini Provinsi telah memiliki 3 buah Bandara yaitu Bandara Sultan Thaha yang berada di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Pasir Mayang di Kabupaten Bungo. Pada Gambar di bawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui ketiga bandara tersebut,

dimana terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mulai terjadi peningkatan, namun di tahun 2021 mulai terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan adanya pengurangan armada pesawat udara ke Bandara Pasir Mayang Muaro Bungo serta perbaikan *runway* bandara Depati Parbo Kerinci. Untuk mengoptimalkan pelayanan ketiga bandara ini pemenuhan perlengkapan dan peralatan khususnya untuk membantu operasional bandara pada cuaca yang kurang baik perlu disediakan, seperti pada saat terjadi bencana asap dan lain-lain.

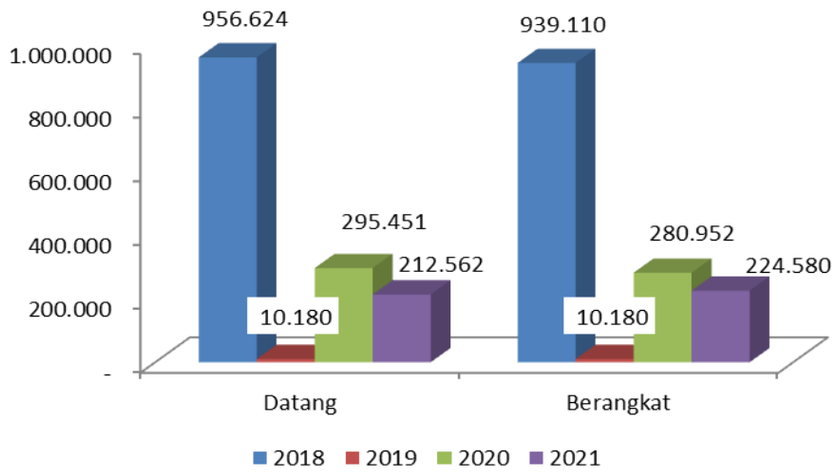

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-55 Perkembangan Lalu Lintas Penumpang Untuk Penerbangan Dalam Negeri di Provinsi Jambi (orang

Pada transportasi laut, saat ini Provinsi Jambi memiliki 12 buah pelabuhan laut dan kedepan akan mendorong program prioritas yang berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yaitu pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan utama. Jika dilihat dari alur lintasan barang dan orang yang melalui laut sesungguhnya memberikan pengaruh pada sektor perhubungan dan distribusi barang yang menghubungkan ke Pulau-pulau perbatasan dengan Provinsi Jambi. Untuk kebutuhan dasar adalah dominan dari produksi sumberdaya alam di Provinsi Jambi yang melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, pelabuhan Muara Sabak, dan pelabuhan-pelabuhan sungai lainnya.

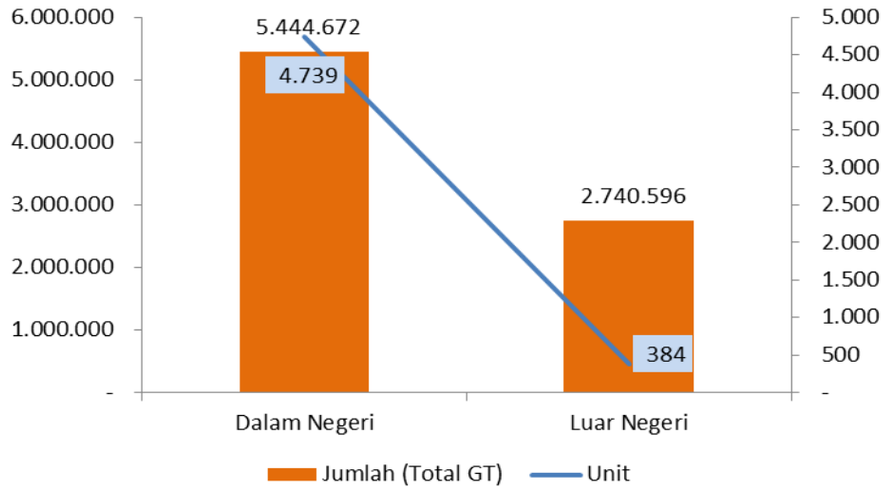

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-56 Kunjungan Kapal pelayaran Dalam dan Luar Negeri di Pelabuhan Provinsi Jambi Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, arus barang pelayaran dalam dan luar negeri baik bongkar dan muat di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori "sedang", dimana potensi untuk bongkar muat arus barang cukup baik. Namun masih diperlukan Pelabuhan yang lebih besar dan layak untuk pelayaran arus penumpang dan barang.

Oleh karena itu, sejak tahun 2012, Provinsi Jambi fokus untuk mendorong pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai outlet distribusi sumber daya alam yang nantinya diharapkan tidak hanya dari Provinsi Jambi, akan tetapi dari Provinsi lainnya yang berbatasan sehingga peran pelabuhan tidak hanya komoditas lokal saja.

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Terkait dengan pemanfaatan internet/intranet di seluruh perangkat daerah di Provinsi Jambi, saat ini seluruh perangkat daerah telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan Portal Intranet/Internet dengan bandwidth sebesar 200 Mbps. Selanjutnya juga dilakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk mengadakan transponder dengan

bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan program/kegiatan Provinsi sampai ke pelosok pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara trkoneksi dan terintegrasi melalui penayangan siaran TVRI Jambi dan dapat dipergunakan untuk siaran langsung setiap saat dari mana saja dengan hasil gambar dan suara yang baik.

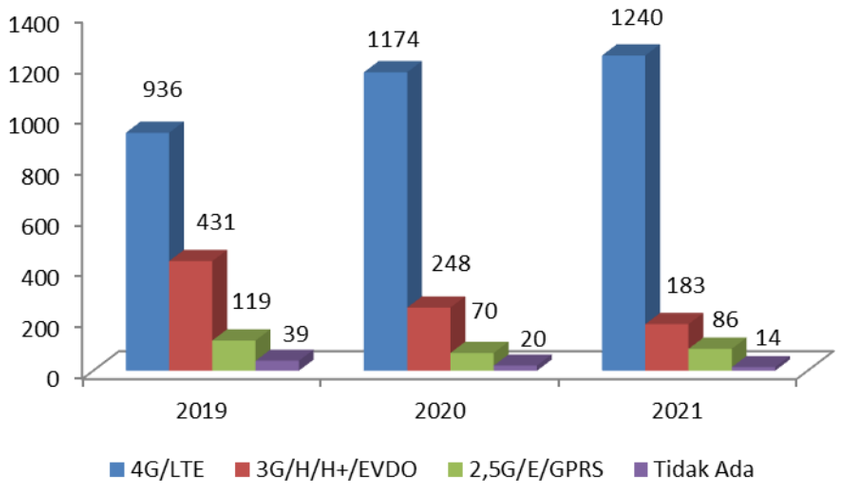

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-57 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021

Pada grafik di atas dapat dilihat perkembangan desa/kelurahan di Provinsi Jambi yang telah menerima sinyal internet telepon seluler, di mana pada tahun 2021 hampir seluruhnya yang menerima sinyal 4G/LTE yaitu sebanyak 1.240 desa/kelurahan, meningkat sebanyak 5,62 persen dibanding tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dapat diakses hingga ke desa-desa dan kelurahan.

2.3.1.2.11 Koperasi dan UKM

Ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian

ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.

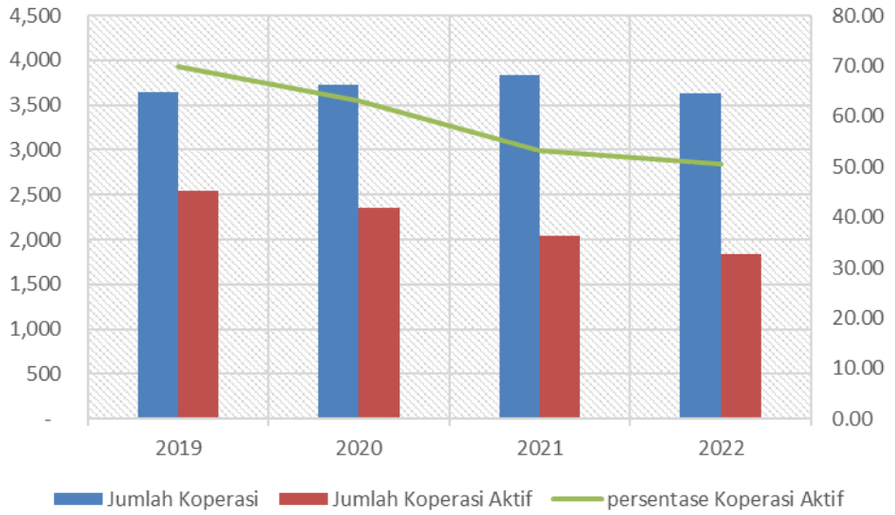

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2022

Gambar 2-58 Persentase Koperasi aktif di Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Pada periode tahun 2019-2022, jumlah lembaga koperasi mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 berjumlah 3.645 unit menjadi 3.629 unit pada tahun 2022. Demikian juga jumlah lembaga koperasi yang aktif mengalami penurunan yaitu dari 2.544 unit pada tahun 2019 menjadi 1.831 unit pada tahun 2022 atau mengalami rata-rata penurunan sebesar 10,96 persen per tahun.

Sementara itu, perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 14,23 persen dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu dari 104.155 unit pada tahun 2018 menjadi 184.042 unit di tahun 2022. Dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan menengah, usaha mikro memiliki jumlah yang terbanyak setiap tahunnya. Namun bila dilihat dari jumlahnya, maka terlihat bahwa jumlah terbesar adalah pada usaha mikro, dimana jumlahnya pada tahun 2018 sebanyak 90.345 unit dan meningkat rata-rata sebesar 15,84 persen per tahun menjadi 171.852 unit. Untuk Usaha Skala Kecil justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,76 persen, sementara untuk Usaha Skala Menengah meskipun jumlahnya paling sedikit, namun ampu tumbuh positif dari 908 unit di tahun 2018 menjadi 2.341 unit di tahun 2022.

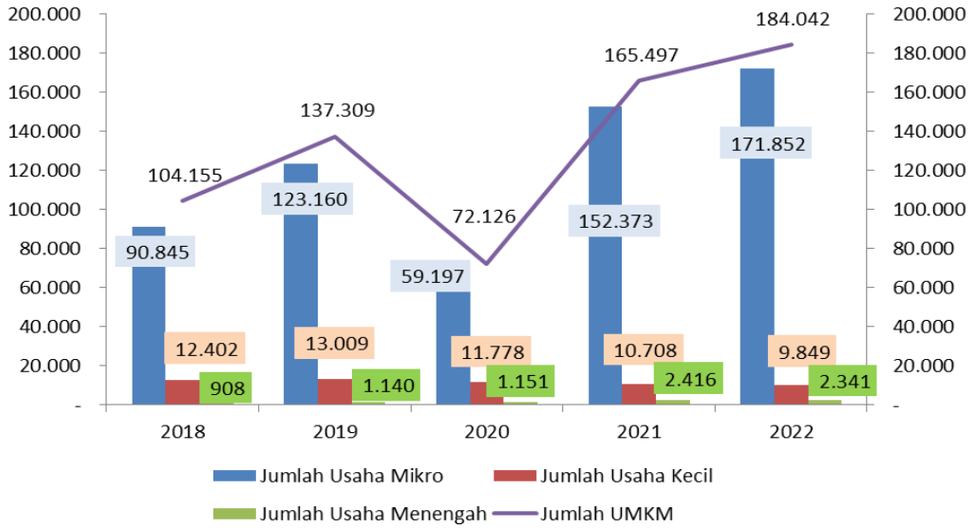

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-59 Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Selain peningkatan jumlah UMKM, pada periode yang sama terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 184.124 orang pada tahun 2018, bertambah menjadi 370.831 orang pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 sudah mulai membaik. Berarti penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 17,50 persen. Hal ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja akibat peningkatan jumlah UMKM tersebut.

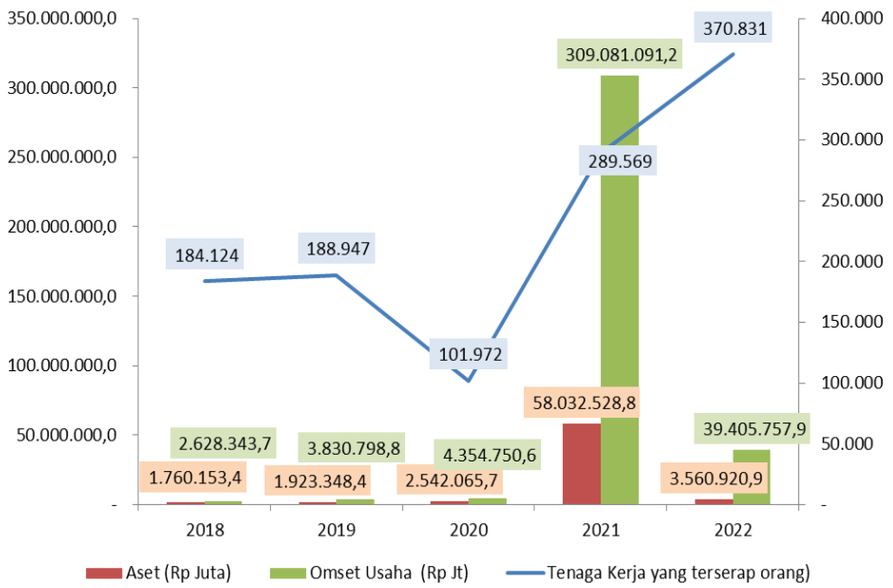

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-60 Perkembangan Tenaga Kerja, Aset dan Omset Usaha UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Pada periode tahun 2016-2021, Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) DI Provinsi Jambi memperlihatkan tren penurunan dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,77 persen.. Peningkatan PMDN tercatat pada tahun 2017, dan turun signifikan di tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya menperlihatkan tren peningkatan, namun tidak terlalu signifikan dibandingkan penurunan yang telah terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA). Yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,88 persen.

Pada tahun 2022, perkembangan realisasi penamanan modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan, meskipun nilainya pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Namun sebaliknya terjadi pada realisasi penanaman modal asing, bila dilihat pada periode tahun 2018-2022 mengalami penurunan, dimana realisasi tahun 2022 sebesar Rp39.202,6 juta dari Rp101.872,3 Juta di tahun 2018, meskipun secara jumlah unit terjadi peningkatan.

Kinerja investasi PMDN pada tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan investasi pada beberapa sektor, diantaranya yaitu pengerjaan proyek PLTA Batang Merangin yang berkapasitas 350 Megawatt di Kabupaten Kerinci, serta proyek bendungan raksasa Sungai Merangin tepatnya di Simpang Parit di Kecamatan Sungai Manau yang menghabiskan anggaran hampir Rp5,5 Triliun dimana perkiraan anggaran awal sebelumnya sebesar Rp3,3 Triliun. Saat ini kegiatan proyek sudah menyelesaikan tahapan pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan dan terowongan dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang. Selain proyek PLTA, dilakukan juga persiapan pembangunan jalan rigid beton menuju Muara Sabak, pembangunan Rumah sakit Rapha Theresia yang sudah memasuki tahap akhir, serta mulai dilakukannya pengerjaan proyek jalan Simpang Pelawan – Batang, Simpang Pudak – Suak, dan Simpang Teluk Nilau – Senyerang yang ditargetkan selesai tahun 2024 mendatang dengan anggaran sebesar Rp 703,3 Milyar.

Untuk mempertahankan investasi yang sudah berjalan, mempercepat realisasi investasi yang sudah mendapat persetujuan, maka pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perusahaan PMA/PMDN serta menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi ada beberapa permasalahan/hambatan antara lain masih banyak pelaksanaan penyelesaian pelayanan perizinan yang melewati limit waktu

yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan : a) Permohonan yang disampaikan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; b) Tim Teknis dari Instansi teknis kadang belum siap dan masih diinstansinya; c) Pemohon kurang mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan; d) Sistem yang dilaksanakan untuk melayani perizinan sebahagian besar masih manual.

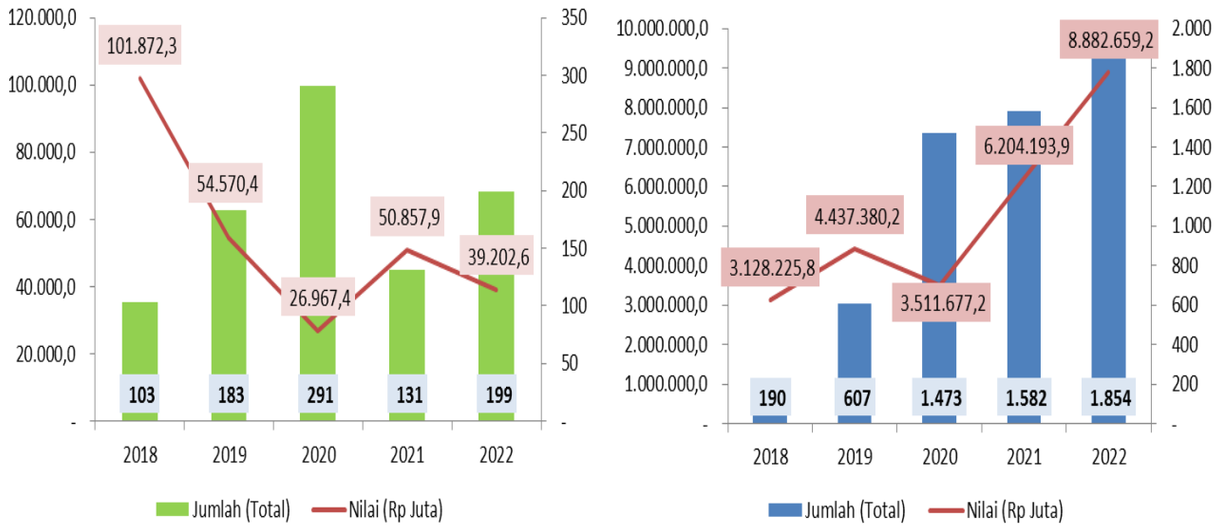

PMDN **PMA**

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-61 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Tahun 2018-2022

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka olahraga merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolahraga masih rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atltlit Provinsi jambi juga belum menggembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-38 Perkembangan Olahraga Provinsi JambiTahun 2018-2022

Nama Program	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Olahraga	44	44	44	44	44
Jumlah Gedung Olahraga	14	14	14	14	14
Jumlah cabor yang dibina di PPLPD	6	6	6	6	6
Jumlah atlet pelajar yang dibina di PPLPD	46	46	46	46	46

Sumber : Dispora, 2023

Tabel 2-39 OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2022

No	Bidang	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
1	Keagamaan	PW. Pemuda Muhammadiyah (PM)
		GP. Ansor
		DPD Angkatan Muda Indoneia (AMII)
		PW. Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)
2	Kebangsaan	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)
		KNPI
3	Kemahasiswaan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila(Satma-PP)
4	Kepartaian	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
		Pemuda Ka'bah
		BM PAN
5	Kekeluargaan	Forum Komunikasi Putra/putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)
6	kepanduan	Pramuka
		Hisbul Wathan

Sumber: Dispora, 2023

Pemuda merupakan komponen masyarakan yang memiliki peran strategis di dalam pembangunan daerah. Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi penduduk Provinsi Jambi di satu sisi merupakan kekuatan, namun di sisi lain juga dapat menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu ditempuh. Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai wadah dalam berhimpun dan menempa kemampuan dan keterampilan pemuda untuk itu perlu ditumbuhkembangkan.

2.3.1.2.14 Kebudayaan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 danNomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek-aspek:kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan;tradisi;kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;kepustakaan;kenaskahan;danperfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota selama ini telah dilaksanakan dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni budaya Melayu Jambi. Terdapat 12 agenda kegiatan yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Terkait dengan warisan budaya, penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini telah terdaftar di UNESCO untuk di ajukan sebagai sebagai salah satu Warisan Dunia. Selain itu ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu Jaringan Geopark Nasional oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang saat ini dalam proses pengajuan untuk menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO. Sementara itu di Provinsi Jambi masih terdapat sejumlah cagar budaya yang belum dilakukan proses penetapan. Aspek budaya daerah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tradisi yang masyarakat, lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dan dokumentasi sejarah daerah Provinsi Jambi, serta ragam bahasa daerah.

2.3.1.2.15 Perpustakaan

Pada tahun 2018-2021, jumlah anggota perpustakaan Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan ini disebabkan akibat pesatnya kemajuan internet sehingga mengurangi minat baca masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain perlu juga dievaluasi terkait dengan fasilitas, sarana prasarana dan sistem layanan perpustakaan, termasuk koleksi buku yang dibutuhkan pembaca. Kecenderungan penurunan jumlah anggota perpustakaan dipengaruhi oleh semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat tren minat baca yang mulai beralih ke digital, perpustakaan Provinsi Jambi sebaiknya mulai beralih secara perlahan menjadi perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan zaman.

Tabel 2-40 Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2018	8.971	255,57
2	2019	3.271	-63,54
3	2020	3.405	4,1
4	2021	2.975	-12,63

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2022

Di sisi lain, pada periode yang sama penurunan tidak terjadi pada jumlah pengunjung perpustakaan, meskipun berfluktuasi namun cenderung meningkat, yaitu dari 249.945 orang pengunjung di tahun 2016 menjadi 271.312 orang di tahun 2019. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang kurang memungkinkan bagi masyarakat berkunjung ke perpustakaan.

Tabel 2-41 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2016	249.945	-3,55
2	2017	260.100	4,06
3	2018	270.887	4,15
4	2019	271.312	0,16
5	2020	24.925	-90,81

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Tabel 2-42 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (buku)	Perkembangan (%)
1	2016	177.854 eks	534,94
2	2017	186.833 eks	5,05
3	2018	13.896 eks	-92,56
4	2019	157.366 eks	1032,46
5	2020	211.709 eks	2,03

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Jumlah koleksi buku perpustakaan Provinsi Jambi berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kurun tahun 2016-2019, yaitu dari 177.854 eksemplar pada tahun 2016 menjadi 157.366 eksemplar pada tahun 2019 yang disebabkan karena kondisi buku – buku yang mulai rusak.. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2020 Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah menambah koleksi hingga berjumlah 211.709 eks, atau meningkat 2,03 persen dibanding tahun 2019.

2.3.1.2.16 Kearsipan

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan.

Tabel 2-43 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pemberkasan arsip in-aktif	5.000 berkas pendataan/tata	1.500 berkas arsip in aktif		7.891 berkasmusnah
		700 berkas akuisisi	1.000 berkas usul musnah 3.501	nihil	15.765 arsip In-aktif
2	Penyusutan Arsip			6.901 berkas	7.891 berkasmusnah
				(7 OPD)	
3	Akuisisi			34 album	34 Album
				285 CD	285 CD
				5 profil dewan	5 Profil dewan
4	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	550 photo	200 photo		157 Photo
		4.267 lembar peta	250 peta		10.898 peta
		1.262 arsip buku	60 arsip buku		325 arsipbuku
		150 naskah dinas	154 naskah dinas	nihil	2.970 naskah kuno
5	Telaksananya pameran kearsipan	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan tahun 2018–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan

budidaya pada tahun 2018 sebesar 50.400,1 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 52.067 ton, namun kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.

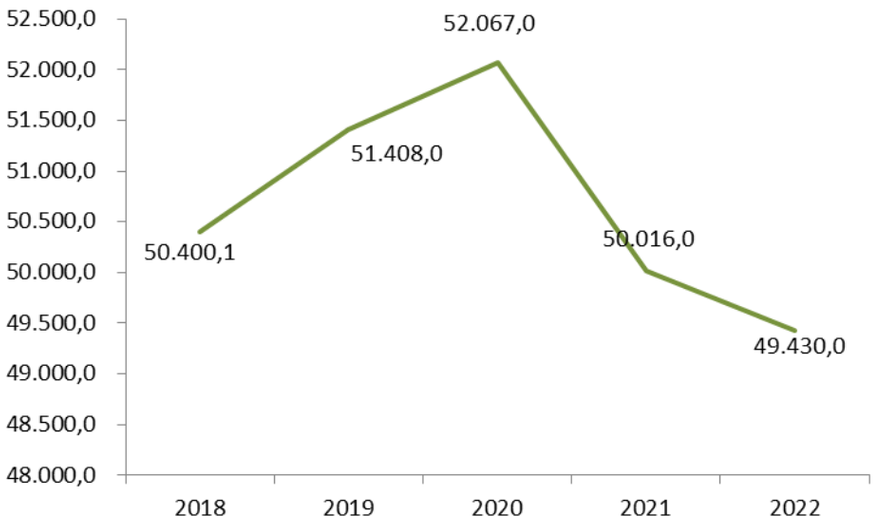

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-62 Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2018-2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 50.400,1 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut salah satunya akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

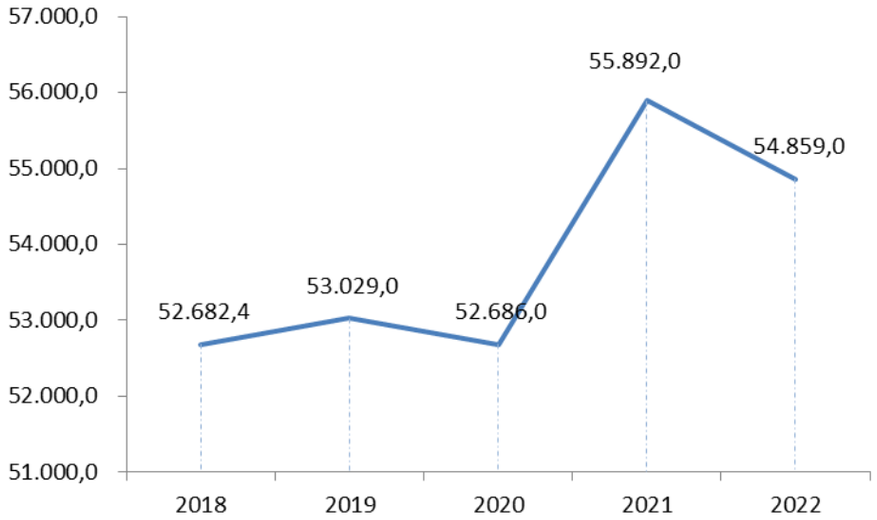

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-63 Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton) Tahun 2018-2022

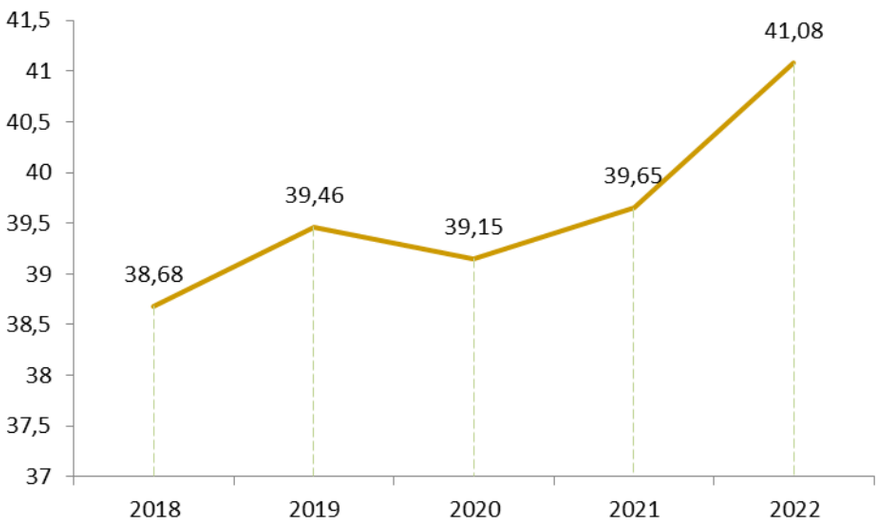

Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-64 Perkembangan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2022 mengalami kecenderungan meningkat. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.

2.3.2.2 Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan pariwisata dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Terkait dengan hal tersebut, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terlihat fluktuatif dengan kecenderungan menurun selama tahun 2018-2022. Terutama pada tahun 2020, dimana pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi.

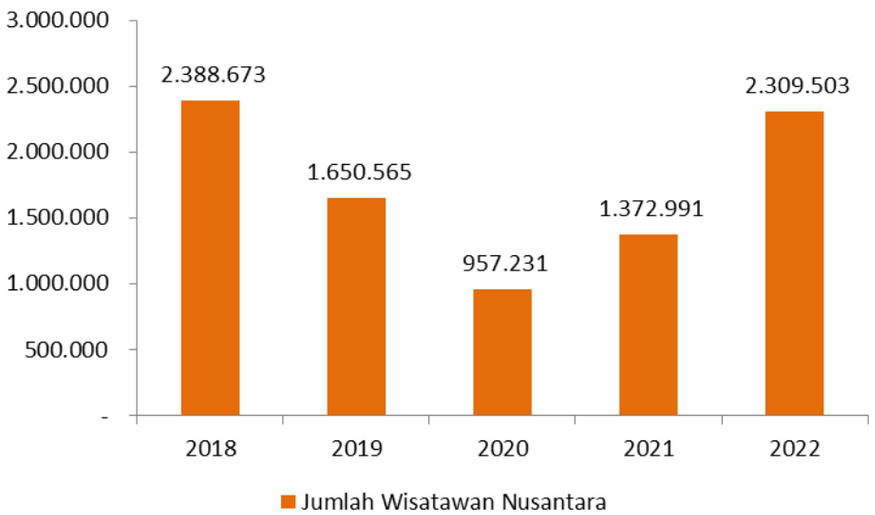

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2023

Gambar 2-65 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (orang)

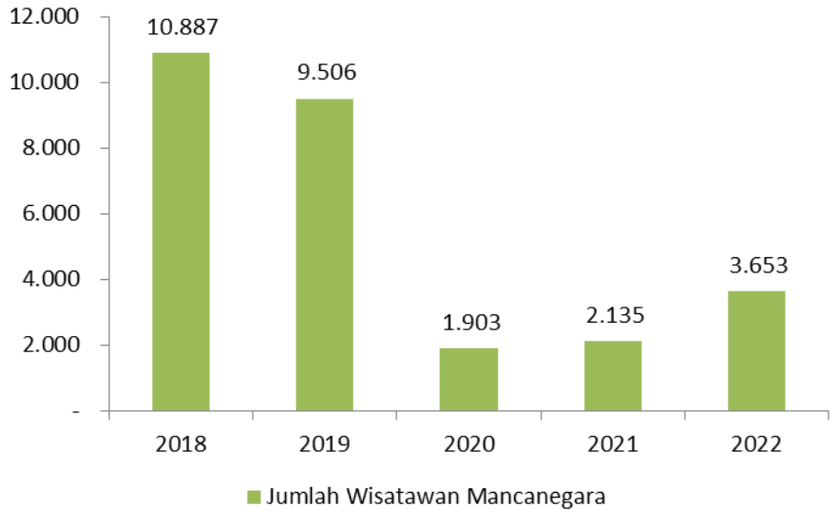

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2023

Gambar 2-66 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (orang)

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di Provinsi Jambi, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang menghambat adalah kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Provinsi Jambi, sehingga pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.2.1 Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). *Pertama*, kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor

ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

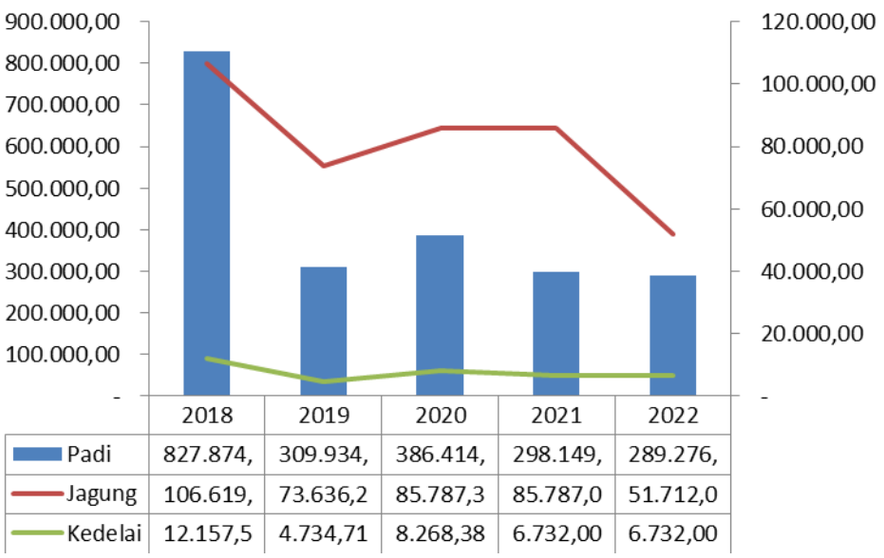

	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	827.874,	309.934,	386.414,	298.149,	289.276,
Jagung	106.619,	73.636,2	85.787,3	85.787,0	51.712,0
Kedelai	12.157,5	4.734,71	8.268,38	6.732,00	6.732,00

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-67 Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Ton) di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 – 2022, yang dimulai di tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen,

serta terjadi penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Ke depan perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.

Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2018 – 2022. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan, hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

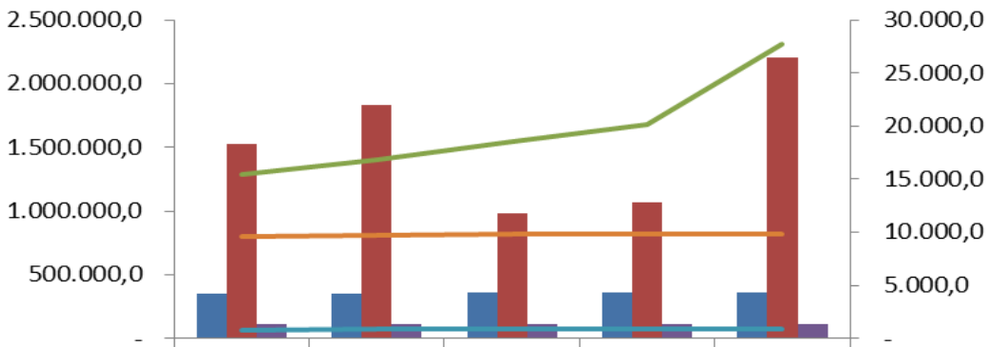

	2018	2019	2020	2021	2022
Karet	348.551,0	353.145,0	357.488,0	358.055,4	364.004,0
Kelapa Sawit	1.528.870	1.830.035	983.496,7	1.063.677	2.202.121
Kelapa Dalam	107.724,0	108.917,0	114.944,0	115.657,5	114.675,0
Kopi	15.461,0	16.784,0	18.580,1	20.135,2	27.773,0
Kakao	822,0	826,0	924,0	929,0	933,0
Tebu	9.650,0	9.743,0	9.819,0	9.839,0	9.839,0

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-68 Perkembangan produksi komoditi perkebunan Provinsi Jambi (ton) Tahun 2018 -2022

2.3.2.3 Kehutanan

SK.863/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi ditetapkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah seluas + 2.098.535 hektar yang dirinci menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas + 685.471 ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas + 179.588 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 258.285 ha
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 963.792 ha

- Kawasan Hutan produksi Konversi (HPK) seluas + 11.399 ha

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan serta Tata Guna Hutan kesepakatan (TGHK) tahun 2018, luas hutan di Provinsi Jambi ditetapkan seluas 2.113.775,33 Ha, dengan perincian:

- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas + 694 586,01 ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas + 181 794,96 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 260 386,14 ha
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 966 704,47 ha
- Kawasan Hutan produksi Konversi (HPK) seluas + 10 303,75 ha

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tetang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi area dengan luas ± 1.458.934 ha terdiri dari HL dengan luas ± 175.483 HP dengan luas ± 981.530 ha, HPT dengan luas ±301.922. Berdasarkan SK tersebut maka kawasan hutan provinsi Jambi dibagi dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Dari 17 KPH tersebut sampai dengan tahun 2015 baru terdapat 5 KPHP yang memiliki organisasi pengelola dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) yaitu KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun, KPH Unit I Kerinci, KPHP Lubuk Pekak Hulu Landai Kabupaten Merangin, KPHP Tebo Barat dan Tebo Timur di Kabupaten Tebo. Sedangkan satu KPHL yaitu KPHL Bram Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki pengelola hanya RPHJPnya perlu direvisi menyesuaikan dengan format baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3.2.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Data-data lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 2-44 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023

Tabel 2-45 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsat	

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023

Tabel 2-46 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2023

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar dibeberapa kabupaten di Provinsi.

2.3.2.4.1 Perdagangan

Perkembangan ekspor asal Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Penurunan ekspor pada tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan harga komoditas.

Selanjutnya, pada tahun 2020 semakin menurun akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas termasuk ekspor. Namun seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 dan 2022 nilai ekspor Provinsi Jambi mulai mengalami peningkatan menjadi US$ 1,558 Milyar dan US$ 2,614 Milyar. Peningkatan nilai ekspor tersebut bersumber dari kenaikan permintaan komoditas batu bara dan minyak nabati. Berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina masih berdampak pada gangguan rantai pasok dan *energy crunch* yang mendorong peningkatan permintaan komoditas energi termasuk batu bara, terutama dari negara kawasan Eropa guna pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangkit listrik selama musim dingin. Adapun ekspor batu bara Jambi sebagian besar ditujukan ke negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga masih berdampak pada berkurangnya pasokan produk substitusi minyak nabati berbahan kelapa sawit, seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai. Hal ini berimbas pada terjaganya harga CPO pada level tinggi, sehingga kinerja ekspor kelapa sawit Provinsi Jambi masih tumbuh positif, meskipun mulai melambat menuju normal.

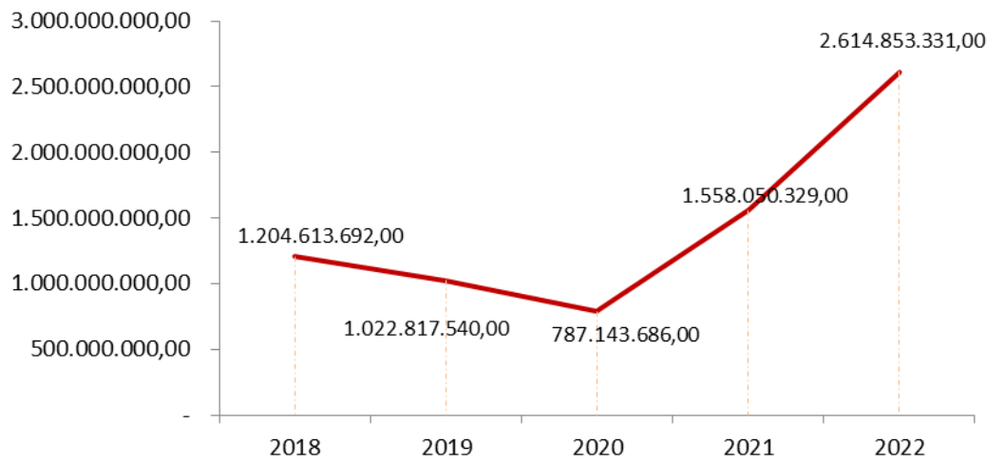

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-69 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2018-2022(US$)

Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2018-2022 struktur nilai ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll) dan Kertas/Pulp, sementara dari pertambangan didominasi

komoditi migas. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 83 Negara, dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat. Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada.

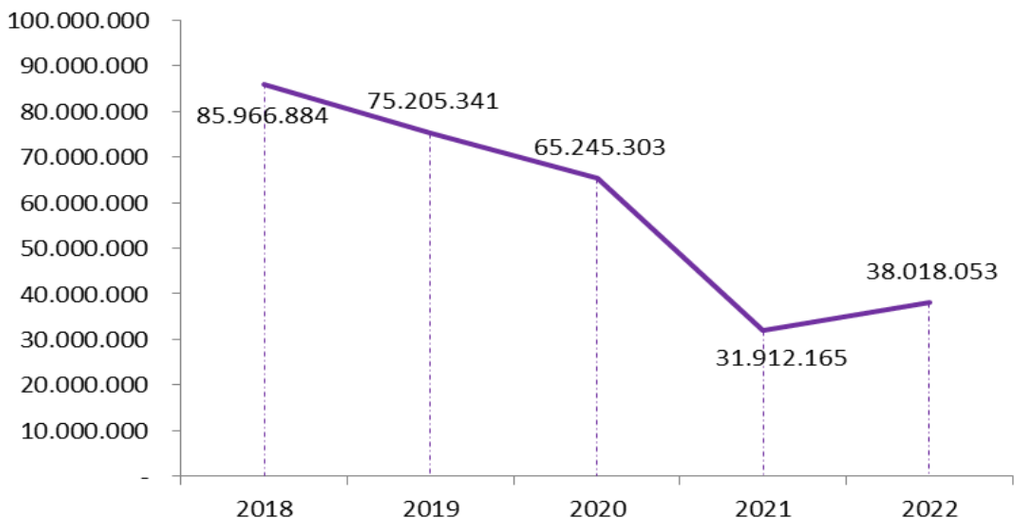

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-70 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (US$)

Sementara itu, perkembangan impor Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, baik nilai maupun volumenya. Nilai impor pada tahun 2018 mencapai US$ 85,96 juta, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017. Namun mulai menurun pada tahun 2019 hingga akhir tahun 2021 menjadi US$31,912 juta, dan kembali meningkat di tahun 2022 mencapai US$ 38,018 juta. Impor terbesar terjadi pada kelompok mesin industri tertentu/khusus, kelompok kimia anorganis dan kelompok mesin industri dan perlengkapannya yang menyumbang kinerja impor meningkat.

2.3.2.5 Perindustrian

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser share sektor primer ke sektor sekunder, salah satunya melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jambi. Namun upaya ini belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, karena terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu, percepatan perwujudan kawasan Ujung Jabung termasuk Kawasan Industri Kemingking harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi.

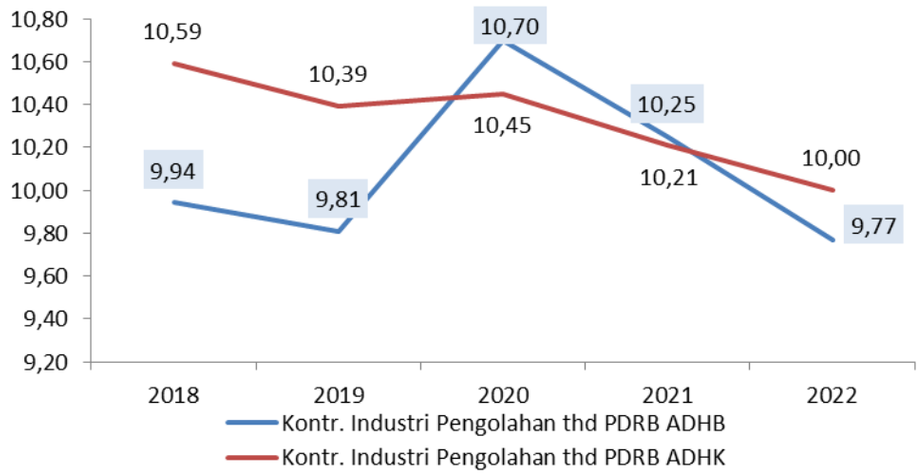

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-71 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi

2.3.2.5.1 Transmigrasi

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma sebagai berikut, yaitu; mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan; mendukung kebijakan energi alternatif (*bio fuel*); mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia; mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan; menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk (dalam arti sempit), melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *topdown* dari pusat, melainkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Dasar hukum pelaksanaan program transmigrasi ini di antaranya adalah Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Adapun manfaat transmigrasi bagi masyarakat, antara lain yaitu: Meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya yang belum banyak dimanfaatkan orang; merangsang pembangunan daerah baru, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran antar suku bangsa, solusi masalah pengangguran dan kemiskinan. Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran di bidang ketransmigrasian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, terdapat beberapa lokus kawasan transmigrasi prioritas di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu Kabupaten Bungo
2. Kawasan Transmigrasi Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kawasan Transmigrasi Bathin IX Kabupaten Sarolangun
4. Kawasan Transmigrasi Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori berhasil karena daerah – daerah yang telah dijadikan lokasi transmigrasi umumnya menjadi wilayah yang maju dan cepat tumbuh. Contoh daerah transmigrasi yang tumbuh lebih baik daripada wilayah sekitarnya adalah Sungai Bahar di Kabupaten Muaro Jambi, Singkut di Kabupaten Sarolangun dan Rimbo Bujang di Kabupaten Tebo.

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan di Provinsi adalah

teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Perencanaan yang disusun selain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, juga mendukung perencanaan nasional, sehingga akan tercipta sinergisitas antara pusat dan daerah.

Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dan telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan terhadap RPJPD terkait dengan indikator, target indikator dan penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal perencanaan secara spasial, Provinsi Jambi juga telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043, yang menjadi salah satu dasar dilakukannya Perubahan RPJMD ini. Peraturan Daerah ini menggantikan Perda RTRW lama, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 yang mendasari penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebelum dilakukan perubahan. Kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu RPJPD dan RTRWP merupakan dokumen yang dipendomani dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

2.3.3.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara trasparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah memperoleh opini WTP sebelas kali berturut-turut. Kondisi ini hendaknya dapat terus dipertahankan di masa yang akan datang.

2.3.3.3 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di Pemerintah Provinsi Jambi, diperlukan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawas sehingga diperoleh pengawasan yang profesional.

Inspektorat Provinsi Jambi sebagai APIP (auditor internal) dan BPK RI selaku auditor ekternal melaksanakan Pemeriksaan regular lingkup Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya. Bagian terpenting dari sebuah audit tidak hanya rekomendasi namun sejauh mana tindak lanjut rekomendasi tersebut. Adapun progres tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-47 Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan.

TAHUN	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat (%)	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (%)
2019	42,86	61,82
2020	32,51	35,58
2021	53,87	44,20
2022	77,75	50,54
2023	49,16	19,05

Sumber: Inspektorat Provinsi Jambi, 2024

2.3.3.4 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan sistem *reward and punishment*. Disiplin PNS ditegakkan antara lain melalui penggunaan absensi berbasis aplikasi online (SiABON) bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kedisiplinan ini menjadi salah satu indikator dalam pemberian reward berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Formulasi penilaian kinerja ini akan terus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan adil.

Pengembangan SDM juga tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat tersebut diharapkan menjadi daya ungkit dalam mewujudkan ASN yang berkompeten dan profesional, yang tentunya harus didukung dengan inovasi, kurikulum, metode serta sarana dan prasarana diklat yang baik.

2.3.3.5 Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan dan dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat daerah yang juga merupakan suatu pengaturan kelembagaan yang sistematik, dan berjangka panjang untuk mnedorong, menyebarluaskan dan menerapkan inovasi teknologi dalam aspek pembangunan maka dibangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sistem inovasi dibutuhkan dalam rangka mengatasi permasalahan karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin ilmu, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat dan pengelolaan SDM kolaboratif serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2018-2022 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata Pengeluaran nominal per kapita sebulan untuk makanan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.555.989/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp.663.021/bulan pada tahun 2022. Sementara untuk pengeluaran bukan makanan yang antara lain terdiri dari pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, pakaian, pajak, aneka barang dan jasa, lebih rendah

dibanding pengeluaran untuk makanan, yaitu dari Rp496.432 menjadi 598.816/bulan.

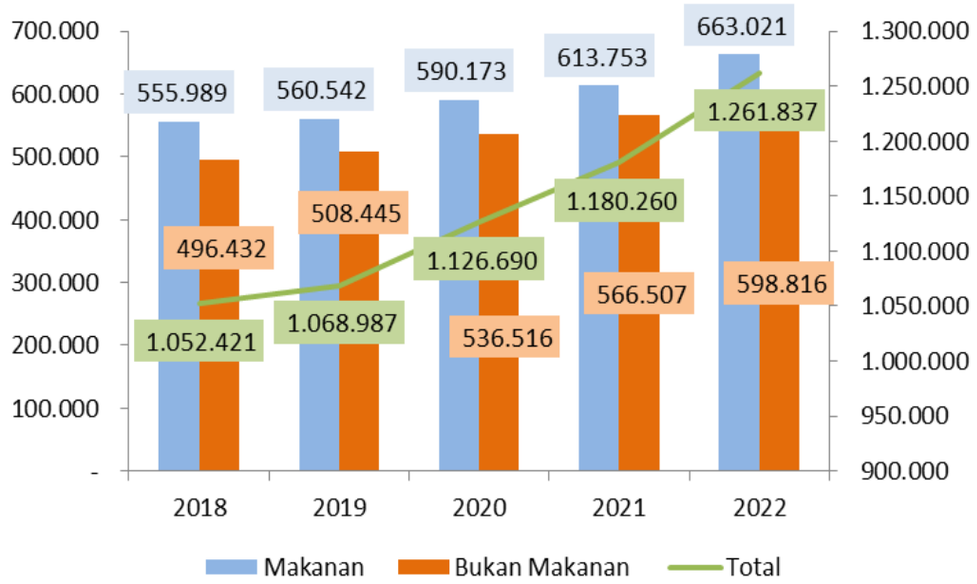

Sumber : BPS, 2023

Gambar 2-72 Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018-2022

Bila dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, terlihat bahwa pengeluaran terbesar masih pada kelompok makanan, kecuali Kota Jambi yang telah bergeser komposisi konsumsi masyarakatnya dari dominan kelompok makanan menjadi dominan kelompok bukan makanan, terutama yang didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka barang dan jasa.

Tabel 2-48 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Persentase Pengeluaran per Kapita Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan (%)			
	Makanan		Bukan Makanan	
	2021	2022	2021	2022
PROVINSI JAMBI	52,00	52,54	48,00	47,46
KERINCI	54,35	56,28	45,65	43,72
MERANGIN	56,08	52,23	43,92	47,77
SAROLANGUN	52,03	50,30	47,97	49,70
BATANGHARI	52,29	56,45	47,71	43,55
MUARO JAMBI	54,20	59,32	45,80	40,68
TANJUNG JABUNG TIMUR	59,42	59,15	40,58	40,85
TANJUNG JABUNG BARAT	56,94	56,80	43,06	43,20
TEBO	54,35	54,15	45,65	45,85
BUNGO	52,71	51,73	47,29	48,27
KOTA JAMBI	43,99	44,64	56,01	55,36
KOTA SUNGAI PENUH	52,55	51,03	47,45	48,97

Sumber : BPS, 2023

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

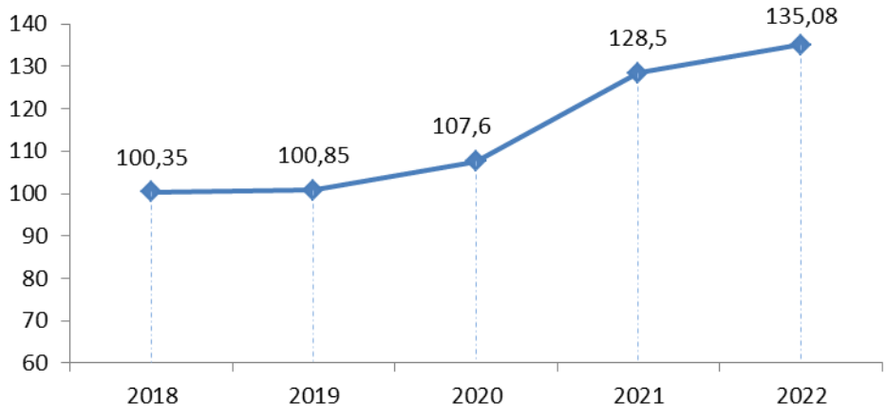

Sumber BPS, 2023

Gambar 2-73 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2018-2022 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan perikanan, yang disebabkan karena adanya perbaikan harga komoditas TBS dan harga bokar, serta adanya inflasi pada beberapa komoditas ikan. Perbaikan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu ke depan kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1 Proporsi Jalan Kondisi baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2018 – 2021 berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Penurunan tersebut terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam kategori jalan sedang. Namun pada tahun 2022, terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik menjadi 46,33 persen.

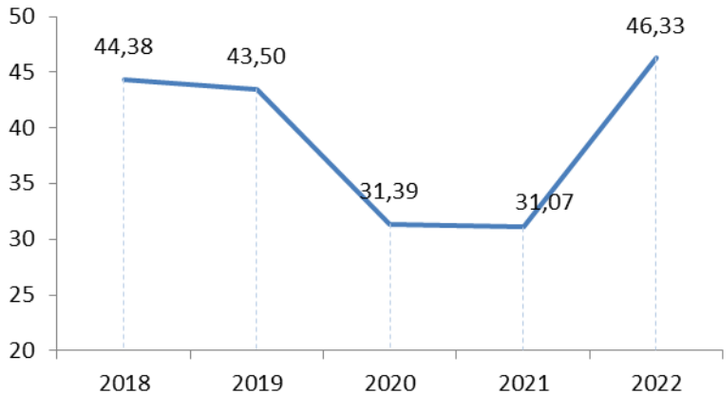

Sumber: Dinas PU Provinsi Jambi,2023

Gambar 2-74 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2018 – 2022

2.4.2.2 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidayapertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri.

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah.Arahan pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

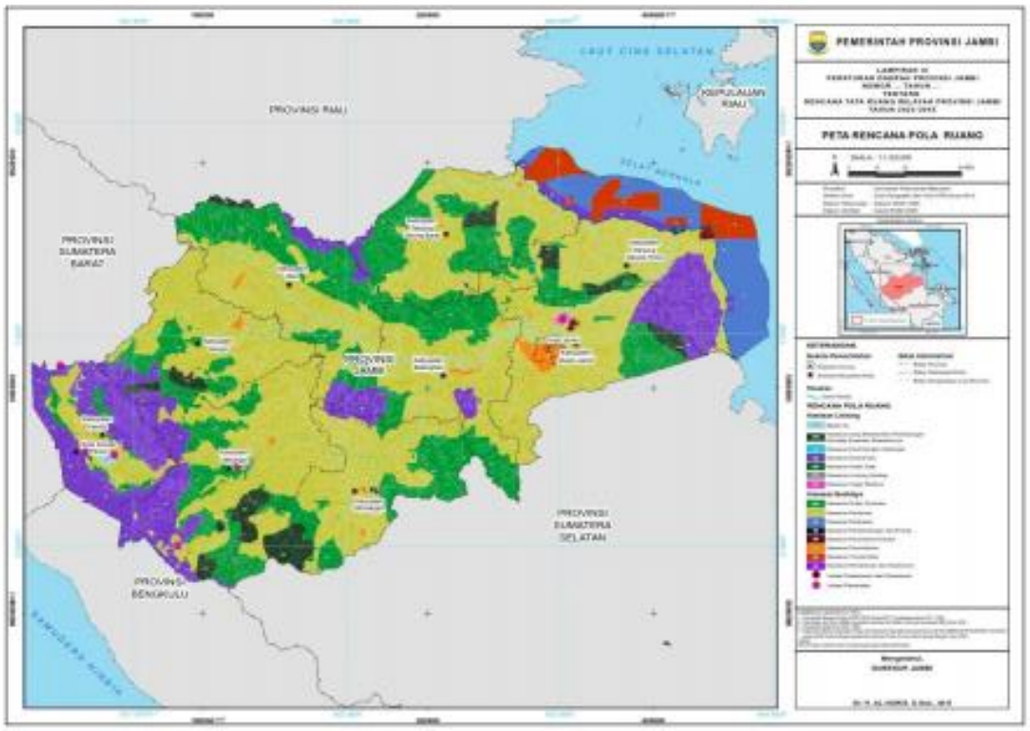

Gambar 2-75 Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043)

Penetapan Kawasan industri di Provinsi Jambi dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi industri, mendorong kegiatan industri agar berlokasi di kawasan industri, serta menyediakan fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Luas rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan industri seluas kurang lebih 7.139 hektar yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
b. Kawasan peruntukan industri tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

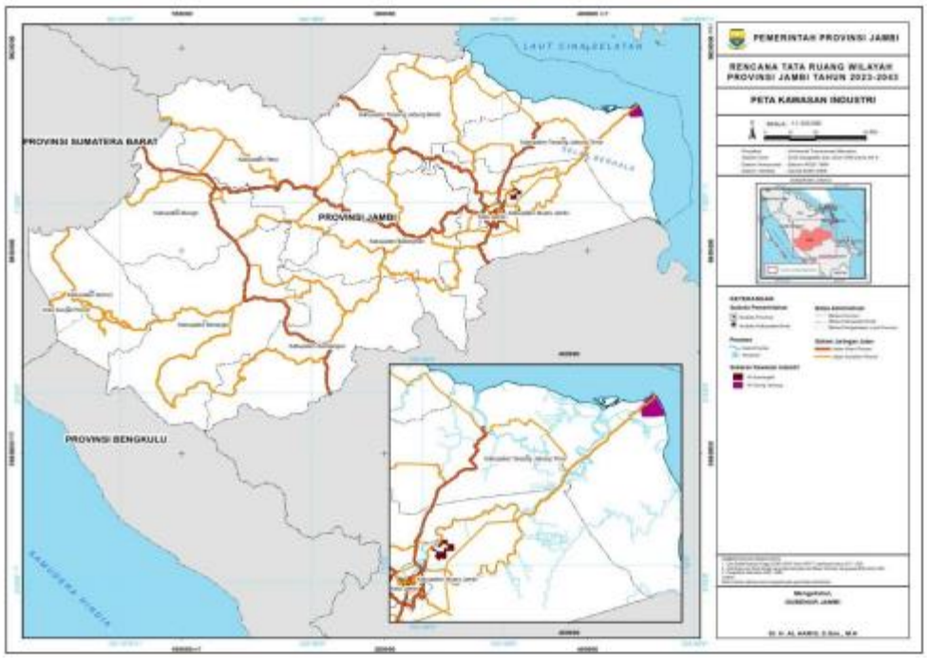

Gambar 2-76 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043)

2.4.2.3 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Perkembangan hotel di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah hotel kelas bintang cenderung menurun yaitu dari 37 hotel di tahun 2018 menjadi 35 hotel di tahun 2022, namun untuk kelas non bintang mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2019, namun jumlah tersebut kembali menurun pada tahun 2020, seiring dengan pandemi covid-19 yang merupakan salah satu variabel yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat hunian hotel. Meskipun demikian di tahun 2021 dan 2022 jumlahnya kembali meningkat.

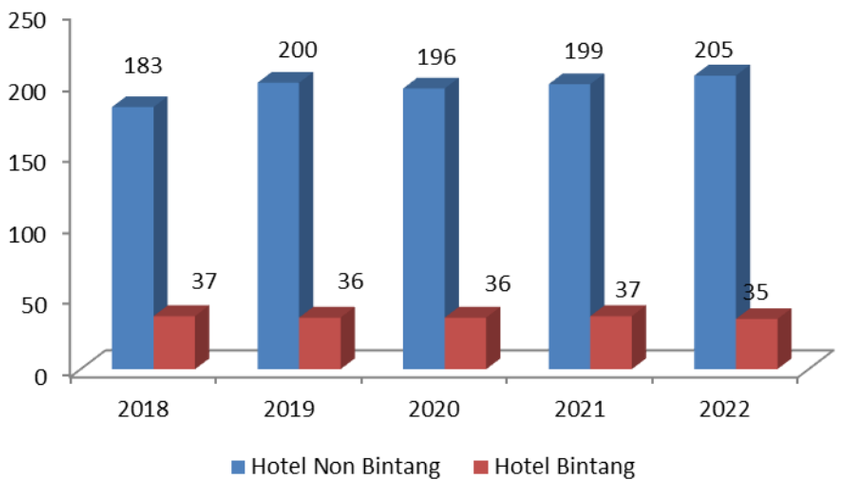

Sumber: BPS, 2022

Gambar 2-77 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.4.2.4 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan mahkluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Berdasarkan data BPS, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2022 adalah 79,19 persen. Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa hambatan yang dihadapi terkait cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

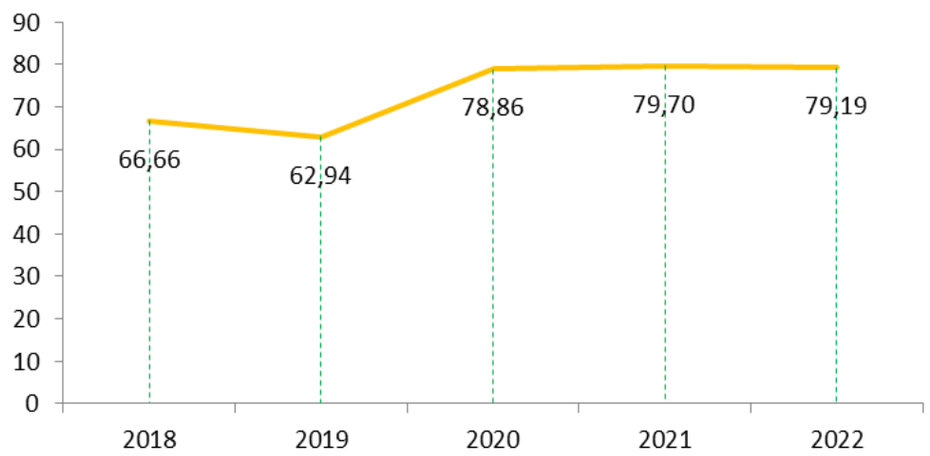

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-78 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

2.4.2.5 Rasio ketersediaan daya listrik,

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai 99,99 persen. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

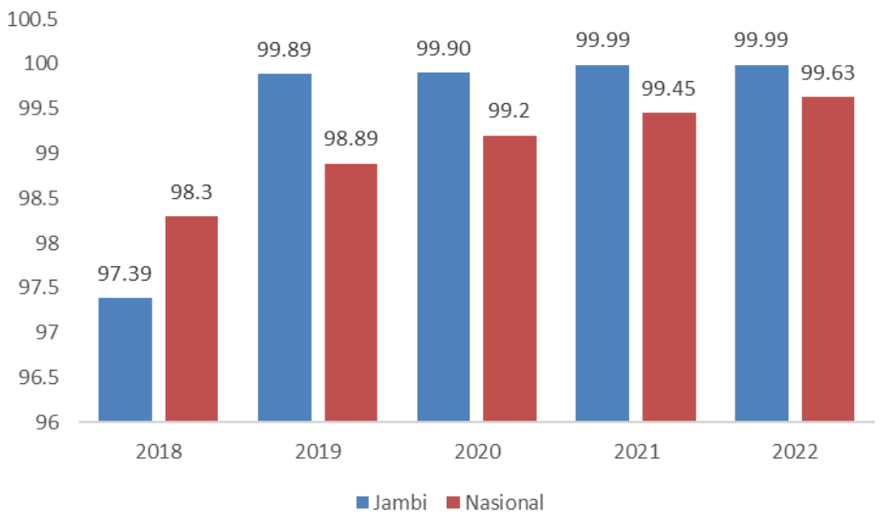

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-79 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Kriminalitas

Selama selang waktu tahun 2018-2021, jumlah kejahatan di Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif, namun memperlihatkan tren penurunan. Hal yang sama terlihat pada jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan, walaupun penurunannya tidak signifikan. Salah satu pemicu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, untuk itu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejahatan di Provinsi Jambi, seiring dengan upaya perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

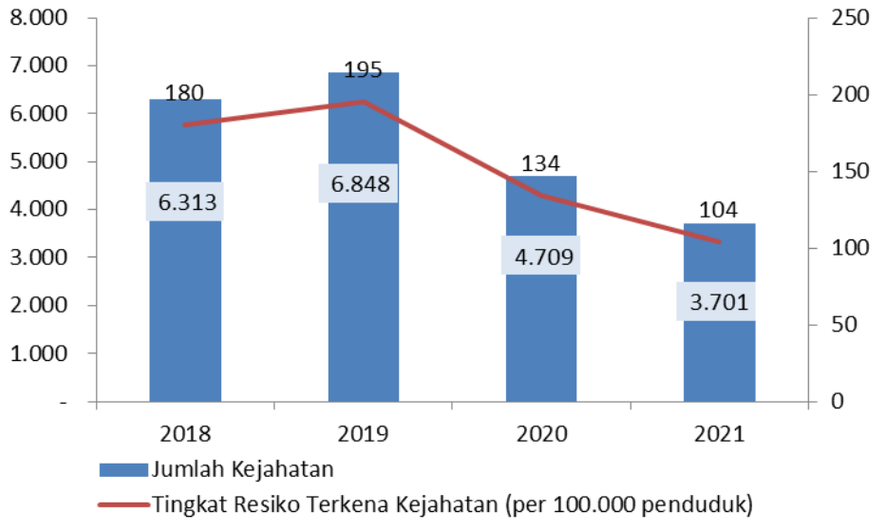

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-80 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia produktif di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini.

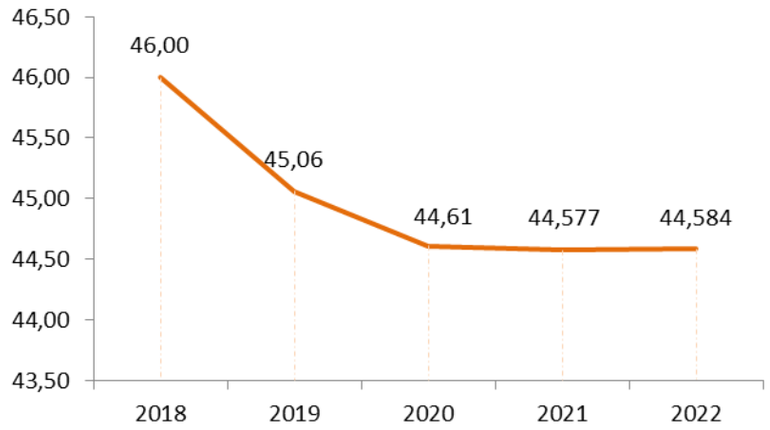

Sumber: BPS, 2023 dan Data diolah

Gambar 2-81 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65+ tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang.

2.2. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh uraian tentang kondisi umum daerah, kinerja pemerintah daerah serta potensi perekonomian dan daya saing daerah saat ini pada akhirnya membangun pencapaian target pembangunan berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jambi. Adapun pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data dalam Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian TPB Provinsi Jambi. Dari 289 indikator pembangunan berkelanjutan yang kemudian dicerminkan oleh 219 target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional hanya 197 target pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan karakter yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dari target PB nasional tersebut, 85 target (43,2%) dapat dicapai, 58 target (29,4%) belum dapat dicapai, dan belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia adalah sebanyak 55 target (27,4% dari total target PB).

Tabel 2-49 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2023

TPB (2020)		Indikator PB (Metadata SDGs 2020 v.2)	Target PB Nasional	Capaian PB Nasional	Melebihi capaian nasional	Belum > capaian nasional	Belum dilaksa-nakan	Belum teriden-tifikasi
1	Tanpa kemiskinan	14	23	21	16	4	-	1
2	Tanpa kelaparan	16	9	9	4	4	-	1
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	31	36	32	16	13	-	3
4	Pendidikan berkualitas	14	18	17	8	7	-	2
5	Kesetaraan gender	12	16	13	6	3	-	4
7	Energi bersih dan terjangkau	7	6	6	3	3	-	-
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	17	16	8	6	-	2
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	21	15	8	-	3	-	5
10	Berkurangnya kesenjangan	17	16	13	6	2	-	5
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	25	14	9	4	3	-	2
6	Air bersih dan sanitasi layak	10	1	9	2	-	-	7
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	17	3	3	1	1	-	1
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	17	7	4	-	1	-	3
13	Penanganan perubahan iklim	9	1	5	1	-	-	4
14	Ekosistem lautan	10	7	6	1	4	-	1
15	Ekosistem daratan	14	3	4	-	1	-	3
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	36	27	22	9	3	-	10
	Total	289	219	197	85	58	-	54
			75.8%	90.0%	43.15%	29.44%	0.0%	27.41%

Sumber: berbagai sumber statistik.
Keterangan:
Tujuan 1 – 5 termasuk Pilar Sosial
Tujuan 7-20 dan Tujuan 17 termasuk Pilar Ekonomi
Tujuan 6, dan Tujuan 11-15 termasuk Pilar Lingkungan
Tujuan 16 adalah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sementara, tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator berdasarkan pengelompokkan TPB sebagaimana oleh Bappenas. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa Pilar Sosial merupakan pilar yang paling banyak mencapai target (41,7% dari total target TPB) dan Pilar Hukum dan Tata Kelola yang paling sedikit mencapai target (41,7% dari total target TPB).

Tabel 2-50 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2023.

Pilar	Sudah tercapai	Belum tercapai	Belum dilaksanakan	Tidak teridentifikasi
Sosial	54.3%	33.7%	0.0%	12.0%
Ekonomi	48.1%	32.7%	0.0%	13.0%
Lingkungan	48.8%	22.6%	0.0%	13.1%
Hukum & Tata Kelola	41.7%	13.6%	0.0%	21.7%

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator TPB yang belum mencapai target TPB sebagian besar (81,1%) merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Separuhnya terkait dengan urusan wajib terkait pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan 25,9% terkait dengan urusan wajib tetapi tidak terkait langsung pelayanan dasar pada bidang tenaga kerja, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perhubungan, kominfo dan lingkungan hidup. Pada urusan pilihan, terdapat target TPB yang belum tercapai pada urusan ESDM, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan. Adapun pada urusan penunjang adalah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan. Hal-hal ini selayaknya menjadi permasalahan dan menjadi isu penting pembangunan pada periode tahun 2021-2026. Adapun target yang belum teridentifikasi menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang dalam penyediaannya untuk segera melengkapi sistem pendataannya, sehingga informasi mengenai kondisi pencapaian TPB dapat diperoleh dengan baik.

Tabel 2-51 Indikator TPB yang tidak mencapai target TPB Provinsi Jambi berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan bidang Tahun 2023

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	1	Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Sederajat.	1	Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	1	Pendidikan
4.5.1*	3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan	1	Pendidikan
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	1	Pendidikan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.	1	Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	1	Kesehatan
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1	Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1	Kesehatan
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1	Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	1	Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	1	Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1	Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	1	Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR).	1	Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	1	Kesehatan
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	1	Perkim
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	1	Perkim
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1	Perkim

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1	Perkim
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1	Perkim
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan.	1	Sosial
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	1	Sosial
1.5.3*	Rencana dan Implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015-2030	1	Tantib Linmas
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	1	Tantib Linmas
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	2	Tenaga kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	2	Tenaga kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	2	Tenaga kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2	Tenaga kerja
2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2	Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2	Pangan
3.7.1.(b)	Angka penggunaan MKJP cara modern.	2	P2- KB
5.6.1.(a)	Unmet need KB yang tidak terpenuhi).	2	P2-KB
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa.	2	Penanaman modal
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	2	Perhubungan
17.8.1*	Persentase pengguna internet	2	Kominfo
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	2	P3A
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2	P3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	2	P3A
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	2	Lingkungan Hidup
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	2	Lingkungan

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
			Hidup
7.3.1*	Intensitas energi primer	3	ESDM
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	3	Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3	Perindustrian
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 WPPNRI secara berkelanjutan.	3	Kel.dan Perikanan
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	3	Kel.dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	3	Kel.dan Perikanan
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan.	3	Kehutanan
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	4	Perencanaan
8.2.1*	Lajur pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	4	Perencanaan
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	4	Keuangan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	4	Keuangan

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2021 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan, demikian pula selama dua tahun pelaksanaan RPJMD. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecuali tahun 2020 dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; ***Pertama***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. ***Kedua***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2019 – 2023.

Tabel 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**4.575.192.849.736**	**4.400.624.372.119**	**4.323.654.694.959**	**4.628.194.933.188**	**4.484.471.674.814**	**-0,40**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.651.089.944.335**	**1.535.183.487.238**	**1.843.429.186.553**	**2.167.059.581.370**	**2.087.825.447.632**	**4,81**
1.1.1.	Pajak daerah	1.345.106.684.308	1.292.729.048.514	1.558.105.416.539	1.871.835.359.804	1.845.711.834.787	6,53
1.1.2.	Retribusi daerah	19.109.708.620	18.593.509.421	12.616.308.643	16.894.410.077	17.916.260.424,00	-1,28
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	31.064.882.847	27.923.864.762	28.026.487.059	30.612.977.019	30.978.710.987,64	-0,06
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	255.808.668.561	195.937.064.541	244.680.974.312	247.716.834.471	193.218.641.433,08	-5,46
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.922.494.905.401**	**2.862.888.575.956**	**2.477.911.982.706**	**2.446.415.535.918**	**2.376.006.895.706**	**-4,06**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.608.000.000**	**2.552.308.925**	**2.313.525.700**	**14.719.815.900**	**20.639.331.476**	**66,60**
1.3.1	Hibah	1.608.000.000	2.552.308.925	2.313.525.700	14.719.815.900	20.639.331.476	66,60
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.3.6	Pendapatan luar biasa	-	-			-	0,00

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
				-	-		
2	**Belanja**	**4.824.366.351.413**	**4.430.392.750.899**	**4.385.007.349.233**	**4.662.396.536.118**	**5.190.893.278.556**	**1,48**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.079.700.724.871**	**2.902.115.287.977**	**3.072.179.423.612**	**2.820.760.501.587**	**3.078.441.615.463**	**-0,01**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.382.612.319.837	1.391.317.474.093	1.496.906.302.862	1.510.166.012.395	1.485.432.616.443	1,44
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.032.706.552	743.288.221.805	770.674.394.667	1.113.354.020.596	1.377.978.794.692	6,12
2.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000	550.000.000	550.000.000	1.221.139.100	5.739.553.750	62,92
2.1.4	Belanja Hibah	672.272.497.982	766.631.092.079	777.720.359.692	178.805.155.456	188.896.906.895	-22,42
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	283.200.500	328.500.000	26.328.366.390	17.214.174.040	3.762.000.000	67,75
2.2	**Belanja Modal**	**866.500.805.931**	**642.695.707.788**	**449.690.683.606**	**907.326.673.480**	**1.038.628.084.627**	**3,69**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**91.193.410**	**152.703.760.217**	**51.878.593.557**	**9.090.918.793**	**1.733.566.345**	**80,22**
2.4	**Belanja Transfer**	**878.073.627.201**	**732.877.994.917**	**811.258.648.459**	**925.218.442.258**	**1.072.090.012.121**	**4,07**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	710.641.702.401	631.105.361.717	717.538.648.459	768.618.442.258	899.987.022.121	4,84
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	167.431.924.800	101.772.633.200	93.720.000.000	156.600.000.000	172.102.990.000	0,55
3.1	**Pembiayaan**	**669.496.931.347**	**420.323.429.670**	**239.473.515.534**	**700.773.234.715**	**621.327.501.413,26**	**-1,48**
3.2	Penerimaan Pembiayaan	671.280.817.888	422.155.996.445	239.473.515.534	727.979.765.897	631.461.501.413,26	-1,22
	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	12.500.000.000,00	-	27.206.531.182	10.134.000.000,00	-7,54

Sumber: BPKPD, Unaudited, 2024

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program ***intensifikasi*** dan ***ekstensifikasi*** terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifiksi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2019-2023 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibeberapa Kabupaten, dan menyediakan beberapa gerai samsat pada pusat perbelanjaan di Kota Jambi, serta pembayaran pajak melalui ATM.
3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengadakan pertemuan dengan *Dealer* Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha *Show Room* kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan kemampuan penerimaan daerah akibat kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan transfer pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Bila dilihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), dengan membandingkan Total PAD dengan Dana Perimbangan, maka terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah berfluktuatif. Kondisi ini disebabkan berfluktuatifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pajak daerah maupun retribusi. Selain itu, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, terlihat bahwa pada periode tahun 2019-2023, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terkontraksi sebesar -0,40%, dengan komponen pendapatan dengan pertumbuhan rata-rata terbesar adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 66% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,81%, sementara Pendapatan transfer terus terkoreksi dengan rata-rata tumbuh -4,06%.

Tabel 3-2 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai RKKD (%)
2019	56,5
2020	52,32
2021	74,39
2022	88,58
2023	87,87

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi 2024, data diolah

Tabel 3-3 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Rp)

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	
1	**PENDAPATAN**	**100,19**	**OT**	**105,37**	**OT**	**107,36**	**OT**	**106,75**	**OT**	**98,75**	UT	**-0,003**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**105,40**	**OT**	**112,80**	**OT**	**115,13**	**OT**	**112,01**	**OT**	**100,33**	**E**	**0,01**
1.1.1.	Pajak daerah	100,30	OT	111,65	OT	112,60	OT	112,11	OT	100,13	OT	**0,02**
1.1.2.	Retribusi daerah	80,23	UT	216,07	OT	110,82	OT	92,54	UT	95,01	UT	**0,03**
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	106,34	OT	89,46	UT	100,00	E	100,63	OT	100,10	OT	**-0,01**
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	148,42	OT	119,99	OT	137,50	OT	114,48	OT	102,83	OT	**-0,05**
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**97,44**	**UT**	**101,77**	**OT**	**104,45**	**OT**	**103,38**	**OT**	**97,47**	**UT**	**0,01**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**108,06**	**OT**	**127,11**	**OT**	**5,34**	**UT**	**42,83**	**UT**	**98,54**	**UT**	**-0,17**
1.3.1	Hibah	**108,06**	**OT**	**127,11**	**OT**	**5,34**	**UT**	**42,83**	**UT**	**98,54**	**UT**	**-0,17**
1.3.2	Dana darurat	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	**E**
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	**-**
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	**-**
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	**-**
1.3.6	Pendapatan luar biasa	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	**-**
2	**Belanja**	**92,37**	**UT**	**96,61**	**UT**	**91,33**	**UT**	**92,34**	**UT**	**97,59**	**UT**	**0,00**
2.1	**Belanja Operasi**	**91,48**	**UT**	**95,54**	**UT**	**90,88**	**UT**	**90,50**	**UT**	**97,32**	**UT**	**0,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	91,34	UT	96,41	UT	93,46	UT	95,80	UT	97,80	UT	**0,01**

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80,47	UT	82,01	UT	83,68	UT	84,64	UT	94,62	UT	**0,01**
2.1.3	Belanja Subsidi	100,00	E	100,00	E	100,00	OT	14,92	UT	86,77	UT	**-0,32**
2.1.4	Belanja Hibah	116,09	OT	111,53	OT	96,59	UT	90,05	UT	118,15	OT	**-0,05**
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50,28	UT	100,00	E	50,48	UT	93,02	UT	85,60	UT	**0,13**
2.2	**Belanja Modal**	**90,02**	**UT**	**102,22**	**OT**	**92,66**	**UT**	**93,02**	**UT**	**96,41**	**UT**	**0,01**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,95**	**UT**	**82,41**	**UT**	**41,79**	**UT**	**31,47**	**UT**	**52,18**	**UT**	**1,01**
2.4	**Belanja Transfer**	**98,24**	**UT**	**100,71**	**OT**	**100,00**	**E**	**99,73**	**UT**	**99,67**	**UT**	**0,00**
2.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**100,00**	**E**	**99,49**	**UT**	**100,00**	**E**	**100,00**	**E**	**100,00**	**E**	**0,00**
2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**96,49**	**UT**	**101,93**	**OT**	**100,00**	**E**	**98,43**	**UT**	**97,15**	**UT**	**0,00**
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	96,50	UT	99,95	UT	100,00	E	98,43	UT	97,95	UT	**0,00**
2.4.2.2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	95,37	UT	-	E	-	E	-	E	-	E	**-1,00**
3	**Pembiayaan**	**102,01**	**OT**	**102,60**	**OT**	**96,90**	**UT**	**105,45**	**OT**	**100,00**	**E**	**0,01**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	99,73	UT	99,57	UT	96,90	UT	105,24	OT	100,00	E	**0,01**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	UT	-	UT	-	E	100,00	E	100,00	E	**100,00**

Sumber: BPKPD,data diolah, 2024

Keterangan: E = Equal (realisasi sama dengan target/anggaran)

UT = Under Target (realisasi lebih kecil dari target/anggaran)

OT = Over Target (realisasi lebih besar dari target/anggaran)

Tabel di atas memperlihatkan kinerja realisasi pendapatan daerah tahun 2019-2023, dengan membandingkan antara anggaran pada perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Secara umum pendapatan daerah pada periode ini cukup efisien dan terus memperlihatkan perbaikan, yang ditandai dengan selalu terlampauinya target pendapatan. Komponen PAD yang kinerjanya kurang baik dalam periode 2019-2023 adalah retribusi daerah, karena jarang terealisasi sama atau melampuai target kecuali tahun 2020 dan 2021. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dalam pemanfaatan aset daerah untuk menjadi sember pendapatan yang potensial.

Pada tabel berikut dapat dilihat potret proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 dari sisi pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2019-2023 menunjukan tren peningkatan, khususnya pada tahun 2022 yang naik signifikan, dimana PAD berkontribusi sebesar 46,82% terhadap pendapatan. Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan transfer yang proporsinya berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, hingga terakhir pada tahun 2023 adalah sebesar 52,98% dari sebelumnya sebesar 63,87% pada tahun 2019. Gambaran ini telah sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Tabel 3-4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

NO	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**36,09**	**34,89**	**39,01**	**46,82**	**46,56**
1.1.1.	Pajak daerah	29,40	29,38	32,97	40,44	41,16
1.1.2.	Retribusi daerah	0,42	0,42	0,27	0,37	0,40
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,68	0,63	0,59	0,66	0,69
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5,59	4,45	5,18	5,35	4,31
1.2.	**Pendapatan transfer**	**63,87**	**65,05**	**60,94**	**52,86**	**52,98**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,04**	**0,06**	**0,05**	**0,32**	**0,46**

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.3.1	Hibah	0,04	0,06	0,04	0,06	0,46
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan luar biasa	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD, data diolah, 2024

Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.1	**Belanja Operasi**	63,84	65,50	70,08	60,50	59,30
2.1.1	Belanja Pegawai	28,66	31,40	34,19	32,39	28,62
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21,23	16,78	17,56	23,88	26,55
2.1.3	Belanja Subsidi	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2.1.4	Belanja Hibah	13,93	17,30	17,72	3,84	3,64
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,01	0,60	0,37	0,07
2.2	**Belanja Modal**	17,96	14,51	10,25	19,46	20,01
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	0,00	3,45	1,18	0,19	0,03
2.4	**Belanja Transfer**	18,20	16,54	18,49	19,84	20,65
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	14,73	14,24	16,35	16,49	17,34
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3,47	2,30	2,14	3,36	3,32
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	3,43	2,25	2,14	3,36	3,32
2.4.2.2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,04	0,04	-	-	-

Sumber: BPKPD, data diolah, 2024

Sementara untuk proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 dari sisi belanja daerah, tabel di atas memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi masih mendominasi belanja Pemerintah

Provinsi Jambi namun dengan tren penurunan proporsi setiap tahunnya. Hal sebaliknya terjadi pada belanja modal dan belanja transfer yang terus mengalami peningkatan proporsi, sedangkan komponen belanja tidak terduga berfluktuasi. Komponen belanja operasi yang mengalami kecenderungan peningkatan proporsi setiap tahunnya adalah belanja barang dan jasa, sedangkan komponen lainnya mengalami tren penurunan, terutama belanja hibah. Proporsi belanja hibah hanya mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, seiring beberapa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial serta belanja hibah kepada penyelenggara Pemilukada dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selain bertambahnya proporsi belanja hibah, kenaikan juga terjadi pada proporsi belanja tidak terduga pada tahun 2020 sebagai antisipasi bila anggaran yang disediakan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kurang, juga menjadi penyebab berkurangnya proporsi belanja modal pada tahun 2020 secara cukup signifikan.

3.1.2 Neraca Daerah

Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2019-2023 rata-rata terkontraksi sebesar 11,11 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada periode 2016-2020 yaitu 3,01 persen. Rata-rata pertumbuhan aset lancar ini ditopang oleh rata-rata pertumbuhan persediaan sebesar 7,64 persen, piutang melambat sebesar minus 29,52 persen dan belanja dibayar dimuka melambat sebesar minus 1,65 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan kas melambat minus 24,57 persen atau mengalami penurunan.

Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 6,93 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata 2016-2020 yang berada pada 5,59 persen, investasi ini didorong oleh peningkatan investasi permanen yang tumbuh rata-rata sebesar 7,09 persen dan investasi non permanen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,97 persen. Pertumbuhan rata-rata ini lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata investasi non permanen dan investasi permanen tahun 2016-2020 yang masing-masing berada pada 5,77 persen 0,56 persen pertahun. Investasi ini ditempatkan

dibeberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 senilai Rp6.524.037.916.803,- menjadi senilai Rp7.892.024.424.268,- pada tahun 2023, sehingga secara rata-rata aset tumbuh sebesar 3,88 persen, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pada 2016-2020 yang tumbuh sebesar 9,05 persen pertahun. Kontribusi terbesar dari asset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan, diikuti aset tetap peralatan dan mesin. Peningkatan kontribusi jalan, jaringan dan instalasi serta gedung dan bangunan ini disebabkan alokasi biaya infrastruktur kurun waktu 2019-2023 yang meningkat sehingga beberapa asset Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan.

Utang jangka pendek dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami penurunan dari Rp140.592.814.322,- pada tahun 2019 menjadi Rp45.198.871.809,- atau tumbuh melambat rata-rata sebesar minus 20,30 persen. Penurunan utang jangka pendek ini menyebabkan penurunan kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Jambi dari dari Rp Rp411.030.632.726,- pada tahun 2019 menjadi Rp374.378.631.492,- pada tahun 2023 atau turun rata-rata sebesar minus 1,82 persen. Perbedaan antara utang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempunyai utang belanja dan utang pada pihak ketiga sehingga walaupun utang jangka pendek turun, namun kewajiban jangka pendek tetap meningkat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki utang jangka panjang sehingga kewajiban jangka panjang sampai tahun 2023 tidak ada. Dengan demikian dari perhitungan kewajiban jangka pendek tersebut sama jumlahnya dengan kewajiban Pememerintah Provinsi Jambi yaitu tumbuh rata-rata sebesar minus 1,85 persen pertahun selama 2019-2023.

Tabel 3-6 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2019 – 31 Desember 2023

KD. REK		2019	2020	2021	2022	2023	GR(%)
1	**ASET**	**8.941.719.097.775**	**9.058.798.239.794**	**9.529.828.339.383**	**9.966.114.108.839**	**10.142.160.401.068**	**2,55**
01.01	ASET LANCAR	992.014.627.206	765.755.995.537	1.145.898.246.997	1.126.523.999.016	550.667.638.323	-11,11
01.01.01	Kas	468.227.411.054	432.451.382.483	770.762.428.594	675.149.288.355	**114.357.487.106,00**	-24,57
01.01.02	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00
01.01.03	Piutang	251.859.944.723	56.138.206.655	49.782.877.651	38.482.007.587	**43.792.919.661,21**	-29,52
01.01.04	Belanja dibayar dimuka	845.725.257	661.979.657	718.057.442	952.947.118	**778.258.571,85**	-1,65
01.01.05	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-	0,00
01.01.06	Persediaan	271.081.546.172	276.504.426.742	324.634.883.310	411.939.755.957	**391.738.972.984,08**	7,64
	JUMLAH ASET LANCAR	**992.014.627.206**	**765.755.995.537**	**1.145.898.246.997**	**1.126.523.999.016**	**550.667.638.323**	**-11,11**
	PERT.ASET LANCAR (%)	(0,32)	(22,81)	49,64	(1,69)	(51,12)	175,05
01.02	INVESTASI JANGKA PANJANG	427.714.586.558	413.360.381.437	450.607.618.003	553.022.330.023	597.927.739.397	6,93
01.02.01	Investasi Non Permanen	12.358.783.135	12.533.929.154	12.730.368.321	12.825.541.995	12.967.939.899,14	0,97
01.02.02	Investasi Permanen	415.355.803.423	400.826.452.283	437.877.249.682	540.196.788.028	584.959.799.497,75	7,09
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**427.714.586.558**	**413.360.381.437**	**450.607.618.003**	**553.022.330.023**	**597.927.739.396,89**	**6,93**
	PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)	10,70	(6,29)	9,01	19,88	5,78	-11,60
01.03	ASET TETAP	6.524.037.916.803	6.711.472.204.139	6.784.809.194.787	7.211.579.477.356	7.892.024.424.189	3,88

KD. REK		2019	2020	2021	2022	2023	GR(%)
01.03.01	Tanah	785.181.775.722	746.820.630.097	798.880.080.685	817.996.871.480	1.039.309.534.268,70	5,77
01.03.02	Peralatan dan Mesin	1.513.917.191.769	1.667.913.033.379	1.849.155.112.542	2.040.524.282.940	2.290.410.166.821,16	8,63
01.03.03	Gedung dan Bangunan	1.575.338.632.494	1.720.231.317.702	1.912.539.362.543	2.274.287.391.241	2.426.709.477.473,48	9,03
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.333.105.832.486	7.727.796.254.785	7.859.184.496.597	8.138.216.722.214	8.343.443.459.955,74	2,62
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	502.637.720.745	466.335.510.863	454.067.721.432	446.175.353.278	524.660.750.832,49	0,86
01.03.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	110.279.947.679	94.622.912.487	86.723.699.079	88.983.181.957	433.896.587.439,32	31,52
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	(5.296.423.184.093)	(5.712.247.455.174)	(6.175.741.278.092)	(6.594.604.325.754)	(7.166.405.552.602,02)	6,23
	JUMLAH ASET TETAP	**6.524.037.916.803**	**6.711.472.204.139**	**6.784.809.194.787**	**7.211.579.477.356**	**7.892.024.424.189**	**3,88**
	PERT.ASET TETAP (%)	6,29	2,87	1,09	6,29	9,44	8,45
01.04	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
01.04.01	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	PERT.DANA CADANGAN (%)	-	-	-	-	-	0,00
01.05	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	399.339.429.055	0,00
01.05.01	Properti Investasi	-	-	-	-	399.339.429.055,00	0,00
01.05.02	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	399.339.429.055	0,00

KD. REK		2019	2020	2021	2022	2023	GR(%)
01.06	ASET LAINNYA	997.951.967.208	1.168.209.658.681	1.148.513.279.597	1.074.988.302.445	702.201.170.104	**-6,79**
01.06.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00
01.06.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	156.062.000	120.562.000	120.562.000	2.257.582.116	14.585.140.164,29	147,81
01.06.03	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	189.742.089.055	397.742.089.055	397.742.089.055	399.339.429.055	-	-100,00
01.06.04	Aset Tidak Berwujud	10.048.341.699	10.221.497.949	10.500.155.449	14.992.603.724	20.128.828.408,46	14,91
01.06.05	Aset Lain-lain	825.337.202.002	915.157.760.271	905.346.198.451	968.921.927.060	984.460.271.537,38	3,59
	Akumulasi Amortisasi	(7.179.144.084)	(7.515.137.483)	(7.785.942.478,66)	(8.112.020.854)	(9.580.272.556,50)	5,94
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	(20.152.583.465)	(147.517.113.112)	(157.409.782.879,88)	(302.411.218.657)	(307.392.797.449,56)	72,45
	JUMLAH ASET LAINNYA	997.951.967.208	1.168.209.658.681	1.148.513.279.597,10	1.074.988.302.445	702.201.170.104	**-6,79**
	PERT.ASET LAINNYA (%)	2,23	17,06	(1,69)	(6,40)	(34,68)	-273,12
	JUMLAH ASET	**8.941.719.097.775**	**9.058.798.239.794**	**9.529.828.339.383**	**9.966.114.108.839**	**10.142.160.401.068,00**	**2,55**
	PERT.ASET (%)	5,25	1,31	5,20	4,58	1,77	-19,57

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi, 2024

Tabel 3-7 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1Januari 2019 - 31 Desember 2023

Kode rek.		2019	2020	2021	2022	2023	GR (%)
1		2	3	4	5	6	7
2	**KEWAJIBAN**	**411.030.632.726**	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	**374.378.631.492**	**-1,85**
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	411.030.632.726	389.279.172.270	381.763.642.325	484.743.302.036	374.378.631.492,35	-1,85
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00
3 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	21.037.500	6.187.500	0,00
4 . 1 . 6	Utang Belanja	270.437.818.403	244.663.792.362	229.780.093.222	331.833.591.188	329.173.572.182	4,01
5 . 1 . 7	Utang Jangka Pendek Lainnya	140.592.814.322	144.615.379.908	151.983.549.104	152.888.673.348	45.198.871.809	-20,30
6 . 1 . 8	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**411.030.632.726**	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	**374.378.631.492**	**-1,85**
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)	**(7,64)**	**(5,29)**	**(1,93)**	**26,97**	**(22,77)**	**24,40**
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri						0,00

Kode rek.		2019	2020	2021	2022	2023	GR (%)
1		2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**411.030.632.726**	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	**374.378.631.492**	**-1,85**
	PERT. KEWAJIBAN (%)	**(7,64)**	**(5,29)**	**(1,93)**	**26,97**	**(22,77)**	**24,40**

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi, 2024

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current rasio*) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-8 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Rasio Likuiditas					
1. Rasio Lancar	**2,41**	**1,97**	**3,00**	**2,32**	**1,47**
2. Quick Ratio	**1,75**	**1,26**	**2,15**	**1,47**	**0,42**

Sumber: Hasil Pengolahan (2024)

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 selalu lebih besar dari 1,5 namun menunjukan tren penurunan hingga 1,97 pada tahun 2020 dari 2,24 pada tahun 2018. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari trend nilai rasio lancar tersebut

cenderung terus menurun sampai tahun 2020 namun kembali membaik pada dua tahun terakhir walau masih berfluktuatif. Sehingga kedepan Pemerintah Provinsi Jambi, harus mulai hati-hati dalam mengelola asset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek.

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka *quick ratio* yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya *quick ratio* yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 masih lebih besar dari 1. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Provinsi Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun nilai dari quick ratio menunjukkan kecendrungan yang menurun, sehingga kedepan perlu pengolalaan asset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

Tabel 3-9 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Rasio Solvabilitas					
1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset	**0,05**	**0,05**	**0,04**	**0,05**	**0,04**
2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	**0,06**	**0,05**	**0,04**	**0,05**	**0,04**

Sumber: Hasil Pengolahan (2024).

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap equitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio solvablitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 tertera pada tabel di atas.

Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2019-2023 berada pada rentang 0,04 – 0,05. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap asset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas didapat dengan membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2019-2023 berada pada rentang 0,04-0,06. Nilai rasio ini hampir sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas (lihat tabel sebelummnya). Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif

dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-10 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Rasio Aktivitas					
1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang	11,40	12,77	4,47	3,48	3,35
2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	10,36	11,03	11,51	13,49	11,03

Sumber: Hasil Pengolahan (2024).

Rasio rata-rata umur piutang menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2019-2023 berada pada rentang 3,35 – 12,77. Tabel di atas menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 relatif berfluktuasi, namun cenderung turun.

Nilai Rasio rata-rata umur persediaan menunjukan jumlah perputaran persediaan dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relatif rendah dan dapat menganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relatif besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami

kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tersebut pada tahun 2019-2023 berada pada rentang 10,36 - 13,49. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Jambi dari tahun 2019-2023.

Tabel 3-11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2019	1.382.612.319.837	4.824.366.351.413	28,66
2	2020	1.391.317.474.093	4.430.392.750.899	31,40
3	2021	1.500.168.641.906	4.388.299.688.277	34,19
4	2022	1.510.166.012.395	4.689.603.067.300	32,20
5	2023	1.485.432.616.443	5.201.027.278.556	28,56

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi, 2024

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2019-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dari proporsi belanja ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk belanja aparatur semakin mengecil pada tiga tahun terakhir, sehingga tidak mengganggu proporsi belanja program selama tahun 2019-2023. Kondisi ini kedepan harus terus dibenahi, agar proporsi belanja terus fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kondisi alokasi anggaran ini mengindikasikan bahwa, pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2019-2023 telah mampu mendorong alokasi anggaran pada belanja publik yaitu untuk menstimulasi ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang rusak.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2018 dan 2021 terjadi surplus anggaran sedangkan pada tahun 2019-2023, 2020, 2022 dan 2023 terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran pada tahun 2019, 2020, 2022 dan 2023 tersebut dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3-12 Defisit Riil Anggaran

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	4.575.192.849.736	4.400.624.372.119	4.725.724.403.283	4.628.194.933.188	4.623.340.716.586	0,21
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	4.824.366.351.413	4.430.392.750.899	4.388.299.688.277	4.662.396.536.118	5.174.988.838.796	1,41
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	27.206.531.182	10.134.000.000	
	Defisit riil	(249.173.501.676)	(29.768.378.779)	337.424.715.006	(61.408.134.112)	(561.782.122.210)	17,66

Sumber : BPKPD Provins Jambi, 2024 (diolah)

Tabel 3-13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	13,88	9,49	8,90	15,61	11,91
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi, 2024

Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Jambi selama tahun 2019-2023 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

Tabel 3-14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	420.323.429.670	100,00	285.774.677.553	100,00	740.479.765.897	100,00	679.072.586.671	100,00	69.679.379.203	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	84.642.815.824	20,14	174.196.723.107	60,96	242.289.186.674	32,72	232.286.003.941	34,21	6.966.082.720	10,00
3.	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	(62.825.879.424)	(14,95)	(44.545.360.208)	(15,59)	122.662.294.168	16,57	79.881.974.238	11,76	(64.838.887.563)	(93,05)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	120.000.000	0,03	544.308.925	0,19	(40.981.635.838)	(5,53)	(19.651.375.480)	(2,89)	(490.329.182)	(0,70)
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	398.386.493.271	94,78	155.579.005.729	54,44	416.509.920.893	56,25	386.555.983.972	56,92	128.042.513.228	183,76

No.	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
7.	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi (diolah), 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Pembentuk Silpa terbesar berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kecuali pada tahun 2020 yang pembentuk terbesarnya berasal dari pelampauan penerimaan PAD. Kondisi sebagaimana tahun 2020 tersebut perlu ditingkatkan, dimana Silpa diupayakan berasal dari pelampauan target pendapatan bukan berasal dari belanja yang tidak terealisasi ataupun penghematan belanja.

Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 2 tahun kedepan (tahun 2024-2025) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

   Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jambi pada tahun 2024-2025 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, atau pada Bank Jambi.

2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan bidang usaha BUMD.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Jambi untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jambi diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan emudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN.
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah ditargetkan akan meningkat rata-rata 2,35 per tahun, sedikit lebih rendah dari target sebelum perubahan, yaitu sebesar 2,52 persen pertahun dalam kurun waktu 2022-2026. Hal ini implikasi dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana diproyeksikan akan terjadi penurunan target rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer dari target sebelumnya sebesar 0,57 persen per tahun, menjadi -0,88 persen per tahun atau turun 0,88 persen per tahun. Sementara pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah didorong untuk lebih besar dari target semula sebesar 5,59 persen per tahun, menjadi 6,11 persen per tahun. Perubahan target tersebut yang didukung dari perubahan pertumbuhan rata-rata pajak daerah dari 3,88 persen menjadi 4,72 persen dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah dari semula 5,32 persen pertahun menjadi 10,33 persen per tahun. Pertumbuhan yang tidak terlalu besar ini dengan mempertimbangkan perekonomian Provinsi Jambi yang masih memerlukan pemulihan sebagai akibat pandemi Covid-19 pada awal tahun rencana.

Dengan pertumbuhan rata-rata PAD yang diproyeksikan lebih besar dari pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Jambi. Kontribusi PAD diproyeksikan terus meningkat dari 39,05 persen pada rencana tahun 2022 dan terealisasi sebesar 44,62 persen, menjadi 53,29 persen pada tahun 2026 atau naik 8,03 persen dari proporsi yang ditetapkan sebelumnya sebesar 45,26 persen. Sedangkan proporsi pendapatan transfer diproyeksikan turun sedikit demi sedikit dari target 60,20 persen tahun 2022 dan terealisasi sebesar 54,58 persen, menjadi 46,66 persen pada tahun 2026 atau lebih rendah dari target proporsi sebelumnya yang ditetapkan sebesar 54,68 persen.

Kontribusi rencana anggaran belanja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diproyeksikan sedikit melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,27 persen. Perlambatan ini didorong oleh realisasi kontribusi belanja operasi sebesar 61,74 persen pada tahun 2022 dan diupayakan proporsinya ditekan agar tidak terlalu meningkat

menjadi 52,5 persen atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,41 persen selama kurun waktu 2022-2026.

Belanja modal akan didorong proporsinya terus meningkat, dari realisasi tahun 2022 sebesar 19,32 persen menjadi 21,79 persen pada tahun 2026. Melalui proporsi belanja modal yang cukup, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jambi pada periode RPJMD ini. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan cukup besar juga direncanakan akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears) yaitu tahun 2022-2024 untuk memberikan jaminan anggaran tersedia sampai pekerjaan selesai. Sementara belanja bantuan keuangan berkisar antara 3,15 – 3,57 persen selama kurun waktu 2022-2026. Bantuan keuangan ini direncanakan untuk penunjang pelaksanaan program DUMISAKE sebesar Rp156,2 milyar setiap tahunnya untuk diberikan kepada 1585 desa/ kelurahan masing-masing Rp100 juta/tahun/desa/kelurahan, serta Rp7,2 milyar setiap tahun mulai tahun 2023 untuk kecamatan sebesar Rp50 juta/ kecamatan dan akan dialokasikan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Bantuan keuangan ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun. Adapun rencana pinjaman daerah sebagaimana direncanakan sebelumnya tidak jadi dilaksanakan, dengan pertimbangan bahwa kepastian pemenuhan kebutuhan pendanaan rencana pembangunan yang akan dilakukan cukup dengan mekanisme tahun jamak.

Tabel 3-15 Perubahan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

No	Uraian	Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
1	Rata-rata pertumbuhan pendapatan	2,52	2,35
2	Rata-rata pertumbuhan PAD	5,59	6,11
3	Rata-rata pertumbuhan pendapatan	0,57	-0,88

No	Uraian	Perubahan	
		Sebelum	Sesudah
	transfer		
4	Rata-rata pertumbuhan belanja	1,7	-0,27
5	Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan	-11,18	-17,86

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi (diolah), 2024

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

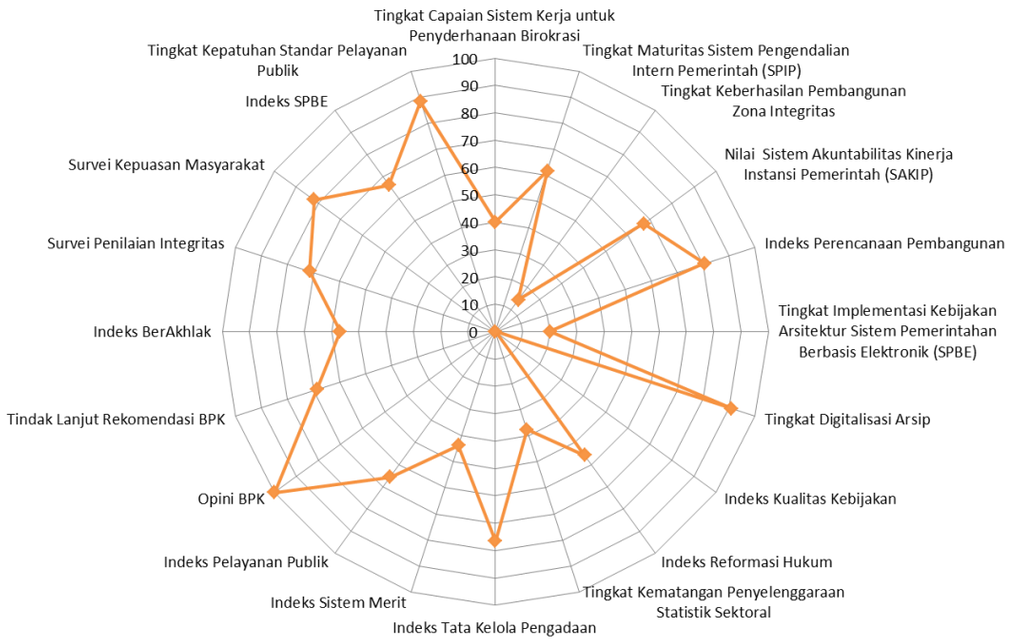

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Gambar 4-1 Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana pada gambar 4-1, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral,indeks sistem merit, dan indeks berahlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.

4.1.2 Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

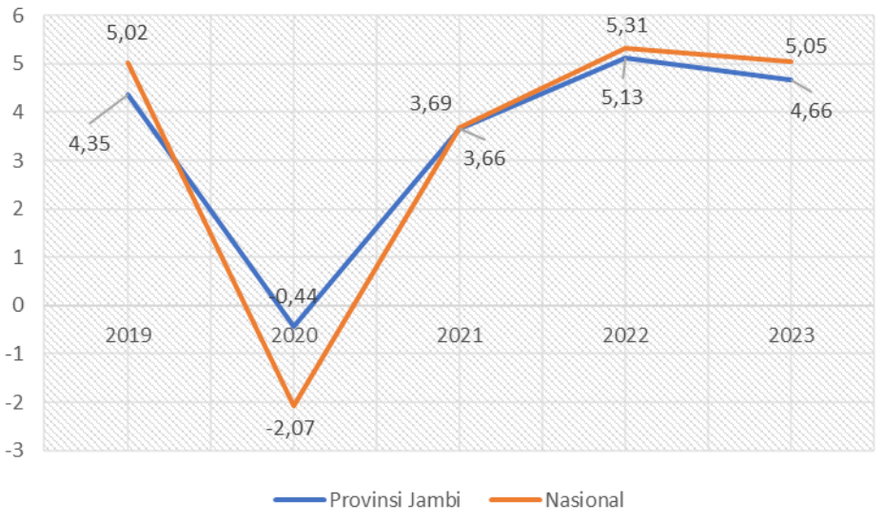

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 4-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan

infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

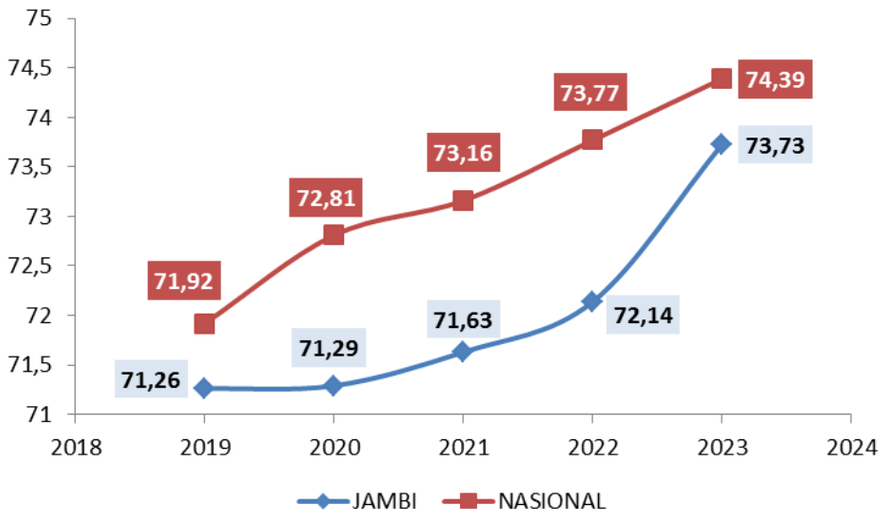

Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 4-3 IPM Nasional dibanding IPM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 dengan metode baru

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2023 di Provinsi Jambi adalah 9,16 tahun, ini berarti rata-rata

penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Capaian indikator ini lebih baik dari nasional hingga tahun 2021, di bawah nasional pada tahun 2022 dan kembali lebih baik dari nasional pada tahun 2023. Hal ini berarti perbaikan pada indikator ini kurang stabil.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.

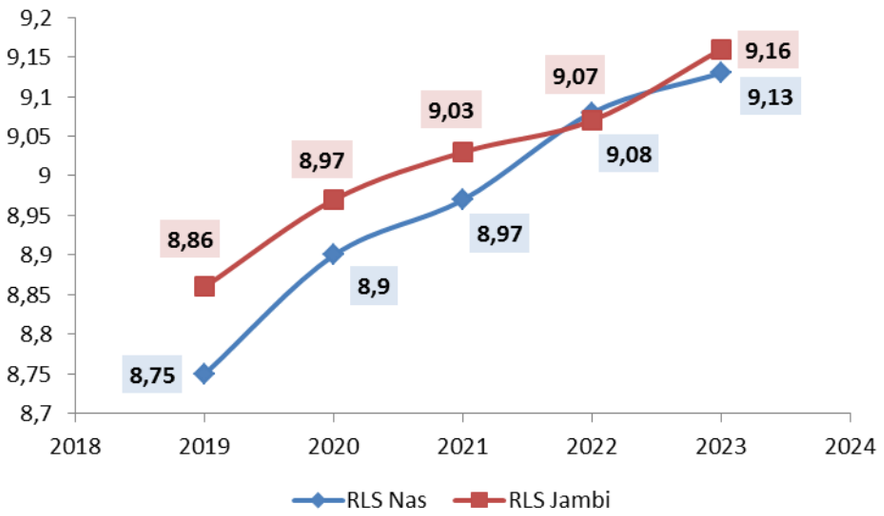

Sumber : BPS, 2024

Gambar 4-4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2019-2023

Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi,

pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 71,06 tahun pada 2019 meningkat menjadi 71,77 tahun pada 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71 – 72 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

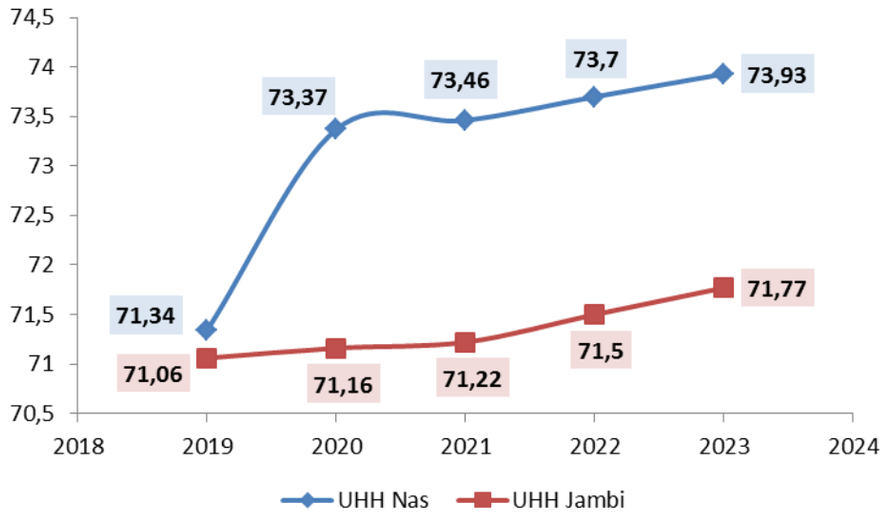

Sumber : BPS, Tahun 2024

Gambar 4-5 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2019-2023

Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

4.1.4 Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas linkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.

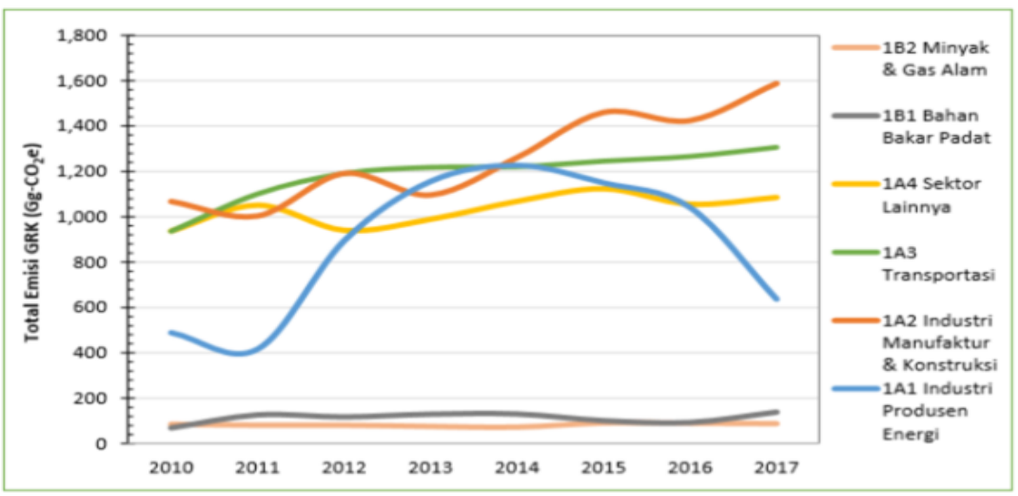

Sumber: KLHS Energi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, UNDP, 2021

Gambar 4-6 Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017

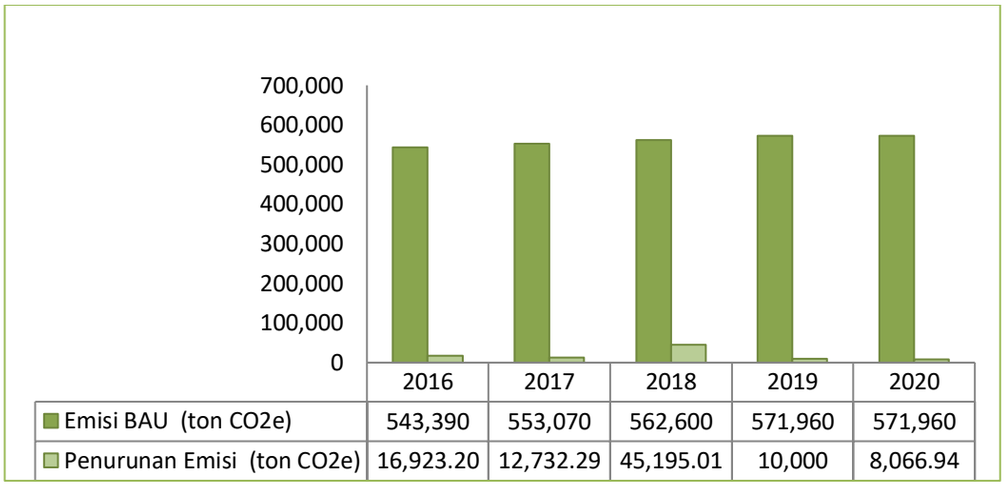

	2016	2017	2018	2019	2020
Emisi BAU (ton CO2e)	543,390	553,070	562,600	571,960	571,960
Penurunan Emisi (ton CO2e)	16,923.20	12,732.29	45,195.01	10,000	8,066.94

Sumber: Dinas LH Provinsi Jambi, 2021

Gambar 4-7 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi

Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO^2e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO^2e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta

meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

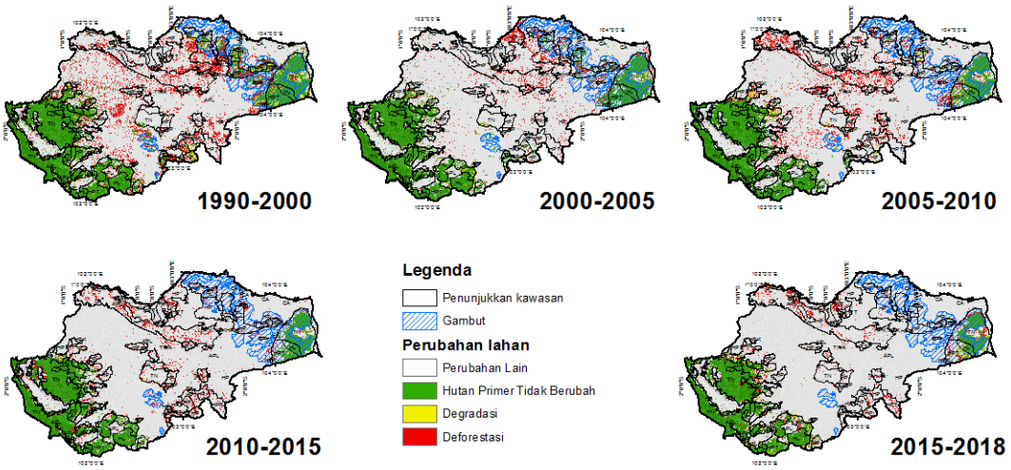

Gambar 4-8 Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, dimana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagi intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal**

   Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang

kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan pendidikan
b. Peningkatan pelayanan kesehatan
c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan pemukiman tangguh bencana,
d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakalan lingkungan hidup.
h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. **Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun**

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut:

a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah

c. Penguatan sektor industri

Pada periode sebelum Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013, namun dengan telah terbitnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 maka mulai Tahun 2023 maka mengacu pada RTRW terbaru. Melalui RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi). Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya: rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 juga harus memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, yaitu:

a. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
c. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
d. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut menjadi penopang agenda pembangunan nasional, yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan dan dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan; 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,

memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

   Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

   Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Berdasarkan ketujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional tersebut, Pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan untuk Pulau Sumatera, yaitu:

- Memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia

Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN

- Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
- Mempercepat transformasi ekonomi melalui:
  a. hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah;
  b. mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan Pelabuhan; dan.
  c. pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor, dengan hub internasional di Kuala Tanjung (Kabupaten Batubara, Sumatera Utara).

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan tersebut, Pemerintah merencanakan pelaksanaan 41 proyek strategis nasional. Beberapa diantaranya yang terkait dengan solusi permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, yang memiliki manfaat:
   - Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs).
   - Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.
   - Terjadinya perubahan prilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis).
2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit, yang memiliki manfaat:
   - Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen;
   - Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tahun;
   - Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia;
   - Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat.
3. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, yang memiliki manfaat meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan:
   - Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup

- Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen

4. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, yang memiliki manfaat:
   - Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi)
   - Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan
   - Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0.
5. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung
6. Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital, yang memiliki manfaat:
   - Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK
   - Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan
   - Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi, dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa Big Data dari berbagai sumber data yang tersedia.
7. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
8. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Wilayah Provinsi Jambi dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu bagian barat, tengah dan timur. Pembagian ini didasarkan pada karakter bentang alam. Bagian barat ditujukan untuk pembangunan berbasis sektor kehutanan dan konservasi sumber daya alam, bagian tengah merupakan sentra pembangunan berbasis sektor pertanian dan sektor lain yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan (pertambangan), sedangkan bagian timur ditujukan pada pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa serta interkoneksi antar wilayah di pesisir timur Sumatera.

Berdasarkan pembagian wilayah pembangunan tersebut, terdapat korelasi rencana pembangunannya dengan wilayah lain yang bersebelahan namun secara yurisdiksi merupakan wilayah provinsi lain, yaitu Provinsi Sumatera Barat (bagian barat dan tengah), Provinsi Riau (bagian tengah dan timur), Provinsi Bengkulu (bagian barat) dan Provinsi Sumatera Selatan (bagian barat, tengah dan timur sebelah selatan Provinsi Jambi). Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditelaah rencana pembangunan pada wilayah-wilayah yang dimaksud karena akan saling terkait dengan rencana pembangunan di wilayah yang secara yurisdiksi merupakan wilayah Provinsi Jambi.

Hasil telaah menunjukkan bahwa ada kesamaan rencana pembangunan yang dilakukan di wilayah Provinsi Jambi yang berbasis pembagian wilayah pembangunan dengan rencana pembangunan pada wilayah-wilayah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan provinsi lain juga telah berdasarkan pada karakter dan potensi lokal. Dengan demikian, perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah agar hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan di wilayah-wilayah yang berada didalam satu kesamaan wilayah pembangunan dapat saling menguatkan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada:

a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan

   Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lahan-lahan pertanian pangan yang produktif dan berskala ekonomi, sehingga hasilnya akan mendukung peningkatan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dengan kualitas yang terjaga dan harga yang semakin terjangkau. Meningkatnya produksi pertanian pangan dapat menjadi salah satu sektor yang juga mendorong

meningkatnya tingkat pendapatan kelompok masyarakat petani dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian wilayah Provinsi Jambi.

Potensi pengembangan wilayah pertanian pangan sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Provinsi Jambi merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan DAS kedua terbesar di Indonesia dan pada saat ini merupakan sumber air yang belum banyak dimanfaatkan. Dibutuhkan penyediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dari aliran sungai ini berupa perluasan jaringan irigasi dan embung-embung penampungan air untuk kebutuhan lahan pertanian pangan teknis. Adanya infrastruktur ini akan merubah lahan pertanian kering yang belum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah irigasi teknis dengan luasan yang cukup signifikan untuk mendorong peningkatan aspek ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi yang juga dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan, mengingat lebih dari 70% pendapatan masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi pangan dan lebih dari 20% digunakan untuk konsumsi beras atau bahan makanan pokok. Di sisi lain, adanya infrastruktur ini akan berfungsi juga didalam pengendalian potensi banjir yang di masa depan akan meningkat jika aktivitas manusia di daerah hulu yang menyebabkan tingginya sedimentasi dan pendangkalan aliran sungai di wilayah Provinsi Jambi tidak segera ditertibkan.

Perluasan lahan pertanian di lahan-lahan rawan kebakaran juga menjadi salah satu program yang dapat mendukung penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Adanya pemanfaatan lahan-lahan tersebut dan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat juga dapat berperan dalam mengurangi potensi bencana kebakaran lahan serta memburuknya kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi.

b. Penguatan kelembagaan koperasi petani dan nelayan

Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya adalah kelompok masyarakat yang sumber penghidupannya adalah pada sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, berbagai upaya peningkatan

produktivitas lahan dan akses kepada pembiayaan usaha termasuk investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dapat lebih diwujudkan. Disamping itu dengan menguatnya kelembagaan koperasi ini akan menguatkan posisi tawar petani terhadap harga jual hasil produksi perkebunannya. Sisa hasil usaha yang dikelola oleh koperasi juga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan modal usaha maupun investasi pada sektor industri pengolahan yang dibutuhkan bersama dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan sistem ekonomi rakyat selaras dan karenanya harus dibarengi dengan kebijakan pembangunan yang fokus pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau. Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi hijau mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan, serta memperhitungkan penurunan emisi gas rumah kaca.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan koperasi yang bergerak pada sektor pertanian perkebunan difokuskan agar para anggotanya dapat berdaya untuk menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan adalah meningkatnya produktivitas lahan dan keuntungan pelaku usaha disamping mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup akibat perluasan lahan perkebunan yang dapat memicu terjadinya peningkatan gas emisi rumah kaca.

c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan)

Pembangunan infrastruktur statis ini tidak hanya dapat menekan biaya logistik, namun juga memiliki dampak lainnya berupa: menurunnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan pengangkutan yang digunakan pada saat ini serta dampak lanjutannya berupa konflik sosial antara masyarakat disepanjang jalan pengangkutan tersebut dengan para pengguna jalan. Keberadaan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan menekan potensi terjadinya alih fungsi lahan di sekitar

infrastruktur tersebut dibandingkan jenis infrastruktur pengangkutan lainnya (jalan tol atau jalan berbayar) mengingat konflik lahan masih merupakan permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi pada saat ini,

d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung

Pembangunan infrastruktur statis ini perlu dilakukan sebagai pelabuhan pengumpul sesuai arahan kebijakan pembangunan nasional. Di masa depan, diperlukan upaya peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung berikut fasilitasnya sebagai pendukung pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hub internasional untuk wilayah Pulau Sumatera. Letak geografis yang strategis menjadi pertimbangan terhadap upaya peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung ini, karena dapat mengurangi biaya logistik untuk kegiatan ekspor-impor bagi wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya, dan berdampak pada menurunnya harga barang-barang dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi

Pembangunan kawasan strategi ekonomi sangat diperlukan untuk mengakomodir pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian. Disamping selaras dengan RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 Pertumbuhan ekonomi hijau juga difokuskan pada pembangunan kawasan strategis ekonomi yang memfasilitasi pembangunan berbagai industri yang tidak hanya dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat namun juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi tekanan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

1. Pabrik pengolahan CPO (PKS) dengan kapasitas 5 ton/jam yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi pekebun rakyat. Pembangunan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan rakyat yang masih belum memiliki atau lokasinya jauh dari PKS yang sudah ada sehingga dapat mengurangi biaya logistik yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat pelaku usaha. Saat ini dengan menggunakan data nasional, kapasitas penggunaan PKS sudah diatas 90%, dan karenanya dibutuhkan penambahan PKS untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan produk minya sawit baik dalam maupun luar negeri.
2. Pabrik pengolahan limbah cair PKS yang dapat menghasilkan listrik biogas bagi operasional PKS maupun listrik bagi pemukiman

sekitarnya sebagai bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Pabrik pengolahan aspal karet, sebagai upaya menyerap hasil produk perkebunan karet rakyat serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional dan dapat mengurangi biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan.
4. Pembangkit listrik tenaga uap biomassa, yang bersumber bahan bakunya dari biomassa yang dihasilkan dari upaya peremajaan kebun karet, rehabilitasi lahan kritis, hasil pengelolaan hutan di areal program perhutanan sosial maupun hutan tanaman industri.

Pembangunan kawasan strategis ekonomi juga meningkatkan potensi Pendapatan Daerah melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan aktivitas perekonomian didalamnya.

f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital

Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar perusahaan atau individu. Program pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) beserta penguatan ekosistem ekonomi digital seperti pasar komoditas digital di sentra-sentra produksi perkebunan kopi, kayu manis dan rempah-rempah lainnya akan meningkatkan peluang pemasaran hasil produk pertaniannya hingga ke pasar global disertai dengan mengurangi biaya transaksi ekonomi yang terjadi pada saat ini melalui sistem tata niaga dan rantai pasok konvensional.

g. Penataan ruang dan tata guna tanah.

Penataan ruang wilayah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sudah merupakan kebutuhan mutlak, terutama Provinsi Jambi yang perekonomiannya masih tergantung pada lapangan usaha berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya yang terkandung didalamnya. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan iii) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah perlu ditindaklanjuti dengan penata gunaan tanah yang baik, yang bertujuan untuk: i) mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan lahan yang salah tempat; ii). mengatur persediaan lahan bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus; iii). mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah; dan iv) menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Terwujudnya penataan ruang wilayah dan penata gunaan tanah yang baik merupakan wujud konkrit hasil dari reformasi birokraksi dan berjalannya proses pembangunan yang inklusif. Program ini juga akan mendukung peningkatan pelayanan pada bidang perumahan dan permukiman, yang difokuskan pada program peningkatan akses masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah-rendah, kepada air bersih dan sanitasi yang layak berbasis komunitas. Penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana disertai dengan pengalokasian kawasan permukiman di daerah layak huni – tidak rawan bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan relokasi masyarakat di daerah rawan bencana sesuai penataan ruang juga perlu menjadi prioritas.

h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik melalui pengelolaan satu data – satu peta

Perencanaan tata guna lahan tampak belum cukup mengatur alokasi lahan produktif. Rencana induk perkebunan hanya dimiliki komoditas tertentu sementara masih banyak komoditas strategis lainnya. Perluasan perkebunan yang berlebihan perlu dikendalikan sehingga tidak merusak dan mengganggu lahan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan yang minim pada lahan mengakibatkan konflik pada areal hutan lindung gambut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka peluang pelanggaran terhadap penguasaan lahan. Persoalan pemetaan ini juga terjadi pada lahan pertanian yang belum dilengkapi dengan peta kesesuaian lahan

pertanian. Budidaya padi merupakan sektor yang masih perlu untuk didorong mengingat produktivitasnya masih dibawah rata-rata nasional. Perluasan lahan pertanian, meskipun sudah didorong oleh pemerintah daerah melalui penegasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), masih membutuhkan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini perlu didukung oleh pengelolaan data yang lebih baik mulai dari pengumpulan data, data cleaning, penyebarluasan data dan pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi-institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, penyadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasiitas-fasilitas kesehatan berupa puskemas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, oleh karena itu dalam Perubahan RPJMD ini tidak dilakukan perubahan atas Visi Misi. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

5.2 Misi

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan

(RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sesuai” berasal dari suai yang artinya berpadanan (dengan); berpatutan (dengan); selaras. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Secara jumlah terjadi pengurangan terhadap jumlah misi yang disampaikan pada saat kampanye, namun secara substansi ketiga misi yang ditetapkan selaras dengan misi saat kampanye. Berdasarkan hasil *cascading* yang dilakukan, dua diantara lima misi yang dilaksanakan pada saat kampanye lebih tepat sebagai sasaran pada misi memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.**

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Sementara pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi titik strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2 **Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi terkontraksi pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun sebelumnya perlu dipulihkan segera agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Komoditas unggulan Provinsi Jambi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang hampir seluruhnya berbasis lahan perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menerapkan praktek-praktek baik, serta perlu ditingkatkan nilai tambahnya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung guna meningkatkan produktivitas serta menarik investasi industri pengolahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau menjadi pilihan karena menjadi salah satu jalan tengah agar ekonomi Provinsi Jambi bertumbuh namun lingkungan tetap terjaga, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB hijau.

3 **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.**

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan sehat ini ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Agama dan kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan yang dilakukan karena memuat 7 dimensi yang holistik yaitu (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

5.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**

   Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah.

2. **Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima**

   Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat menghendaki penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik. Untuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan organisasi dan aparatur yang kapabel sehingga dapat bekerja efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima akan ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan tersebut, sehingga indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terus meningkat, sedangkan birokrasi yang kapabel pada Pemerintah Provinsi Jambi ditandai dengan Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang semakin meningkat.

3. **Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan**

   Komoditas unggulan Provinsi Jambi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan dengan produktivitas yang tinggi.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan, maka seluruh kewenangan perizinan, pengawasan dan pembinaan berpindah ke Pemerintah Pusat, sehingga walaupun komoditas pertambangan seperti batubara merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi namun tidak menjadi bagian yang dimaksud dalam sasaran ini. Sehingga indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.

4. **Meningkatnya industri pengolahan**

   Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Provinsi Jambi adalah melalui pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

5. **Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata**

   Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, seperti Geopark Nasional Merangin Jambi, Komplek percandian Muaro Jambi, Alam Kerinci, 4 (empat) Taman Nasional, Pantai Cemara di Pantai Timur yang merupakan tempat burung berimigrasi antar benua dan lain-lain, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi terutama pasca pandemi Covid-19. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

6. **Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar**

   Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, rasio elektrifikasi, persentase luas sawah beririgasi, dan persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet.

7. **Meningkatnya kualitas lingkungan**

   Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon (ekonomi hijau) di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

8. **Menurunnya tingkat pengangguran**

   Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Provinsi Jambi, sehingga pada periode RPJMD ini akan dilakukan upaya-upaya penurunan angka pengangguran tersebut. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun.

9. **Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan**

   Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Jambi berkaitan dengan pangan, karena konsumsi pangan masih mendominasi pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan diangkat menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks ketahanan pangan.

10. **Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**

    Kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

11. **Meningkatnya akses pendidikan**

    Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah.

12. **Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya**

Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya menjadi salah satu

sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

13. **Meningkatnya toleransi intra dan antar agama**

    Kerukunan intra dan antar agama melalui pengembangan sikap toleransi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Situasi yang kondusif tentu akan membuat pembangunan berjalan lebih baik. Untuk itulah hal tersebut dijadikan salah satu sasaran dalam RPJMD ini, dengan indikator Indeks kebebasan dari diskriminasi.

14. **Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan**

    Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu didorong untuk berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender.

Tabel 5-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi

Visi: Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi			B	B	B	BB	BB	BB	BB
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	75	77	80	82	85	85
			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	28,1	30	32	34	36	38	38
				Indeks Kepuasan Masyarakat	83,09	83,5	84	84,5	85,3	86	86
Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan	Pertumbuhan PDRB Hijau			NA	4,55	4,75	5	5,2	5,3	5,3
			Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	30,85	30,9	30,92	30,93	30,94	30,95	30,95
			Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	10,83	10,9	10,95	11	11,5	11,75	11,75

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat		Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,18	1,2	1,22	1,3	1,4	1,5	1,5
			Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas	53,5	53,9	54	54,1	54,2	54,4	54,4
				Akses terhadap air minum layak	78,06	79,08	83,92	83,92	85	87	87
				Rasio elektrifikasi	99,9	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
				Persentase luas sawah beririgasi	76,89	78	79,5	81	82,5	84	84
				Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	81,76	99,36	100	100	100	100	100
				Persentase penurunan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi (PPKS)	0,46	-	-	0,74	0,74	0,74	0,74

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07	72,43	72,8	73,17	73,53	73,53
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)	31,683	3,283	3,348	3,412	3,476	3,541	34,641
		Tingkat kemiskinan			7,97	7,9	7,84	7,6	7,45	7,2	7,2
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka	5,13	5	4,61	4,56	4,39	4,2	4,2
			meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia			71,29	72,14	72,62	73,07	73,56	74,04	74,04
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,16	71,28	71,4	71,52	71,64	71,76	71,76

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
	gender		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,55	8,79	8,9	9,02	9,14	9,26	9,26
			Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mayarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1,02	17	18	19	20	21	21
		Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)			NA	-	-	79,00	80,00	80,50	80,50
			Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi	93,47	93,6	93,8	-	-	-	-
				Indeks Aspek Kebebasan (metode baru)	NA	-	-	78,5	79,0	80,0	80,0
			Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,86	67,78	69,02	-	-	-	-
				Indeks Ketimpangan Gender	0,558	-	-	0,56	0,58	0,61	0,61

Sasaran–sasaran di atas diharapkan dapat memulihkan perekonomian Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh berkurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Tabel 5-2 Target Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMN untuk Provinsi Jambi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7	5,4	6,0	6,4	6,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,7	3,5	3,40	2,90	2,60

Sumber: RPJMN 2020-2024

RPJMN telah memberikan target pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tergambar pada tabel 5-2 di atas. Target tersebut dibangun pada kondisi normal pada tahun 2019 dengan melihat tren pada tahun-tahun sebelumnya serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia tahun 2020 dan telah memasuki tahun kedua dengan kondisi yang tidak terlalu berbeda maka target tersebut tentu saja sudah tidak relevan. Terlebih dampak yang telah diakibatkan tentu memerlukan biaya penanganan yang tidak sedikit, sehingga beberapa rencana pembangunan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menghitung kembali dan menetapkan target rasional dengan tetap melakukan langkah–langkah agar dapat merealisasikannya sebagaimana tergambar dalam tabel 5-3.

Tabel 5-3 Target Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	4,90	5,15	5,30	5,40
2	Tingkat Kemiskinan (Sept) (%)	7,90	7,84	7,60	7,45	7,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,00	4,61	4,56	4,39	4,2

Sumber: Updating Analisis KEMD Bappeda Prov. Jambi, 2023

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yangumum guna memandu pengembangan program pembangunantahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatupemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024. Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : memantapkan Tata kelola Pemerintah		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,danakuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		pemberantasan korupsi
		Percepatan proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah
		Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
		Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi
		Pengembangan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal
		Penataan batas wilayah provinsi
		penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah
	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dnegan pelayanan publik yang prima	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
		Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK
		Penyederhanaan birokrasi dan perizinan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Menerapkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0
Misi 2 : memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat
		Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin
		mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
		Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
		Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan
		Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
		revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
	Meningkatnya industri pengolahan	fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam
		Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung
		Perencanaan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Bantuan modal kerja bagi UMKM/ industri rumah tangga
		Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal
	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran
		Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
		Dukungan fasilitas e-bisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif
		Pengembangan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal
		Membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan
		Mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia
		Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota
		Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan
	memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Fasilitasi dan peningkatan kualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara
		Fasilitasi akses terhadap jaringan internet
		Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan
		Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi
		Fasilitasi dan pembangunan jembatan
		Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus
		Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol
		Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung
		Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional
		Fasilitasi percepatan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung
		Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang
		Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api Provinsi Jambi

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati parbo
		Pengembangan dan peningkatan bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional
		Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi
		Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan
		Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum
		Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas dan kelestarian sungai
		restorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis (GEBERMEWAH)
		peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat
		Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan
		Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk
		Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Peningkatan penggunaan energi bersih (*clean energy*) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
		Fasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
		Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera
		Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan
	menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja
		Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil atau usaha rumah tangga
		Revitalisasi peran BLK
		peningkatan *life skill* santri/santriwati
		Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya
	meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Pembangunan dan pengembangan kawasan lumbung pangan
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
		pengembangan kawasan kampung pangan terpadu
		Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak
		Fasilitasi peningkatan peran PPL yang tepat

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
		Peningkatan produksi potensi kelautan di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur
		Mendorong pembentukan kampung nelayan maju dan kampung budidaya perikanan terpadu
		Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Misi 3: Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid-19
		Mendorong optimalisasi peran institusi kesehatan
		Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
		Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
		Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
		Dukungan kegiatan posyandu
		Pengembangan RSUD Rd. Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
		pembangunan stadion olahraga (Jambi Sport Center)

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga tertentu menjadi industri olahraga
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
		Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%
	Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin
		Pemberian beasiswa
		Dukungan fasilitas e-learning untuk keluarga miskin
		Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal
		Revitalisasi SMK
		Penambahan RKB SMA/SMK
		beasiswa bagi atlet berprestasi
		Peningkatan peran swasta dalam pembangunan bidang olahraga
		Pengembangan pusat pendidikan dan latihan pelajar olahraga unggulan
		peningkatan rata-rata lama sekolah
	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Peningkatan festival dan lomba budaya daerah
		Peningkatan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat
	Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Pembangunan Islamic Center
		Pembangunan sarana prasarana agama termasuk sarana pendidikan keagamaan
		peningkatan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama
		Peningkatan Indeks aspek kebebasan
		Penguatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri
		Peningkatan peran da'i dalam pembangunan
		fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan keagamaan (ponpes dan tahfiz)
	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum,ketenagakerjaan, sosial, politik,lingkungan hidup dan ekonomi
		Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
		Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		Pembangunan pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
		gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi
		peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional seperti yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetap juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada tahun 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan

dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Transformasi ekonomi wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor.

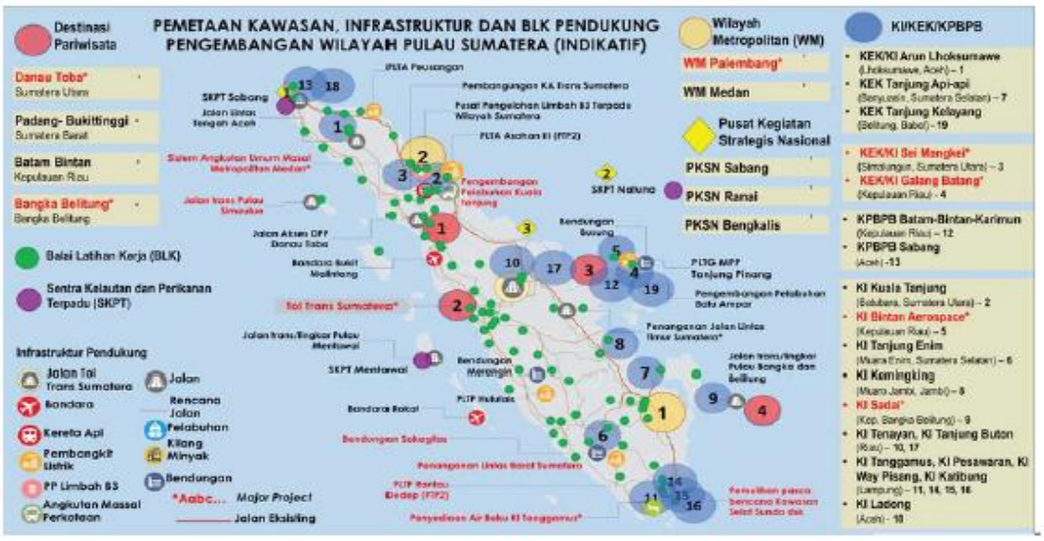

Sumber : RPJMN, 2020

Gambar 6-1 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera RPJMN 2020-2024

6.2.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6-2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	5,10	5,02	3,69	4,16	4,43
Merangin	5,17	4,82	0,78	5,09	5,72
Sarolangun	4,72	5,08	-0,26	6,61	6,73
Batang Hari	4,96	4,99	-0,27	4,74	12,27
Muaro Jambi	5,27	5,06	0,27	4,08	7,97
Tanjung Jabung Timur	3,13	4,25	-3,87	0,13	0,57
Tanjung Jabung Barat	6,89	5,15	-0,64	1,36	2,56
Tebo	5,02	4,78	-0,04	4,32	6,30
Bungo	4,72	4,35	-0,40	5,12	4,73
Kota Jambi	5,48	5,33	-3,28	3,94	5,36
Kota Sungai Penuh	5,54	5,12	-0,14	3,67	4,45

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Bila dilihat dari data *time serries* pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 adalah Kabupaten Batang Hari, diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Persebaran perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dan 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

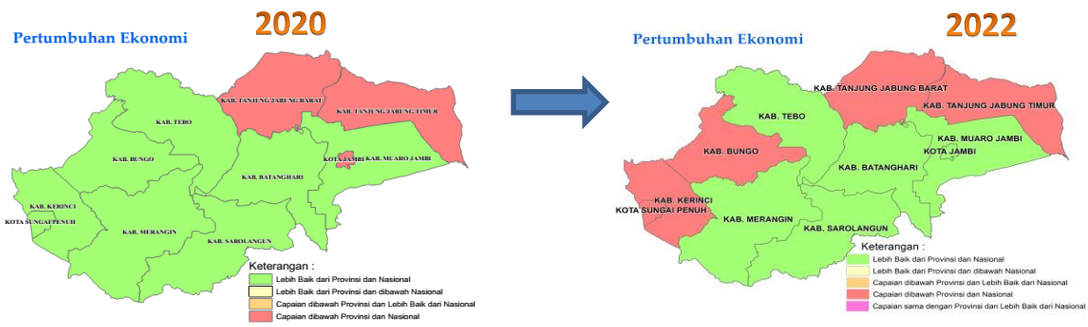

Gambar 6-2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2022

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kecepatan pemulihan ekonomi di tiap wilayah tidak sama. Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kota Sei. Penuh yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dari Provinsi Jambi dan Nasional pada Tahun 2020, justru pertumbuhannya di bawah capaian Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2022. Pertumbuhan dan pemulihan yang tidak secepat kabupaten/kota lain juga terlihat dari penurunan kontribusi Kota Sei.Penuh dan Kabupaten Kerinci terhadap PDRB Provinsi Jambi. Sedangkan kontribusi Kabupaten Bungo terhadap PDRB Provinsi Jambi tetap meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut berada di bawah Provinsi dan nasional pada tahun 2022 lebih disebabkan oleh baseline PDRB Tahun 2021, dimana Kabupaten ini telah tumbuh tinggi pada tahun 2021, tertinggi kedua atau pulih paling cepat setelah Kabupaten Sarolangun.

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari sub kategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, dengan kontribusi yang terus menurun sejak Tahun 2020.

Tabel 6-3 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB PROVINSI JAMBI				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	4,49	4,52	5,03	4,84	4,43
Merangin	6,9	6,97	7,55	7,67	7,36
Sarolangun	6,92	6,92	6,98	7,13	7,53
Batanghari	7,48	7,49	7,91	8,06	8,82
Muaro Jambi	10,96	11,08	11,8	11,89	11,96
Tanjung Jabung Timur	11,51	11,24	9,39	9,38	9,29
Tanjung Jabung Barat	19,79	19,61	17,88	18,02	18,17
Tebo	6,61	6,65	7,1	7,27	7,15
Bungo	8,26	8,16	8,36	8,64	9,04
Kota Jambi	13,75	13,96	14,35	13,68	13,11
Kota Sungai Penuh	3,32	3,41	3,64	3,42	3,15

Sumber : Jambi Dalam angka 2023,2023

Tabel 6-4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	7,07	7,13	7,30	7,71	7,57
Merangin	8,88	8,48	8,63	9,11	8,70
Sarolangun	8,73	8,45	8,42	8,87	8,48
Batang Hari	10,23	9,75	9,65	10,05	9,63
Muaro Jambi	4,05	3,83	3,83	4,53	4,47
Tanjung Jabung Timur	12,38	11,54	10,95	11,39	10,91
Tanjung Jabung Barat	11,10	10,56	10,29	10,75	10,00
Tebo	6,58	6,47	6,26	6,68	6,34
Bungo	5,78	5,6	5,8	6,23	5,38
Kota Jambi	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
Kota Sungai Penuh	2,76	2,81	3,03	3,41	2,97

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2018 – 2022 pada tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun jika dilihat dari jumlah maka penduduk miskin terbanyak berada pada Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 2,97 persen, dan persentase ini terus menunjukan penurunan sejak meningkat pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

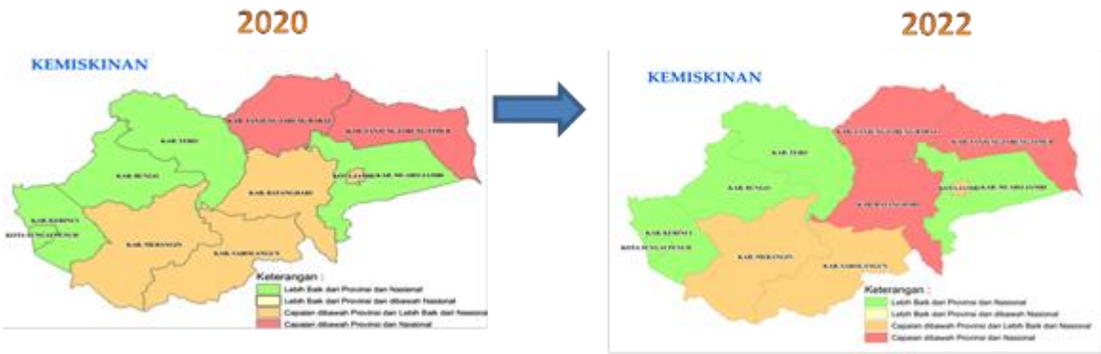

Gambar 6-3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022

Tabel 6-5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63
Merangin	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69
Sarolangun	4,06	4,09	5,71	5,52	5,22
Batanghari	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53
Muaro Jambi	4,52	5,20	5,43	5,59	5,35
Tanjung Jabung Timur	1,80	1,63	1,41	1,56	1,32
Tanjung Jabung Barat	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88
Tebo	2,00	2,90	2,95	2,83	1,38
Bungo	3,03	3,82	5,94	5,86	5,50
Kota Jambi	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95
Kota Sungai Penuh	5,13	4,00	5,56	3,00	2,49

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kota Jambi memiliki TPT tertinggi disusul oleh Kabupaten Kedua kabupaten/kota tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana dampak pandemi Covid-19 belum hilang sepenuhnya pada sektor ini. Namun demikian, pada dasarnya TPT pada kedua kabupaten/kota tersebut telah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

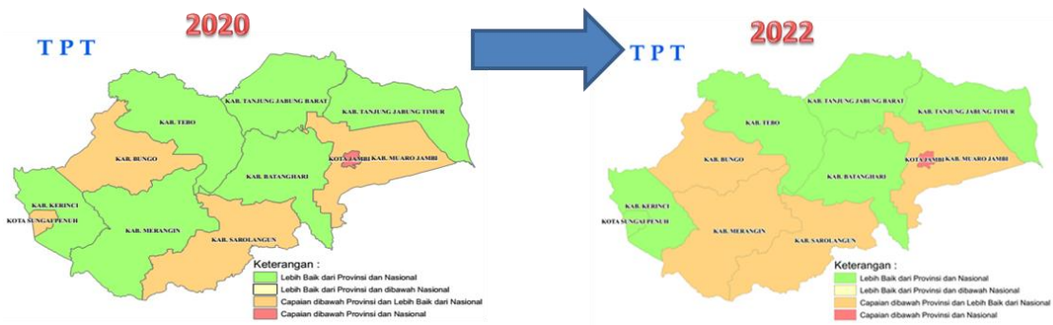

Gambar 6-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022

Tabel 6-6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28
Merangin	0,35	0,29	0,32	0,29	0,35
Sarolangun	0,29	0,29	0,31	0,32	0,30
Batanghari	0,30	0,31	0,32	0,31	0,29
Muaro Jambi	0,31	0,27	0,28	0,32	0,27
Tanjung Jabung Timur	0,29	0,29	0,25	0,25	0,27
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,29	0,28	0,25	0,26
Tebo	0,31	0,28	0,30	0,30	0,30
Bungo	0,32	0,26	0,31	0,30	0,32
Kota Jambi	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36
Kota Sungai Penuh	0,30	0,34	0,31	0,31	0,29

Sumber : BPS, 2023

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain,

Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukan perbaikan ataupun tetap, kecuali Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi yang justru mengalami peningkatan gini ratio atau mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.

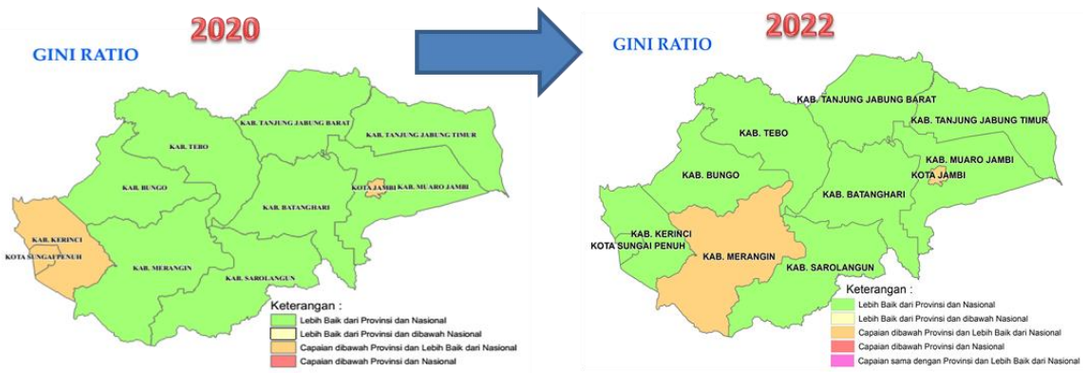

Gambar 6-5 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022

Tabel 6-7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muaro Jambi	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjung Jabung Timur	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjung Jabung Barat	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
Kota Jambi	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58
Kota Sungai Penuh	74,67	75,36	75,42	75,70	76,17

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023,2023

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Pada tahun 2021, baru 6 kabupaten/ kota yang termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, pada tahun 2022 ini terdapat penambahan 1 kabupaten lagi hingga secara keseluruhan terdapat 7 kabupaten/kota dengan IPM kategori tinggi, yaitu

Kota Jambi, Kota Sei, Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi. Namun jika dilihat secara spasial dengan membandingkan dengan capaian IPM Provinsi dan nasional, belum ada perubahan dari tahun 2020, dimana hanya 2 Kota yang capaiannya lebih baik dari provinsi dan nasional, yaitu Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh, sedangkan capaian seluruh kabupaten masih berada di bawah provinsi dan nasional.

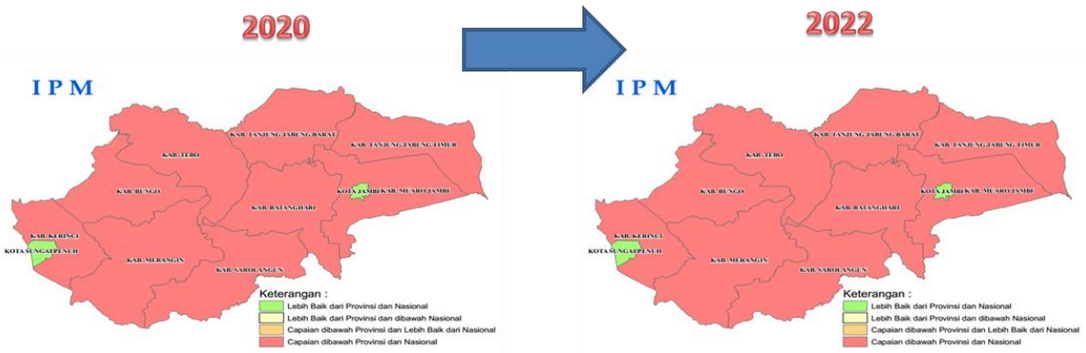

Gambar 6-6 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2022

Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan diatas maka Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskanpada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025** juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021-2026 akan diprioritaskan pada :

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program "DUMISAKE"; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan, perbaikan rantai nilai serta hilirisasi produk.
3. Perencanaan pengembangan Kawasan "SENTUSA" (Sengeti – Tungkal – Sabak)
4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan
7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah islamic center dan stadion. Adapun pembangunan Islamic center dan Stadion ini akan dilakukan dengan pola tahun jamak atau multiyears
8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik
11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.

12. Peningkatan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran dan perlindungan perempuan

Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 yang selanjutnya ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi** yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
   a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan pengembangan kawasan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
   b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
   c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
   d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
   c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
   2 meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
   3 meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasam strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:

a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
e. Pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.

4 Pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
a. Pemantapan PKN Kawasan Perkotaan Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Muara Bulian, dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRWN.
c. Pemantapan PKL yang terdiri dari Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, Perkotaan Sanggaran Agung, Perkotaan Bangko, Perkotaan Sungai Manau, Perkotaan Pasar Masurai, Perkotaan Rantau Panjang, Perkotaan Pasar Pamenang, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Wirotho Agung, Perkotaan Sungai Bengkal, Perkotaan Sengeti, Perkotaan Pijoan, Perkotaan Sebapo, Perkotaan Marga, Perkotaan Sungai Gelam, Perkotaan Pauh, Perkotaan Pekan Gedang, Perkotaan Singkut, Perkotaan Rantau Keloyang, Perkotaan Embacang Gedang, Perkotaan Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Ikil, Perkotaan Simpang Sungai Rengas, Perkotaan Muara Tembesi, Perkotaan Muara Jangga, Perkotaan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Mendahara, Perkotaan Nipah Panjang, dan Perkotaan Pandan Jaya.

5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melalui:
a. Penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan.
b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta peanfaatan jasa lingkungan.
c. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.
d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan lindung

e. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah daerah.
f. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
g. Menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.

6 Peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui:
a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah daerah
b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1 Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
2 Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
3 Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar.
4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan;

Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.

5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi.

6 Kota Sungai Penuh mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.

7 Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar.

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026, yaitu:

1. Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan di Provinsi Jambi, dengan target 285 desa yang belum tersentuh layanan internet pada tahun 2020. Melalui Jambi cerdas dan pintar, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan; memberikan bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini (pilihan melalui bantuan keuangan sesuai kebutuhan). Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-8 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa

Uraian	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa					
	2022		2023	2024	2025	2026
	Target	Realisasi				
SMA	1100	2700	1100	2700	2700	2700
SMK	550	1600	550	1600	1600	1600
SLB	500	1600	500	500	500	500
S1	70	150	70	300	300	300

Uraian	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa					
	2022		2023	2024	2025	2026
	Target	Realisasi				
S3 (Dosen)	50	28	50	50	50	50

b. Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-9 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

Uraian	2022		2023	2024	2025	2026
	Rencana	Realisasi				
Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jambi (jiwa)	76.586	76.115	77.086	77.586	78.086	78.586

c. Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun skema bedah rumah dan bantuan permodalan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-10 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Bedah Rumah	550	550	550	550	550
Bantuan modal kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga/start up	1500	1500	1500	-	-

Mulai Tahun 2024, selain pemberian bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial, juga akan disalurkan subsidi bunga bagi UMKM yang masih membutuhkan modal. Subsidi bunga ini diharapkan dapat menjadikan UMKM lebih mandiri dan bertanggungjawab dalam pengembangan usahanya.

d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an . Mengingat pemberian honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah, pondok pesantren; dan honorarium da'i kecamatan juga dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, maka bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi dapat digunakan untuk menu lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Bersifat khusus tersebut.

e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana. Selain itu, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jambi, melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus juga disediakan pembiayaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miski ekstrem dan pekerja rentan.

2. **Meningkatkan konektivitas** , diantaranya:

a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.

b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.

c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan

Penangan beberapa ruas jalan akan dilaksanakan dengan pola tahun jamak guna mendapatkan jaminan keberlanjutan penanganan ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalan tersebut antara lain:

- Ruas Jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis

- Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai
- Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang

3. **Membangun pusat-pusat pertumbuhan**
   a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN, PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
   b. Perencanaan pengembangan Kawasan SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
   c. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
   d. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah

Bila pembangunan kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan ruang tersebut, diharapkan akan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/ kota, meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan target minimal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks gini pada seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021 – 2026 guna mendukung target Provinsi dan nasional. Secara rinci target minimal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 6-11 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	4,61	4,80	4,95	5,00	5,20
Kab. Merangin	4,42	4,57	4,70	4,90	5,10
Kab. Sarolangun	4,46	4,50	4,65	4,80	4,95
Kab. Batang Hari	4,12	4,25	4,35	4,50	4,70
Kab. Muaro Jambi	4,88	4,95	5,10	5,20	5,35
Kab. Tanjab Timur	4,70	4,75	4,80	4,83	4,88
Kab. Tanjab Barat	2,73	2,80	2,93	3,15	3,25
Kab. T e b o	4,59	4,65	4,71	4,80	4,95
Kab. Bungo	4,28	4,32	4,45	4,60	4,75
Kota Jambi	4,88	4,90	4,95	5,00	5,10
Kota Sungai Penuh	4,76	4,80	4,90	4,95	5,10

Tabel 6-12 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Tingkat Kemiskinan(Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	7,25	7,05	6,90	6,70	6,55
Kab. Merangin	8,53	8,35	8,15	8,00	7,85
Kab. Sarolangun	8,40	8,35	8,30	8,25	8,20
Kab. Batang Hari	9,50	9,42	9,37	9,30	9,15
Kab. Muaro Jambi	3,80	3,70	3,60	3,50	3,40
Kab. Tanjab Timur	10,80	10,75	10,65	10,50	10,35
Kab. Tanjab Barat	10,25	10,20	10,10	10,00	9,80
Kab. T e b o	6,15	6,10	5,97	5,94	5,92
Kab. Bungo	5,70	5,65	5,60	5,50	5,35
Kota Jambi	8,15	8,10	8,00	7,95	7,90
Kota Sungai Penuh	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60

Tabel 6-13 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	2,40	2,35	2,20	2,05	2,00
Kab. Merangin	4,70	4,60	4,50	4,40	4,30
Kab. Sarolangun	5,50	5,40	5,30	5,20	5,10
Kab. Batang Hari	4,30	4,25	4,20	4,10	4,00
Kab. Muaro Jambi	5,35	5,30	5,20	5,10	5,00
Kab. Tanjab Timur	1,40	1,38	1,35	1,27	1,25
Kab. Tanjab Barat	2,05	2,00	1,99	1,98	1,97
Kab. T e b o	2,90	2,85	2,82	2,80	2,77
Kab. Bungo	5,90	5,85	5,81	5,78	5,75
Kota Jambi	10,35	10,32	10,27	10,20	10,10
Kota Sungai Penuh	5,50	5,45	5,30	5,40	5,30

Tabel 6-14 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	GINI RATIO				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	0,320	0,320	0,315	0,315	0,310
Kab. Merangin	0,310	0,310	0,310	0,300	0,300
Kab. Sarolangun	0,310	0,310	0,310	0,300	0,300

Kab/ Kota	GINI RATIO				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Batang Hari	0,310	0,310	0,305	0,305	0,300
Kab. Muaro Jambi	0,270	0,270	0,270	0,270	0,265
Kab. Tanjab Timur	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Kab. Tanjab Barat	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Kab. T e b o	0,280	0,280	0,280	0,275	0,275
Kab. Bungo	0,260	0,260	0,260	0,255	0,255
Kota Jambi	0,325	0,322	0,320	0,315	0,310
Kota Sungai Penuh	0,340	0,335	0,330	0,320	0,325

Tabel 6-15 Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	71,50	71,80	72,01	72,25	72,40
Kab. Merangin	69,25	69,50	69,75	70,00	70,50
Kab. Sarolangun	69,90	70,00	70,15	70,25	75,40
Kab. Batang Hari	69,90	69,95	70,00	70,25	70,50
Kab. Muaro Jambi	69,22	69,35	69,50	69,75	70,00
Kab. Tanjab Timur	64,50	64,70	64,85	65,00	65,25
Kab. Tanjab Barat	67,55	67,75	67,98	68,20	68,50
Kab. T e b o	69,20	69,35	69,55	69,75	70,40
Kab. Bungo	69,95	70,15	70,30	70,45	70,75
Kota Jambi	78,40	78,50	78,60	78,75	78,95
Kota Sungai Penuh	75,50	75,75	75,90	76,20	76,35

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan arah kebijakan umum, dirumuskan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun. Adapun arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026 berdasarkan pada tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6-16 Arah Kebijakan PembangunanProvinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi
Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi
Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia
Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas
Pelaksanaan prosedur kerja	Peningkatan kinerja	Peningkatan kinerja	Peningkatan kinerja	Peningkatan kinerja

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
yang efektif dengan memanfaatkan teknologi	birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK
Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan
Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil
Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM dan IKM	Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan	Mendorong kemandirian UMKM	Mendorong kemandirian UMKM	Mendorong kemandirian UMKM
Penguatan kelembagaan	Mendorong keaktifan	Mendorong keaktifan	Mendorong keaktifan	Mendorong keaktifan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran
Fasilitasi pengembangan kawasan wisata Gentala Arasy	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata
Mendorong percepatan perwujudan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi perwujudan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia
Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin	Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin	Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin	Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin	Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan
Revitalisasi dan fasilitasi	Fasilitasi pengembangan	Fasilitasi	Fasilitasi	Fasilitasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi
Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung	Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung	Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung	Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung	Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung
Inisiasi kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Persiapan perencanaan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Perencanaan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Mendorong perwujudan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Mendorong perwujudan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)
Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi dan pembangunan jembatan	Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi
Peningkatan kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan
Mendorong pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi Percepatan pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu
Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan	Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan	Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan	Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan	Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan
Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung	Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung	Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung	Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung	Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung
Mendorong penyelesaian	Mendorong penyelesaian	Mendorong		

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
akses menuju pelabuhan Ujung Jabung	akses menuju pelabuhan Ujung Jabung	penyelesaian akses menuju pelabuhan Ujung Jabung		
Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan
Percepatan pembangunan infrastruktur listrik	Pemenuhan kebutuhan listrik untukindustri	Pemenuhan kebutuhan listrik untukindustri	Pemenuhan kebutuhan listrik untukindustri	Pemenuhan kebutuhan listrik untukindustri
Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi
Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi	Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi	Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi	Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi	Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil	Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil	Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil	Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil	Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil
Mendorong tumbuhnya wira usaha baru	Mendorong tumbuhnya wira usaha baru	Mendorong tumbuhnya wira usaha baru	Mendorong tumbuhnya wira usaha baru	Mendorong tumbuhnya wira usaha baru
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan
Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Aangka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Aangka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Aangka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Aangka Kematian Bayi
Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa S1 untuk umum dan beasiswa S3 bagi dosen	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa S1 untuk umum dan beasiswa S3 bagi dosen	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa S1 untuk umum dan beasiswa S3 bagi dosen	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa S1 untuk umum dan beasiswa S3 bagi dosen	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa S1 untuk umum dan beasiswa S3 bagi dosen
Menyusun roadmap revitalisasi SMK	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan SMK dan pengembangan	Penyelarasan kurikulum SMK yang beradaptasi	Akreditasi dan perbaikan terus menerus terhadap	Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan SMK

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
	Kelembagaan serta penyediaan dan peningkatan ualitas guru	perkembangan dengan konteks lokal serta meningkatkan keterlibatan DUDI	tatakelola penyelenggaraan pendidikan SMK. Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan SMK	
Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa
meningkatkan konntribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan konntribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan konntribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan konntribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan konntribusi pariwisata pada PDRB
Penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19	penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19			
penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19	penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19			
penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19	penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19			
Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata
Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM
Perbaikan rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan	Perbaikan rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan	Perbaikan rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan,	Perbaikan rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan,	Perbaikan rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan,

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
kelautan daerah Jambi	dan kelautan daerah Jambi	perikanan dan kelautan daerah Jambi	perikanan dan kelautan daerah Jambi	perikanan dan kelautan daerah Jambi
Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau
Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya	Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya	Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya		
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
	pencegahan deforetasi	dan pencegahan deforetasi	dan pencegahan deforetasi	dan pencegahan deforetasi
Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya
Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum	Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum	Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum	Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum	Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum
Peningkatan indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan indeks Pembangunan Manusia
Percepatan pencapaian target SDGs	Percepatan pencapaian target SDGs	Percepatan pencapaian target SDGs	Percepatan pencapaian target SDGs	Percepatan pencapaian target SDGs
peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
	perempuan	perempuan	perempuan	perempuan
Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi	Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi	Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi	Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi	Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi
Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission

Tabel 6-17 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 1:Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan															
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
Sasaran 1.1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	75		77		80		82		85		85		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	1.877.578,05	BB	1.900.500,10	BB	1.920.500,00	BB	1.925.510,00	A	1.950.000,00	A	9.574.088,15	Seluruh Perangkat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	60%	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	88.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah Desa Mandiri	83 Desa	127	300	134	400	141	500	148	700	155	1000	163	2.900	
	Jumlah Desa Berkembang	875 Desa	849	250	807	350	767	450	731	650	694	900	659	2.600	
	Jumlah Desa Tertinggal	154 Desa	87	350	84	500	80	700	76	700	72	700	68	2.950	
	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	80	100	150	115	300	120	500	130	700	130	1000	130	2.650	
	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	0	0	150	4	300	6	500	10	700	12	1000	12	2.650	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90%	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	19.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1802 pelapor LKPM	3%	300	4%	1.220,00	-	-	-	-	-	-	7%	1.520,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Pelaku usaha pemilik NIB (Nomor Induk Berusaha) yang melaporkan Laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM)	1803	-	-	-	-	1205	1.388,00	1277	1.465,00	1366	1.542,00	1366	4.395,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi	30%	50%	1.000.	60%	1.200	70%	1.400	80%	1.600	90%	1.800	90%	7.000	Dinas Kominfo
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Predikat Pengawasan Kearsipan	B (Baik)	B (Baik)	831	B (Baik)	831	B (Baik)	851	BB (Sangat Baik)	851	BB (Sangat Baik)	870	BB (Sangat Baik)	4.234.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA		98%	1.580,00	98%	1.715,00	98%	1.845,00	98%	1.980,00	98%	2.075,00	98%	9.195,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan		95%	3.300,00	95%	3.300,00	95%	3.300,00	96%	3.300,00	96%	3.300,00	96%	16.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia		96 persen	1.265,00	96 persen	1.454,75	96 persen	1.672,96	96 persen	1.923,91	96 persen	2.212,49	96 persen	8.529,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	15.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Konsistensi program RKPD dalam APBD	100%	100%	3.992,64	100%	4.141,99	100%	4.514,56	100%	4.872,65	100%	6.609,17	100%	24.131,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah	74,38 Persen	79,50 persen	7.488,48	84,62 persen	9.056,14	89,74 persen	10.837,33	94,86 persen	12.490,40	100 persen	14.316,44	100 persen	54.188,79	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP nilai	997.186,78	WTP nilai	1.066.346,89	WTP nilai	1.143.549,71	WTP nilai	1.227.936,09	WTP nilai	1.350.729,70	WTP nilai	5.785.749,18	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 % (Rp1.535.185.805.549,67)	5,25 persen	18.051,16	5,7 persen	19.205,98	3,2 persen	20.635,46	9,68 persen	22.135,40	8,47 persen	24.348,93	32,3 persen	104.376,93	BPKPD

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	70 persen	72%	9.045,35	74%	9.181,03	-	-	-	-	-	-	74 persen	18.226,38	Inspektorat Daerah Provinsi
	Presentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	NA	-	-	-	-	72%	9.226,93	77%	9.319,20	82%	9.371,50	82%	27.917,63	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori ”B”	33 persen	38%	3.396,92	43%	3.512,92	-	-	-	-	-	-	43%	6.909,84	Inspektorat Daerah Provinsi
	Indeks kepuasan auditi atas kenerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat	NA	-	-	-	-	3	3.530,48	4	3.565,81	4	3.601,47	4	10.697,76	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	100 persen	1.910,00	100 persen	2.025,00	100 persen	1.500,00	100 persen	2.280,00	100 persen	2.429,00	100 persen	10.144,00	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 persen	1.656,47	100 persen	1.822,11	100 persen	700,00	100 persen	2.204,76	100 persen	2.204,76	100 persen	8.588,10	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	50%	50 persen	4.081,89	100 persen	4.898,03	100 persen	3.500,00	100 persen	6.830,00	100 persen	7.200,00	100 persen	26.509,92	Sekretariat Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100 persen	64.727,86	100 persen	68.030,49	100 persen	71.663,38	100 persen	135.600,00	100 persen	142.380,00	100 persen	482.401,73	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 Persen	1.735,95	100 persen	2.169,93	100 Persen	1.216,25	100 Persen	2.772,00	100 Persen	3.050,00	100 Persen	10.944,13	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	92.341,42	100 persen	99.377,38	100 persen	88.274,13	100 persen	93.543,57	100 persen	99.129,19	100 persen	472.665,69	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	60 persen	6.302,30	65 persen	7.548,75	-	-	-	-	-	-	65 persen	13.851,05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil riset dan teknologi yang diaplikasikan stakeholders	50 persen	-	-	-	-	70 persen	7.569,60	72 persen	7.580,07	75 persen	8.590,07	75 persen	23.739,74	
	Indeks inovasi daerah	5.244 (skor)	-	-	-	-	60		60,25		60,5		60,5		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 1.2: Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi	28,1	30		32		34		36		38		38		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,09	83,5		84		84,5		85,3		86		86		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB Provinsi Jambi	61,7	63,5 skor	2.134,00	64 skor	2.249,00	-	850,00	-	2.760,00	-	2.720,00	64 skor	10.713,00	Sekretariat Daerah
	Indeks Tingkat Efisiensi dan Efektifitas unit Perangkat Daerah	1,2	-		-		1,5		1,6		1,7		1,7		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi	>2,600 nilai	2.086,77	>2,700 nilai	2.295,45	>2,800 nilai	1.000,00	>2,850 nilai	3.650,00	>2,900 nilai	4.000,00	>2,900 nilai	13.032,22	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil		94%	2.430,00	95%	2.725,00	96%	2.725,00	97%	2.975,00	98%	2.975,00	98%	13.830,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk		99 persen	1.960,00	99 persen	3.375,00	99 persen	3.375,00	99 persen	4.105,00	99 persen	4.105,00	99 persen	16.920,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan		80%	1.099,98	80%	2.524,98	80%	2.524,98	80%	2.750,00	80%	2.750,00	80%	11.649,95	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan		100%	160	100%	130	100%	130	100%	160	100%	160	100%	740	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90%	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	47.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan pelaksanaankerjasama desa	40%	50%	150	60%	150	70%	150	80%	150	80%	150	80%	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	50%	55%	5.000,00	60%	5.500,00	65%	6.000,00	70%	6.500,00	80%	7.000,00	80%	30.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	75%	80%	9.700,00	85%	10.000,00	-	-	-	-	-	-	85%	19.700,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	65%	-	-	-	-	72%	17.500,00	74%	18.000,00	75%	18.500,00	75%	54.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks kematangan keamanan informasi	0,7 (Level 1)	1,0 (Level 1)	2.600,00	1,7 (level 2)	2.100,00	-	-	-	-	-	-	1,7 (level 2)	4.700,00	Dinas Kominfo
	Tingkat kematangan keamanan informasi	40%	-	-	-	-	53%	1.500,00	54%	1.500,00	55%	1.650,00	55%	4.650,00	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	215	250	6.780,95	275	7.523,66	250	8.286,05	275	8.940,38	300	9.604,89	300	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN	45	70	6.780,95	75	7.523,66	65	8.286,05	67,5	8.940,38	70	9.604,89	70	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	72%	17.173,74	75%	17.800,00	78%	18.750,00	81%	21.700,00	84%	21.700,00	84%	97.123,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	90%	93%	17.173,74	95%	17.800,00	97%	18.750,00	99%	21.170,00	99%	21.700,00	99%	96.593,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	nilai indeks kepuasan masyarakat	89 (A)	90 (A)	970	90 (A)	1.100,00	91 (A)	1.140,00	91 (A)	1.180,00	92 (A)	1.230,00	92 (A)	5.620,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100	100%	100	-	-	-	-	-	-	100%	200	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	100 persen	2.030,66	100 persen	2.207,59	100 persen	2.428,35	100 persen	2.671,18	100 persen	2.938,30	100 persen	12.276,07	Badan Penghubung Daerah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,55	25 KSP/USP	441,08	27 KSP/USP	507,24	29 KSP/USP	583,33	30 KSP/USP	6.999,90	151	8.915,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100%	100%	875,3	100%	900	-	998,2	-	1.045,04	-	1.045,04	100%	4.863,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tertib Usaha	NA	60%		60%		60%		62%		62%		62%		
Misi 2: Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah															
Tujuan 2 : Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**Pertumbuhan PDRB Hijau (%)**	**NA**	**4,55**		**4,75**		**5**		**5,2**		**5,3**		**5,3**		
	Tingkat kemiskinan	**7,97**	**7,9**		**7,84**		**7,6**		**7,45**		**7,2**		**7,2**		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 2.1: Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	**Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (persen)**	**30,85**	**30,9**		**30,92**		**30,93**		**30,94**		**30,95**		**30,95**		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	27%	30%	2.455,19	31%	2.577,95	32%	2.706,85	33%	2.842,19	34%	2.984,38	34%	13.566,58	Dinas Perkebunan
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	16,74%	10%	400	10%	450	-	-	-	-	-	-	20%	850,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	peresentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	NA	-	-	-	-	10%	500	10%	550	10%	600	30%	1.650,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi	5%	7%	1.000,00	8%	1.500,00	9%	1.700,00	10%	2.000,00	12%	2.300,00	12%	8.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	7%	11%	10.000,00	13%	12.500,00	15%	14	17%	15.000,00	19%	16.000,00	19%	53.514,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	8%	8,50%	2.452,14	9%	2.574,14	9,50%	2.703,48	10%	2.838,66	10,50%	2.980,59	10,50%	13.549,00	Dinas Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	11%	15%	23.400,00	17%	28.850,00	19%	31.350,00	21%	34.700,00	23%	37.600,00	23%	155.900,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan Kab/Kota	14%	14,50%	16.766,49	15%	17.604,82	15,50 %	18.485,06	16%	19.409,31	16,50%	20.379,77	16,50%	92.645,45	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparatur pertanian yang diberdayakan/ ditingkatkan keterampilannya	0,75%	1,70%	950	2,20%	1.060,00	2,70%	1.120,00	3%	1.180,00	3,20%	1.290,00	3,20%	5.600,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase kelembagaan pertanian yang meningkat kapasitasnya	0,63%	1%	1.705,00	1,50%	2.080,00	2%	2.560,00	2,50%	3.040,00	3%	3.500,00	3%	12.885,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota	4,50%	5%	4.159,86	5,50%	7.103,36	6%	5.291,15	6,50%	4.098,83	7%	4.351,28	7%	25.004,48	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	350	100%	262,5	-	-	-	-	-	-	100%	612,50	Dinas Perkebunan
	Rekomendasi Teknis Perizinan yang diberikan	NA	-	-	-	-	2	275,63	2	289,41	2	565,04	6	1.130,08	
	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	10%	10%	250	10%	300	-	-	-	-	-	-	30%	550,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	-	2	2.564,50	2	3.120,00	-	3.590,00	-	5.100,00	-	5.315,00	4	19.689,50	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	0	-		-		2		2		2		6		
	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan	-	10.687, 49 Ha		16.400, 53 Ha		-		-		-		16.400,53 Ha		
	Jumlah kawasan konservasi perairan yang di tetapkan	0	-		-		1		3		3		7		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	53.833, 0 ton	54.480, 9 ton	13.417,92	54.807, 8 ton	9.321,74	55.136,7 ton	7.836,81	55.467,5 ton	8.393,82	55.800, 3 ton	14.070,00		53.040,29	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	52.067,0 ton	57.168,0 ton	7.258,00	58.997,0 ton	7.808,50	60.885,0 ton	8.535,00	62.833,0 ton	9.211,00	64.843,6 ton	9.843,00		42.655,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	45%	60%	2.437,00	65%	1.263,00	70%	1.327,00	75%	1.407,80	77%	1.562,40	77%	7.997,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	NA	50%		50%		50%		50%		50%		50%		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	76 (B)	77 (B Indeks)	2.466,96	78 (B Indeks)	2.578,12	79 (B Indeks)	3.125,87	80 (B Indeks)	3.371,31	81 (B Indeks)	3.562,32	81 (B Indeks)	15.104,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku	60%	60%		62%		75%		76%		77%		77%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%		100%		92%		94%		94%		94%		
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	28,66%	40%		41.8%		90%		90%		90%		90%		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	(96366 7435,9 USD)	6%	1.070,00	6%	1.784,00	6%	1.540,80	6%	1.848,08	6%	1.848,08	30%	8.090,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.2: Meningkatnya industri pengolahan	**Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (persen)**	**10,83**	**10,9**		**10,95**		**11**		**11,5**		**11,75**		**11,75**		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5%	650	10%	725	15%	800	20%	875	25%	875	25%	3.925,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20%	20%	250	20%	270	20%	280	15%	300	15%	325	15%	1.425,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri besar di Provinsi	NA	1%	6.506,18	1%	6.816,79	1%	7.286,47	1%	7.960,12	1%	8.613,13	1%	37.182,70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,35%	0.39%		0,41%		0,43%		0,45%		0,48%		0,48%		
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	7,65%	7,86%		7,97%		8,08%		8,19%		8,30%		8,30%		
	nilai ekspor non migas (US$ Milyar)	0,934	0,966		0,983		1		1,017		1,034		1,034		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	329.124	250.977		257.866		-		-		-		257.866		
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	NA	0.527 Triliun		0.627 Triliun		-		-		-		0.627 Triliun		
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Trilliun	10%	400	10%	420	10%	440	10%	460	10%	480	50%	2.200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Trilliun	-	-	-	-	Rp. 5,71 Trilliun		Rp. 6,28 Trilliun		Rp. 6,91 Trilliun		Rp. 6,28 Trilliun		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	Rp. 6,4 Trilliun	10%	206,03	10%	500	-	-	-	-	-	-	20%	806,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Nilai Rencana Investasi	Rp. 6,4 Trilliun	-	-	-	-	Rp. 9,37 Triliun	700	Rp. 10,31 Triliun	900	Rp. 11,34 Triliun	1.100,00	Rp. 11,34 Triliun	2.700,00	
Sasaran 2.3: Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**1,18**	**1,2**		**1,22**		**1,3**		**1,4**		**1,5**		**1,5**		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	15%	17%	4.740,00	18%	5.335,00	-	6.725,00	-	7.385,00	-	8.490,00	18%	32.675,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	-	-	-	-	-	5.400		6.480		7.776		19.656		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	0	16%	847	18%	1.300,00	19%	1.600,00	22%	1.902,00	25%	2.330,00	100%	7.979,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	9%	16%	900	18%	1.200,00	19%	1.400,00	22%	1.600,00	25%	1.800,00	100%	6.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	14%	15%	13.900,00	17%	15.010,00	18%	18.045,00	19%	21.400,00	20%	24.500,00	89%	92.855,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,69% (119 Koperasi Aktif)	2,69%	1.356,00	3,69%	1.559,40	4,69%	1.793,31	5,69%	2.062,31	6,69%	2.309,78	23,45%	9.080,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	17,6% (72.126 UMKM)	19,60%	41.210,36	21,60%	41.391,91	23,60 %	41.600,70	25,60 %	41.840,80	27,60%	46.861,70	118,00%	212.905,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4%	5%	2.500,00	5%	2.875,00	5%	3.306,25	5%	3.802,19	5%	4.258,45	25,00%	16.741,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi berkinerja baik	30% (6 Koperasi)	40%	479,32	45%	575,17	50%	675,61	50%	828,24	50%	927,63	50%	3.485,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	6.82%	7%	575	7,50%	661,25	8%	780,44	8,50%	897,5	9%	1.005,20	9%	3.919,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat dan cukup sehat	40% (8 KSP/USP)	43%	277,72	45%	319,38	47%	367,29	50%	422,38	50%	473,07	50%	1.859,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 2.4: memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	**Rasio Konektivitas (%)**	**53,5**	**53,9**		**54**		**54,1**		**54,2**		**54,4**		**54,4**		
	Akses terhadap air minum layak (%)	**78,06**	**79,08**		**83,92**		**85**		**87**		**90**		**90**		
	Rasio elektrifikasi (%)	**99,9**	**99,92**		**99,93**		**99,94**		**99,95**		**99,96**		**99,96**		
	Persentase luas sawah beririgasi	**76,89**	**78**		**79,5**		**81**		**82,5**		**84**		**84**		
	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	**81,76**	**99,36**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase penurunan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi (PPKS)	**0,46**	-	-	-	-	**0,74**		**0,74**		**0,74**		**0,74**		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	25 (jumlah total bangunan dan gedung milik pempro v dalam proses penghitungan)	4	6.000,00	4	6.000,00	30,61%	20.000,00	40,82%	25.000,00	71,43%	50.000,00	71,43%	107.000,00	Dinas PUPR
	persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	0	0	0	0	0	100	252.000,00	0	0	0	0	100	252.000,00	Dinas PUPR
	Penyediaan dan peningkatan bangunan gedung strategis	0	0	0	0	0	5	252.000	7	350.000	7	400.000	7	1.002.000,00	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	daerah Provinsi yang layak fungsi														
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	na	40	2.113,68	50	2.500,30	-	-	-	-	-	-	50	4.613,98	Dinas PUPR
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak	75,89	78,45	2.500,00	81,44	2.500,00	81,44	5.000,00	82,08	7.500,00	82,94	10.000,00	82,94	27.500,00	Dinas PUPR
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	29,01	31,03	202.000,00	32,46	143.000,00	-	-	-	-	-	-	32,46	345.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06	79,08	2.350,69	83,92	2.850,60	83,92	3.120,50	85	3.850,69	87	5.000,00	87	17.172,48	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	76,9	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	-	-	-	-	-	-	86,01	146.913,32	Dinas PUPR
	persentase luas baku daerah irigasi yg terairi	76,9	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	-	-	-	-	-	-	86,01	146.913,32	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan Kinerja Sistem irigasi kewenangan Provinsi	NA	-	-	-	-	64,51 %	86.436,25	68,50 %	91.104,32	65,78%	105.000,00	67,14%	282.540,57	Dinas PUPR
	Persentase Pengurangan Kawasan Banjir di WS kewenangan Provinsi	NA	-	-	-	-	1,88%	8.000,00	28,27 %	15.800,00	51,54%	30.500,00	52%	54.300,00	Dinas PUPR
	Persentase peningkatan kinerja irigasi kewenangan Provinsi	76,9	-	-	-	-	64,51 %	86.436,25	65,78 %	91.104,32	67,14%	105.000	67,14%	282.540,57	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh (ha)	196,32	185	22.640,00	172	26.000,00	-	-	-	-	-	-	172	48.640,00	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis	0	-	-	-	-	2	3.000,00	3	8.000,00	3	12.000,00	8	23.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)	0	-	-	-	-	-	-	1	150.000	0	-	1	150.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	Na	-	-	-	-	4,33%	3.000,00	14,64%	8.000,00	36,51%	10.000,00	36,51%	21.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Na	-	-	-	-	1	5.000,00	1	8.000,00	1	10.000,00	1	23.000,00	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata														
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,81	79,6	799.085	83,231	803.043,20	82,243	664.000,00	83,87	647.000,00	85,245	677.000,00	85,245	3.590.128,20	Dinas PUPR
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	NA	-	-	-	-	100%	1.000	100%	3.000	100%	5.000	100%	9.000	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Dokumen penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	NA	-	-	-	-	100%	1.000	100%	3.000	100%	5.000	100	9.000	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Pemenuhan Dokumen Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	NA	-	-	-	-	-	-	100%	700	100%	800	100%	1.500	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	2.500	100%	3.000	100%	3.500	100%	4.000	100%	4.500	100%	17.700	Dinas PUPR
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100%	100%	1.750	100%	1.275	100%	1.315	100%	1.425	100%	1.400	100%	7.365	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luas kawasan permukiman kumuh	247 (2022)	-	-	-	-	0,93	2.000,00	4,21	7.000,00	6,79	10.000,00	6,79	19.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	92% (dari 46,7 km = 42 km)	6	25.000,00	12	30.000,00	60	30.000,00	65	35.000,00	75	40.000,00	75	160.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Pelayaran	NA	15%	12.150,00	25%	13.550,00	50%	14.100,00	75%	15.000,00	100%	16.000,00	100%	70.800,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian	NA	60%	3.500,00	70%	4.650,00	80%	4.650,00	90%	4.950,00	100%	4.950,00	100%	22.700,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)	NA	0,55	38.150,00	0,55	42.650,00	0,55	45.700,00	0,55	45.000,00	0,55	47.150,00	0,55	218.650,00	Dinas Perhubungan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	99,90%	99,92%	3.620,37	99,93%	4.198,875	99,94 %	5.780,375	99,95 %	6.270,375	99,96%	6.770,375	100%	26.640,375	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	26,00%	27,00%	1.660	28,00%	1.740	28,00 %	1.770	29,00 %	1.790	30%	1.800	30%	8.760	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	NA	24%	73,668	24,89%	450	25,80 %	600	27,61 %	1.000,00	45,08%	400	45,08%	2.523,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	NA	1 lokasi	415,299	24,89%	750	-	800	-	800	-	850	1 lokasi	3.615,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang berkualitas	NA	-		-		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	32,14	33,82		35,18		35,64		36,09		36,33		36,33		
	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	40,27	40,89		41,47		41,8		42,22		43,11		43,11		
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	NA	1 lokasi	139,997	1 lokasi	650	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	790,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Lokasi perencanaan pencadangan transmigrasi yang difasilitasi dan dikoordinasikan untuk mewujudkan lokasi calon kawasan transmigrasi yang clear dan clean	NA	-	-	-	-	1 lokasi	750	1 lokasi	850	1 lokasi	850	1 lokasi	2.450,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5%	5%	1.875,00	7,50%	1.930,02	8,00%	2.000,00	8,00%	2.200,00	8,50%	2.230,00	8,50%	10.235,02	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31,73%	100,00 %	510	100,00 %	675	100,00%	805	100,00%	1.025,00	100,00 %	12.000,00	100,00%	15.015,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	25%	25%	250	40%	275	40%	280	40%	300	40%	300	40%	1.405,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	50%	600	50%	750	50%	900	50%	975	50%	975	50%	4.200,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2,50%	2,50%	895	2,75%	1.485,00	2,75%	1.485,00	2,75%	1.490,00	2,75%	1.623,00	2,75%	6.978,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,50%	0,50%	8.261,07	0,70%	7.395,17	0,70%	7.649,17	0,70%	8.085,17	0,70%	8.592,29	0,70%	39.982,87	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	76,97%	100%	1.509,21	100%	1.849,76	100%	2.120,26	100%	2.503,55	100%	1.736,60	100%	9.719,38	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	60%	70%	29.866,06	75%	12.807,05	-	-	-	-	-	-	75%	42.673,11	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase pembangunan SPBE	30%	-	-	-	-	45%	9.758,03	50%	10.671,86	55%	11.812,75	55%	32.242,64	
Sasaran 2.5: Meningkatnya kualitas lingkungan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**68,06**	**72,07**		**72,43**		**72,8**		**73,17**		**73,53**		**73,53**		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis lahan (Juta TCO2 Eq)	**31,683**	**3,283**		**3,348**		**3,412**		**3,476**		**3,541**		**34,641**		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	138,64	138,14	11.684,07	137,64	12.257,62	137,14	14.549,70	136,64	15.866,87	136,14	22.348,63	136,14	76.706,88	BPBD
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	29,30%	20%	800	30%	850	40%	1.800,00	50%	1.250,00	50%	1.250,00	50%	5.950,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	persentase zona konservasi pada cekungan air tanah Provinsi Jambi yang terpetakan	0,00%	-	-	-	-	40%	300	50%	300	60%	400	60%	1.200.000	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan	0,00%	20%	900	20%	600	-	-	-	-	-	-	20%	1.500,00	
	persentase pengusahaan air tanah yang baik	NA	-	-	-	-	60%	200	80%	160	100%	100	100%	460	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi	0 Persen	100	710	100	750	-	-	-	-	-	-	100	1.460,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	14.648 SBM	178	9.909,79	634	13.789,39	-	14.572,95	-	15.978,07	-	17.283,20	5.852	75.733,39	
	Persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi	Na	-	-	-	-	20,21 %		24%		24,85%		24,85%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Presentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan	Na	-	-	-	-	25,00 %	4.650	35,00 %	4.650	45,00%	4.650	45%	13.950	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	53% (37 usaha/ kegiatan)	70%	940	76%	1.095,00	77%	1.190,00	79%	1.365,00	86%	1.490,00	86%	6.080,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100% (8 kasus)	100%	860	100%	1.000,00	100%	1.150,00	100%	1.350,00	100%	1.550,00	100%	5.910,00	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	64,28% (27 MHA)	71,42%	250	79%	400	86%	400	93%	400	100%	400	100%	1.850,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi	0	0%	350	0%	400	20%	450	40%	500	60%	500	60%	2.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	17,20%	26%	300	27%	600	28%	200	30%	600	30%	200	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	NA	26%	300	27%	600	28%	200	30%	600	30%	200	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	825	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	56,75	61,19	4.740,24	61,29	4.213,24	61,39	4.738,24	61,49	4.575,24	61,59	4.575,24	61,59	22.842,18	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	85,65	84,42		84,52		84,62		84,72		84,82		84,82		
	Indeks Kualitas Air Laut	55,93	77,19		77,84		78,49		79,05		79,7		79,7		
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	69,14	73,89		74,39		74,39		75,39		75,89		75,89		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	550	100%	650	100%	750	100%	850	100%	850	100%	3.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas/Masyarakat Lingkungan Hidup yang dibina	NA	50%	450	60%	500	70%	550	80%	600	80%	600	80%	2.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	2.450,00	100%	2.550,00	100%	3.400,00	100%	2.000,00	100%	3.050,00	100%	13.450,00	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnyaEkosistemnya	80% (81.449 Ha)	0,20%	1.426,53	0,20%	3.185,00	0,20%	3.508,50	0,20%	3.455,85	0,20%	3.807,44	81%	17.336,79	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	8% (15.783,55 Ha dari total luas izin 204.296,97 Ha)	15% (penambahan 14.287 Ha menjadi 30.070,55)	4.619,09	20%	4.880,96	26%	4.043,34	38%	4.267,06	44%	4.384,94	44%	7.805,67	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	4,5% (dari 133 kelembagaan)	8,20%	206,268	12%	226,894	15,78 %	249,584	19,54 %	249,584	23,30%	274,542	23,30%	1.206,88	Dinas Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	0,20%	28.489,29	0,20%	30.982,15	0,20%	26.369,41	0,20%	26.369,41	0,20%	24.048,96	0,20%	138.490,14	Dinas Kehutanan
	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,3% (dari total 181.888 Ha)	1,46%		1,58%		1,92%		1,94%		1,99%		1,99%		
	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	4,37%	0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	5	10	7.159,85	10	8.703,84	80	9.716,21	83	10.565,03	85	10.565,03	85	46.709,96	Dinas PUPR
Sasaran 2.6: menurunnya tingkat pengangguran	**Tingkat Pengangguran terbuka (%)**	**5,13**	**5**		**4,61**		**4,56**		**4,39**		**4,2**		**4,2**		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	33	40	9.000,00	47	9.250,00	54	9.500,00	61	9.750,00	68	10.000,00	68	47.500,00	Dinas PUPR
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	9,50%	9,60%	1.000,00	9,7 %%	1.000,00	9,80%	1.000,00	9,90%	1.000,00	10%	1.000,00	10%	5.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi	4, 5 %	5,10%	8.400,00	5,20%	8.400,00	5,30%	8.400,00	5,40%	8.400,00	5,50%	8.400,00	5,50%	42.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	24,92%	30,10%	3.850,00	30,20%	3.850,00	30,30 %	3.850,00	30,40 %	3.850,00	30,50%	3.850,00	30,50%	19.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	70%	76%	1.500,00	77%	1.500,00	-	-	-	-	-	-	77%	3.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma tenaga kerja	70%	-	-	-	-	78%	1.500,00	79%	1.500,00	80%	1.500,00	80%	7.500,00	
Sasaran 2.7: meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	**Indeks Ketahanan Pangan**	**70**	**71.00**		**72.00**		**73.00**		**74.00**		**75.00**		**75.00**		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	desa mandiri pangan	21	31	6.616,08	41	7.158,49	51	8.782,26	61	9.499,60	71	10.324,54	71	42.380,98	Dinas Ketahanan Pangan
	Rasio desa mandiri pangan dibanding desa rawan pangan	-	-	-	-	-	14,96		17,89		20,82		20,82		
PROGRAM PENINGKATA	skor pph	92.3	92.5	7.093,05	93.2	8.707,01	95.2	9.413,06	95.2	10.225,02	95.5	11.158,78	95.5	562.500,00	Dinas Ketahana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	konsumsi beras (kg/kap/thn)	86	85.5		85		84.5		84		83.5		83.5		n Pangan
	konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2139,4	2140		2195		2195,5		2198		2200		2200		
	konsumsi protein (gr/kap/hr)	60	60,5		61		61,5		62		62,5		62,5		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan rawan pangan	9,5	7.5	5.000,00	6.5	6.000,00	5.5	7.000,00	4.5	8.000,00	3.5	9.000,00	3.5	35.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	13,57% (42,2 ton)	19,61		19,61		19,61		20,42		20,4		20,4		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96,13	100	10.000,00	100	2.000,00	100	2.500,00	100	3.000,00	100	3.500,00	100	21.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	39,40 kg/kapita/tahun	40,60 kg/kapita/tahun	5.759,10	41,00 kg/kapita/tahun	4.649,80	41,50 kg/kapita/tahun	5.061,50	42,00 kg/kapita/tahun	54,78	42,50 kg/kapita/tahun	5.592,05	42,50 kg/kapita/tahun	21.117,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	40%	45%	649,68	50%	1.271,45	55%	1.398,59	60%	1.546,24	65%	1.694,15	65%	6.560,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkaan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)	340.000.000	3%	80	8%	100	10%	120	10%	140	10,00%	160	41,00%	600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas	NA	-	-	-	-	10%		10%		10%		40%		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90%	1.288,50	91%	1.301,10	92%	1.325,22	92%	1.341,14	94%	1.341,14	94%	6.597,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENTING	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	NA	5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		
Misi 3: Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia															
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat , berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	**Indeks Pembangunan Manusia**	**71,29**	**72,14**		**72,62**		**73,07**		**73,56**		**74,04**		**74,04**		
Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	**71,16**	**71,28**		**71,4**		**71,52**		**71,64**		**71,76**		**71,76**		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4	6	850	6	1.050,00	-	-	-	-	-	-	6	1.900,00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GerMas)	36,36	-	-	-	-	63,64	1.325,00	63,64	1.325,00	72,73	1.325,00	72,73	3975,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086	76.586	134.294,18	77.086	36.716,21	77.586	35.950,51	78.086	36.184,88	78.586	36.419,34	78.586	279.565,12	Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian Bayi	353	343	850	333	850	-	-	-	-	_	-	333		
	Jumlah kematian ibu	62	59		56		-		-		_		56		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93%	96%		96%		96%		96%		96%		96%		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV	21%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah kabupaten /kota mencapai eliminasi malaria	7	9		9		9		10		11		11		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	80%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63%	73%		81,80%		90,90 %		100%		100%		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	Prevalensi stunting	21,03	16		14		-		-		-		14		
	Prevalensi wasting	10,2	7,8		7,5		-		-		-		7,5		
	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Rd. Mattaher	83,47	84	66.318,81	84,5	69.430,48	85	71.697,73	86	76.128,35	87	79.730,49	87	363.305,86	RSUD Rd Mattaher
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	98%	98%	18.349,34	98%	26.652,59	-	-	-	-	-	-	98%	45.001,93	Rumah Sakit Jiwa
	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSJ	NA	-	-	-	-	84	31.149,89	85	20.833,40	86	43.190,60	86	95.173,89	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar (BAPELKES)	50%	53,40%	1.675,00	57,95%	1.842,50	64,75 %	2.062,75	71,57 %	2.229,43	78,39%	2.452,37	78,39%	10.262,04	Dinas Kesehatan (Bapelkes)
	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38,35%	40%	1.292,05	43%	1.456,31	46%	1.644,00	48%	1.757,92	50%	1.858,87	50%	8.009,14	Dinas Kesehatan
	Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap	NA	-	-	-	-	97,00 %		98,00 %		100,00 %		100,00%		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%	4.250,00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,11%	60,32%	3.725,00	60,35%	3.725,00	60,39 %	3.725,00	60,45 %	3.725,00	60,50%	3.725,00	60,50%	18.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	60,30%	65,44%	2.050,00	65,48%	2.050,00	65,50 %	2.050,00	65,52 %	2.050,00	65,57%	2.050,00	65,57%	10.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,72%	1,72%	1.150,00	1,70%	5.250,00	1,68%	5.250,00	1,65%	5.250,00	1,62%	5.250,00	1,62%	22.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Sasaran 3.2: Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,55	8,79		8,9		9,02		9,14		9,26		9,26		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,86%	26,86%	72.593,16	27,86%	83.314,41	-	-	-	-	-	-	27,86%	155.907,57	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik ASN memenuhi standar jumlah	41,00%	-	-	-	-	66,90%	5.820,00	79,61%	5.960,00	92,31%	6.100,00	92,31%	17.880,0	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kualitas	85,39%	-	-	-	-	87,83%		89,05%		90,26%		90,26%		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/SMK	70,33%	74,23%	72.593,16	76,17%	72.593,16	-	-	-	-	-	-	76,17%	145.186,32	Dinas Pendidikan
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	26,00%	30,00%		35,00%		-		-		-		35,00%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	57,20%	59,20%		60,20%		-		-		-		60,20%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26,50%	28,30%		29,20%		-		-		-		29,20%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	30%	35%		40%		-		-		-		40%		
	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	25,01%	27%		29%		-		-		-		29%		
	Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	NA	1%		2%		-		-		-		2%		
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	72,52%	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	29,85%	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	64,12%	-		-		70%	572.658,00	72%	568.440,00	75%	568.465	75%	1.709.563,00	
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	90,69%	-		-		94		94,15		94,3		94,3		
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	42,90%	-		-		47,5		47,65		47,8		47,8		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	60,51	-		-		66,2		66,35		66,5		66,5		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	51,62	-		-		55,53		55,68		55,83		55,83		
	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	57,1	-		-		62,87		63,02		63,17		63,17		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	4.939	-		-		53,13		53,28		53,43		53,43		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	50,84	-		-		56,75		56,9		57,05		57,05		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	41,47	-		-		45,2		45,35		45,5		45,5		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	56,66	-		-		62,82		62,97		63,12		63,12		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	49,98	-		-		54,24		54,39		54,54		54,54		
	Rata-Rata Kompetensi Literas SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	45,88	-		-		51,47		51,62		51,77		51,77		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	48,31	-		-		52,2		52,35		52,5		52,5		
	Indeks Iklim Keamanan SMA		-		-		87,35		87,5		87,65		87,65		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		-		-		89,52		89,67		89,82		89,82		
	Indeks Inklusivitas SMA		-		-		83,93		84,08		84,23		84,23		
	Indeks Iklim Keamanan SMK		-		-		84,32		84,47		84,62		84,62		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMK		-		-		87,06		87,21		87,36		87,36		
	Indeks Inklusivitas SMK		-		-		79,69		79,84		79,99		79,99		
	Indeks Iklim Keamanan SDLB		-		-		85,32		85,47		85,62		85,62		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		-		-		92,02		92,17		92,32		92,32		
	Indeks Inklusivitas SDLB		-		-		84,82		84,97		85,12		85,12		
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB		-		-		79,04		79,19		79,34		79,34		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		-		-		70,89		71,04		71,19		71,19		
	Indeks Inklusivitas SMPLB		-		-		76,76		76,91		77,06		77,06		
	Indeks Iklim Keamanan SMALB		-		-		74,01		74,16		74,31		74,31		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		-		-		70,43		70,58		70,73		70,73		
	Indeks Inklusivitas SMALB		-		-		72,59		72,74		72,89		72,89		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru	NA	5%	2.125,00	10%	2.175,00	-	-	-	-	-	-	15%	61.300,00	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bahasa Indonesia														
	Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25%	-	-	-	-	75%	250	100%	300	100%	300	100%	850,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	20%	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	3.925,00	100%	3.925,00	100%	3925	100%	11.775,00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	100%	100%	320	100%	340	100%	355	100%	370	100%	370,00	100%	1.755,00	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	peringkat POPNAS	peringkat 10	Peringkat 9 (2022 tidak ada event)	Rp46.993	Peringkat 8	Rp44.191	Peringkat 8	Rp49.623	Peringkat 7	Rp55.990	Peringkat 7	Rp64.389	Peringkat 7 (tahun 2026 tidak ada event)	Rp261.186	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	peringkat PEPARPENAS	peringkat 13	Peringkat 12 (2022 tidak ada event)		Peringkat 11		Peringkat 11		Peringkat 10		Peringkat 10		Peringkat 10 (tahun 2026 tidak ada event)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0.024% (56 kelompok dari total 231.323 kelompok)	0.033 % (76 kelompok)	Rp7.689	0.041 % (96 kelompok)	Rp8.252	0.052 % (121 kelompok)	Rp9.435	0.063 % (146 kelompok)	Rp10.380	0.074 % (171 kelompok)	Rp11.937	0.074 % (171 kelompok)	Rp47.692	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0.087 % (811 orang /925.295 orang pemuda)	0.13% (1181 orang)		0.15 % (1368 orang)		0.17 % (1570 orang)		0.19 % (1772 orang)		0.21 % (1974 orang)		0.21 % (1974 orang)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	100%	3.797,64	100%	4.302,29	100%	4.879,38	100%	5.539,63	100%	6.370,57	100%	Rp24.890	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,78	63,3	2.000,00	67,3	2.200,00	71,3	2.400,00	75,3	2.600,00	79,3	2.800,00	79,3	12.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	20,89	21,5		22,5		23,5		24,5		25,5		25,5		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Na	-	-	-	-	74	755	77	820	80	885	80	2.460	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sasaran 3.3: Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan mayarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1,02%	17,00%		18,00%		19,00 %		20,00 %		21,00%		21,00%		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregistrasi	53 buah	100 buah	1.400,00	110 buah	1.600,00	75 buah	1.800,00	78 buah	2.000,00	81 buah	2.100,00	81 buah	8.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	7%	13%	400	15%	500	18%	550	21%	600	23%	600	90%	2.650,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	14%	16%	3.920,00	18%	3.945,00	20%	3.975,00	22%	3.995,00	24%	4.010,00	100%	19.845,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan	20 karya	27 karya	7.930,00	30 karya	8.646,00	32 karya	9.465,00	34 karya	10.250,00	34 karya	11.025,00	34	47.316,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi	50.000 apresian	51.000 apresian		52.000 apresian		53.000 apresian		54.000 apresian		55.000 apresian		265.000		
	Presentase penetapan karya budaya yang diusulkan	-	-		-		6,60%		5,90%		5,90%		0		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan	0 kali	2 kali	1.820,00	3 kali	1.945,00	4 kali	2.010,00	5 kali	2.150,00	6 kali	2.235,00	20	10.160,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah peningkatan pelaku seni	300 orang	310 orang		315 orang		320 orang		325 orang		330 orang		**1600**		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 3.4: Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi	93,47	93,6		93,8		-		-		-		93,8		
	Indeks Aspek Kebebasan (metode baru)	NA	-	-	-	-	78,5	-	79	-	80	-	80		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273,50	90%	1.421,00	90%	2.065,00	90%	2.395,00	95%	2.450,00	95%	9.604,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	75%	85%	650	90%	840	92%	1.130,00	93%	1.185,00	95%	1.300,00	95%	5.105,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	76%	1.055,00	79%	1.200,00	80%	1.445,00	81%	1.620,00	83%	1.725,00	83%	7.045,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	78%	1.840,00	80%	1.977,50	83%	2.422,50	85%	2.680,00	86%	3.275,00	86%	12.195,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	77%	2.970,00	79%	3.200,00	81%	4.450,00	83%	4.500,00	85%	4.540,00	85%	19.660,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan petugas satlinmas (orang)	13.109	17.150	670	18.200	695	19.600	810	22.000	930	23.430	980	23.430	4.085,00	Dinas Satuan Polisi Pamong

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	93,02%	100%	5.395,17	100%	5.818,22	100%	6.342,40	100%	6.451,51	100%	7.200,70	100%	31.208,00	Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	59,10%	100%	900,27	100%	1.030,54	100%	1.115,54	100%	1.325,54	100%	1.375,54	100%	5.747,43	
Sasaran 3.5: Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,86	67,78		69,02		-		-		-		-		
	Indeks Ketimpangan Gender	0,558	-	-	-	-	0,56		0,58		0,61		0,61		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	54,54%	54,54%	3.000,00	72,72%	3.150,00	81,81 %	3.150,00	100%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	15.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome*)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50 %	6.000,00	91,50 %	6.000,00	91,50%	6.000,00	91.50%	30.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	600	100%	200	100%	200	100%	200	100%	600	100%	1.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,809	0,81	2.625,00	0,82	1.325,00	0,83	1.325,00	0,84	1.525,00	0,85	2.625,00	0,85	9.425,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,26	67	1.950,00	67,62	1.950,00	69,87	1.950,00	70	1.950,00	70	1.950,00	70	9.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00 %	100,00 %	1.125,00	100,00 %	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00 %	1.125,00	100,00%	5.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil Provinsi, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang diperkirakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua rencana penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2026, walaupun distribusinya belum dominan. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah–langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah–langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan untuk menambah investasi sebesar Rp461,146 Milyar selama lima tahun, sehingga PAD akan semakin meningkat. Adapun yang telah direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp25,0 Milyar rupiah. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi pemungut serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, sehingga akan tercapai optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Provinsi Jambi adalah melalui perluasan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 7-1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2024-2026 dan Realisasi Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Proyeksi dan Realisasi				Perubahan Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022 (Proyeksi)	2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2023 (Realisasi)	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**4.534.247.038.522**	**4.335.678.330.489**	**4.621.127.367.020**	**4.484.471.674.814**	**4.665.049.713.392**	**4.568.921.637.133**	**4.870.108.486.436**	**2,35**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.770.428.802.468**	**1.934.773.577.429**	**2.106.376.141.600**	**2.087.825.447.632**	**2.210.628.278.142**	**2.401.027.182.332**	**2.602.952.618.661**	**6,11**
1.1.1.	Pajak daerah	1.507.600.967.749	1.669.702.987.193	1.837.088.612.138	1.845.711.834.787,75	1.854.028.644.999	1.971.602.316.176	2.102.564.689.158	4,72
1.1.2.	Retribusi daerah	23.026.961.400	18.257.083.000	19.096.088.818	17.916.260.424,00	17.096.088.818	27.971.893.861	29.846.010.750	10,33
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	28.028.487.058,56	30.422.308.662	30.948.286.943	30.978.710.987,64	48.260.390.624	56.008.240.000	56.008.240.000	12,98
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	211.772.386.260,67	216.391.198.574	219.243.153.701	193.218.641.433,08	291.243.153.701	345.444.732.295	414.533.678.753	13,88
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**2.729.487.634.674**	**2.366.533.561.680**	**2.481.245.430.670**	**2.376.006.895.706**	**2.429.309.383.500**	**2.156.549.639.301**	**2.264.655.867.775**	**-0,88**
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.729.487.634.674	2.366.533.561.680	2.472.535.159.670		2.429.309.383.500	2.156.549.639.301	2.264.655.867.775	-0,88
1.2..	Dana Insentif Daerah	2.425.767.000,00	14.187.913.000	8.710.271.000		-	-	-	-100,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**34.330.601.380,00**	**34.371.191.380**	**33.505.794.750**	**20.639.331.476**	**25.112.051.750**	**11.344.815.500**	**2.500.000.000**	**-40,80**
1.3.1	Hibah	34.330.601.380,00	34.371.191.380	33.505.794.750	20.639.331.476	25.112.051.750	11.344.815.500	2.500.000.000	-40,80
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	-	-	-		-	-	-	-

No.	Uraian	Proyeksi dan Realisasi				Perubahan Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022 (Proyeksi)	2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2023 (Realisasi)	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	**BELANJA**	**4.975.011.195.547**	**5.048.951.565.206**	**5.242.454.868.433**	**5.190.893.278.556**	**5.178.334.014.113**	**4.694.574.867.353**	**4.980.659.327.691**	**-0,27**
2.1	**Belanja Operasi**	**2.768.648.440.224**	**3.117.002.840.422**	**3.091.309.516.697**	**3.078.441.615.463**	**3.065.973.427.044**	**2.516.357.320.302**	**2.620.141.098.432**	**-3,41**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.578.064.833.151,00	1.576.308.441.262	1.529.413.589.663	1.485.432.616.443	1.661.773.628.778	1.736.553.442.073	1.814.698.346.966	2,86
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	634.094.822.031,00	1.315.446.354.833	1.392.370.930.592	1.377.978.794.692	1.158.076.429.295	673.753.878.229	699.392.751.466	-11,87
2.1.3	Belanja Subsidi	550.000.000,00	8.182.500.000	3.851.200.000	5.739.553.750	2.300.000.000	2.550.000.000	2.550.000.000	-20,80
2.1.4	Belanja Hibah	555.838.785.042,00	198.559.518.524	161.858.770.066	188.896.906.895	242.775.368.971	100.000.000.000	100.000.000.000	-12,82
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	18.506.025.803	3.815.026.376	3.762.000.000	1.048.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	-28,33
2.2	**Belanja Modal**	**1.195.481.112.512**	**975.345.517.180**	**1.067.622.923.340**	**1.038.628.084.627**	**1.045.220.585.343**	**936.652.486.369**	**1.083.263.684.307**	**2,12**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**49.226.371.770,00**	**28.884.765.344**	**7.835.406.275**	**1.733.566.345**	**16.659.020.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**-2,85**
2.4	**Belanja Transfer**	**961.655.271.041**	**927.718.442.260**	**1.075.687.022.121**	**1.072.090.012.121**	**1.050.480.981.726**	**1.216.565.060.682**	**1.252.254.544.952**	**6,18**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	805.455.271.041	768.618.442.260	899.987.022.121	899.987.022.121	882.280.981.726	1.050.865.060.682	1.086.554.544.952	7,17
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	156.200.000.000,00	159.100.000.000	175.700.000.000	172.102.990.000	168.200.000.000	165.700.000.000	165.700.000.000	0,82
	Surplus (defisit)	(440.764.157.025)	(713.273.234.717)	(621.327.501.413)	(706.421.603.742)	(513.284.300.721)	(125.653.230.220)	(110.550.841.255)	-31,13
3	**PEMBIAYAAN**	**440.764.157.025**	**713.273.234.717**	**621.327.501.413**	**621.327.501.413,26**	**286.845.606.183**	**114.715.456.301**	**116.563.032.421**	**-30,39**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	500.764.157.025	740.479.765.899	631.461.501.413	**631.461.501.413,26**	426.005.810.341	241.886.558.380	276.832.134.500	-17,86
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	250.764.157.025	727.979.765.899	631.461.501.413	631.461.501.413,26	426.005.810.341	241.886.558.380	276.832.134.500	-17,58

No.	Uraian	Proyeksi dan Realisasi				Perubahan Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022 (Proyeksi)	2022 (Realisasi)	2023 (Proyeksi)	2023 (Realisasi)	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000	-	-	0,00	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	12.500.000.000	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	27.206.531.182	10.134.000.000	10.134.000.000	139.160.204.158	127.171.102.079	160.269.102.079	42,57
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	2.206.531.182	134.000.000	134.000.000	160.204.158	147.102.079	147.102.079	-41,82
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	60.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000,00	139.000.000.000	127.024.000.000	160.122.000.000	44,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0	0	0	**0,00**	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, 2024

Pendapatan daerah ditargetkan akan meningkat rata-rata 2,35 tahun, sedikit lebih rendah dari target sebelum perubahan, yaitu sebesar 2,52 persen pertahun dalam kurun waktu 2022-2026. Hal ini implikasi dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana diproyeksikan akan terjadi penurunan target rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer dari target sebelumnya sebesar 0,57 persen per tahun, menjadi -0,88 persen per tahun atau turun 0,88 persen per tahun. Sementara pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah didorong untuk lebih besar dari target semula sebesar 5,59 persen per tahun, menjadi 6,11 persen per tahun. Perubahan target tersebut yang didukung dari perubahan pertumbuhan rata-rata pajak daerah dari 3,88 persen menjadi 4,72 persen dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah dari semula 5,32 persen pertahun menjadi 10,33 persen per tahun. Pertumbuhan yang tidak terlalu besar ini dengan mempertimbangkan perekonomian Provinsi Jambi yang masih memerlukan pemulihan sebagai akibat pandemi Covid-19 pada awal tahun rencana.

Dengan pertumbuhan rata-rata PAD yang diproyeksikan lebih besar dari pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Jambi. Kontribusi PAD diproyeksikan terus meningkat dari 39,05 persen pada rencana tahun 2022 dan terealisasi sebesar 44,62 persen, menjadi 53,29 persen pada tahun 2026 atau naik 8,03 persen dari proporsi yang ditetapkan sebelumnya sebesar 45,26 persen. Sedangkan proporsi pendapatan transfer diproyeksikan turun sedikit demi sedikit dari target 60,20 persen tahun 2022 dan terealisasi sebesar 54,58 persen, menjadi 46,66 persen pada tahun 2026 atau lebih rendah dari target proporsi sebelumnya yang ditetapkan sebesar 54,68 persen.

Kontribusi rencana anggaran belanja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diproyeksikan sedikit melambat dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar -0,27 persen. Perlambatan ini didorong oleh realisasi kontribusi belanja operasi sebesar 61,74 persen pada tahun 2022 dan diupayakan proporsinya ditekan agar tidak terlalu meningkat menjadi 52,6 persen atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,41 persen selama kurun waktu 2022-2026.

Belanja modal akan didorong proporsinya terus meningkat, dari realisasi tahun 2022 sebesar 19,32 persen menjadi 21,79 persen pada tahun 2026. Melalui proporsi belanja modal yang cukup, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jambi pada periode RPJMD ini. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan cukup besar juga direncanakan akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears) yaitu tahun 2022-2024 untuk memberikan jaminan anggaran tersedia sampai pekerjaan selesai. Sementara belanja bantuan keuangan berkisar antara 3,15 – 3,57 persen selama kurun waktu 2022-2026. Bantuan keuangan ini direncanakan untuk penunjang pelaksanaan program DUMISAKE sebesar Rp156,2 milyar setiap tahunnya untuk diberikan kepada 1585 desa/ kelurahan masing-masing Rp100 juta/tahun/desa/kelurahan, serta Rp7,2 milyar setiap tahun mulai tahun 2023 untuk kecamatan sebesar Rp50 juta/ kecamatan dan akan dialokasikan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Bantuan keuangan ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun dengan besaran indikatif sebagaimana terlihat pada tabel 7-1 di atas. Adapun rencana pinjaman daerah sebagaimana direncanakan sebelumnya tidak jadi dilaksanakan, dengan

pertimbangan bahwa kepastian pemenuhan kebutuhan pendanaan rencana pembangunan yang akan dilakukan cukup dengan mekanisme tahun jamak.

7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari penghitungan kerangka pendanaan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah.

Tabel di bawah memperlihatkan realisasi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.699.339.945.890,- dan direncanakan tumbuh rata-rata 5,14 persen, hingga menjadi Rp3.375.741.254.381,- pada tahun 2026. Rencana pertumbuhan rata-rata ini meningkat dibanding rencana sebelumnya yang hanya sebesar 2,27 persen. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut, maka didapatkan realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.689.318.150.502,- dengan rencana pertumbuhan rata-rata minus 5,02 persen hingga menjadi Rp2.079.259.333.694,- pada tahun 2026. Pertumbuhan ini lebih kecil dari rencana pertumbuhan

sebelumnya yang direncanakan sebesar 0,66 persen dan menurun sebagai konsekuensi peningkatan rencana belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut direncanakan untuk mendanai pembangunan di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja prioritas I rata – rata 53,45 persen, antara lain untuk membiayai Program Dumisake dan program prioritas dan unggulan lainnya dalam rangka mencapai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tabel 7-2 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.576.308.441.262	1.485.432.616.443	1.661.773.628.778	1.736.553.442.073	1.814.698.346.966
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3	Belanja bagi hasil	768.618.442.260	899.987.022.121	882.280.981.726	1.050.865.060.682	1.086.554.544.952
4	Belanja Program DUMISAKE dan bantuan keuangan	325.000.000.004	325.000.000.003	332.200.000.000	325.000.000.000	325.000.000.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	29.413.062.364	10.134.000.000	139.160.204.158	127.318.204.158	160.416.204.158
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	2.206.531.182	134.000.000	160.204.158	147.102.079	147.102.079
c	Penyertaan Modal	27.206.531.182	10.000.000.000	139.000.000.000	127.171.102.079	160.269.102.079
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	2.374.339.945.886	2.395.553.638.564	2.614.010.592.800	2.854.642.515.758	2.998.870.666.318

Sumber: BPKPD, Hasil Analisis 2024

Tabel 7-3
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	4.335.678.330.489	4.484.471.674.814	4.665.049.713.392	4.569.402.146.272	4.853.168.453.575
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	727.979.765.899	631.461.501.413	426.005.810.341	241.886.558.380	276.832.134.500
4.	Pinjaman Daerah	-				
	Total penerimaan	5.063.658.096.388	5.115.933.176.228	5.091.055.523.733	4.811.288.704.652	5.130.000.588.075
	Dikurangi:	2.374.339.945.886	2.395.553.638.564	2.614.010.592.800	2.854.642.515.758	2.998.870.666.318
5.	Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	2.374.339.945.886	2.395.553.638.564	2.614.010.592.800	2.854.642.515.758	2.998.870.666.318
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.704.024.681.684	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 7-4 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.704.024.681.684	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405
a	Prioritas I	1.575.999.420.273	1.273.046.092.351	1.320.108.659.375	1.580.265.631.884	1.594.638.451.098
b	Prioritas II	1.128.025.261.411	978.820.799.306	1.025.057.507.298	936.652.486.369	1.083.263.684.307

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi dalam Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah dengan kebutuhan pendanaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7-5 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Jambi

Kapasitas Riil / Belanja	Realisasi (Rp.)		Proyeksi (Rp.)		
	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kapasitas riil keuangan	2.704.024.681.684	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405
Belanja Barang dan Jasa	1.315.446.354.833,00	1.377.978.794.692,00	1.158.076.429.295,00	673.753.878.229,00	699.392.751.466,00
Belanja Subsidi	8.182.500.000,00	5.739.553.750,00	2.300.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Belanja Hibah	198.559.518.524,00	188.896.906.895,00	242.775.368.971,00	575.427.009.114,00	586.844.273.737,00
Belanja Bantuan Sosial	18.506.025.803,00	3.762.000.000,00	1.048.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal	975.345.517.180,00	1.038.628.084.627,00	1.045.220.585.343,00	1.099.515.137.986,00	1.229.815.110.202,00
Belanja Tidak Terduga	28.884.765.344,00	1.733.566.345,00	16.659.020.000,00	11.372.092.924,00	5.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	159.100.000.000,00	172.102.990.000,00	168.200.000.000,00	168.200.000.000,00	168.200.000.000,00

Sumber: hasil analisis, 2024

Tabel 7-6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NON URUSAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	1.877.578,05	BB	1.900.500,10	BB	1.920.500,00	BB	1.925.510,00	A	1.950.000,00	A	9.574.088,15	Seluruh Perangkat Daerah
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR															
PENDIDIKAN															
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,86%	26,86%	72.593,16	27,86%	83.314,41	-	-	-	-	-	-	27,86%	155.907,57	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik ASN memenuhi standar jumlah	41,00%	-	-	-	-	66,90%	5.820,00	79,61%	5.960,00	92,31%	6.100,00	92,31%	17.880,0	
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kualitas	85,39%	-	-	-	-	87,83%		89,05%		90,26%		90,26%		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/SMK	70,33%	74,23%	72.593,16	76,17%	72.593,16	-	-	-	-	-	-	76,17%	145.186,32	Dinas Pendidikan
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	26,00%	30,00%		35,00%		-		-		-		35,00%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	57,20%	59,20%		60,20%		-		-		-		60,20%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26,50%	28,30%		29,20%		-		-		-		29,20%		
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	30%	35%		40%		-		-		-		40%		
	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	25,01%	27%		29%		-		-		-		29%		
	Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	NA	1%		2%		-		-		-		2%		
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%		100%		-		-		-		100%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	72,52%	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus)	29,85%	-		-		100%		100%		100%		100%		
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	64,12%	-		-		70%	572.658,00	72%	568.440,00	75%	568.465	75%	1.709.563,00	
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	90,69%	-		-		94		94,15		94,3		94,3		
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	42,90%	-		-		47,5		47,65		47,8		47,8		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	60,51	-		-		66,2		66,35		66,5		66,5		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	51,62	-		-		55,53		55,68		55,83		55,83		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	57,1	-		-		62,87		63,02		63,17		63,17		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	4.939	-		-		53,13		53,28		53,43		53,43		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	50,84	-		-		56,75		56,9		57,05		57,05		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	41,47	-		-		45,2		45,35		45,5		45,5		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	56,66	-		-		62,82		62,97		63,12		63,12		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	49,98	-		-		54,24		54,39		54,54		54,54		
	Rata-Rata Kompetensi Literas SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	45,88	-		-		51,47		51,62		51,77		51,77		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	48,31	-		-		52,2		52,35		52,5		52,5		
	Indeks Iklim Keamanan SMA		-		-		87,35		87,5		87,65		87,65		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		-		-		89,52		89,67		89,82		89,82		
	Indeks Inklusivitas SMA		-		-		83,93		84,08		84,23		84,23		
	Indeks Iklim Keamanan SMK		-		-		84,32		84,47		84,62		84,62		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMK		-		-		87,06		87,21		87,36		87,36		
	Indeks Inklusivitas SMK		-		-		79,69		79,84		79,99		79,99		
	Indeks Iklim Keamanan SDLB		-		-		85,32		85,47		85,62		85,62		
	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		-		-		92,02		92,17		92,32		92,32		
	Indeks Inklusivitas SDLB		-		-		84,82		84,97		85,12		85,12		
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB		-		-		79,04		79,19		79,34		79,34		
	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		-		-		70,89		71,04		71,19		71,19		
	Indeks Inklusivitas SMPLB		-		-		76,76		76,91		77,06		77,06		
	Indeks Iklim Keamanan SMALB		-		-		74,01		74,16		74,31		74,31		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		-		-		70,43		70,58		70,73		70,73		
	Indeks Inklusivitas SMALB		-		-		72,59		72,74		72,89		72,89		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia	NA	5%	2.125,00	10%	2.175,00	-	-	-	-	-	-	15%	61.300,00	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25%	-	-	-	-	75%	250	100%	300	100%	300	100%	850,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	20%	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	3.925,00	100%	3.925,00	100%	3925	100%	11.775,00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	100%	100%	320	100%	340	100%	355	100%	370	100%	370,00	100%	1.755,00	Dinas Pendidikan
KESEHATAN															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4	6	850	6	1.050,00	-	-	-	-	-	-	6	1.900,00	Dinas Kesehatan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GerMas)	36,36	-	-	-	-	63,64	1.325,00	63,64	1.325,00	72,73	1.325,00	72,73	3975,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086	76.586	134.294,18	77.086	36.716,21	77.586	35.950,51	78.086	36.184,88	78.586	36.419,34	78.586	279.565,12	Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian Bayi	353	343	850	333	850	-	-	-	-	_	-	333		
	Jumlah kematian ibu	62	59		56		-		-		_		56		
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93%	96%	850	96%	850	96%	850	96%	850	96%	850	96%		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV	21%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		
	Jumlah kabupaten /kota mencapai eliminasi malaria	7	9		9		9		10		11		11		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	80%	100%		100%		-		-		-		100%		
	Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63%	73%		81,80%		90,90%		100%		100%		100%		
	Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi stunting	21,03	16		14		-		-		-		14		
	Prevalensi wasting	10,2	7,8		7,5		-		-		-		7,5		
	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Rd. Mattaher	83,47	84	66.318,81	84,5	69.430,48	85	71.697,73	86	76.128,35	87	79.730,49	87	363.305,86	RSUD Rd Mattaher
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	98%	98%	18.349,34	98%	26.652,59	-	-	-	-	-	-	98%	45.001,93	Rumah Sakit Jiwa
	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSJ	NA	-	-	-	-	84	31.149,89	85	20.833,40	86	43.190,60	86	95.173,89	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar (BAPELKES)	50%	53,40%	1.675,00	57,95%	1.842,50	64,75%	2.062,75	71,57%	2.229,43	78,39%	2.452,37	78,39%	10.262,04	Dinas Kesehatan (Bapelkes)
	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38,35%	40%	1.292,05	43%	1.456,31	46%	1.644,00	48%	1.757,92	50%	1.858,87	50%	8.009,14	Dinas Kesehatan
	Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap	NA	-	-	-	-	97,00%		98,00%		100,00%		100,00%		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%	850	100%	4.250,00	Dinas Kesehatan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
SOSIAL															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5%	5%	1.875,00	7,50%	1.930,02	8,00%	2.000,00	8,00%	2.200,00	8,50%	2.230,00	8,50%	10.235,02	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31,73%	100,00%	510	100,00%	675	100,00%	805	100,00%	1.025,00	100,00%	12.000,00	100,00%	15.015,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	25%	25%	250	40%	275	40%	280	40%	300	40%	300	40%	1.405,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	50%	600	50%	750	50%	900	50%	975	50%	975	50%	4.200,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2,50%	2,50%	895	2,75%	1.485,00	2,75%	1.485,00	2,75%	1.490,00	2,75%	1.623,00	2,75%	6.978,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,50%	0,50%	8.261,07	0,70%	7.395,17	0,70%	7.649,17	0,70%	8.085,17	0,70%	8.592,29	0,70%	39.982,87	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TRANTIBUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	138,64	138,14	11.684,07	137,64	12.257,62	137,14	14.549,70	136,64	15.866,87	136,14	22.348,63	136,14	76.706,88	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	76,97%	100%	1.509,21	100%	1.849,76	100%	2.120,26	100%	2.503,55	100%	1.736,60	100%	9.719,38	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan petugas satlinmas (orang)	13.109	17.150	670	18.200	695	19.600	810	22.000	930	23.430	980	23.430	4.085,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	93,02%	100%	5.395,17	100%	5.818,22	100%	6.342,40	100%	6.451,51	100%	7.200,70	100%	31.208,00	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	59,10%	100%	900,27	100%	1.030,54	100%	1.115,54	100%	1.325,54	100%	1.375,54	100%	5.747,43	
PU DAN PENATAAN RUANG															
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	25 (jumlah total bangunan dan gedung milik pemprov dalam proses penghitungan)	4	6.000,00	4	6.000,00	30,61%	20.000,00	40,82%	25.000,00	71,43%	50.000,00	71,43%	107.000,00	Dinas PUPR
	persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	0	0	0	0	0	100	252.000,00	0	0	0	0	100	252.000,00	
	Penyediaan dan peningkatan bangunan gedung strategis daerah Provinsi yang layak fungsi	0	0	0	0	0	5	252.000	7	350.000	7	400.000	7	1.002.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	na	40	2.113,68	50	2.500,30	-	-	-	-	-	-	50	4.613,98	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
LIMBAH	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak	75,89	78,45	2.500,00	81,44	2.500,00	81,44	5.000,00	82,08	7.500,00	82,94	10.000,00	82,94	27.500,00	Dinas PUPR
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	29,01	31,03	202.000,00	32,46	143.000,00	-	-	-	-	-	-	32,46	345.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06	79,08	2.350,69	83,92	2.850,60	83,92	3.120,50	85	3.850,69	87	5.000,00	87	17.172,48	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	76,9	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	-	-	-	-	-	-	86,01	146.913,32	Dinas PUPR
	persentase luas baku daerah irigasi yg terairi	76,9	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	-	-	-	-	-	-	86,01	146.913,32	Dinas PUPR
	Persentase peningkatan Kinerja Sistem irigasi kewenangan Provinsi	NA	-	-	-	-	64,51%	86.436,25	68,50%	91.104,32	65,78%	105.000,00	67,14%	282.540,57	Dinas PUPR
	Persentase Pengurangan Kawasan Banjir di WS kewenangan Provinsi	NA	-	-	-	-	1,88%	8.000,00	28,27%	15.800,00	51,54%	30.500,00	52%	54.300,00	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase peningkatan kinerja irigasi kewenangan Provinsi	76,9	-	-	-	-	64,51%	86.436,25	65,78%	91.104,32	67,14%	105.000	67,14%	282.540,57	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	33	40	9.000,00	47	9.250,00	54	9.500,00	61	9.750,00	68	10.000,00	68	47.500,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh (ha)	196,32	185	22.640,00	172	26.000,00	-	-	-	-	-	-	172	48.640,00	Dinas PUPR
	Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis	0	-	-	-	-	2	3.000,00	3	8.000,00	3	12.000,00	8	23.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)	0	-	-	-	-	-	-	1	150.000	0	-	1	150.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	Na	-	-	-	-	4,33%	3.000,00	14,64%	8.000,00	36,51%	10.000,00	36,51%	21.000,00	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Na	-	-	-	-	1	5.000,00	1	8.000,00	1	10.000,00	1	23.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,81	79,6	799.085	83,231	803.043,20	82,243	664.000,00	83,87	647.000,00	85,245	677.000,00	85,245	3.590.128,20	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	5	10	7.159,85	10	8.703,84	80	9.716,21	83	10.565,03	85	10.565,03	85	46.709,96	Dinas PUPR
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	2.500	100%	3.000	100%	3.500	100%	4.000	100%	4.500	100%	17.700	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100%	100%	1.750	100%	1.275	100%	1.315	100%	1.425	100%	1.400	100%	7.365	Dinas PUPR
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luas kawasan permukiman kumuh	247 (2022)	-	-	-	-	0,93	2.000,00	4,21	7.000,00	6,79	10.000,00	6,79	19.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	92% (dari 46,7 km = 42 km)	6	25.000,00	12	30.000,00	60	30.000,00	65	35.000,00	75	40.000,00	75	160.000,00	Dinas PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR															
TENAGA KERJA															
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	9,50%	9,60%	1.000,00	9,7 %%	1.000,00	9,80%	1.000,00	9,90%	1.000,00	10%	1.000,00	10%	5.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi	4, 5 %	5,10%	8.400,00	5,20%	8.400,00	5,30%	8.400,00	5,40%	8.400,00	5,50%	8.400,00	5,50%	42.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	24,92%	30,10%	3.850,00	30,20%	3.850,00	30,30%	3.850,00	30,40%	3.850,00	30,50%	3.850,00	30,50%	19.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	70%	76%	1.500,00	77%	1.500,00	-	-	-	-	-	-	77%	3.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma tenaga kerja	70%	-	-	-	-	78%	1.500,00	79%	1.500,00	80%	1.500,00	80%	7.500,00	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	54,54%	54,54%	3.000,00	72,72%	3.150,00	81,81%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	15.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91.50%	30.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	600	100%	200	100%	200	100%	200	100%	600	100%	1.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,809	0,81	2.625,00	0,82	1.325,00	0,83	1.325,00	0,84	1.525,00	0,85	2.625,00	0,85	9.425,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,26	67	1.950,00	67,62	1.950,00	69,87	1.950,00	70	1.950,00	70	1.950,00	70	9.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00%	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	5.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KETAHANAN PANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	desa mandiri pangan	21	31	6.616,08	41	7.158,49	51	8.782,26	61	9.499,60	71	10.324,54	71	42.380,98	Dinas Ketahanan Pangan
	Rasio desa mandiri pangan dibanding desa rawan pangan	-	-	-	-	-	14,96		17,89		20,82		20,82		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pph	92.3	92.5	7.093,05	93.2	8.707,01	95.2	9.413,06	95.2	10.225,02	95.5	11.158,78	95.5	562.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	konsumsi beras (kg/kap/thn)	86	85.5		85		84.5		84		83.5		83.5		
	konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2139,4	2140		2195		2195,5		2198		2200		2200		
	konsumsi protein (gr/kap/hr)	60	60,5		61		61,5		62		62,5		62,5		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan rawan pangan	9,5	7.5	5.000,00	6.5	6.000,00	5.5	7.000,00	4.5	8.000,00	3.5	9.000,00	3.5	35.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	13,57% (42,2 ton)	19,61		19,61		19,61		20,42		20,4		20,4		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96,13	100	10.000,00	100	2.000,00	100	2.500,00	100	3.000,00	100	3.500,00	100	21.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
PERTANAHAN															
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	NA	-	-	-	-	100%	1.000	100%	3.000	100%	5.000	100%	9.000	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Dokumen penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	NA	-	-	-	-	100%	1.000	100%	3.000	100%	5.000	100	9.000	Dinas PUPR
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Pemenuhan Dokumen Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	NA	-	-	-	-	-	-	100%	700	100%	800	100%	1.500	Dinas PUPR
LINGKUNGAN HIDUP															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	53% (37 usaha/kegiatan)	70%	940	76%	1.095,00	77%	1.190,00	79%	1.365,00	86%	1.490,00	86%	6.080,00	Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100% (8 kasus)	100%	860	100%	1.000,00	100%	1.150,00	100%	1.350,00	100%	1.550,00	100%	5.910,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	64,28% (27 MHA)	71,42%	250	79%	400	86%	400	93%	400	100%	400	100%	1.850,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi	0	0%	350	0%	400	20%	450	40%	500	60%	500	60%	2.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	17,20%	26%	300	27%	600	28%	200	30%	600	30%	200	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	NA	26%	300	27%	600	28%	200	30%	600	30%	200	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	165	100%	825	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	56,75	61,19	4.740,24	61,29	4.213,24	61,39	4.738,24	61,49	4.575,24	61,59	4.575,24	61,59	22.842,18	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	85,65	84,42		84,52		84,62		84,72		84,82		84,82		
	Indeks Kualitas Air Laut	55,93	77,19		77,84		78,49		79,05		79,7		79,7		
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	69,14	73,89		74,39		74,39		75,39		75,89		75,89		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	550	100%	650	100%	750	100%	850	100%	850	100%	3.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas/Masyarakat Lingkungan Hidup yang dibina	NA	50%	450	60%	500	70%	550	80%	600	80%	600	80%	2.700,00	Dinas Lingkungan Hidup

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	2.450,00	100%	2.550,00	100%	3.400,00	100%	2.000,00	100%	3.050,00	100%	13.450,00	Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL															
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil		94%	2.430,00	95%	2.725,00	96%	2.725,00	97%	2.975,00	98%	2.975,00	98%	13.830,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk		99 persen	1.960,00	99 persen	3.375,00	99 persen	3.375,00	99 persen	4.105,00	99 persen	4.105,00	99 persen	16.920,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan		80%	1.099,98	80%	2.524,98	80%	2.524,98	80%	2.750,00	80%	2.750,00	80%	11.649,95	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan		100%	160	100%	130	100%	130	100%	160	100%	160	100%	740	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	60%	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	88.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah Desa Mandiri	83 Desa	127	300	134	400	141	500	148	700	155	1000	163	2.900	
	Jumlah Desa Berkembang	875 Desa	849	250	807	350	767	450	731	650	694	900	659	2.600	
	Jumlah Desa Tertinggal	154 Desa	87	350	84	500	80	700	76	700	72	700	68	2.950	
	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	80	100	150	115	300	120	500	130	700	130	1000	130	2.650	
	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	0	0	150	4	300	6	500	10	700	12	1000	12	2.650	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90%	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	47.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90%	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	19.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan pelaksanaankerja sama desa	40%	50%	150	60%	150	70%	150	80%	150	80%	150	80%	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,11%	60,32%	3.725,00	60,35%	3.725,00	60,39%	3.725,00	60,45%	3.725,00	60,50%	3.725,00	60,50%	18.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	60,30%	65,44%	2.050,00	65,48%	2.050,00	65,50%	2.050,00	65,52%	2.050,00	65,57%	2.050,00	65,57%	10.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,72%	1,72%	1.150,00	1,70%	5.250,00	1,68%	5.250,00	1,65%	5.250,00	1,62%	5.250,00	1,62%	22.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Pelayaran	NA	15%	12.150,00	25%	13.550,00	50%	14.100,00	75%	15.000,00	100%	16.000,00	100%	70.800,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian	NA	60%	3.500,00	70%	4.650,00	80%	4.650,00	90%	4.950,00	100%	4.950,00	100%	22.700,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)	NA	0,55	38.150,00	0,55	42.650,00	0,55	45.700,00	0,55	45.000,00	0,55	47.150,00	0,55	218.650,00	Dinas Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI															
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	60%	70%	29.866,06	75%	12.807,05	-	-	-	-	-	-	75%	42.673,11	Dinas Komunikasi dan Informatika

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pembangunan SPBE	30%	-	-	-	-	45%	9.758,03	50%	10.671,86	55%	11.812,75	55%	32.242,64	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	50%	55%	5.000,00	60%	5.500,00	65%	6.000,00	70%	6.500,00	80%	7.000,00	80%	30.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	75%	80%	9.700,00	85%	10.000,00	-	-	-	-	-	-	85%	19.700,00	
	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	65%	-	-	-	-	72%	17.500,00	74%	18.000,00	75%	18.500,00	75%	54.000,00	
KOPERASI DAN UKM															
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,55	25 KSP/USP	441,08	27 KSP/USP	507,24	29 KSP/USP	583,33	30 KSP/USP	6.999,90	151	8.915,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,69% (119 Koperasi Aktif)	2,69%	1.356,00	3,69%	1.559,40	4,69%	1.793,31	5,69%	2.062,31	6,69%	2.309,78	23,45%	9.080,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	17,6% (72.126 UMKM)	19,60%	41.210,36	21,60%	41.391,91	23,60%	41.600,70	25,60%	41.840,80	27,60%	46.861,70	118,00%	212.905,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4%	5%	2.500,00	5%	2.875,00	5%	3.306,25	5%	3.802,19	5%	4.258,45	25,00%	16.741,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi berkinerja baik	30% (6 Koperasi)	40%	479,32	45%	575,17	50%	675,61	50%	828,24	50%	927,63	50%	3.485,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	6.82%	7%	575	7,50%	661,25	8%	780,44	8,50%	897,5	9%	1.005,20	9%	3.919,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat dan cukup sehat	40% (8 KSP/USP)	43%	277,72	45%	319,38	47%	367,29	50%	422,38	50%	473,07	50%	1.859,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	nilai indeks kepuasan masyarakat	89 (A)	90 (A)	970	90 (A)	1.100,00	91 (A)	1.140,00	91 (A)	1.180,00	92 (A)	1.230,00	92 (A)	5.620,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100	100%	100	-	-	-	-	-	-	100%	200	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Trilliun	10%	400	10%	420	10%	440	10%	460	10%	480	50%	2.200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Trilliun	-	-	-	-	Rp. 5,71 Trilliun		Rp. 6,28 Trilliun		Rp. 6,91 Trilliun		Rp. 6,28 Trilliun		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1802 pelapor LKPM	3%	300	4%	1.220,00	-	-	-	-	-	-	7%	1.520,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelaku usaha pemilik NIB (Nomor Induk Berusaha) yang melaporkan Laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM)	1803	-	-	-	-	1205	1.388,00	1277	1.465,00	1366	1.542,00	1366	4.395,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	Rp. 6,4 Trilliun	10%	206,03	10%	500	-	-	-	-	-	-	20%	806,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Nilai Rencana Investasi	Rp. 6,4 Trilliun	-	-	-	-	Rp. 9,37 Triliun	700	Rp. 10,31 Triliun	900	Rp. 11,34 Triliun	1.100,00	Rp. 11,34 Triliun	2.700,00	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	peringkat POPNAS	peringkat 10	Peringkat 9 (2022 tidak ada event)	Rp46.993	Peringkat 8	Rp44.191	Peringkat 8	Rp49.623	Peringkat 7	Rp55.990	Peringkat 7	Rp64.389	Peringkat 7 (tahun 2026 tidak ada event)	Rp261.186	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	peringkat PEPARPENAS	peringkat 13	Peringkat 12 (2022 tidak ada event)		Peringkat 11		Peringkat 11		Peringkat 10		Peringkat 10		Peringkat 10 (tahun 2026 tidak ada event)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0.024% (56 kelompok dari total 231.323 kelompok)	0.033 % (76 kelompok)	Rp7.689	0.041 % (96 kelompok)	Rp8.252	0.052 % (121 kelompok)	Rp9.435	0.063% (146 kelompok)	Rp10.380	0.074 % (171 kelompok)	Rp11.937	0.074 % (171 kelompok)	Rp47.692	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0.087 % (811 orang /925.295 orang pemuda)	0.13% (1181 orang)		0.15 % (1368 orang)		0.17 % (1570 orang)		0.19 % (1772 orang)		0.21 % (1974 orang)		0.21 % (1974 orang)		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	100%	3.797,64	100%	4.302,29	100%	4.879,38	100%	5.539,63	100%	6.370,57	100%	Rp24.890	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi	30%	50%	1.000.	60%	1.200	70%	1.400	80%	1.600	90%	1.800	90%	7.000	Dinas Kominfo
PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks kematangan keamanan informasi	0,7 (Level 1)	1,0 (Level 1)	2.600,00	1,7 (level 2)	2.100,00	-	-	-	-	-	-	1,7 (level 2)	4.700,00	Dinas Kominfo
	Tingkat kematangan keamanan informasi	40%	-	-	-	-	53%	1.500,00	54%	1.500,00	55%	1.650,00	55%	4.650,00	
KEBUDAYAAN															
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregistrasi	53 buah	100 buah	1.400,00	110 buah	1.600,00	75 buah	1.800,00	78 buah	2.000,00	81 buah	2.100,00	81 buah	8.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	7%	13%	400	15%	500	18%	550	21%	600	23%	600	90%	2.650,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	14%	16%	3.920,00	18%	3.945,00	20%	3.975,00	22%	3.995,00	24%	4.010,00	100%	19.845,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan	20 karya	27 karya	7.930,00	30 karya	8.646,00	32 karya	9.465,00	34 karya	10.250,00	34 karya	11.025,00	34	47.316,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi	50.000 apresian	51.000 apresian		52.000 apresian		53.000 apresian		54.000 apresian		55.000 apresian		265.000		
	Presentase penetapan karya budaya yang diusulkan	-	-		-		6,60%		5,90%		5,90%		0		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan	0 kali	2 kali	1.820,00	3 kali	1.945,00	4 kali	2.010,00	5 kali	2.150,00	6 kali	2.235,00	20	10.160,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah peningkatan pelaku seni	300 orang	310 orang		315 orang		320 orang		325 orang		330 orang		**1600**		
PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,78	63,3	2.000,00	67,3	2.200,00	71,3	2.400,00	75,3	2.600,00	79,3	2.800,00	79,3	12.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	20,89	21,5		22,5		23,5		24,5		25,5		25,5		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Na	-	-	-	-	74	755	77	820	80	885	80	2.460	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
KEARSIPAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Predikat Pengawasan Kearsipan	B (Baik)	B (Baik)	831	B (Baik)	831	B (Baik)	851	BB (Sangat Baik)	851	BB (Sangat Baik)	870	BB (Sangat Baik)	4.234.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN															
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	-	2	2.564,50	2	3.120,00	-	3.590,00	-	5.100,00	-	5.315,00	4	19.689,50	Dinas Kelautan dan Perikanan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah rekomendasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	0	-		-		2		2		2		6		
	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan	-	10.687,49 Ha		16.400,53 Ha		-		-		-		16.400,53 Ha		
	Jumlah kawasan konservasi perairan yang di tetapkan	0	-		-		1		3		3		7		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	53.833,0 ton	54.480,9 ton	13.417,92	54.807,8 ton	9.321,74	55.136,7 ton	7.836,81	55.467,5 ton	8.393,82	55.800,3 ton	14.070,00		53.040,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	52.067,0 ton	57.168,0 ton	7.258,00	58.997,0 ton	7.808,50	60.885,0 ton	8.535,00	62.833,0 ton	9.211,00	64.843,6 ton	9.843,00		42.655,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	45%	60%	2.437,00	65%	1.263,00	70%	1.327,00	75%	1.407,80	77%	1.562,40	77%	7.997,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	NA	50%		50%		50%		50%		50%		50%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	39,40 kg/kapita/ tahun	40,60 kg/kapita/tahun	5.759,10	41,00 kg/kapita/tahun	4.649,80	41,50 kg/kapita/tahun	5.061,50	42,00 kg/kapita/tahun	54,78	42,50 kg/kapita/tahun	5.592,05	42,50 kg/kapita/ tahun	21.117,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
PERTANIAN															
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	27%	30%	2.455,19	31%	2.577,95	32%	2.706,85	33%	2.842,19	34%	2.984,38	34%	13.566,58	Dinas Perkebunan
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	16,74%	10%	400	10%	450	-	-	-	-	-	-	20%	850,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	peresentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	NA	-	-	-	-	10%	500	10%	550	10%	600	30%	1.650,00	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi	5%	7%	1.000,00	8%	1.500,00	9%	1.700,00	10%	2.000,00	12%	2.300,00	12%	8.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	7%	11%	10.000,00	13%	12.500,00	15%	14	17%	15.000,00	19%	16.000,00	19%	53.514,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	8%	8,50%	2.452,14	9%	2.574,14	9,50%	2.703,48	10%	2.838,66	10,50%	2.980,59	10,50%	13.549,00	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	11%	15%	23.400,00	17%	28.850,00	19%	31.350,00	21%	34.700,00	23%	37.600,00	23%	155.900,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan Kab/Kota	14%	14,50%	16.766,49	15%	17.604,82	15,50%	18.485,06	16%	19.409,31	16,50%	20.379,77	16,50%	92.645,45	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparatur pertanian yang diberdayakan/ditingkatkan keterampilannya	0,75%	1,70%	950	2,20%	1.060,00	2,70%	1.120,00	3%	1.180,00	3,20%	1.290,00	3,20%	5.600,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase kelembagaan pertanian yang meningkat kapasitasnya	0,63%	1%	1.705,00	1,50%	2.080,00	2%	2.560,00	2,50%	3.040,00	3%	3.500,00	3%	12.885,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota	4,50%	5%	4.159,86	5,50%	7.103,36	6%	5.291,15	6,50%	4.098,83	7%	4.351,28	7%	25.004,48	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	350	100%	262,5	-	-	-	-	-	-	100%	612,50	Dinas Perkebunan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Rekomendasi Teknis Perizinan yang diberikan	NA	-	-	-	-	2	275,63	2	289,41	2	565,04	6	1.130,08	
	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	10%	10%	250	10%	300	-	-	-	-	-	-	30%	550,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PARIWISATA															
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	15%	17%	4.740,00	18%	5.335,00	-	6.725,00	-	7.385,00	-	8.490,00	18%	32.675,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	-	-	-	-	-	5.400		6.480		7.776		19.656		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	0	16%	847	18%	1.300,00	19%	1.600,00	22%	1.902,00	25%	2.330,00	100%	7.979,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	9%	16%	900	18%	1.200,00	19%	1.400,00	22%	1.600,00	25%	1.800,00	100%	6.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	14%	15%	13.900,00	17%	15.010,00	18%	18.045,00	19%	21.400,00	20%	24.500,00	89%	92.855,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KEHUTANAN															
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnyaEkosistemnya	80% (81.449 Ha)	0,20%	1.426,53	0,20%	3.185,00	0,20%	3.508,50	0,20%	3.455,85	0,20%	3.807,44	81%	17.336,79	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	8% (15.783,55 Ha dari total luas izin 204.296,97 Ha)	15% (penambahan 14.287 Ha menjadi 30.070,55)	4.619,09	20%	4.880,96	26%	4.043,34	38%	4.267,06	44%	4.384,94	44%	7.805,67	Dinas Kehutanan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	4,5% (dari 133 kelembagaan)	8,20%	206,268	12%	226,894	15,78%	249,584	19,54%	249,584	23,30%	274,542	23,30%	1.206,88	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	0,20%	28.489,29	0,20%	30.982,15	0,20%	26.369,41	0,20%	26.369,41	0,20%	24.048,96	0,20%	138.490,14	Dinas Kehutanan
	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,3% (dari total 181.888 Ha)	1,46%		1,58%		1,92%		1,94%		1,99%		1,99%		
	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	4,37%	0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL															

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	29,30%	20%	800	30%	850	40%	1.800,00	50%	1.250,00	50%	1.250,00	50%	5.950,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	persentase zona konservasi pada cekungan air tanah Provinsi Jambi yang terpetakan	0,00%	-	-	-	-	40%	300	50%	300	60%	400	60%	1.200.000	
	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan	0,00%	20%	900	20%	600	-	-	-	-	-	-	20%	1.500,00	
	persentase pengusahaan air tanah yang baik	NA	-	-	-	-	60%	200	80%	160	100%	100	100%	460	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi	0 Persen	100	710	100	750	-	-	-	-	-	-	100	1.460,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	14.648 SBM	178	9.909,79	634	13.789,39	-	14.572,95	-	15.978,07	-	17.283,20	5.852	75.733,39	
	Persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi	Na	-	-	-	-	20,21%		24%		24,85%		24,85%		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	99,90%	99,92%	3.620,375	99,93%	4.198,875	99,94%	5.780,375	99,95%	6.270,375	99,96%	6.770,375	100%	26.640,375	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	26,00%	27,00%	1.660	28,00%	1.740	28,00%	1.770	29,00%	1.790	30%	1.800	30%	8.760	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Presentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan	Na	-	-	-	-	25,00%	4.650	35,00%	4.650	45,00%	4.650	45%	13.950	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PERDAGANGAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	(963667435,9 USD)	6%	1.070,00	6%	1.784,00	6%	1.540,80	6%	1.848,08	6%	1.848,08	30%	8.090,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	40%	45%	649,68	50%	1.271,45	55%	1.398,59	60%	1.546,24	65%	1.694,15	65%	6.560,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkaan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)	340.000.000	3%	80	8%	100	10%	120	10%	140	10,00%	160	41,00%	600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas	NA	-	-	-	-	10%		10%		10%		40%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100%	100%	875,3	100%	900	-	998,2	-	1.045,04	-	1.045,04	100%	4.863,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tertib Usaha	NA	60%		60%		60%		62%		62%		62%		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90%	1.288,50	91%	1.301,10	92%	1.325,22	92%	1.341,14	94%	1.341,14	94%	6.597,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	NA	5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	76 (B)	77 (B Indeks)	2.466,96	78 (B Indeks)	2.578,12	79 (B Indeks)	3.125,87	80 (B Indeks)	3.371,31	81 (B Indeks)	3.562,32	81 (B Indeks)	15.104,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku	60%	60%		62%		75%		76%		77%		77%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%		100%		92%		94%		94%		94%		
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	28,66%	40%		41.8%		90%		90%		90%		90%		
PERINDUSTRIAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5%	650	10%	725	15%	800	20%	875	25%	875	25%	3.925,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20%	20%	250	20%	270	20%	280	15%	300	15%	325	15%	1.425,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri besar di Provinsi	NA	1%	6.506,18	1%	6.816,79	1%	7.286,47	1%	7.960,12	1%	8.613,13	1%	37.182,70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,35%	0.39%		0,41%		0,43%		0,45%		0,48%		0,48%		
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	7,65%	7,86%		7,97%		8,08%		8,19%		8,30%		8,30%		
	nilai ekspor non migas (US$ Milyar)	0,934	0,966		0,983		1		1,017		1,034		1,034		
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	329.124	250.977		257.866		-		-		-		257.866		
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	NA	0.527 Triliun		0.627 Triliun		-		-		-		0.627 Triliun		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
TRANSMIGRASI															
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	NA	24%	73,668	24,89%	450	25,80%	600	27,61%	1.000,00	45,08%	400	45,08%	2.523,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	NA	1 lokasi	415,299	24,89%	750	-	800	-	800	-	850	1 lokasi	3.615,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah kawasan permukiman transmigrasi yang berkualitas	NA	-		-		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	32,14	33,82		35,18		35,64		36,09		36,33		36,33		
	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	40,27	40,89		41,47		41,8		42,22		43,11		43,11		
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	NA	1 lokasi	139,997	1 lokasi	650	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	790,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Lokasi perencanaan pencadangan transmigrasi yang difasilitasi dan dikoordinasikan untuk mewujudkan lokasi calon kawasan transmigrasi yang clear dan clean	NA	-	-	-	-	1 lokasi	750	1 lokasi	850	1 lokasi	850	1 lokasi	2.450,00	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA		98 persen	1.580,00	98 persen	1.715,00	98 persen	1.845,00	98 persen	1.980,00	98 persen	2.075,00	98 persen	9.195,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan		95 persen	3.300,00	95 persen	3.300,00	95 persen	3.300,00	96 persen	3.300,00	96 persen	3.300,00	96 persen	16.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia		96 persen	1.265,00	96 persen	1.454,75	96 persen	1.672,96	96 persen	1.923,91	96 persen	2.212,49	96 persen	8.529,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	15.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Konsistensi program RKPD dalam APBD	100%	100%	3.992,64	100%	4.141,99	100%	4.514,56	100%	4.872,65	100%	6.609,17	100%	24.131,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah	74,38 Persen	79,50 persen	7.488,48	84,62 persen	9.056,14	89,74 persen	10.837,33	94,86 persen	12.490,40	100 persen	14.316,44	100 persen	54.188,79	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP nilai	997.186,78	WTP nilai	1.066.346, 89	WTP nilai	1.143.549, 71	WTP nilai	1.227.936, 09	WTP nilai	1.350.729, 70	WTP nilai	5.785.749, 18	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 % (Rp1.535.1 85.805.54 9,67)	5,25 persen	18.051,16	5,7 persen	19.205,98	3,2 persen	20.635,46	9,68 persen	22.135,40	8,47 persen	24.348,93	32,3 persen	104.376,93	BPKPD
INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	70 persen	72%	9.045,35	74%	9.181,03	-	-	-	-	-	-	74 persen	18.226,38	Inspektorat Daerah Provinsi
	Presentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	NA	-	-	-	-	72%	9.226,93	77%	9.319,20	82%	9.371,50	82%	27.917,63	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori ”B”	33 persen	38%	3.396,92	43%	3.512,92	-	-	-	-	-	-	43%	6.909,84	Inspektorat Daerah Provinsi
	Indeks kepuasan auditi atas kenerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat	NA	-	-	-	-	3	3.530,48	4	3.565,81	4	3.601,47	4	10.697,76	
KEPEGAWAIAN															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	215	250	6.780,95	275	7.523,66	250	8.286,05	275	8.940,38	300	9.604,89	300	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN	45	70	6.780,95	75	7.523,66	65	8.286,05	67,5	8.940,38	70	9.604,89	70	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	72%	17.173,74	75%	17.800,00	78%	18.750,00	81%	21.700,00	84%	21.700,00	84%	97.123,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase penyelenggaraan pegembangan SDM aparatur	90%	93%	17.173,74	95%	17.800,00	97%	18.750,00	99%	21.170,00	99%	21.700,00	99%	96.593,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273,50	90%	1.421,00	90%	2.065,00	90%	2.395,00	95%	2.450,00	95%	9.604,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	75%	85%	650	90%	840	92%	1.130,00	93%	1.185,00	95%	1.300,00	95%	5.105,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	76%	1.055,00	79%	1.200,00	80%	1.445,00	81%	1.620,00	83%	1.725,00	83%	7.045,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	78%	1.840,00	80%	1.977,50	83%	2.422,50	85%	2.680,00	86%	3.275,00	86%	12.195,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	77%	2.970,00	79%	3.200,00	81%	4.450,00	83%	4.500,00	85%	4.540,00	85%	19.660,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	60 persen	6.302,30	65 persen	7.548,75	-	-	-	-	-	-	65 persen	13.851,05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase hasil riset dan teknologi yang diaplikasikan stakeholders	50 persen	-	-	-	-	70 persen	7.569,60	72 persen	7.580,07	75 persen	8.590,07	75 persen	23.739,74	
	Indeks inovasi daerah	5.244 (skor)	-	-	-	-	60		60,25		60,5		60,5		
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	100 persen	1.910,00	100 persen	2.025,00	100 persen	1.500,00	100 persen	2.280,00	100 persen	2.429,00	100 persen	10.144,00	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 persen	1.656,47	100 persen	1.822,11	100 persen	700,00	100 persen	2.204,76	100 persen	2.204,76	100 persen	8.588,10	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	50%	50 persen	4.081,89	100 persen	4.898,03	100 persen	3.500,00	100 persen	6.830,00	100 persen	7.200,00	100 persen	26.509,92	Sekretariat Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100 persen	64.727,86	100 persen	68.030,49	100 persen	71.663,38	100 persen	135.600,00	100 persen	142.380,00	100 persen	482.401,73	Sekretariat Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi	>2,600 nilai	2.086,77	>2,700 nilai	2.295,45	>2,800 nilai	1.000,00	>2,850 nilai	3.650,00	>2,900 nilai	4.000,00	>2,900 nilai	13.032,22	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB Provinsi Jambi	61,7	63,5 skor	2.134,00	64 skor	2.249,00	-	850,00	-	2.760,00	-	2.720,00	64 skor	10.713,00	Sekretariat Daerah
	Indeks Tingkat Efisiensi dan Efektifitas unit Perangkat Daerah	1,2	-		-		1,5		1,6		1,7		1,7		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 Persen	1.735,95	100 persen	2.169,93	100 Persen	1.216,25	100 Persen	2.772,00	100 Persen	3.050,00	100 Persen	10.944,13	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	92.341,42	100 persen	99.377,38	100 persen	88.274,13	100 persen	93.543,57	100 persen	99.129,19	100 persen	472.665,69	Sekretariat DPRD
PENGELOLAAN PENGHUBUNG															

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	100 persen	2.030,66	100 persen	2.207,59	100 persen	2.428,35	100 persen	2.671,18	100 persen	2.938,30	100 persen	12.276,07	Badan Penghubung Daerah

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/ kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Guna mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 8-1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi

No	Indikator Makro Pembangunan	Kondisi Awal (2020)	Target (T) dan Realisasi (R)				Target		
			2022 (T)	2022 (R)	2023 (T)	2023 (R)	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	72,14	72,14	72,62	73,73	73,07	73,56	74,04
2	Tingkat Kemiskinan (Sept) (%)	7,97	7,9	7,7	7,84	7,58	7,6	7,45	7,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,13	5	4,59	4,61	4,53	4,56	4,39	4,2
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,46	4,7	5,12	4,9	4,66	5,15	5,3	5,4
5	Pendapatan Perkapita ADHK 2010 (Rp.juta)	41,84	42,3	44,54	43,24	46,01	44,29	45,47	46,77
6	Indeks Gini (Sept)	0,316	0,315	0,335	0,314	0,343	0,314	0,314	0,314

Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target (T) dan Realisasi (R)				Target		
		2022 (T)	2022 (R)	2023 (T)	2023 (R)	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	BB	BB	BB
Pertumbuhan PDRB Hijau (%)	NA	4,55	4,65	4,75	4,75	5	5,2	5,3
Rasio Konektivitas	53,5	53,9	68,4	54	54,05	54,1	54,2	54,4
Akses terhadap air minum layak (%)	78,06	79,08	78,86	83,92	80,02	85	87	90
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	78,06	99,36	89,5	100	94,88	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07	70,32	72,43	68,15	72,8	73,17	73,53

Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target (T) dan Realisasi (R)				Target		
		2022 (T)	2022 (R)	2023 (T)	2023 (R)	2024	2025	2026
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (Juta Ton CO2 eq)	31,683	3,283	4	3,348	4	3,412	3,476	3,541
Tingkat Kemiskinan (Sept) (%)	7,97	7,9	7,7	7,84	7,58	7,6	7,45	7,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,13	5	4,59	4,61	4,53	4,56	4,39	4,2
Indeks Ketahanan Pangan	70	71.00	69,5	72.00	72,17	73.00	74.00	75.00
Indeks Pembangunan Manusia	71,29	72,14	72,14	72,62	73,73	73,07	73,56	74,04
Indeks Pemberdayaan Gender	65,86	67,78	65,93	69,02	67,86	-	-	-
Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)	NA	-	77,19	-	77,19*	79,00	80,00	80,50

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Tabel 8.2 berikut adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Tabel 8-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,46	4,7	5,13	4,9	4,9	5,15	5,3	5,4	5,4
1.2	Laju Inflasi	%	3,01	3	6,35	3	0,4	3	3	3	3
1.3	PDRB Perkapita ADHK 2010	Rp. juta	41,84	42,3	44,536	43,24	43,49	44,29	45,47	46,77	46,77
1.4	Indeks Gini	-	0,316	0,315	0,335	0,314	0,343	0,314	0,314	0,314	0,314
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson	-	0,38	0,37	0,4	0,37	0,4*	0,365	0,365	0,36	0,36
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,03	92,1	92,3	92,16	92,42	92,4	92,55	92,8	92,8
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	71,29	72,14	72,14	72,62	72,77	73,07	73,56	74,04	74,04
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,09	83,5	84,333	84	83,809	84,5	85,3	86	86
1.9	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	32,59	35,56	44,62	36,3	46,47	37,16	38,2	39,37	39,37
1.10	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,16	71,28	71,5	71,4	71,77	71,52	71,64	71,76	71,76

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12	Kasus kematian ibu (AKI)	Jumlah kematian	62	59	75	56	53	53	50	47	47
1.13	Kasus kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian	353	343	308	333	366	323	313	303	303
1.14	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,03	16	18	14	13,5	12	11	10	10
1.15	Prevalensi wasting pada balita	%	10,2	7,8	6,6	7,5	6,6	7,3	7	6,8	6,8
1.16	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	371	366	35,13	362	362	358	354	350	350
1.17	Persentas angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate)	%	-	-	-	-	-	90	90	90	90
1.18	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	%	-	-	-	-	-	55	60	65	65
1.19	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	9,1	8,9	8,9	8,8	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5
1.20	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	63,5	76%		82%	100%	88%	92%	96%	96%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	7	9	7	9	7	9	9	9	9
1.22	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.23	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100
1.24	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5	4,59	4,61	4,53	4,56	4,39	4,2	4,2
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
2.1	Nilai Tukar Petani	-	107,604*	108	127,31	109	139,77	110	111	112	112

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	25,36*	25,4	47,46	25,45	49,38	25,5	25,55	25,6	25,6
2.3	Rasio ketergantungan		43,23	43	44,78	42,85	44,91	42,76	42,5	42,25	42,25
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Fokus Pelayanan Urusan Wajib											
1	*Kesehatan*										
1.1	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase FKTP yang terakreditasi	%	-	-		-	100	100	100	100	100
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	50,24	100	100	100	100
1.5	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	38,35	40	50,24	43	1,32	46	48	50	50
1.6	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	0,16	0,2	1,38	0,24	1,32	1,24	1,28	1,32	1,32
1.7	Rasio Puskesmas per Kecamatan	Rasio	-	-	-	-	-	0,95	0,97	1	1
1.8	Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi	%	74,79	80	80,24	83	87,15	93	94	95	95
1.9	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah	-	-	-	-	-	7	7	8	8
2	*Pendidikan*										
2.1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	59,2		60,2	56,32	-	-	-	56,32

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	60,51	-	67,16	66,2	66,35	66,5	66,5
2.3	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	28,3		29,2	51,62	-	-	-	51,62
2.4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	51,62	-	56,69	55,53	55,68	55,83	55,83
2.5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	57,01	-	63,17	62,87	63,02	63,17	63,17
2.6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	49,39	-	53,87	53,13	53,28	53,43	53,43
2.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	50,84	-	52,73	56,75	56,9	57,05	57,05

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	41,47	-	45,58	45,2	45,35	45,5	45,5
2.9	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	56,66	-	50,75	62,82	62,97	63,12	63,12
2.10	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	49,98	-	52,39	54,24	54,39	54,54	54,54
2.11	Rata-Rata Kompetensi Literas SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	45,88	-	47,77	51,47	51,62	51,77	51,77
2.12	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	-	48,31	-	49,55	52,2	52,35	52,5	52,5
2.13	Persentase sekolah menengah negeri yang terakreditasi	%	98,87	99,63	95,98	100	97,77	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	Persentase satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	%	100	100	90	100	79,17	100	100	100	100
2.15	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	61,38	100	72,52	100	72,46	100	100	100	100
2.16	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-20 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	NA	100	67	100	59,78	100	100	100	100
2.17	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	NA	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2.18	Jumlah SMK Negeri yang terevitalisasi	sekolah	31	25		28	23	28	28	28	168
2.19	Jumlah SLB Negeri yang terevitalisasi	sekolah	0	3	-	3	5	5	5	5	21
2.20	Indeks Iklim Keamanan SMA		-	-	-	-	71,43	87,35	87,5	87,65	87,65
2.21	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		-	-	-	-	72,42	89,52	89,67	89,82	89,82

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	Indeks Inklusivitas SMA		-	-	-	-	57,49	83,93	84,08	84,23	84,23
2.23	Indeks Iklim Keamanan SMK		-	-	-	-	67,72	84,32	84,47	84,62	84,62
2.24	Indeks Iklim Kebinekaan SMK		-	-	-	-	69,07	87,06	87,21	87,36	87,36
2.25	Indeks Inklusivitas SMK		-	-	-	-	54,74	79,69	79,84	79,99	79,99
2.26	Indeks Iklim Keamanan SDLB		-	-	-	-	72,41	85,32	85,47	85,62	85,62
2.27	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		-	-	-	-	65,16	92,02	92,17	92,32	92,32
2.28	Indeks Inklusivitas SDLB		-	-	-	-	58,71	84,82	84,97	85,12	85,12
2.29	Indeks Iklim Keamanan SMPLB		-	-	-	-	63,46	79,04	79,19	79,34	79,34
2.30	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		-	-	-	-	63,43	70,89	71,04	71,19	71,19
2.31	Indeks Inklusivitas SMPLB		-	-	-	-	55,78	76,76	76,91	77,06	77,06
2.32	Indeks Iklim Keamanan SMALB		-	-	-	-	59,63	74,01	74,16	74,31	74,31
2.33	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		-	-	-	-	61,79	70,43	70,58	70,73	70,73
2.34	Indeks Inklusivitas SMALB		-	-	-	-	58,48	72,59	72,74	72,89	72,89

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*Sosial*										
3.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	63,63	72,72	72,72	81,81	81,81	100	100	100	100
3.2	Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	orang	10	40	35	40	35	40	50	50	300
3.3	peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	orang	10	40	141	40	142	40	50	50	513
3.4	layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	45,45	72,72	72,72	81,81		90,9	100	100	100
3.5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	badan	23	28	28	33		40	40	40	40
3.6	bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	KPM	0	110	412	220	460	60	120	120	1502

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7	keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	102.103	102.103	102,785	102.103	93.018	102.103	102.103	102.103	102.103
3.8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	orang	44	44	569	44	512	44	44	44	264
3.9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	lembaga	3	5	12	5	5	5	5	5	5
3.10	Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa	3.332	3.332	6.630	3.332	106390	3.332	3.332	3.332	19.992
3.11	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	jiwa	650	550	1573	550	315	150	150	150	4.088
3.12	jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	kelompok	15	10	3	10	2	3	3	3	49

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	0rang	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.14	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,74	1,8	1,44	0,92	1,8	100	100	100	100
3.15	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,22	0,11	0,28	0,22	0,38	100	100	100	100
3.16	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,34	0,35	0,7	0,36	0,44	100	100	100	100
3.17	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0	15,6	0,55	15,6	1,47	100	100	100	100
4	*Trantibum dan Perlindungan Masyarakat*										
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,02	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	59,1	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase penanganan pra bencana	%	79	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
5	*PU dan Penataan Ruang*										
5.1	Persentase luas sawah beririgasi	%	76,89	78	79,65	79,5		81	82,5	84	84
5.2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,81	79,6	77,36	83,231	72,036	82,243	83,87	85,245	85,245
5.3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	78,06	79,08	80	83,92	80,02	83,92	85	87	87

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	77,82	78,45		81,44		81,44	82,08	82,94	82,94
6	*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*										
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,13	100		100		100	100	100	100
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100		100		100	100	100	100
7	*Tenaga Kerja*										
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,79	69,18	67,84	69,49	68,75	69,85	70	71	71
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,11	4,59	4,61	4,53	4,56	4,39	4,2	4,2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	13,45	58,45	16,32	12,2	43	12,4	12,6	12,8	12,8
7.4	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	5	24,5	15,13	9,7	15,13	9,8	9,9	10	10
7.5	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	605	985	900	1200	1100	1300	1400	1600	1600
7.6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	1872	5000	1702	5000	1930	5000	5000	5000	5000
7.7	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	48,6	62		65	67	67	71	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	87,72	87,88	88,35	88	97,68	88,5	88,7	90	90
8	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*										
8.1	Persentase ARG pada belanja APBD	%	70	75	75	75	71,36	75	75	75	75
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,86	67,78	65,93	69,02	67,86	70,05	71,5	73	73
8.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	66,26	67	66,26	67,62	66,26	69,87	70	70	70
9	*Pangan*										
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:										
	Skor PPH	-	92,3	92,5	93,4	93,2	93,1	95,2	95,2	95,5	95,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	64,21	2,5	88,24	2,5	98,44	2,5	2,5	2,5	76,71
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	85	85		85		85	85	85	85
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:										
	Persentase penduduk beresiko rawan pangan	%	9,5	7,5	12,14	6,5	12,83	5,5	4,5	3,5	3,5
	Desa Mandiri Pangan	Desa	21	31	31	41	41	51	61	71	71
	Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	%	13,57	19,61	70,07	19,61	233,1	19,61	20,42	20,4	20,4
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	9,5	7,5		6,5	2,99	5,5	4,5	3,5	3,5
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Distribusi Pangan	Kab/kota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9.4	Stabilitas Harga Pangan:										
	Pangan Pokok	CV %	CV<6%	CV<10%		CV<10%	CV<6,6	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%
	Pangan Strategis	CV %	CV<58%	CV<30%		CV<30%	CV< 18,1	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%
10	*Lingkungan Hidup*										
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	70,87	72,07	70,32	72,43	68,15	72,8	73,71	73,81	73,81
10.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK)	Juta Ton CO2 eq	31,683	3,283	4,00	3,348	4,00	3,412	3,476	3,541	34,641
10.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan PUU LH yang diterbitkan	%	53	70	89,47	76	88,57	77	79	86	86
11	*Administrasi Kependudukan dan Capil*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	94	97	95	98	100	99	100	100	100
11.3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100		100	100	100	100
11.4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Pemanfaatan data kependudukan	%	19	34,48	20,9	46,51		46,51	58,14	58,14	58,14
12	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*										
12.1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
12.2	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.3	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
12.4	Jumlah desa mandiri	Desa	83	127	188	134	287	141	148	155	155
12.5	Jumlah desa berkembang	Desa	875	849	764	807	603	767	731	694	694
12.6	Jumlah desa tertinggal	Desa	154	87	55	84	39	80	76	72	72
12.7	Status Perkembangan KPPN	Indeks	10	30	30	40	40	50	50	50	50
12.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang	Desa	80	100	127	115	115	120	130	130	130
12.9	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	Desa	0	0	5	4	4	6	10	12	12
13	*Pengendalian Penduduk dan KB*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	55,11	60,32	56,67	60,35	62,58	64,55	65,45	66,5	66,5
13.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	47,8	35	26,7	30	26,8	17	16,9	16,8	16,8
13.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,49	2,31	2,18	2,28	2,26	2,10	2,10	2,10	2,10
13.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	60,3	65,44	64,9	65,48	65,4	66,36	66,52	66,57	66,57
13.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	%	14	10	11,5	10	9,2	6,33	6,3	6,28	6,28
14	*Perhubungan*										
14.1	On time Performance Layanan transportasi	%	80,2	85	85,7	85,2		88,06	89,2	90,1	90,3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	nilai	57,14	75	77,26	77,62		79,1	80,2	81,6	83,2
14.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangatan *	Rasio	15,4	15,31	2,84	15,22		15,09	15,01	14,95	14,8
15	*Komunikasi dan Informasi*										
15.1	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah	%	50	63	90	75		85	92	100	100
15.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC,ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	%	NA	53	100	70		81	86	93	93

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	%	68	75		80		85	90	95	95
15.4	Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	70	75		80		85	90	95	95
15.5	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	%	35	65		70		75	80	90	90
15.6	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	10	40		50		55	60	70	70
15.7	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	%	35	55		60		65	70	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.8	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi	%	40	60		65		70	75	80	80
15.9	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah	%	5	5		5		5	5	5	5
15.10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	NA	60		72		76	85	94	94

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.11	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	%	70	72		76		80	84	92	92
16	*Koperasi dan UKM*										
16.1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	2	5,4	7,34	5,6	14,92	6	6,7	6,7	6,7
16.2	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha	%	3,29	3,38	91,61	6	98,53	95	100	100	100
17	*Penanaman Modal*										
17.1	Realisasi PMDN	Rp. Trilyun	3,5	4,24	8,88	4,7	10,4	5,1	5,64	6,2	6,2
17.2	Realisasi PMA	US $. Juta	400	480	562	528	667,196	580	638	702	702
18	*Kepemudaan dan Olahraga*										
18.1	Prestasi olahraga	Medali emas	13	14	49	15	11	16	17	18	18
18.2	Peringkat POPNAS	Peringkat	10	9	10	8	15	8	7	7	7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.3	Peringkat PEPARPENAS	Peringkat	13	12	13	11	20	11	10	10	10
18.4	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,024	0,033	0,029	0,041	0,088	0,052	0,063	0,074	0,074
18.6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,016	0,049	0,039	0,065	66,15	0,084	0,103	0,124	0,124
19	*Statistik*										
19.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	40	100	60	100		100	100	100	100
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	40	100	60	100		100	100	100	100
20	*Persandian*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	3	2	5		7	9	11	11
20.2	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	-	2	2	4		4	4	4	4
21	*Kebudayaan*										
21.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	NA	0,22	0,19	0,25	25	0,28	0,31	0,34	0,34
21.2	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	7,8	17	8,57	18	18	19	20	21	21

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)	%	0,018	0,36	0,037	0,024	0,27	0,027	0,03	0,033	0,033
21.4	Persentase penduduk usa 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,037	1,65	0,037	0,04	0,046	0,046	0,049	0,052	0,052
21.5	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	1,02	17	17	18	18	19	20	21	21
21.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	0	2	10	3	7	4	5	6	6
21.7	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	unit	2	7	2	8	13	9	10	11	11

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	unit	NA	15	91	16	88	17	18	19	19
21.9	Jumlah museum yang dikelola	unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21.10	Jumlah cagarbudaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	NA	2	2	3	3	4	5	6	6
22	*Perpustakaan*										
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,78	63,3	63,75	67,3	68,1	71,3	75,3	79,3	79,3
22.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	20,89	21,5	21,58	22,5	62,84	23,5	24,5	25,5	25,5
23	*Kearsipan*										
23.1	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	orang	267	350	312	350	419	350	350	350	350

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	15	250	166	275	4566	300	325	350	350
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan											
1	*Kelautan dan Perikanan*										
1.1	kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	Ha	0	10.687,49	0	16.400,53	0	-	-	-	0,00
1.2	Jumlah kawasan konservasi perairan yang ditetapkan	Kawasan	0	-	-	-	-	1	3	3	7
1.3	Produksi perikanan budidaya	Ton	52.067	57.168,00	50.428,00	58.997,00	50.807,14	60.885,00	62.833,00	64.843,60	64.843,60
1.4	Produksi perikanan tangkap	Ton	53.833	54.480,90	54.478,10	54.807,80	54.807,50	55.136,70	55.467,50	55.800,30	55.800,30
1.5	Konsumsi ikan	kg/kap/ thn	39,15	40,6	40,2	41	40,80	41,5	42	42,5	42,5
1.6	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	*Pariwisata*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. Juta	284	350	378,45	450	452,32	550	650	750	2750
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,07	1,19	1,05	1,21	1,08	1,25	1,29	1,3	1,3
2.3	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	895.528	950.000	2.309.503	1.500.00	1.842.162	5.400	6.480	7.776	6.016.849
3	*Pertanian*										
3.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	(54 ku/ha)	1,8	-3,35	2		3	4	4,2	(63,5 ku/ha)
3.2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah	%	(88,15 ku/ha)	2	11,73	2,23		2,45	2,68	2,9	(90,32 ku/ha)
3.3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	4,22	9,22		4,82		5,04	5,28	5,49	5,49
3.4	Populai ternak:										
	- Populasi Sapi	Ekor	158.825	162.002	429,393	165.242	408.644	168.546	171.917	175.536	175.536
	- Populasi Kambing	Ekor	404.385	412.473	23,35	420.722	24,51	429.137	437.719	446.474	446.474

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	16,74	25,74		29,24	273.276	32,34	35,34	37,34	37,34
3.6	Produksi Padi	Ton GKG	386.413	416.223	289,277	435.708	20.754	463.472	497.937	533.504	533.504
3.7	Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	66.627	67.826	33,208	69.178	20.753,80	71.249	74.099	77.205	77.205
3.8	Produksi Daging:										
	- sapi	Ribu ton	5,54	5,76	5,76	5,88	4,92	5,99	6,11	6,24	6,24
	- kambing	Ribu ton	0,98	1	0,71	1,02	0,57	1,04	1,06	1,08	1,08
	- Ayam Buras	Ribu ton	5,59	6,61	10,18	7,21	4,61	7,86	8,56	9,34	9,34
	- Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,37	1,39	2,26	1,41	1,17	1,45	1,49	1,54	1,54
	- Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	44,61	61,65	53,48	72,64	63,23	85,71	101,14	119,35	119,35
	- Itik	Ribu ton	0,51	0,53	0,5	0,54	0,64	0,56	0,58	0,6	0,6
4	*Kehutanan*										
4.1	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	2.376,10	260	534,5	225	415	250	260	270	3.641,10

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	15.783,55	30.070,55	15,63	39.951,55	44.095,79	53.588,55	77.174,55	89.642,55	89.642,55
5	*ESDM*										
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	99,92	99,99	99,93	99,99	99,94	99,95	99,96	99,96
5.2	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,06	12,32	15	16,65	17,04	20,21	24	24,85	24,85
5.3	Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)	%	99	99,92	100	99,93	100	99,94	99,95	99,96	99,96
6	*Perdagangan*										
6.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-21,96	6	5,41	6		6	6	6	30
6.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	82,5	90	100	93	100	95	97	97	97
6.3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	12,09	40	40	41,8		43,25	46,6	51,1	51,1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	60	60	98,28	62		66	67	70	70
6.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	90	91	91		92	92	94	94
6.6	Tertib usaha	%	NA	60	60	60		60	62	62	62
7	*Perindustrian*										
7.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	0,35	0,39	0,31	0,41	0,42	0,43	0,45	0,48	2,16
7.2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	7,65	7,86	9,77	7,97	9,98	8,08	8,19	8,3	8,3
7.3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas	USD Miliar	0,934	0,966	0.821	0,983	0,749	1	1,017	1,034	1,034
7.4	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan	orang	329.124	250.977	75.802	257.866		264.755	271.644	278.533	278.533
7.5	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas	Rp. Trilyun	NA	-	-	-	1,88	2,0	2,3	2,4	2,4
8	*Transmigrasi*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	32,14	33,82	48,09	35,18	35,18	45,44	36,09	36,33	36,33
8.2	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	40,27	40,89	35,02	41,47	41,47	41,8	42,22	43,11	43,11
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan											
1	*Perencanaan*										
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	*Keuangan*										
2.2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3	Persentase SilPA terhadap LRA	%	7,8	6	13,22	5,5	24,48	5	6,7	6,7	6,7
2.4	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	7,52	6,5	12,5	6,5	20,21	6,5	6,5	6,5	6,5
2.5	Persentase belanja pendidikan	%	25,78	20	25,54	20	119,75	20	20	20	20

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Persentase belanja kesehatan	%	9,29	10	14,49	10	153	10	10	10	10
3	*Kepegawaian dan Diklat*										
3.1	Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3	%	77,13	78	76,06	79	81,17	80	81	82	82
4	*Penelitian dan Pengembangan*										
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	60	100	65	100	70	75	80	80
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	%	50	80	100	80	100	85	85	85	85
5	*Pengawasan*										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir (2026)
								2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	35	60	49,82	65	49,16	70	75	80	80
5.2	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK	%	65	67	64,68	69	19,05	71	73	75	75

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional dalam sisa periode RPJMD. Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun, dalam hal ini tahun 2021-2026. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun menuju Provinsi Jambi yang **Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT**.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1 Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama sisa periode RPJMD.

2 Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3 Untuk menjalankan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:

   a) Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

   b) Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang kabupaten serta penjaringan

aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.

c) Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari Forum Perangkat Daerah.

4 Dokumen Perubahan RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

5 Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Perubahan RPJMD ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, maka RPJMD ini menjadi pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2026. Mengacu pada Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD bagi provinsi yang belum memiliki RPJMD adalah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. RKPD yang disusun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.